

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011**



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disingkat RKPMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Pasal 2

- (1) RKPMD Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- (2) RKPMD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran dari Raperda RPJPD 2005 – 2025 yang dituangkan dalam RPJMD Tahap II Tahun 2010-2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPMD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- (4) RKPMD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman di dalam penyusunan evaluasi Renja – SKPD.
 - b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Bandung Tahun 2012.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2012 sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPMD Tahun 2012, untuk :

- a. Menyusun Rancangan Akhir Renja – SKPD;
- b. Sebagai bahan untuk penyusunan Pra RKA – SKPD.

Pasal 4

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja – SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 5

Kaidah – kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala SKPD melakukan pemantauan.
- b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing – masing SKPD.
- c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
- d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan / atau
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **31 Mei 2011**


BUPATI BANDUNG
H. DADANG M, NASER, SH., S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **31 Mei 2011**


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**
SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN **2011** NOMOR **41**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 41 Tahun 2011

TANGGAL : 31 Mei 2011

TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 5
1.4. Hubungan Antar Dokumen	I – 5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I – 6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	II – 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II – 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 6
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II – 18
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II – 52
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II – 63
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II – 65
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	II – 65
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	II – 69
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III – 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009, 2010 dan Perkiraan Tahun 2011	III – 15
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013	III – 17
3.1.3. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal	III – 18
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 24
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III – 24
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 27
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III – 27
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III – 28
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III – 31
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV – 1
4.2 Prioritas dan Pembangunan	IV – 4
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V – 1
BAB VI PENUTUP	VI – 1

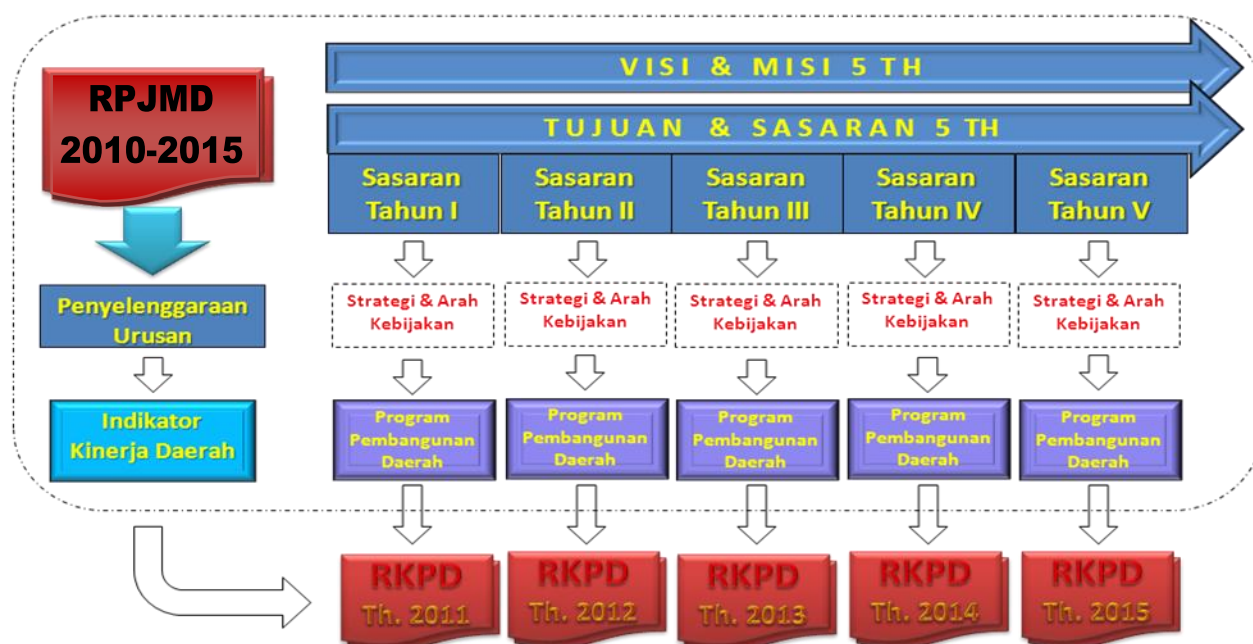
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan RAPBD & APBD. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan akhir RKPD dan penetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah. Mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010 pasal 101 ayat 1 menyatakan bahwa ;"Bappeda menyusun RKPD", namun dalam pelaksanaan penyusunannya dilakukan oleh suatu tim yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.

RKPD tahun 2012 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD tahun 2010 – 2015. Penjabaran yang dimaksud, menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan tahun 2012 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target tahun kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2010 – 2015. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2012 Kabupaten Bandung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat:
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013;
27. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat:
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPД bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPД bagi daerah yang bersangkutan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik antar wilayah, antar sektor, serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun dengan kabupaten/kota perbatasan sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RKPД Kabupaten Bandung tahun 2012 ini, diantaranya:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahap kedua (tahun 2011 – 2015)
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Hubungan antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPД) adalah penjabaran dari RPJMD. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen – dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. RKPД Kabupaten yang disusun diserasikan dengan dokumen RKPД provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara, terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala regional RTRW Provinsi dan skala nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan. Untuk melihat hubungan antar dokumen tiap jenjang dan tingkatan pemerintahan, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

1.5 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.3.1 s/d 2.3.2 yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009, 2010 dan Perkiraan Tahun 2011.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab III.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat dan menjadi skala Prioritas daerah.

BAB VI PENUTUP

Tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada setiap bab, diharapkan dapat memberikan gambaran pada tahun berjalan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung yang terletak pada koordinat 107° 22' – 108° - 5' Bujur Timur dan 6° 41' – 7°19' Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha, sebagian besar wilayah Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi Kabupaten Bandung, seperti disebelah utara terletak Bukittunggul dengan tinggi 2.200m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Dengan Morfologi wilayah pegunungan dengan rata-rata kemiringan lereng antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12⁰ C sampai 24⁰ C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.

Dampak dari Kondisi Morfologis, dan Geografis Kabupaten Bandung membuat Potensi sumber daya air yang tersedia cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.

Dengan aspek hidrologis seperti ini, Kabupaten Bandung cukup potensial untuk dapat mengembangkan sektor pertanian, sektor industri dan sektor-sektor lain yang membutuhkan ketersediaan air. Sungai Citarum yang melalui Kabupaten Bandung, sejak dulu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Bandung. Sungai ini dimanfaatkan sejak lama untuk menghidupi banyak hal, tidak hanya sebagai sumber air namun menjadi lahan mata pencaharian, pengairan, transportasi, dan lain-lain.

Namun demikian, disayangkan fungsi sungai menjadi tempat pembuangan sampah dari masyarakat-masyarakat sekitar sungai dan limbah-limbah sisa sektor industri, Sehingga kondisi ini juga menimbulkan permasalahan, permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah hulu sungai seperti pemanfaatan lahan pertanian di daerah perbukitan dengan kemiringan tertentu

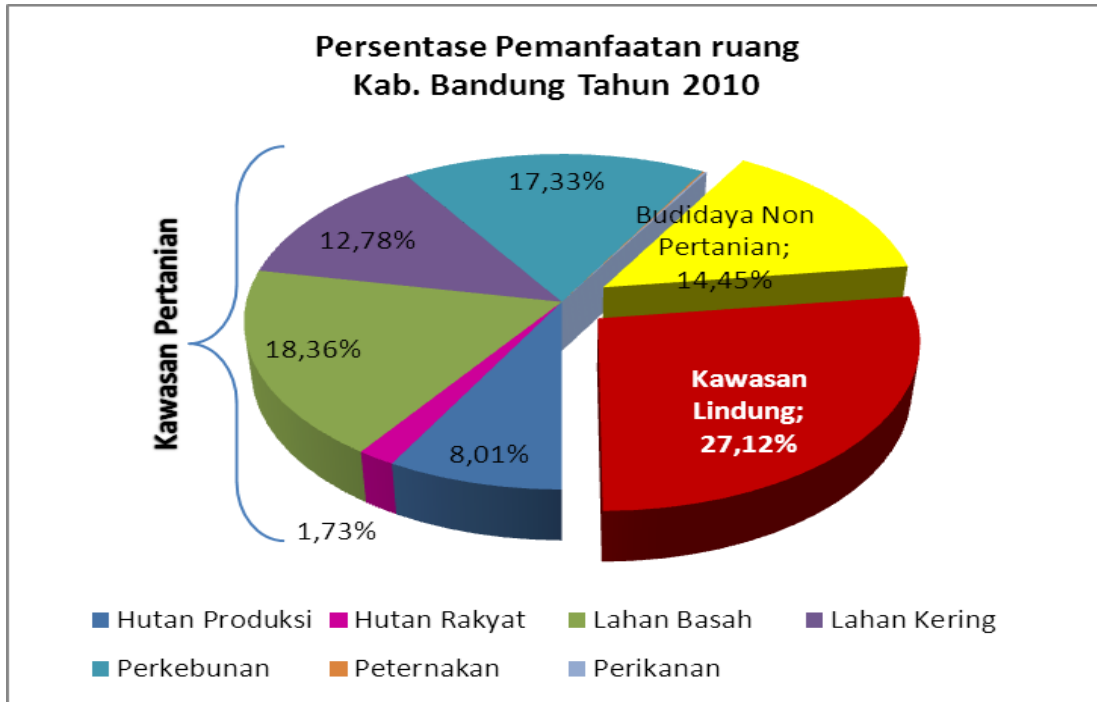
beralih fungsi dari hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan sering terjadinya pergerakan tanah atau longsor dan bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Bandung akibat erosi, sedimentasi dan longsor. Akibat dari kurang baiknya kondisi lingkungan di daerah hulu, terutama sering berkurangnya fungsi resapan air menyebabkan sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Hal tersebut diperparah dengan makin tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman/non pertanian serta perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pengelolaan sampah.

Tabel 2.1
Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 2010

No	Pemanfaatan Ruang	Luas Area	Persentase
1.	Kawasan Budidaya	227.013 Ha	72,88 %
1.1	Budidaya Pertanian	182.014 Ha	58,44%
	a. Hutan Produksi	24.943 Ha	8,01 %
	b. Hutan Rakyat	5.375 Ha	1,73 %
	c. Lahan Basah	57.200 Ha	18,36%
	d. Lahan Kering	39.805 Ha	12,78 %
	e. Perkebunan	53.975 Ha	17,33 %
	f. Peternakan	324 Ha	0,10%
	g. Perikanan	391 Ha	0,13 %
1.2	Budidaya Non Pertanian	44.999 Ha	14,45 %
	a. Permukiman	28.719 Ha	9,22%
	b. Fasos/ Fasum	246 Ha	0,08%
	c. Perdagangan / Jasa	1.211 Ha	0,39%
	d. Militer	1.973 Ha	0,63 %
	e. Pertambangan	62 Ha	0,2 %
	f. Kawasan Industri	4.470 Ha	1,58 %
	g. Zona Industri	4.470 Ha	1,43 %
	h. Cadangan / lain-lain	3.408 Ha	1,09 %
2.	Kawasan Lindung	84.462 Ha	27,12 %
	Hutan lindung / konservasi	48.917 Ha	15.71 %
	Sempadan	3.853 Ha	1,24 %
	Suaka / Pelestarian Alam	4.391	1,41 %
	Rawan Bencana	19.569 Ha	6,2 %
	Perairan	7.732 Ha	2,48%

Sumber : www.bandungkab.go.id

Gambar 2.1
Grafik Presentase Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bandung
Tahun 2010



Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung yang bervariasi menyebabkan keragaman sumber daya alam. Komoditi unggulan yang diusahakan bervariasi di setiap wilayah, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian. Komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Bandung, terdapat beberapa komoditi yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Komoditi-komoditi tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditi khas Kabupaten Bandung.

Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung diantaranya dari sektor pertanian yaitu stroberi, kopi, sapi perah dan produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya industri peralatan pertanian dan industri kerajinan wayang golek. Komoditi-komoditi tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditi telah dapat bersaing di pasar internasional.

Secara kuantitas, Komoditi yang terbesar dihasilkan dari sektor pertanian, Hal ini dimungkinkan dari segi geografis maupun demografis. Kabupaten Bandung memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Dari segi lahan, tercatat 37.043,43 Ha lahan di Kabupaten Bandung di pakai sebagai areal Pertanian, itu belum termasuk areal perkebunan dan daerah huma. Daerah yang Strategis akan mempermudah akses pemasaran produk-produk pertanian dan perkebunan, seperti Kota Bandung dan Jabotabek. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Sektor Pertanian sebagai salah satu *core bussiness* dan *leading sector* di samping industri manufaktur dan pariwisata, serta merupakan andalan pada pembangunan bidang ekonomi.

Salah satu sektor yang menjadi andalan Kabupaten Bandung karena faktor geografisnya adalah pariwisata. Keberadaan danau-danau alam, gunung-gunung, hutan-hutan yang masih alami dan kekayaan alam lainnya menjadi modal yang baik bagi dikembangkannya sektor pariwisata. Pengembangan Pariwisata ke depan, tidak hanya mengandalkan kekayaan hayati, namun juga harus disinergikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, sehingga dapat menjadi nilai tambah.

Berikut Kawasan Pariwisata Alam yang menjadi unggulan Kabupaten Bandung, yaitu : Kecamatan Rancabali meliputi Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk. Kecamatan Cimaung diantaranya Gunung Puntang. Kecamatan Pangalengan diantaranya Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan, Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah Kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibum), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Majalaya), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang), Curug Simandi Racun (Kecamatan Pacet).

Selain memiliki kawasan Pariwisata alam, Kabupaten Bandung memiliki kawasan pariwisata budaya seperti : Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojonmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi). Juga kawasan wisata Agro, seperti Agrowisata Strawberry (Pasirjambu, Rancabali, Ciwidey dan lain-lain), Agrowisata Teh (Kertamanah, Malabar, Rancabali, dan lain-lain), Agrowisata Sayuran (Pasirjambu, Ciwidey, Pacet, Pengalengan Dan Lain-Lain) Dan Agrowisata Herbal (Pasirjambu, Rancabali, Arjasari, dan lain-lain).

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk. 3.215.548 jiwa pada tahun 2010 (Data BPS 2010), terdiri dari laki-laki sebanyak 1.638.623 jiwa (50,96 %) dan perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa (49,04 %). Jumlah ini meningkat 1,35 % dibandingkan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai lk 3.172.860 jiwa, terdiri atas : laki-laki 1.590.399 jiwa (50,13 %) dan perempuan 1.582.461 jiwa (49,87 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2010, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan sebesar 2,25 %, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) menurun 0,44 %, sedangkan jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) meningkat 2,69 %.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2009-2010

No	Kelompok Umur (thn)	2009				2010			
		Jenis Kelamin		Jumlah	%	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan			Laki-laki	Perempuan		
1.	Muda (0-14)	453.081	450.675	903.756	28,48	513.714	488.483	1.002.197	31,17
2.	Produktif	1.063.309	1.066.868	2.130.177	67,14	1.065.575	1.021.119	2.086.694	64,89

No	Kelompok Umur (thn)	2009				2010			
		Jenis Kelamin		Jumlah	%	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan			Laki-laki	Perempuan		
	(15-64)								
3.	Tua (65+)	74.009	64.918	138.927	4,38	59.334	67.323	126.657	3,94
	Jumlah	1.590.399	1.582.461	3.172.860	100	1.638.623	1.576.925	3.215.548	100
	%	50,13	49,87	100,00		50,96	49,04	100,00	
	LPP (%)			1,47				1,35	
	Dependency Ratio (%)			48,95				54,10	
	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)			1.800				1.825	

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda Tahun 2009-2010.

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 54,10 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung lk. 54 orang penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, *dependency ratio* pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,15 poin, sedangkan *dependency ratio* pada tahun 2009 sebesar 48,95 %. Angka Ketergantungan (*dependency ratio*) diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan Daya saing dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Bandung.

Secara Perbandingan wilayah, Kabupaten Bandung memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.238,67 ha atau 1.762,39 km², sehingga rata-rata kepadatan penduduknya adalah 1.825 jiwa/km². Artinya secara rata-rata terdapat 1.825 orang yang menghuni 1 km² daerah atau terdapat sekitar 2 orang dalam 1 m². Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepadatan penduduk tahun 2010 meningkat sebesar 25 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk tahun 2009 mencapai 1.800 jiwa/km². Kenaikan setiap tahun bertambah seiring dengan pertambahan Penduduk yang besar setiap tahun, sedangkan jumlah lahan tidak berubah.

Jika dilihat Per wilayah, urutan 3 terbanyak Jumlah Penduduk paling banyak yang tercatat berada di kecamatan Baleendah, kecamatan Rancaekek dan kecamatan Cileunyi, sedangkan jumlah penduduk terkecil yang tercatat berada di kecamatan Cilengkrang. Namun jika dilihat dari kepadatan penduduk suatu wilayah (jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah daerah masing-masing), Maka Kecamatan Margahayu dan Dayeuhkolot menjadi kecamatan yang paling padat di Kabupaten Bandung, sedangkan kecamatan dengan Kepadatan paling rendah diduduki oleh Kecamatan Rancabali, Pasirjambu dan Kertasari.

Berikut jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 2010 di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk		
1	Ciwidey	37,149	35,877	73,026	4,846.92	21
2	Rancabali	24,129	23,571	47,700	14,837.00	4

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk		
3	Pasirjambu	40,863	39,095	79,958	23,957.64	4
4	Cimaung	37,029	35,981	73,010	5,500.02	9
5	Pengalengan	69,863	68,980	138,843	19,540.93	5
6	Kertasari	33,281	32,433	65,714	15,207.36	4
7	Pacet	52,276	48,840	101,116	9,193.96	15
8	Ibun	38,619	37,157	75,776	5,456.51	17
9	Paseh	61,278	58,292	119,570	5,102.90	26
10	Cikancung	42,132	40,090	82,222	4,013.63	22
11	Cicalengka	55,336	53,775	109,111	3,599.23	30
12	Nagreg	24,406	23,459	47,865	4,930.29	12
13	Rancaekek	83,225	83,235	166,460	4,524.83	38
14	Majalaya	77,897	73,658	151,555	2,536.46	65
15	Solokanjeruk	39,364	38,193	77,557	2,400.66	33
16	Ciparay	77,123	73,888	151,011	4,617.57	31
17	Baleendah	114,472	109,852	224,324	4,155.54	66
18	Arjasari	46,290	44,743	91,033	6,497.79	18
19	Banjaran	58,390	56,085	114,475	4,291.79	37
20	Cangkuang	33,116	31,847	64,963	2,461.06	27
21	Pamengpeuk	35,439	34,127	69,566	1,462.32	50
22	Katapang	56,121	53,618	109,739	1,572.46	72
23	Soreang	53,427	50,961	104,388	2,550.68	43
24	Kutawaringin	46,056	43,488	89,544	4,730.26	20
25	Margaasih	68,799	65,611	134,410	1,834.49	82
26	Margahayu	60,830	59,545	120,375	1.054.33	129
27	Dayeuhkolot	57,982	55,352	113,334	1,102.91	105
28	Bojongsoang	53,308	50,668	103,976	2,781.22	40
29	Cileunyi	83,489	80,606	164,095	3,157.51	58
30	Cilengkrang	23,708	22,912	46,620	3,011.94	15
31	Cimendan	53,226	50,986	104,212	5,308.33	26
TOTAL		1,638,623	1,576,925	3,215,548	176,238.67	19

Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2010

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

RKPD Kabupaten Bandung tahun 2012, secara nyata adalah RKPD pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025 Kabupaten Bandung, Periode tahap ke-2 RPJMD tahun 2010–2015. Pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015, Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu Prioritas untuk menangkis berbagai isu yang berkembang. Pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2010–2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2010 – 2015 yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pematapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan*".

Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2015, dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi, Yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme birokrasi;
2. Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda;
3. Memantapkan pembangunan perdesaan;
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah;
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah;
6. Meningkatkan Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing; dan
7. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan;

Ketujuh butir Misi Kabupaten Bandung, semata-mata untuk mewujudkan Kondisi kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga. Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut tercermin pada pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatan kerja, dan tingkat kriminalitas.

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun untuk daerah-daerah dengan angka partisipasi di jenjang pendidikan dasar yang sudah optimal. Untuk aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, pencapaian yang cukup penting ditunjukkan oleh telah terbentuknya lembaga tripartit antara pemerintah, dunia usaha, dan sekolah sebagai media untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, termasuk penyerapan lulusannya di dunia kerja.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Untuk mencapai derajat kesehatan yang diharapkan, upaya yang diperlukan antara lain peningkatan akses pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan kualitas ketenagaan, peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

Jumlah penduduk produktif (15–65 tahun) di Kabupaten Bandung telah mencapai 2.086.694 jiwa (64,89%). Diperlukan, peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Bandung. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Serta perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiatif masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar yang berlaku.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Upaya peningkatan jati diri masyarakat seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Bandung telah mengarah pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, serta kesadaran dan toleransi antar umat beragama. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Hal-hal tersebut dapat menunjang kesalehan sosial di masyarakat. Namun dalam proses mewujudkan kesalehan sosial di masyarakat, masih terdapat pemahaman menyesatkan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan mengganggu kehidupan beragama dan bermasyarakat.

2.1.2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan PDRB)

PDRB Kabupaten Bandung menggambarkan pertumbuhan ekonomi, Secara umum kondisi makro ekonomi Kabupaten Bandung, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal itu tidak lepas dari kondisi fundamental makro yang mempengaruhi seperti Stabilitas politik dan demokrasi, dukungan kepercayaan dunia usaha dan keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik membuat pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh di tahun ini.

Kondisi ekonomi nasional yang positif ini berimbas pada perekonomian Kabupaten Bandung untuk tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tercatat meningkat, dengan pertumbuhan mencapai 5,88 persen, sedang untuk tahun 2009 berkisar sekitar 4,34 persen.

Sektor yang membuat kenaikan secara signifikan diperoleh dari sektor industri. Namun perlu dicatat juga terjadi penurunan dari sektor-sektor ekonomi lainnya, yaitu pertambangan dan pengalihan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Untuk tahun 2010, PDRB Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dibandingkan dengan PDRB untuk tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya. Baik itu dilihat dari PDRB atas harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Untuk tahun 2010, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 4,89 triliun, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar Rp 1, 2 triliun.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung secara umum pertahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.4
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung
Untuk Tahun 2008 – 2010

Tahun	PDRB ADH Berlaku	PRDB ADH Konstan	pertumbuhan PDRB ADH Berlaku	pertumbuhan PDRB ADH Konstan
2008	38.282.169.450.000	19.674.494.550.000	14,89%	5,30%
2009	41.201.900.670.000	20.527.539.560.000	7,63%	4,34%
2010	46.092.238.720.000	21.734.661.190.000	11,87%	5,88%

Data Produk Domestik Bruto Semesteran Kabupaten Bandung 2010

Secara umum Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung selalu mengalami peningkatan, baik itu dilihat dari PDRB ADH Konstan maupun PDRB ADH berlaku, namun pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung tahun 2009 mengalami penurunan itu disebabkan karena dampak Krisis global yang dialami dunia yang berimbas pada PDRB Kabupaten Bandung. Memasuki tahun 2010 PDRB Kabupaten Bandung kembali menunjukkan kondisi pertumbuhan yang normal.

Kondisi ini tidak terlepas dari adanya pertumbuhan pada bagian semua sektor lapangan usaha Nilai PDRB tak lepas dari nilai-nilai PDRB persektor yang menjadi pembentuk PDRB secara umum, berikut Pertumbuhan PDRB ADH konstan dan berlaku per sektor.

Tabel 2.5.1
Pertumbuhan PDRB ADH Koston
Kabupaten Bandung
Tahun 2010

SEKTOR	TAHUN		Pertumbuhan PDRB
	2009 (Juta Rp.)	2010 (Juta Rp.)	
1. Pertanian	1.502.003,49	1.602.050,01	6,66%
2. Pertambangan Dan Penggalian	269.782,12	282.922,47	4,87%
3. Industri Pengolahan	12.517.223,96	13.173.587,93	5,24%
4. Listrik, Gas Dan Air Bersih	376.034,30	396.026,30	5,32%
5. Bangunan/Kontruksi	355.614,56	381.103,63	7,17%
6. Perdagangan,Hotel Dan Restoran	3.211.263,99	3.474.795,78	8,21%
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	843.661,61	892.448,05	5,78%
8. Keuangan,Persewaan Dan Jasa Perusahaan	451.138,21	474.864,56	5,26%
9. Jasa – Jasa	1.000.817,32	1.056.862,46	5,60%
Total PDRB	20.527.539,56	21.734.661,19	5,88%

PDRB Tahun 2010

Tabel 2.5.2
Pertumbuhan PDRB ADH Berlaku
Kabupaten Bandung
Tahun 2010

SEKTOR	TAHUN		PERTUMBUHAN PDRB
	2009 (juta)	2010 (juta)	
1. Pertanian	3.013.007,10	3.471.661,92	15,22%
2. Pertambangan Dan Penggalian	526.035,13	580.783,81	10,41%
3. Industri Pengolahan	24.565.562,89	27.471.535,02	11,83%
4. Listrik, Gas Dan Air Bersih	674.520,69	741.188,33	9,88%
5. Bangunan/Kontruksi	696.720,83	764.990,68	9,80%
6. Perdagangan,Hotel Dan Restoran	6.780.385,10	7.796.200,55	14,98%
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	1.795.161,77	1.933.148,22	7,69%
8. Keuangan,Persewaan Dan Jasa Perusahaan	820.502,95	898.354,49	9,49%
9. Jasa – Jasa	2.069.321,52	2.434.375,72	17,64%
Total Pdrb	40.941.217,98	46.092.238,74	12,58%

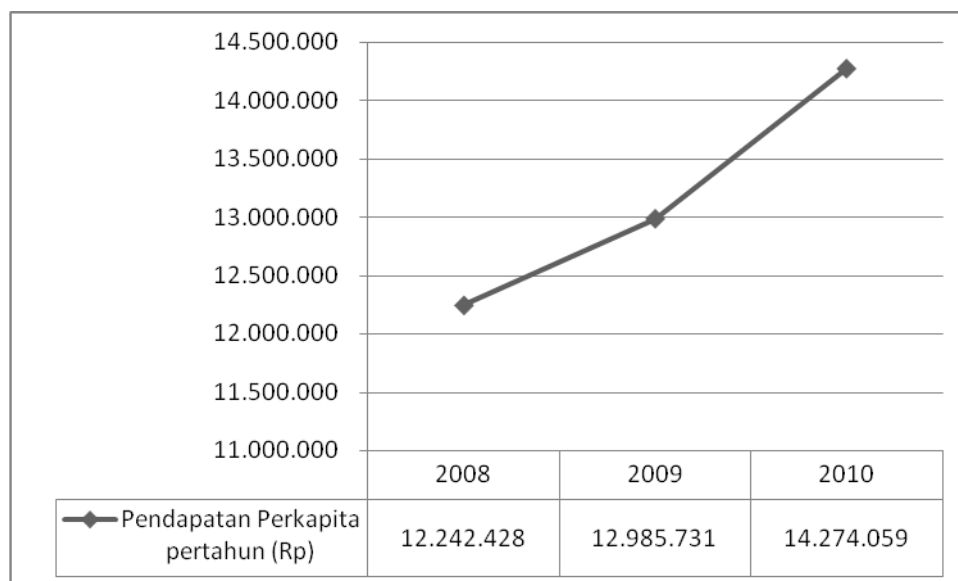
PDRB Tahun 2010

2.1.2.2 PDRB Perkapita

PDRB per kapita atau pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2010 menunjukkan peningkatan lebih besar dibandingkan dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 12.856.303,00, angka ini meningkat 5,01% dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai Rp 12.242.428,00. Nilai PDRB perkapita atas dasar konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung jika dibandingkan dengan PDRB perkapita harga berlaku hanya meningkat sebesar 0,69%, yaitu dari Rp. 6.402.393,00 pada Tahun 2008 menjadi Rp. 6.446.689,00 pada Tahun 2009.

Hal ini sejalan dengan peningkatan daya beli pada IPM pada tahun 2008 - 2010, pada tetapi walaupun demikian peningkatan PDRB perkapita yang dihitung belum menggambarkan sepenuhnya secara riil. Kenaikan daya beli masyarakat karena masih terkandung Faktor Inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Gambar 2.2
Grafik Pendapatan Perkapita Pertahun Kabupaten Bandung
Tahun 2008 -2010



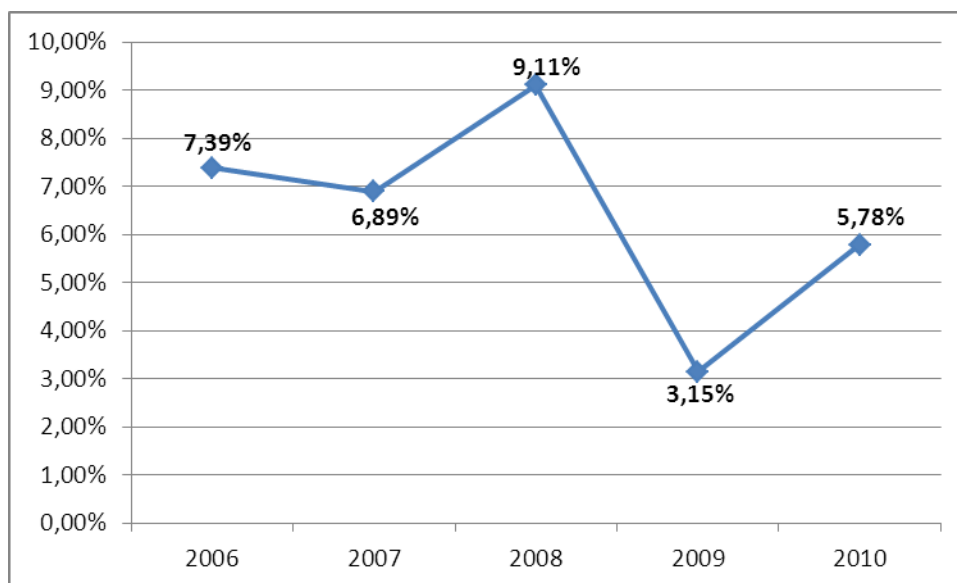
Berdasarkan PDRB Perkapita, kondisi Kabupaten Bandung menggambarkan bahwa tingkat kemakmuran/kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung belum menampakan kemajuan yang berarti. Namun, jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat maka tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan rata-rata pendapatan penduduk Provinsi Jawa Barat. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Jawa Barat pada Tahun 2010 sebesar.

2.1.2.3 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun. Tahun 2010, tingkat inflasi di Kabupaten Bandung meningkat 2,51 poin, yaitu dari 3,15 % pada tahun 2009 menjadi 5,66 % pada tahun 2010. Peningkatan ini masih termasuk inflasi ringan (di bawah 10 % per tahun). Menurunnya tingkat inflasi ini juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Berikut gambaran keadaan tingkat inflasi dari tahun 2008-2010 adalah :

Gambar 2.3
Grafik Tingkat Inflasi PDRB di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006-2010



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2010.

Dilihat dari sektor kegiatannya, tingkat Inflasi PDRB Kabupaten Bandung dari tahun 2008 - 2010 adalah:

Tabel 2.6
Tingkat Inflasi PDRB di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008-2010

No	Lapangan Usaha	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Pertanian	6,46	4,85	8,03
2	Pertambangan dan Penggalian	7,05	6,54	5,28
3	Industri pengolahan	9,46	2,76	5,59
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4,22	0,88	4,34
5	Bangunan/Konstruksi	9,46	2,6	2,46
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,61	5,3	6,26
7	Pengangkutan dan Komunikasi	9,64	-5,21	1,8
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5,66	0,08	4,02
9	Jasa-Jasa	7,35	7,14	6,05

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2010.

Peningkatan inflasi tertinggi terjadi pada sektor pertanian yang mencapai 8,03 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,26 %, serta sektor jasa-jasa sebesar 6,06 %. Adapun sektor lainnya berkisar antara 1,80 – 5,59 %.

2.1.2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Nilai Tambah Bruto (NTB)

Salah satu indikator makro Ekonomi yang menjadi acuan adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 5,88 %. Jika dilihat dari pertumbuhan tiap-tiap sektor ekonomi terlihat bahwa pada tahun 2010 hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, dua sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan sampai 8,21 %, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar 4,87 % adalah sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 2.7
Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung
(Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi) Tahun 2010

No.	Sektor	Kontribusi/ Peranan NTB (%)	LPE Atas Dasar Harga Konstan (%)	Tingkat Inflasi (%)
1.	Pertanian	7,53	6,66	8,03
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,26	4,87	5,28
3.	Industri Pengolahan	59,60	5,24	5,59
4.	Listrik, Gas dan Air	1,61	5,32	4,34
5.	Bangunan	1,66	7,17	2,46
6.	Perdagangan, Hotel & restoran	16,91	8,21	6,26
7.	Angkutan dan Komunikasi	4,19	5,78	1,80
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,95	5,26	4,02
9.	Jasa-jasa	5,28	5,60	6,05

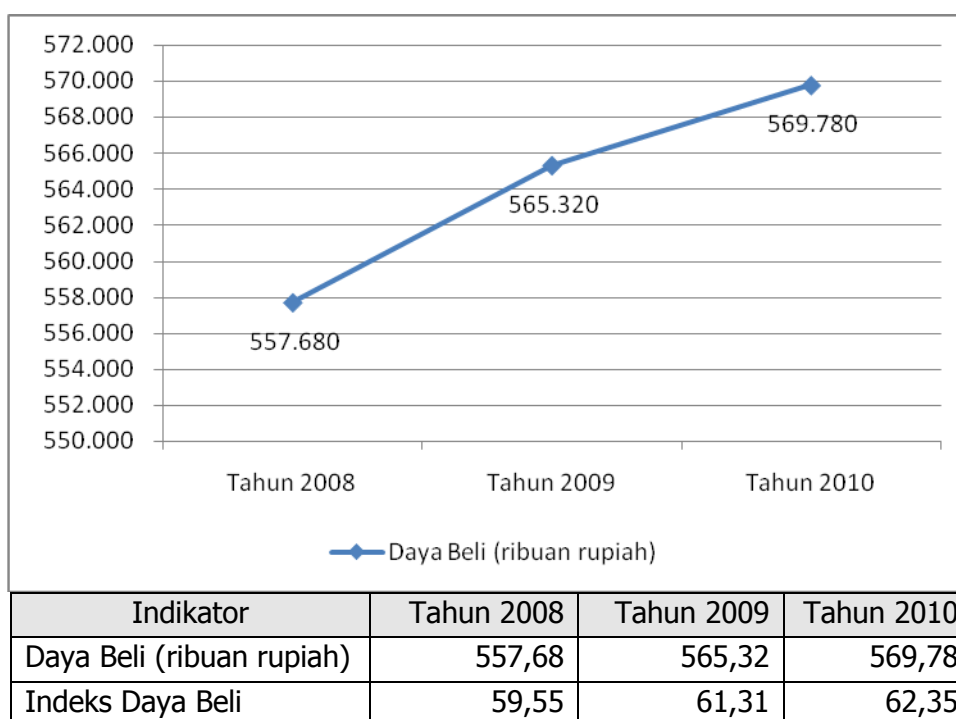
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2010.

Penurunan tingkat inflasi ini terjadi di seluruh sektor perekonomian, bahkan sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami deflasi hingga 5,21% dari tingkat inflasi 9,64% pada Tahun 2008. Deflasi pada sektor pengangkutan terjadi pada sub sektor angkutan jalan raya sedangkan pada sektor komunikasi terjadi sebagai dampak dari pemberlakuan kebijakan penurunan tarif interkoneksi layanan selular pada Tahun 2008. Sektor ekonomi lainnya yang mengalami penurunan tingkat inflasi terbesar adalah sektor industri pengolahan dan sektor bangunan/konstruksi, yang masing-masing mengalami penurunan inflasi hingga 2,09% dan 2,60% dari 9,46% pada Tahun 2008.

2.1.2.5 Daya Beli Masyarakat

Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil perkapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung tahun 2010 berada pada kisaran Rp 572.910,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Angka ini meningkat Rp 7.590,00 dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung sebesar Rp 565.320,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Gambar 2.4
Grafik Daya Beli Masyarakat dan Indeks Daya Beli masyarakat
Kabupaten Bandung Tahun 2008-2010



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2010.

2.1.2.6 Kondisi Ekonomi

Potensi unggulan Kabupaten Bandung salah satunya dapat dilihat dari sektor-sektor yang menjadi unggulan di wilayah Kabupaten Bandung, seperti : sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan sebagainya.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang bekerja di sektor pertanian lk 18,91 %. Selain itu, dapat dilihat dari luas lahan yang digunakan untuk area pertanian yaitu mencapai lk. 48,6 % dari luas wilayah Kabupaten Bandung (176.239 ha), yang terdiri dari : lahan sawah seluas 36.212 ha dan lahan kering bukan sawah seluas 140.027 ha (sumber : Distanbunhut Kab. Bandung)). Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung mencapai

7,53 %. Sektor pertanian berkontribusi terbesar ke-3 setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran.

Dari sisi produksi pertanian, sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Bandung masih merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi maupun dataran rendah bagi daerah perkotaan/ konsumen potensial seperti : Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, serta pasar lokal, baik Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat maupun pasar-pasar di Kabupaten Bandung sendiri. Untuk komoditas beras, sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta (Sumber : Distanbunhut Kab. Bandung) . Sedangkan komoditas sayuran, sebanyak 50% produksi sayuran Kabupaten Bandung dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya, sebanyak 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya dijual ke pasar lokal di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Khusus untuk komoditas kentang, Kabupaten Bandung merupakan penghasil produksi tertinggi di Jawa Barat, yaitu mencapai 70% dan sisanya sebesar 30% untuk tingkat Nasional. Produksi lainnya yaitu komoditas perkebunan (teh, kopi, cengkeh) dan hortikultura (sayuran dan buah-buahan) baik yang berasal dari perkebunan negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar di ekspor. Rata-rata pendapatan penduduk di bidang pertanian per bulan per ha meningkat 16,03 % yaitu Rp 2.509.723 pada tahun 2009 menjadi 2.912.039 pada tahun 2010.

Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis ternak antara lain : sapi perah, sapi potong, domba dan unggas. Dari komoditi sapi perah, Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar baik level Jawa Barat maupun Nasional. Untuk memenuhi kebutuhan susu secara nasional, saat ini Indonesia masih mengandalkan impor yang mencapai 70 % (mayoritas dalam bentuk olahan) dan sisanya (30 %) dari produksi dalam negeri, sehingga peluang pengembangan ternak sapi perah masih cukup tinggi.

Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar masih dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di lain pihak, bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya.

Selain sapi potong, domba merupakan jenis ternak yang potensial dikembangkan. Memelihara ternak domba sudah menjadi kultur masyarakat petani/peternak di perdesaan. Ternak domba berfungsi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan bila diperlukan, di samping sebagai penghasil pupuk yang sangat diperlukan untuk bercocok tanam. Saat ini permintaan daging domba semakin meningkat, sementara ternak bakalan masih sulit didapat.

Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri, yang terdiri dari industri kecil, industri menengah dan industri besar. Pada tahun 2010 jumlah industri di Kabupaten Bandung sebanyak 741 buah, terdiri dari : industri kecil sebanyak 374 buah, industri menengah sebanyak 215 buah dan industri besar sebanyak 152 buah. Penyerapan tenaga kerja pada sejumlah industri tersebut sebanyak 64.226 orang, dengan nilai investasi sebanyak Rp 1.395.176.370.085. Jumlah industri tahun 2010 ini meningkat 3,93 % dibandingkan dengan tahun 2009, yang mana pada tahun 2009 jumlah industri tersebut sebanyak 713 buah. Selain jumlah industri, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi pun meningkat, yaitu penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 2,41 % dan nilai investasi meningkat sebesar 3,03 %.

Tabel 2.8
Jumlah Industri, Nilai Investasi dan
Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung
Tahun 2009-2010

No.	Jenis Industri	2009			2010		
		Jumlah (unit)	Nilai Investasi (Rp)	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	Jumlah (unit)	Nilai Investasi (Rp)	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)
1.	Kecil	369	51.506.446.789	4939	374	54.026.800.000	5.105
2.	Menengah	213	135.025.854.500	14.736	215	136.841.464.500	14.861
3.	Besar	131	1.167.556.855.585	43.039	152	1.204.308.105.585	44.260
	Jumlah	713	1.354.089.156.874	62.714	741	1.395.176.370.085	64.226

Sumber : Laporan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bandung Tahun, 2010.

Potensi industri di Kabupaten Bandung baik industri kecil, industri menengah maupun industri besar lebih banyak didominasi oleh industri tekstil dan produk tekstil; serta industri kimia dan bahan bangunan. Sementara itu jumlah industri yang sangat langka di Kabupaten Bandung adalah industri kerajinan dan aneka; serta industri logam mesin dan elektronika.

Potensi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bandung adalah sektor pariwisata. Dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan, antara lain : Situ Patengan; Situ Cileunca; Kawah Putih; Pemandian air panas Ciwalini, Cibolang; dan lain sebagainya. Tempat-tempat obyek wisata tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti : wisma, motel dan hotel serta restoran/rumah makan.

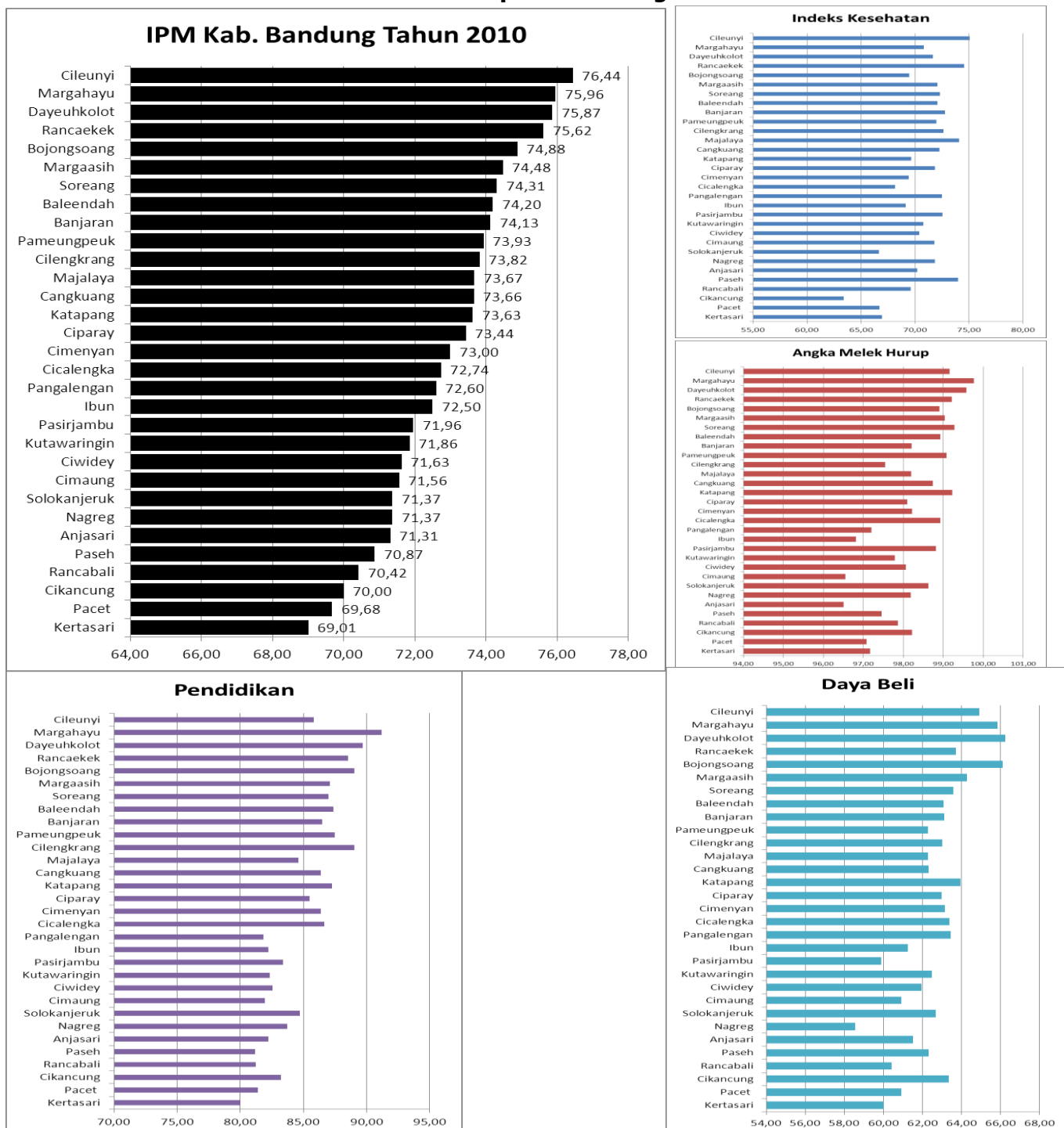
2.1.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup 3 tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu Angka harapan hidup, pengetahuan, dan hidup layak.

Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Bandung dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik (intelektualitas).

Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (Bidang kesehatan); Peningkatan intelektual (pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Gambar 2.5
Grafik Nilai IPM dan Komponen-komponen pendukung IPM
Per Kecamatan Kabupaten Bandung tahun 2010



Secara umum nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk tahun 2010 sebesar 74,24 poin, terjadi peningkatan dari tahun 2009 yang sebelumnya 73,39 poin.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum terdapat 34 bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang dibagi berdasarkan urusan Wajib dan urusan pilihan. Namun tidak semua bidang urusan berhubungan langsung dengan pelayanan umum terhadap publik. Berikut, akan ditampilkan 12 urusan yang memberikan kontribusi terbesar dalam mengukur Pelayanan terhadap publik

2.1.3.1 Pendidikan

Dalam Pembukaan UUD 1945, Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka peluang individu maupun masyarakat untuk mengembangkan diri dan mewujudkannya. Layanan pendidikan dasar yang dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang dicerminkan dalam program pemerintah Wajib Belajar 9 tahun.

Jumlah penduduk yang relatif besar dan struktur umur yang kebanyakan berusia muda, relatif memiliki tanggung jawab besar untuk mengantarkan penduduk muda untuk memperoleh pendidikan yang layak di Kabupaten Bandung. Kendala Disparitas ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Bandung juga relatif besar. Daerah Urban pada umumnya memiliki sekolah-sekolah yang berkualitas dan dikelola secara mandiri. Hal itu berbanding terbalik dengan Daerah rural, Kebanyakan proses pendidikan masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau belum beranjak pada peningkatan kualitas.

Secara umum, Keberhasilan pembangunan manusia/kualitas sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik dapat terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power parity*). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia.

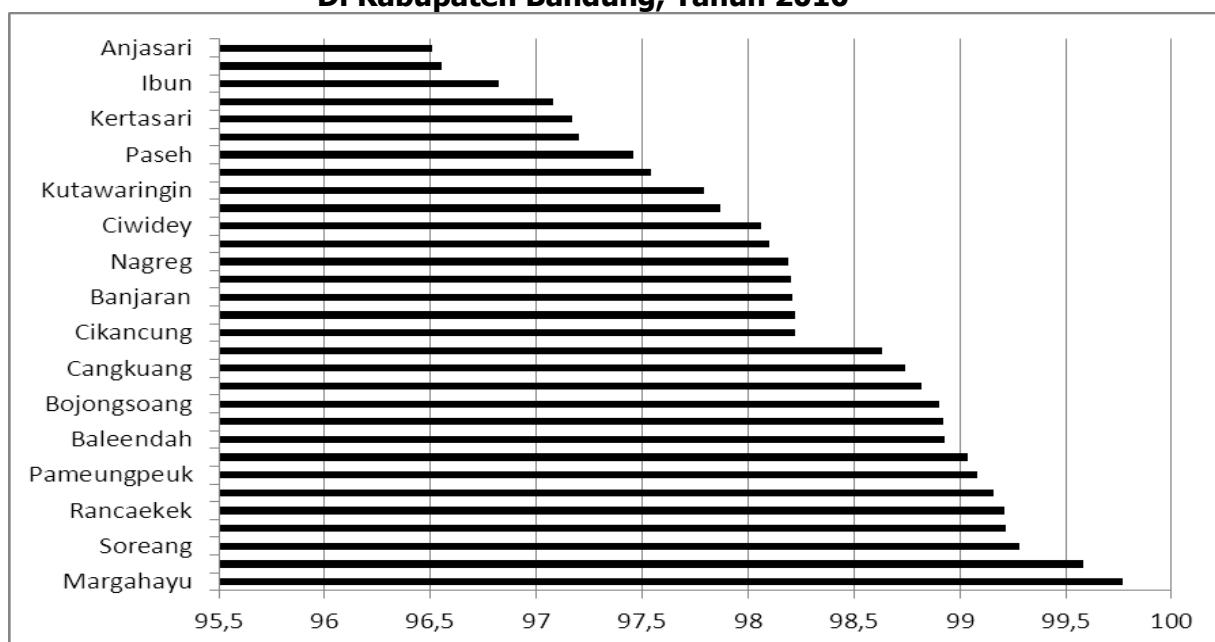
Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Tahun 2010 IPM Kabupaten Bandung mencapai 74,24 yang diperoleh dari : indeks pendidikan 85,65; indeks kesehatan 74,00 dan indeks daya beli 63,07. IPM tahun 2010 ini meningkat 0,85 poin, di mana IPM pada tahun 2009 mencapai 73,39. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan indeks pendidikan sebesar 0,03 poin; indeks kesehatan 0,77 poin dan indeks daya beli 1,75 poin.

A. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf menggambarkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari aspek pendidikan. Indikator AMH diambil dari penduduk dewasa (umur 15 tahun keatas) yang dapat membaca dan menulis minimal kata-kata/kalimat sederhana aksara tertentu, baik huruf latin atau lainnya.

Biasanya data AMH dibuat untuk melihat bagaimana sebaran pencapaian dasar bidang Pendidikan per wilayah. Berikut data AMH menurut kecamatan :

Gambar 2.6
Grafik Sebaran Pencapaian AMH menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bandung, Tahun 2010



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2010

Dari data di atas, terlihat sebaran Angka Melek Huruf perkecamatan di Kabupaten Bandung, untuk tahun 2010 sudah sangat merata (walaupun ada perbedaan namun rentangnya relatif kecil), nilai AMH paling kecil berada pada kecamatan Arjasari sebesar 96,51 % sedang yang paling tinggi adalah kecamatan Margahayu sebesar 99,77%. Secara keseluruhan AMH untuk Kabupaten Bandung adalah 98,41 %, terjadi koreksi untuk tahun 2009 dengan nilai 98,87 %.

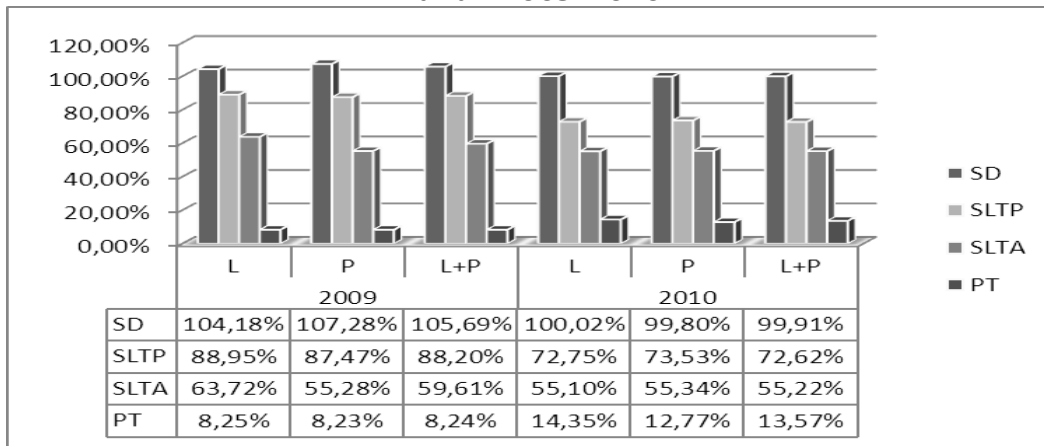
Meskipun mengalami penurunan namun Angka ini tidak menunjukkan penurunan kualitas Pendidikan di Kabupaten Bandung, karena untuk Angka indeks makro ekonomi yang lain terlihat adanya peningkatan.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator APK dan APM dipakai untuk melihat seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. Nilai lain yang sering dipergunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara umum indikator-indikator ini menunjukkan seberapa besar program-program yang dicanangkan oleh pemerintah telah berhasil seperti wajib belajar 9 tahun.

Angka Partisipasi kasar menunjukkan proporsi anak sekolah secara gender pada jenjang tertentu. APK secara umum tidak memperhatikan mengenai usia sekolah. Berikut APK menurut Jenis kelamin dan jenjang Pendidikan

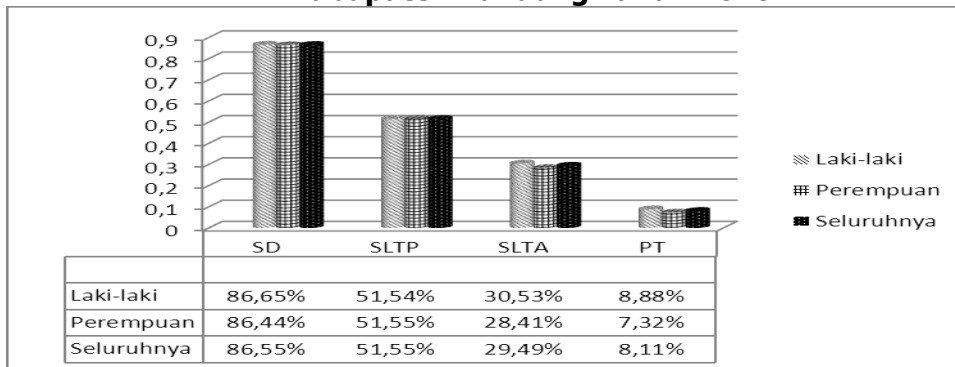
Gambar 2.7.1
Grafik Perbandingan Kenaikan presentase APK
Berdasarkan tingkat pendidikan Kabupaten Bandung
Tahun 2009-2010



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2010

Dilihat dari gambar APK SD untuk jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung sebesar 100,02% (lebih dari 100%) artinya masih terdapat sekitar 0,02 % penduduk di luar usia 7-12 tahun yang berstatus murid SD. Hal ini menunjukkan bahwa telah tumbuh kesadaran bahwa seorang anak harus bersekolah sesuai dengan usianya.

Gambar 2.7.2
Grafik Nilai Presentase APM
Berdasarkan tingkat pendidikan terhadap jenis kelamin
Kabupaten Bandung Tahun 2010



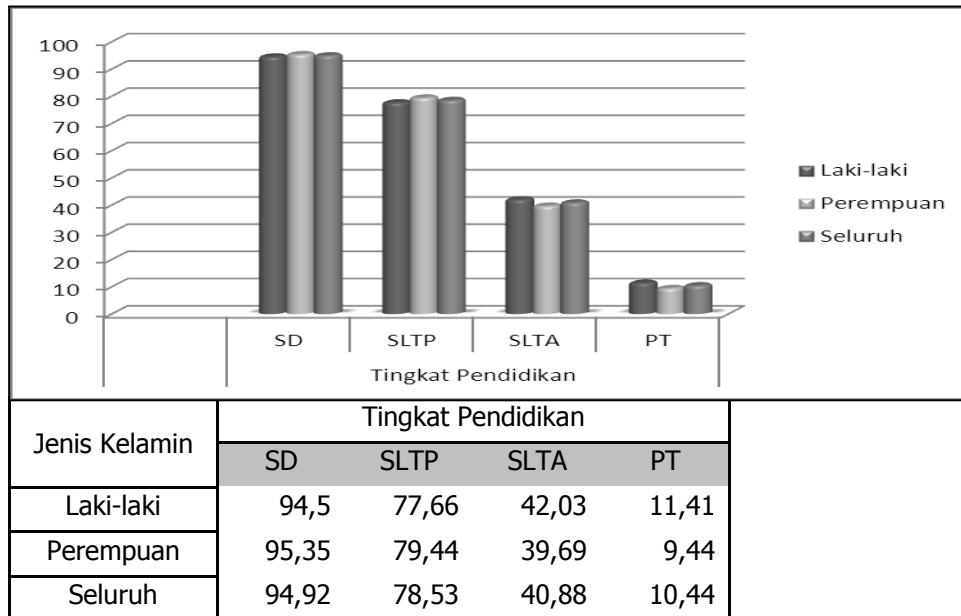
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2010

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Gambar 2.8
Grafik Angka Partisipasi Murni
Berdasarkan tingkat pendidikan terhadap jenis kelamin
Kabupaten Bandung Tahun 2010



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2010

Dari gambar di atas memperlihatkan APS penduduk laki-laki lebih rendah dan cenderung sama dibanding APS penduduk perempuan pada kelompok pada kelompok umum SD dan SLTP, namun untuk kelompok umur pendidikan yang lebih tinggi, angka partisipasi laki-laki lebih tinggi, sehingga bisa disimpulkan perempuan di Kabupaten Bandung banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya karena berbagai faktor.

Fakta yang ada adalah dunia kerja kita masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah, seolah-olah menggambarkan bahwa kesempatan masuk ke dunia kerja masih terbuka lebar meskipun dengan tingkat pendidikan yang relatif terbatas. Sehingga memunculkan anggapan di masyarakat bahwa pendidikan tinggi belum menjadi jaminan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan.

D. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.

Selama kurun waktu 2008-2010 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan, setelah periode sebelumnya mengalami kenaikan yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Pembangunan jumlah sekolah baru tidak sebanding dengan

peningkatan jumlah warga sekolah. Pada tahun 2010, perbandingan ketersediaan sekolah SD/MI di Kabupaten Bandung adalah 1 : 252,75. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung 252 siswa.

Berbeda dengan SD/MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah SMA/MA/MK atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs.

Tabel 2.9
Perbandingan Jumlah sekolah berdasarkan penduduk usia sekolah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 – 2010

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah sekolah	1547	1553	1593
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	456.903	400.438	402.631
1.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 - 12 Tahun	1 : 295,35	1 : 257,85	1:252,75
2	SMP/MTs			
2.1.	Jumlah sekolah	401	411	473
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	198.798	206.499	206.499
2.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 - 15 Tahun	1 : 495,76	1 : 502,43	1:436,57
3	SMA/MA/SMK			
3.1	Jumlah sekolah	238	250	253
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	187.292	178.170	171.552

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 - 18 Tahun	1 : 786,94	1 : 712,68	1:678,07

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2009) dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2009)

E. Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Selama kurun waktu tahun 2008-2010 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Bandung mengalami pasang surut untuk tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan untuk seluruh jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs. maupun SMA/MA/SMK per 10.000 jumlah murid mengalami kenaikan, Namun dari tahun 2009 me tahun 2010 mengalami kenaikan. untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2008. Demikian pula rasio ketersediaan guru SMA/MA/SMK pada tahun 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007. Pada tahun 2010, perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid SD/MI di Kabupaten Bandung adalah 1 29,24. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 1 guru SD/MI melayani (mengajar) 29,24 \approx 29 murid SD.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.10
Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 – 2010

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah Guru	15.159	15.936	14.363
1.2.	Jumlah Murid	403.247	410.245	419.990
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 26,6	1 : 25,74	1:29,24
2	SMP/MTs			
2.1.	Jumlah Guru	9.794	10.003	9.694

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010
2.2.	Jumlah Murid	143.328	143.411	192.851
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 14,63	1 : 14,34	1:19,89
3	SMA/MA/SMK			
3.1	Jumlah Guru	6.397	6.970	6.370
3.2	Jumlah Murid	67.476	69.799	123.027
3.3	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 10,55	1 : 10,12	1:19,31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2009)

F. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata

Pada tahun 2009, rasio guru/kelas SD/MA terhadap jumlah murid yang berusia 6 -12 tahun di Kabupaten Bandung adalah 1 : 1,39 : 35,75. Interpretasi dari angka di atas adalah bahwa 1 kelas SD dilayani (diajar) oleh $1,39 \approx 1$ orang guru, sedangkan kelas tersebut terdiri atas $35,75 \approx 36$ murid SD.

Tabel 2.11
Rasio guru per kelas rata-rata terhadap Jumlah Murid di Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah Guru	15.159	15.936	14.363
1.2.	Jumlah Kelas	11.724	11.474	9668
1.3.	Rasio Guru/Kelas	1 : 1,29	1 : 1,39	1:1,48
1.4.	Jumlah Murid	403.247	410.245	419.990
1.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 34	1 : 36	1 : 43
1.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:1,29:34,4	1:1,39:35,75	1:1,48:43,44
2	SMP/MTs			
2.1	Jumlah Guru	9.794	10.003	9.694
2.2	Jumlah Kelas	3.389	3.763	3.441
2.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 2,89	1 : 2,66	1:2,8
2.4	Jumlah Murid	143.328	143.411	192.851

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010
2.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 42	1 : 38	1 : 56
2.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:2,89 :42,3	1:2,66:38,11	1:2,8:56
3	SMA/MA/SMK			
3.1	Jumlah Guru	6.397	6.970	6.370
3.2	Jumlah Kelas	1.837	2.093	1.883
3.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 3,48	1 : 3,33	1:3,38
3.4	Jumlah Murid	67.476	69.799	92.712
3.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 37	1 : 33	1 : 49
2.5	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:3,48:36,73	1:3,33:33,35	1:3,38:49

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010)

Komponen indikator pendidikan terdiri atas : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 98,41 %, angka ini menurun 0,46 poin dibandingkan tahun 2009, dimana pada tahun 2009 AMH mencapai 98,87 %. Penurunan ini disebabkan adanya perbedaan pengambilan metode perhitungan (pengambilan sampel), sedangkan pada tahun 2010 perhitungan dilakukan berdasarkan hasil sensus penduduk, sedangkan pada tahun 2009 perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survey. Perhitungan menggunakan hasil survey mengandung tingkat kesalahan sebesar 2,5 %, dengan demikian penurunan sebesar 0,46 poin masih berada dalam batas toleransi dan menjadi koreksi terhadap angka-angka sebelumnya.

Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2010 mencapai 9,02 tahun, ini artinya bahwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2010 rata-rata telah menamatkan pendidikan sampai jenjang SLTP (wajar dikdas 9 tahun). Angka ini meningkat 0,15 tahun dibandingkan tahun 2009, sedangkan pada tahun 2009 RLS mencapai 8,87 tahun.

Perkembangan penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki), hampir seluruhnya mengalami perkembangan cukup baik, yaitu jumlah penduduk yang tidak/belum mempunyai ijazah mencapai 10,25 % pada tahun 2010 sedangkan tahun 2009 mencapai 15,17 %; penduduk tamat SD/setara SD mencapai 39,47 % pada tahun 2010 sedangkan tahun 2009 mencapai 35,48 %; penduduk tamat SLTA/setara SLTA mencapai 21,55 % pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2009 mencapai 19,96 %; dan penduduk tamat perguruan tinggi mencapai 5,45 % pada tahun 2010 sedangkan tahun 2009 mencapai 4,30 %.

Selanjutnya, perkembangan penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki yang tamat pendidikan pada jenjang tersebut lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 2.12
Penduduk usia 10 Tahun ke atas berdasarkan
Jenjang Pendidikan yang ditamatkan (Ijazah Tertinggi yang dimiliki)
di Kabupaten Bandung Tahun 2009-2010

No.	Jenjang Pendidikan	2009				2010			
		Jenis Kelamin		Jumlah	%	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan			Laki-laki	Perempuan		
1.	Tdk/blm punya Ijazah	182.036	213.487	395.523	15,17	127.124	132.578	259.702	10,25
2.	SD / setara SD	442.875	482.231	925.106	35,48	484.222	515.443	999.665	39,47
3.	SLTP / setara SLTP	325.026	329.141	654.167	25,09	295.192	294.330	589.522	23,28
4.	SLTA / setara SLTA	297.655	222.798	520.453	19,96	306.693	239.027	545.720	21,55
5.	Perguruan tinggi	61.427	50.570	111.997	4,30	74.670	63.247	137.917	5,45
Jumlah		1.309.019	1.298.227	2.607.246	100,00	1.287.901	1.244.625	2.532.526	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2009, 2010.

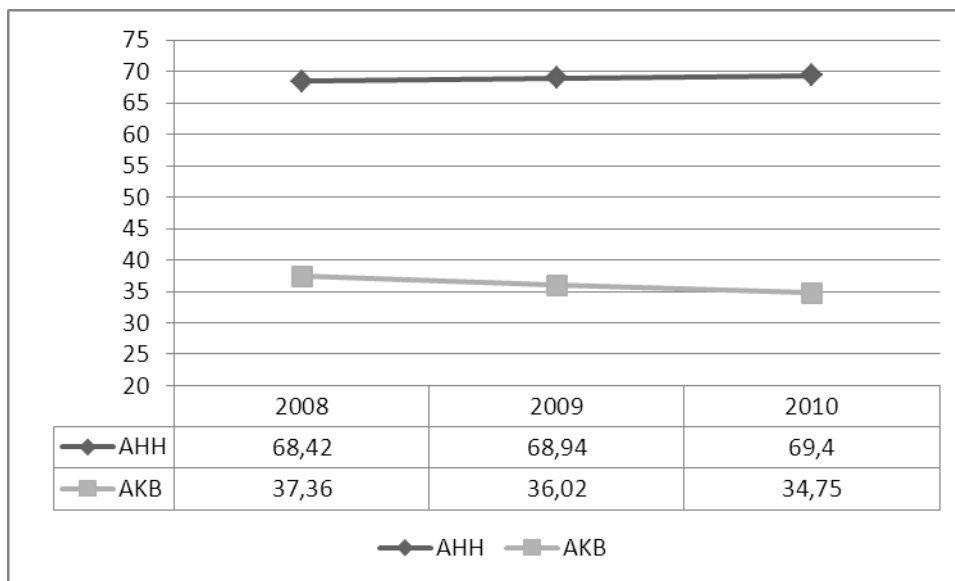
2.1.3.2 Kesehatan

A. Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Pemerintah Kabupaten Bandung telah berupaya untuk terus Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan terus dilakukan, ini bisa dilihat dari Indikator Angka Kematian Bayi Pada tahun 2010, di Kabupaten Bandung, sebesar 34,75 yang artinya ada sekitar 35 kematian bayi dalam 1000 kelahiran hidup, jumlah itu selalu menurun dari tahun 2005 sampai 2010, pada tahun 2003 terdapat 48 kematian bayi dalam 1000 kelahiran hidup.

Nilai Angka Kematian Bayi biasanya berbanding terbalik dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH adalah angka kecenderungan Harapan hidup perkiraan lama hidup rata-rata penduduk Kabupaten Bandung dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 69-70 tahun. Angka ini meningkat 0,64 poin dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 AHH Kabupaten Bandung mencapai 68,94 tahun. Pada tahun 2008-2010 angka harapan hidup cenderung mengalami peningkatan. Untuk tahun 2010, AHH Kabupaten Bandung sebesar 69,40, artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 69-70 tahun nilai itu meningkat jika dibanding pada tahun 2003. Sebesar 65,40. Berikut adalah perbandingan 2 indikator AHH dan AKB bidang kesehatan di Kabupaten Bandung :

Gambar 2.9
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Bandung, Tahun 2008-2010



Dari data di atas, Kabupaten Bandung diklasifikasikan kedalam kelompok kategori *intermediate-rock*, yaitu kelompok menengah yang memerlukan perubahan sosial untuk menurunkan AKB. Menurut *Singarimbun* (1988:vii-viii) ada beberapa faktor yang memiliki kekuatan dalam menurunkan angka kematian, khususnya kematian bayi dan anak, yaitu :

- a) Adanya kemajuan ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup;
- b) Adanya kemajuan teknologi kesehatan;
- c) Adanya kesadaran perbaikan sanitasi dan higienia; dan
- d) Adanya peningkatan persediaan makanan dan perbaikan gizi.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam peningkatan derajat kesehatan untuk penurunan angka kematian bayi, sangat membutuhkan perhatian lebih dan kerja keras. Pada daerah-daerah yang memiliki persebaran AKB yang cukup tinggi, terutama di wilayah Bandung Selatan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan harus tetap diprioritaskan.

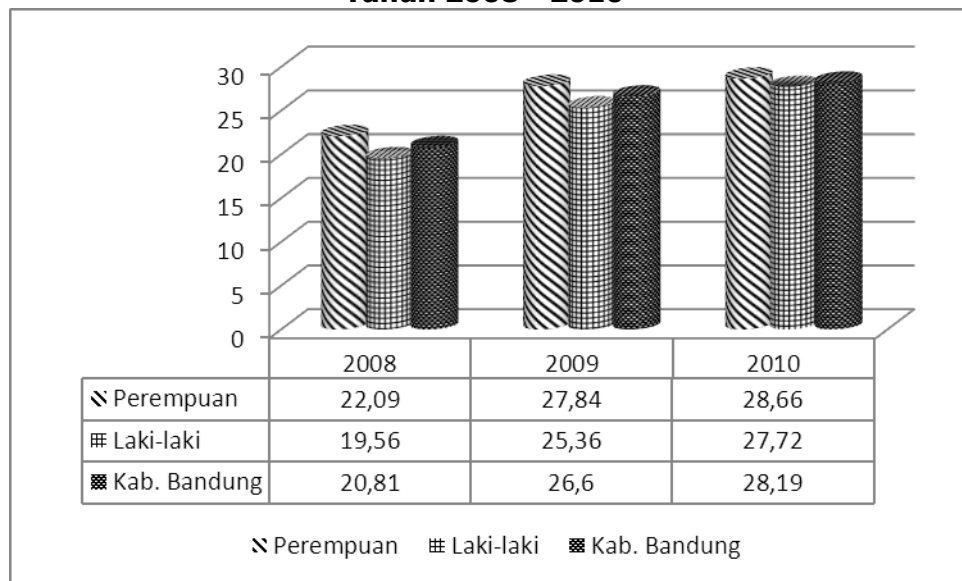
Resiko kematian bayi lebih besar bagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi, dibandingkan dengan ibu yang memiliki gizi cukup. Sedangkan kekurangan gizi berkorelasi positif dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah. Penyebab tingginya angka kematian bayi lahir rendah, berkaitan erat dengan kondisi pada fase kehamilan, pertolongan kelahiran yang aman dan perawatan bayi pada saat dilahirkan.

Faktor kedua yang menyebabkan tingginya AKB adakah pertolongan pertama persalinan, kondisi menurut Suseda tahun 2007 terdapat 45,59 % balita yang lahir hanya mendapatkan pertolongan persalinan dari non tenaga kesehatan (non kesehatan) seperti dukun, namun pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 36,18%, sementara persalinan oleh dokter meningkat menjadi 5,94 %; sedangkan oleh bidan terjadi peningkatan sebesar 59,01 %

Terdapat asumsi dari tim medis yang menyebutkan Penanganan persalinan oleh non naker memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena infeksi atau perawatan pasca persalinan kurang baik dibandingkan dengan persalinan yang ditolong oleh tenaga nakes seperti dokter, bidan maupun tenaga paramedis. Oleh karena itu, peranan tenaga medis dalam pertolongan persalinan harus ditingkatkan.

Indikator lain yang bisa dijadikan acuan lain keberhasilan dalam peningkatan kesehatan adalah Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurut jenis kelamin di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 2.9
Grafik Prosentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2010



Dari tabel di atas, terlihat adanya Kenaikan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dari tahun 2008 terhadap tahun 2009 sebesar 5,79% secara keseluruhan dan 1,59% nilai peningkatan dari tahun 2009 terhadap tahun 2010, Peningkatan keluhan kesehatan terjadi pada laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan hasil SUSEDA 2010, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Namun apabila ditelaah lebih lanjut, terjadi penurunan rata-rata penyembuhan pada tahun 2010, yang tahun sebelumnya berkisar sekitar 2 minggu, menurun menjadi sebagian besar kurang dari seminggu.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pencapaian indikator kesehatan (tingginya angka/jumlah kematian dan kesakitan) adalah masih kurangnya kemampuan beberapa UPTD untuk memenuhi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa serta melaksanakan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, hal ini bisa dilihat dari masih rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010.

B. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 8 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 3 unit, rumah sakit swasta sebanyak 4 unit dan rumah sakit AU sebanyak 1 unit. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 0,003. Hal ini berarti bahwa untuk 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2009 dilayani oleh rumah sakit sebanyak 0,003. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan tahun 2006-2008.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.13
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	2	3	3
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	4	4	4
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	7	8	8
	Jumlah Penduduk	3.127.008	3.172.860	3.215.548
	Rasio	1 : 446.715	1 : 396.607	1 : 401943

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2009)

C. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan,

guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 4.311 buah dan jumlah Balita sebanyak 333.673 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 12,92. Hal ini berarti bahwa dari 1.000 balita yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2009, dapat dilayani Posyandu sebanyak 12-13 Posyandu.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.14
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

NO	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah posyandu	3.883	3.926	4.311
2.	Jumlah balita	280.874	284.112	333.673
3.	Rasio Posyandu per Jumlah Balita	1: 14	1 : 13	1 : 13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2009)

D. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Persatuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2010 mencapai 1 : 4.509. Ini artinya bahwa 1 Puskemas/ Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 4.509 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 2 : 1. Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas.

Jumlah penduduk yang harus dilayani Puskesmas/Poliklinik/Pustu tahun 2010 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008). Pada tahun 2008 satu Puskesmas/Poliklinik/Pustu harus melayani 6.949 penduduk, pada tahun 2009 harus melayani 7.098 penduduk dan tahun 2010 harus melayani 4.509 penduduk.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.15
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 – 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah Puskesmas	61	61	61
2.	Jumlah Poliklinik	318	317	566
3.	Jumlah Pustu	71	69	86
	Jumlah Total Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	450	447	713
4.	Jumlah Penduduk	3.127.008	3.172.860	3.215.548
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 51.262	1 : 52.014	1 : 51.238
	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	1 : 9.833	1 : 10.009	1 : 5.681
	Rasio Pustu persatuan penduduk	1 : 44.042	1 : 45.983	1 : 37.390
	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1 : 6.949	1 : 7.098	1 : 4.509
5.	Jumlah Kecamatan	31	31	31
6.	Jumlah Desa/kelurahan	275	276	276
	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2 : 1	2 : 1	2 : 1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010)

2.1.3.3 Pekerjaan Umum

Urusan/bidang Pekerjaan umum melaksanakan pelayanan publik yang bersifat infrastruktur (fisik). Melihat Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga

fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottle neck* (jaringan jalan yang menyempit) di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2008 proporsi jalan kondisi baik mencapai 27,52 % namun pada tahun 2009 kondisi tersebut membaik menjadi 34,24 %. dan kembali menurut di tahun 2010 menjadi 30,78%. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami peningkatan, yaitu dari 13,14 % pada tahun 2006 menjadi 18,47 % pada 2009.

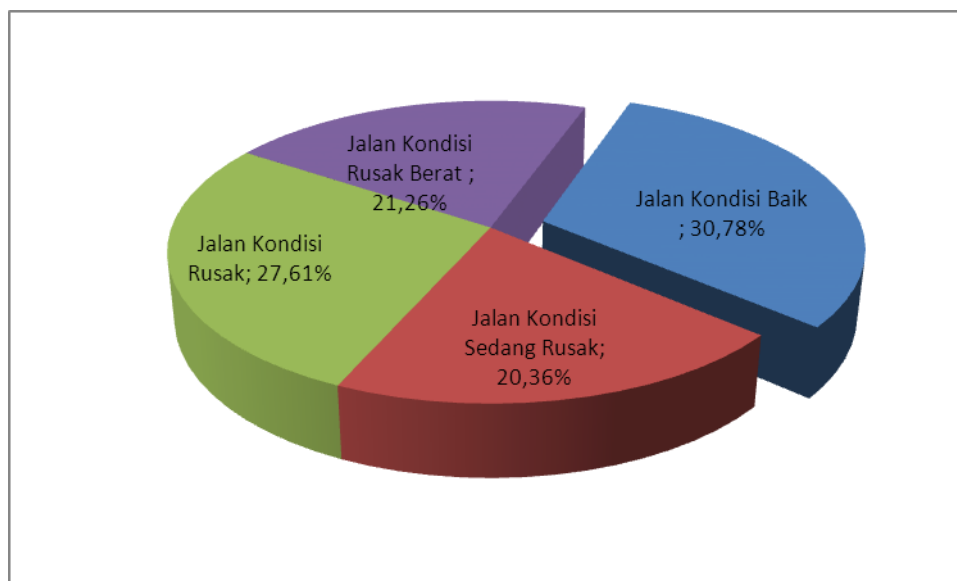
Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2008-2010.

Tabel 2.16
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung
Berdasarkan Kondisi
Tahun 2008 – 2010

No.	Uraian	Panjang Jalan (km)		
		2008	2009	2010
1.	Kondisi Baik	317,72	395,56	355,57
	Poporsi Kondisi Baik (%)	27,52	34,24	30,78
2.	Kondisi Sedang Rusak	316,22	207,49	235,19
	Poporsi Kondisi Sedang Rusak (%)	27,39	17,96	20,36
3.	Kondisi Rusak	274,06	338,96	319,01
	Poporsi Kondisi Rusak (%)	23,74	29,34	27,61
4.	Kondisi Rusak Berat	246,55	213,35	245,58
	Poporsi Kondisi Rusak Berat (%)	21,35	18,47	21,26
5.	Jalan secara keseluruhan	1.154,55	1.155,35	1.155,35

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2010

Gambar 2.10
Grafik Kondisi Jalan di Kabupaten Bandung
Tahun 2010



B. Rasio Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Panjang jaringan irigasi Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sepanjang 1.044,81 km. Angka ini tidak meningkat bila dibandingkan tahun 2008 maupun 2007. Adapun luas lahan budidaya pada tahun 2007 seluas 33.000 km² menjadi 36.739,75 km² pada tahun 2010. Dengan demikian rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya mencapai 1 : 31 pada tahun 2007 menjadi 1 : 35 pada tahun 2009. Ini artinya bahwa setiap 1 km jaringan irigasi harus mengairi lahan budidaya seluas 31 km² pada tahun 2007 dan seluas 35 km² pada tahun 2010.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai gambaran jaringan irigasi di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008 - 2010.

Tabel 2.17
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	Panjang Jaringan (km)		
		2008	2009	2010
1.	Jaringan primer	77,76	77,76	77,76
2.	Jaringan Sekunder	136,00	136,00	136,00
3.	Jaringan Tersier	831,04	831,04	831,04

No.	Uraian	Panjang Jaringan (km)		
		2008	2009	2010
4.	Panjang Total Jaringan Irigasi	1.044,81	1.044,81	1.044,81
5.	Luas lahan budidaya	36.739,75	36.739,75	36.739,75
6.	Rasio	1 : 35	1 : 35	1:35

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2010

2.1.3.4 Perumahan Rakyat

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

A. Persentase luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman.

Dari tahun 2006 sampai tahun 2010 luas permukiman yang tertata/terorganisir baru seluas 11.649,05 ha atau mencapai 81,84 % dari total luas permukiman di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kabupaten Bandung
Tahun 2009 - 2010

No.	Uraian	2009	2010
1.	Luas area permukiman tertata (ha)	8.044,39	11.649,05
2.	Total Luas area permukiman (ha)	14.297,30	14.297,30
4.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	56,27	81,84

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010.

B. Rasio permukiman layak huni dan Rasio rumah layak huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut.

Sampai tahun 2010, luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung mencapai 707,18 ha (4,5%) dari 1.043,09 ha total luas permukiman. Sedangkan jumlah rumah layak huni mencapai 707.600 buah dari 831.988 rumah tangga di Kabupaten Bandung. Bila diasumsikan satu rumah tangga tinggal di satu unit rumah, maka 93,94 % rumah di Kabupaten Bandung dinyatakan telah layak huni.

Tabel 2.19
Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni
di Kabupaten Bandung Tahun 2009 - 2010

No.	Uraian	2009	2010
1.	Luas permukiman layak huni (ha)	707,18	707,18
2.	Luas wilayah permukiman (ha)	14.297,30	14.297,30
3.	Persentase kawasan permukiman layak huni	4,5 %	4,5%
4.	Jumlah rumah layak huni (unit)	706.851	707.600
5.	Jumlah rumah tangga (RT)	885.674	831.988
6.	Persentase rumah layak huni	79,80 %	85%

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung.

C. Persentase rumah tangga berakses air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Kebersihan (Dinas Pertasih) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Dinas Pertasih melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui : pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau BPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Pertasih belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan /kecamatan di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya Pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan Dinas Pertasih Kabupaten Bandung baru mencapai 9,96 % (316.310 jiwa) terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Bandung (3.174.499 jiwa), dan mencapai 13,69 % terhadap total jumlah penduduk daerah pelayanan (2.310.587 jiwa), dengan jumlah desa yang telah mendapat pelayanan air bersih sebanyak 207 desa dari 276 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil survey/identifikasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung dapat diketahui bahwa cakupan penyediaan air bersih atas swadaya masyarakat lebih besar bila dibandingkan dengan cakupan penyediaan air bersih oleh Pemerintah,

sehingga cakupan keseluruhan penyediaan air bersih di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2009 mencapai 94,03 %. Cakupan pelayanan ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2006, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007. Cakupan pelayanan air bersih tahun 2006 mencapai 85,14 %, tahun 2007 mencapai 95,44 % dan tahun 2008 mencapai 81,95 %.

Berikut adalah data tentang kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dalam kurun tahun 2009 - 2010.

Tabel 2.20
Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih
Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2010

NO	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	669.368	832.806	763.184
2.	Jumlah rumah tangga	816.832	885.674	831.988
3.	Persentase rumah tangga berakses air bersih	81,95	94,03	91,73

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010).

D. Persentase rumah tinggal bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja)

Salah satu Faktor yang menjadi penilaian Rumah layak huni adalah Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut : 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat bahwa jumlah rumah di Kabupaten Bandung yang mempunyai akses sanitasi (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) telah mencapai 98,22 % pada tahun 2008. Kondisi ini menurun menjadi 95,84 % pada tahun 2010.

Berikut adalah data tentang kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2008-2010.

Tabel 2.21
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
(Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja)
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja	802.872	872.082	797.392

No.	Uraian	2008	2009	2010
2.	Jumlah rumah tinggal	816.832	885.674	831.988
3.	Persentase	98,29	98,47	95,84

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2009).

2.1.3.5 Perhubungan

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat di lihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

A. Rasio izin trayek

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.

Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 2.401 izin. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2008-2010). Adapun rasio izin trayek terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2008-2010, masing-masing adalah 0,00077, 0,00076, dan 0,00075. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Rasio Izin Trayek di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Izin Trayek perkotaan	2.141	2.141	2.141
2.	Izin Trayek perdesaan	260	260	260
3.	Jumlah Izin Trayek	2.401	2.401	2.401
4.	Jumlah penduduk	3.127.008	3.172.860	3.215.548
5.	Rasio Izin Trayek	0,00077	0,00076	0,00075

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

B. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Seluruh angkutan umum yang diimpor di Kabupaten umum baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2009 sebanyak 3.926 unit kendaraan dari 4.810 unit kendaraan (81,62 %). Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 75,69 %. Namun jumlah tersebut

menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006, di mana pada tahun 2006 jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir mencapai 83,99 %.

2.1.3.6 Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

A. Sebaran Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Total jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 adalah 3.215.548, meningkat 2,07% dari jumlah penduduk tahun 2009, yaitu 3.148.951 jiwa. Jumlah tahun 2009 meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu : meningkat 1,05 % bila dibandingkan tahun 2008, meningkat 2,5 % bila dibandingkan dengan tahun 2007, dan meningkat 1,4 % bila dibandingkan tahun 2006.

Berikut disajikan Tabel Sebaran Penduduk Per wilayah kecamatan Kabupaten Bandung untuk tahun 2010.

Tabel 2.23
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk		
1	Ciwidey	37,149	35,877	73,026	4,846.92	21
2	Rancabali	24,129	23,571	47,700	14,837.00	4
3	Pasirjambu	40,863	39,095	79,958	23,957.64	4
4	Cimaung	37,029	35,981	73,010	5,500.02	9
5	Pangalengan	69,863	68,980	138,843	19,540.93	5
6	Kertasari	33,281	32,433	65,714	15,207.36	4
7	Pacet	52,276	48,840	101,116	9,193.96	15
8	Ibun	38,619	37,157	75,776	5,456.51	17
9	Paseh	61,278	58,292	119,570	5,102.90	26
10	Cikancung	42,132	40,090	82,222	4,013.63	22
11	Cicalengka	55,336	53,775	109,111	3,599.23	30
12	Nagreg	24,406	23,459	47,865	4,930.29	12
13	Rancaekek	83,225	83,235	166,460	4,524.83	38
14	Majalaya	77,897	73,658	151,555	2,536.46	65
15	Solokanjeruk	39,364	38,193	77,557	2,400.66	33

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk		
16	Ciparay	77,123	73,888	151,011	4,617.57	31
17	Baleendah	114,472	109,852	224,324	4,155.54	66
18	Arjasari	46,290	44,743	91,033	6,497.79	18
19	Banjaran	58,390	56,085	114,475	4,291.79	37
20	Cangkuang	33,116	31,847	64,963	2,461.06	27
21	Pamengpeuk	35,439	34,127	69,566	1,462.32	50
22	Katapang	56,121	53,618	109,739	1,572.46	72
23	Soreang	53,427	50,961	104,388	2,550.68	43
24	Kutawaringin	46,056	43,488	89,544	4,730.26	20
25	Margaasih	68,799	65,611	134,410	1,834.49	82
26	Margahayu	60,830	59,545	120,375	1.054.33	129
27	Dayeuhkolot	57,982	55,352	113,334	1,102.91	105
28	Bojongsoang	53,308	50,668	103,976	2,781.22	40
29	Cileunyi	83,489	80,606	164,095	3,157.51	58
30	Cilengkrang	23,708	22,912	46,620	3,011.94	15
31	Cimendan	53,226	50,986	104,212	5,308.33	26
TOTAL		1,638,623	1,576,925	3,215,548	176,238.67	19

Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2010

B. Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Pada tahun 2008 jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP sebanyak 1.872.488 jiwa. Jumlah ini meningkat menjadi 2.161.004 jiwa pada Tahun 2009. Penduduk yang sudah memiliki KK pada tahun 2008 sebanyak 405.105 jiwa, jumlah ini meningkat menjadi 532,085 pada tahun 2009. Peningkatan ini terjadi pula pada jumlah penduduk yang telah memiliki Akte Kelahiran dan jumlah penduduk (non muslim) yang telah memiliki akte nikah. Jumlah Penduduk yang telah memiliki akte kelahiran pada tahun 2008 berjumlah 2.501.606 jiwa, meningkat menjadi 2.538.288 pada tahun 2009 sedangkan jumlah penduduk (non muslim) yang telah memiliki akte nikah meningkat dari 4.930 pasangan pada tahun 2008 menjadi 5.330 pasangan pada tahun 2009. Bila dilihat selama kurun waktu 4 tahun (tahun 2006-2009), jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah rata-rata mengalami peningkatan, peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte NIKah) selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan
KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah
di Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2010

No.	Kepemilikan	2008	2009	2010
1	KTP			
a.	Sudah Memiliki	1.872.488	2.161.004	2.269.054
b.	Belum Memiliki	546.568	369.536	388.013
2	Kartu Keluarga			
a.	Sudah Memiliki	405.105	532.085	558.689
b.	Belum Memiliki	411.727	353.589	371.268
3	Surat Nikah			
a.	Sudah Memiliki	2.501.606	2.538.288	2.538.288
b.	Belum Memiliki	625.402	634.572	666.301
4	Surat Nikah (Non Muslim)			
a.	Sudah Memiliki	4.930	5.330	5.597
b.	Belum Memiliki	820	420	441

Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2010.

2.1.3.7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

A. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata berjumlah 2-3 orang anak.

Tabel 2.25
Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2009

No.	Uraian	2007	2008	2009
1.	Jumlah anak	2.012.492	2.069.296	2.149.953
2.	Jumlah keluarga	782.127	816.832	885.674
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2-3	2-3	2-3

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2009).

B. Rasio akseptor KB

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Bandung cukup menggembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Bandung mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Bandung saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 455.807 peserta dari 627.110 pasangan usia subur. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008. Adapun rasio akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama kurun waktu tahun 2008-2010 masing-masing adalah 75,80; 75,84 dan 82,01. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Rasio akseptor KB di Kabupaten Bandung
Tahun 2008-2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah PUS	575.767	600.609	627.110
2.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	436.405	473.550	455.807
3.	Jumlah Tidak Ber-KB	149.362	127.059	171.303
4.	Rasio Akseptor KB	75,80	78,84	82,01

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010).

2.1.3.8 Ketenagakerjaan

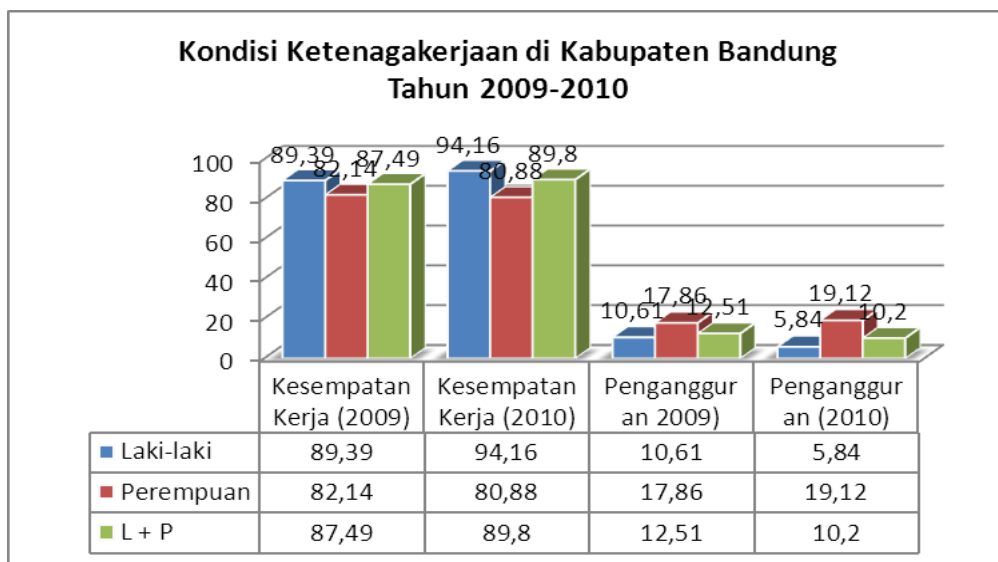
Salah satu Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambarkan dari laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja pada suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), persentase kesempatan kerja, persentase angkatan kerja

yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 53,44 %, terdiri dari : TPAK laki-laki sebesar 70,56 % dan TPAK perempuan sebesar 35,72 %. TPAK tahun 2010 ini meningkat 1,44 poin bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana TPAK tahun 2009 mencapai 52 %. Terdapat ketimpangan yang cukup tajam antara TPAK laki-laki dengan perempuan, perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.

Tingginya TPAK seyogyanya diimbangi dengan besarnya kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Tahun 2010 kesempatan kerja pada lapangan usaha di Kabupaten Bandung mencapai 89,80 % sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,20 %. Angka kesempatan kerja ini mengalami peningkatan sebesar 2,31 poin dibandingkan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 kesempatan kerja mencapai 87,49 %, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 2,31 poin dibandingkan tahun 2009, sedangkan pada tahun 2009 tingkat pengangguran terbuka mencapai 12,51 %. Angka pengangguran ini pada umumnya didominasi oleh perempuan, hal ini disebabkan karena lapangan kerja yang ada belum sesuai dengan ketersediaan kualitas tenaga kerja perempuan di Kabupaten Bandung.

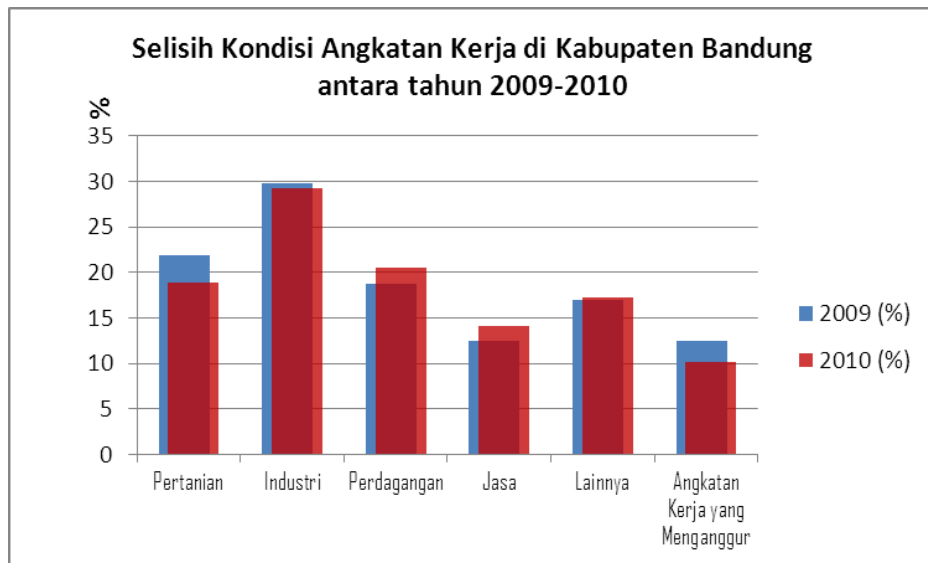
Gambar 2.5



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2009-2010.

Pada umumnya, lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung bergerak pada sektor : pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Pada tahun 2010 penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) mengalami pergeseran dari sektor pertanian dan industri ke sektor perdagangan, jasa dan lainnya, di mana angkatan kerja yang bekerja pada sektor perdagangan mengalami peningkatan sebesar 1,75 poin, yaitu dari 18,75 % pada tahun 2009 menjadi 20,50 % pada tahun 2010. Demikian pula angkatan kerja yang bekerja pada sektor jasa dan lainnya pada tahun 2010 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,65 poin dan 0,2 poin dibandingkan tahun 2009.

Gambar 2.5



No.	Lapangan Pekerjaan	Tahun		Selisih
		2009 (%)	2010 (%)	
A.	Angkatan Kerja yang Bekerja :			
1.	Pertanian	21,87	18,91	-2,96
2.	Industri	29,87	29,23	-0,64
3.	Perdagangan	18,75	20,50	1,75
4.	Jasa	12,49	14,14	1,65
5.	Lainnya	17,02	17,22	0,2
B.	Angkatan Kerja yang Menganggur	12,51	10,20	-2,31

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2010.

2.1.3.9 Penanaman Modal

A. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Salah satu Faktor berjalannya pembangunan adalah tersedianya modal. Hal ini yang menjadikan pengelolaan Penanaman modal menjadi salah satu Bidang penting pelayanan publik dalam menjaring datangnya modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya menjadikan syarat penting, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kabupaten Bandung.

Upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam mencari modal dalam negeri dan modal asing agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung sampai saat ini baru mencapai 28 investor, yaitu terdiri dari 9 investor dalam negeri dan 19 investor asing. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 sebanyak 17 investor dan tahun 2009 sebanyak 30 investor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2010

No.	Uraian	Jumlah Investor		
		2008	2009	2010
1.	PMDN	5	5	9
2.	PMA	12	25	19
3.	Total	17	30	28

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2011.

B. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Jumlah realisasi proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 11 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp 3.401.003.149,2. Jumlah realisasi ini lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah investasi yang disetujui, yaitu 28 proyek sebesar Rp 1.882.376.683,7. Bila dibandingkan dengan investasi pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah investasi pada tahun 2009 menurun sebesar 73,92 % bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan menurun 70,94 % bila dibandingkan dengan tahun 2008.

Tabel 2.28
Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2008	34	877.033.716,00	16	343.628.770,00
2009	22	682.269.594,00	13	89.634.094,00
2010	28	1.882.376.683,7	11	3.401.003.149,2

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2011.

2.1.3.10 Pertanian, Kehutanan dan Peternakan

Sektor Pertanian dan Kehutanan masih menjadi salah satu andalan masyarakat Kabupaten Bandung menjadi mata pencaharian utama, selain itu sektor Pertanian dan Kehutanan secara statistik masih cukup potensial untuk bisa dikembangkan baik dari areal lahan maupun kependudukan yang bergerak disektor ini. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

A. Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Produktivitas padi di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 6,12 ton/ha. Produktivitas ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2009), di mana pada tahun 2006 produktivitas padi mencapai 5,72 ton/ha, tahun 2007 mencapai 5,64 ton/ha, tahun 2008 mencapai 5,53 ton/ha dan tahun 2009 mencapai 6,02 ton/ha. Selain produktivitas padi yang meningkat, produktivitas palawija pun pada tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu 10,7 ton/ha bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009, yaitu dari 8,92 ton/ha pada tahun 2006 menjadi 10,7 ton/ha pada tahun 2010.

Produktivitas sayuran pada tahun 2010 mencapai 141,06 kwt/ha, bila dibandingkan dengan tahun 2007-2009 produktivitas ini meningkat, namun bila dibandingkan dengan tahun 2006 produktivitas tersebut menurun, di mana pada tahun 2006 produktivitas sayuran mencapai 36,38 ton/ha.

Produktivitas buah-buahan pada tahun 2010 mencapai 0,85 kw/pohon, produktivitas ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009, di mana pada tahun 2006 produktivitas buah-buahan mencapai 0,44 kw/pohon dan pada tahun 2009 mencapai 0,59 kw/pohon.

Produktivitas tanaman hias pada tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2007-2008. Pada tahun 2009 produktivitas tanaman hias mencapai 12,49 tangkai/m² sedangkan pada tahun 2007 dan 2008, masing-masing mencapai 2,71 tangkai/m² dan 5,68 tangkai/m².

Produktivitas perkebunan pada tahun 2010 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Pada tahun 2010 produktivitas perkebunan mencapai 1,16 ton/ha sedangkan tahun 2006-2009 masing-masing mencapai 6,42 ton/ha, 2,32 ton/ha, 2,16 ton/ha dan 1,16 ton/ha.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.29
Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan,
Tanaman Hias dan Perkebunan
Kabupaten Bandung Pada Tahun 2008 - 2010

No	Uraian	2008	2009	2010
1	Padi			
	Luas Tanam (ha)	74.676	75.772	84.232
	Luas Panen (ha)	69.595	78.431	84.020
	Produksi (ton)	412.877,00	472.564	513.856
	Produktivitas (ton/ha)	5,53	6,02	61,12
2	Palawija			
	Luas Tanam (ha)	20.064	23.229	26.863
	Luas Panen (ha)	14.823	20.565	26.493
	Produksi (ton)	162.172	214.161	286.054
	Produktivitas (ton/ha)	8,08	9,22	10,7
3	Sayuran			
	Luas Tanam (ha)	25.139	22.007	31.068
	Luas Panen (ha)	31.096	34.619	63.148
	Produksi (ton)	559.753	696.840	1.039.220
	Produktivitas (ton/ha)	22,27	31,66	14,06
4	Buah-buahan			
	Luas Tanam (pohon)	305.218	266.700	200.700
	Luas Panen (pohon yg menghasilkan)	540.071	447.699	623.406
	Produksi (kw)	304.705	266.532	532.874
	Produktivitas (kw/pohon)	0,56	0,59	0,85
5	Tanaman Hias			
	Luas Tanam (M ²)	86.044	39.894	12.965
	Luas Panen (M ²)	115.682	105.036	30.589
	Produksi (tangcai)	488.425	477.150	30.589
	Produktivitas (tangcai/M ²)	5,68	4,06	12,49
6	Perkebunan			
	Luas Tanam (ha)	10.805	11.097	13.643
	Luas Panen (ha)	4.706	5.030	7.482
	Produksi (ton)	23.348	23.367	34.849
	Produktivitas (ton/ha)	2,16	2,11	1,16

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, tahun 2011.

B. Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pada tahun 2010 jumlah produksi daging mencapai 45.183.000 kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 10,50 kg/kapita/th. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 produksi daging mencapai 39.658.461 kg, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bandung.

Konsumsi telur di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 2,08 kg/ kapita/th, dengan jumlah produksi sebanyak 8.323.000 kg. Jumlah konsumsi ini sama dengan tahun 2009 dan meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), yaitu konsumsi telur pada tahun 2006 mencapai 1,66 kg/kapita/th, pada tahun 2007 mencapai 1,62 kg/kapita/th dan pada tahun 2008 mencapai 1,74 kg/kapita/th. Peningkatan jumlah konsumsi tersebut diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi pada setiap tahunnya (2006-2010).

Konsumsi susu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 8,84 kg/kapita/tahun, sementara konsumsi susu nasional adalah sebesar 4,7 sehingga telah melebihi batas standar konsumsi susu nasional. Jumlah konsumsi tahun 2010 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008-2009, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006, di mana pada tahun 2007 jumlah konsumsi susu mencapai 6,90 kg/kapita/th, pada tahun 2008 mencapai 8,28 kg/kapita/th sedangkan pada tahun 2006 mencapai 8,93 kg/kapita/th. Sama halnya dengan jumlah konsumsi, jumlah produksi pun pada tahun 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2010.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah produksi dan konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.30
Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu
Kabupaten Bandung Pada Tahun 2008 – 2010

No	Uraian	2008	2009	2010
1	Daging			
	Produksi (kg)	39.275.391	39.658.461	45.183.000
	Konsumsi (kg/kapita/th)	9,48	9,49	10,5
2	Telur			
	Produksi (kg)	5.881.985	7.128.159	8.323.000
	Konsumsi (kg/kapita/th)	1,74	2,08	2,08
3	Susu			
	Produksi (kg)	57.171.658	59.534.141	62.876.000
	Konsumsi (kg/kapita/th)	8,28	8,62	8,84

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2011.

C. Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi

Tingkat lahan kritis dan kerusakan hutan sekarang ini menyebabkan keprihatinan yang besar bagi semua pihak. Praktek *illegal logging* dan *illegal trade*, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan, pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (GRHLK) merupakan salah satu upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu dengan peran semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan lain-lain) melalui mobilisasi sumber daya.

Luas hutan kawasan Bandung selatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 263,75 ha. Bila dibandingkan dengan tahun 2008, luas hutan ini mengalami peningkatan, namun bila dibandingkan dengan tahun 2006-2007 luas hutan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Luas hutan di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 seluas 3.356,01 ha, pada tahun 2007 seluas 2.028,70 ha dan pada tahun 2008 seluas 224,12 ha. Dari luasan tersebut telah seluruhnya dilakukan rehabilitasi.

Luas lahan kritis di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 mencapai 21.130,00 ha, pada tahun 2007 mencapai 15.330,60 ha dan pada tahun 2008 mencapai 9.056,19 ha. Terhadap lahan kritis tersebut, setiap tahunnya telah dilakukan upaya rehabilitasi, yaitu pada tahun 2008 sebesar 48,79 %, tahun 2009 telah dilakukan upaya rehabilitasi seluas 15,91 %. sehingga pada tahun 2010 luas lahan kritis mencapai 22.076,68 ha. Dari luasan tersebut telah dilakukan rehabilitasi seluas 8,8 %.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2008-2010.

Tabel 2.31
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	Jenis	2008	2009	2010
1.	Luas hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (ha)	LK	4.418,36	1.084,50	2.493,12
		HN BS	182,72	168,62	263,75
		HN BU	41,40	140,40	-
		HN BS + HN BU	224,12	309,02	263,75
	TOTAL		4.642,48	1.393,52	2.756,87
2.	Total luas hutan dan lahan kritis (ha)	LK	9.056,19	6.814,72	22.076,68
		HN BS	182,72	168,62	263,75
		HN BU	41,40	140,40	-
		HN BS + HN BU	224,12	309,02	263,75
	TOTAL		9.280,31	7.123,74	22.340,43
3.	Persentase tase Luas	LK	48,79	15,91	8,8

No.	Uraian	Jenis	2008	2009	2010
	hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	HN BS, HN BS	100,00	100,00	100,00
		LK, HN BS, HN BU	50,03	19,56	8,1

Sumber : *Bapedas Citarum Tahun 2011.*

Ket : LK=Lahan Kritis,
HN BS = Hutan Kawasan Bandung Selatan,
HN BU = Hutan Kawasan Bandung Utara

D. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 11,71 % dari 60.844,90 ha. %tase ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), di mana pada tahun 2006 kerusakan kawasan hutan mencapai 38,06 % dari 64.340,39 ha, pada tahun 2007 mencapai 26,12 % dari 66.456,83 ha, dan pada tahun 2008 mencapai 15,82 % dari 58.645,83 ha.

Tabel 3.32

Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	Jenis	2008	2009	2010
1.	Luas Kawasan Hutan Yang Rusak	HR/LK	9.056,19	6.814,72	78.778.631*
		HN BS	182,72	168,62	263,75
		HN BU	41,40	140,40	-
	TOTAL		9.280,31	7.123,74	78.778.895
2.	Total Luas Kawasan Hutan	HR	9.914,00	14.617,57	16.113,44
		HN BS	36.893,54	34.458,95	34.458,95
		HN BU	2.053,31	1.983,40	1.983,40
		HK	9.784,98	9.784,98	9.784,98
	TOTAL		58.645,83	60.844,90	62.341
3.	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Rusak		15,82	11,71	-

Sumber : *Bapedas Citarum Tahun 2011*

Ket :
LK=Lahan Kritis,
HN BS = Hutan Kawasan Bandung Selatan,
HN BU = Hutan Kawasan Bandung Utara,
HR = Hutan Rakyat,
HK = Hutan Konservasi
*) di dalam hutan 18.800.835 Ha, diluar hutan 59.971,796 Ha

2.1.3.11 Pariwisata

Sektor Pariwisata Kabupaten Bandung masih sangat potensial untuk dikembangkan ke depannya. Gambaran kondisi Kepariwisata di Kabupaten Bandung secara umum dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

A. Kunjungan Wisata

Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Bandung sejak tahun 2010 sebanyak 53 obyek. Jumlah kunjungan yang sebanyak 4.607.330 orang pada tahun 2010. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2008-2009), di mana pada tahun 2008 sebanyak 4.306.602 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 4.126.434 orang yang berkunjung ke 53 obyek. Dari data tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah pengunjung pada masing-masing obyek wisata sebanyak 50.273 pada tahun 2008, sebanyak 77.857 orang pada tahun 2009 dan sebanyak 86.930 orang pada tahun 2010.

Tabel 2.33
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah obyek wisata (obyek)	49	49	53
2.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	4.306.602	5.458.218	6.069.539
3.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	87.890	111.392	123.869

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2011.

2.1.3.12 Perdagangan dan Perindustrian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

A. Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai Rp 456.850.398,57. Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2008. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 40,14 % yaitu dari Rp 678.528.610,67 pada tahun 2007 menjadi Rp 406.188.974,51 pada tahun 2009.

Tabel 2.34
Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 - 2010

No	Uraian	2008	2009	2010
1.	Nilai Ekspor	507.346.266, 81	406.188.974,51	456.850.398,57
2.	Nilai Impor	-	-	
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor)	507.346.266, 81	406.188.974,51	456.850.398,57

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011.

B. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bandung, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sektor perindustrian. Pada tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 7.796.200.550.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 3.474.795.780.000,00. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46.092.238.720.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 21.734.661.190.000,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 sebesar 16,914 % berdasarkan harga berlaku dan 15,987 % berdasarkan harga konstan. prosentase kontribusi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009), yaitu %tase kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2006 berdasarkan harga berlaku mencapai 15,062 %, pada tahun 2007 mencapai 15,342 %, pada tahun 2008 mencapai 15,684 % dan pada tahun 2009 mencapai 16,561%, prosentase kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2006 berdasarkan harga konstan mencapai 14,881 %, pada tahun 2007 mencapai 15,092 %, pada tahun 2008 mencapai 15,222 % dan pada tahun 2009 mencapai 15,642 %

C. Pertumbuhan Industri

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan. Total jumlah industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2009, yaitu dari 722 industri menjadi 741 industri pada tahun 2010. Peningkatan ini terjadi pada industri kecil, dimana pada tahun 2008 berjumlah 331 industri dan pada tahun 2010 berjumlah 374 industri.

Tabel 2.35
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 - 2010

No.	Jenis Industri	2008	2009	2010
1.	Besar	109	141	152
2.	Menengah	180	213	215
3.	Kecil	331	368	374
	Jumlah	620	722	741

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Aspek Daya saing (*competitiveness*) mengukur kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat suatu daerah. Tolok ukur keberhasilan daya saing menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Meskipun secara data kependudukan kabupaten Bandung, Mata pencaharian Masyarakat Kabupaten Bandung di Sektor pertanian tidak lagi menjadi lapangan kerja terbesar (18,91%) tahun 2010, dibandingkan sektor Industri (29,23%) dan Perdagangan (20,50%). Namun Potensi sektor Pertanian masih menjadi yang paling besar di banding dengan sektor-sektor lain sebagai sektor penyedia lapangan kerja Kabupaten Bandung, kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti perdagangan, industri, dan jasa-jasa. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta membawa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Untuk itu kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Bandung. Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Dari ke-9 sektor/lapangan usaha, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor/lapangan usaha industri pengolahan, disusul kemudian oleh sektor/lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran. Sektor/lapangan usaha yang kontribusinya paling kecil adalah sektor/lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Tabel 2.36
Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010
(dlm jutaan rupiah)

No.	Sektor/ Lapangan Usaha	2008		2009		2010	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	2.753.632,27	7,192	3.013.007,10	7,36	3.471.661,92	7.532
2	Pertambangan & Pengecilan	468.303,80	1,223	526.035,13	1,28	580.783,81	1.260
3	Industri Pengolahan	23.275.745,49	60,79	24.565.562,89	60,00	27.471.535,02	59.601
4	Listrik, Gas & Air bersih	642.658,74	1,678	674.520,69	1,65	741.188,33	1.608
5	Konstruksi	648.394,06	1,693	696.720,83	1,70	764.990,68	1.660
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6.005.197,92	15,68	6.780.385,10	16,56	7.796.200,55	16.914
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.766.609,79	4,614	1.795.161,77	4,38	1.933.148,22	4.194
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	792.877,54	2,071	820.502,95	2,00	898.354,49	1.949
9	Jasa-jasa	1.936.315,52	5,057	2.069.321,52	5,05	2.434.375,72	5.282

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009).

Pada tahun 2010 kontribusi sektor/lapangan usaha industri pengolahan mencapai Rp 27.471.535.020.000,00 (59,601 %), secara presentase keseluruhan angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008-2009, di mana pada tahun 2008 sektor/lapangan usaha ini mencapai sebesar 60,79 %, dan pada tahun 2009 mencapai sebesar 60 %. Berbeda dengan sektor/lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, sektor ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2008-2009, sedangkan pada tahun 2010 sektor/lapangan usaha ini berkontribusi sebesar Rp 7.796.200.550.000,00 (16,914 %) sedangkan pada tahun 2008 mencapai sebesar 15,68 %; tahun 2008 mencapai sebesar 16,56 %. Demikian juga dengan sektor Pertanian dari tahun 2008-2010 menunjukkan kecenderungan meningkat, pada tahun 2008 presentasinya 7,192 menjadi 7,532% di tahun 2010. Sektor-sektor lain menunjukkan trend yang menurun.

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari : aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

A. Aksesibilitas daerah

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 1 : 156, ini artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km, dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 156 kendaraan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2007 ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan mencapai 1 : 136, yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 136 kendaraan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2008 lebih banyak atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2007, demikian pula panjang jalan pada tahun 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
di Kabupaten Bandung
Tahun 2008

No.	Uraian	2008
1.	Panjang Jalan	1.345,75
2.	Jumlah Kendaraan :	
	- Roda 4	28.411,00
	- Roda 2	181.605,00
	Jumlah	210.016,00
3.	Rasio	1 : 156

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2008

B. Penataan wilayah

Penataan wilayah di Kabupaten Bandung diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung tahun 2007-2027. Salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2027, rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Bandung terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan, yaitu : kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi : hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi : kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa, kawasan Hankam). Rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung seluas 46.171,71 ha sedangkan rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan budidaya seluas 130,066.96 ha.

Tabel 2.38
Wilayah Pengembangan di Kabupaten Bandung

No	Wilayah Pengembangan (WP)	Kecamatan
1.	WP Soreang	1. Kec. Soreang 2. Kec. Kutawaringin 3. Kec. Katapang 4. Kec. Rancabali 5. Kec. Pasirjambu 6. Kec. Ciwidey
2.	WP Baleendah	1. Kec. Baleendah 2. Kec. Dayeuhkolot 3. Kec. Bojongsoang
3.	WP Banjaran	1. Kec. Banjaran 2. Kec. Pengalengan 3. Kec. Cangkuang 4. Kec. Cimaung 5. Kec. Arjasari 6. Kec. Pameungpeuk
4.	WP Majalaya	1. Kec. Majalaya 2. Kec. Ciparay 3. Kec. Pacet 4. Kec. Kertasari 5. Kec. Paseh 6. Kec. Ibum 7. Kec. Solokan Jeruk
5.	WP Cicalengka	1. Kec. Cicalengka 2. Kec. Nagreg 3. Kec. Cikancung
6.	WP Cileunyi	1. Kec. Cileunyi 2. Kec. Rancaekek
7.	WP Cimenyan – Cilengkrang	1. Kec. Cimenyan 2. Kec. Cilengkrang
8.	WP Margaasih-Margahayu	1. Kec. Margaasih 2. Kec. Margahayu

Sumber : Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung 2007 – 2027

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti : kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman.

C. Fasilitas bank dan non bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya.

Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat dan berdasarkan kegiatan usahanya bank dibagi menjadi : bank konvensional dan bank syariah. Pada tahun 2009, jumlah bank umum di Kabupaten Bandung seluruhnya berjumlah 89 unit, terdiri dari : 81 unit bank umum konvensional dan 8 unit bank umum syariah. Adapun jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) seluruhnya berjumlah 24 unit, ke-24 unit tersebut adalah BPR konvensional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2009
1.	Bank Umum	89
1.1.	Konvensional	81
1.2.	Syariah	8
2.	BPR	24
2.1.	Konvensional	24
2.2.	Syariah	
Jumlah		113

Sumber : Bagian Perekonomian – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.

D. Ketersediaan Restoran, Rumah Makan dan Penginapan

Ketersediaan restoran, rumah makan dan penginapan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan restoran dan rumah makan salah satunya dapat dilihat dari jumlah restoran dan rumah makan. Selama kurun waktu 2008-2010 jumlah restoran, rumah makan dan penginapan yang berhasil di data oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung belum banyak mengalami perubahan.

Tabel 2.40
Jumlah Restoran, Rumah Makan dan penginapan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jenis Usaha Restoran	40	40	40
2.	Jenis Usaha Rumah Makan	467	467	467
3	Jenis penginapan/Hotel	29	29	29

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2010.

2.1.4.3 Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Bandung.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan status desa (persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa).

A. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2009 jumlah tindak kriminal di Kabupaten Bandung sebanyak 6 kasus, yaitu tindak kriminal pembunuhan. Dari data ini dapat diketahui bahwa angka kriminal di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 mencapai 0,02; ini artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 terdapat 0,02 tindak kriminal. Kasus kriminal yang terjadi pada tahun 2006-2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Angka kriminalitas di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah kasus Narkoba	0	0	0
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	1	6	2
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	0	0
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	0	0	3

No.	Uraian	2008	2009	2010
5.	Jumlah kasus Pencurian	2	0	4
6.	Jumlah kasus Penipuan	2	0	0
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	7	6	9
9.	Jumlah Penduduk	3.127.008	3.172.860	3.125.548
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9) per 10.000 jumlah penduduk	0,02	0,02	0.0288

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2010.

B. Kemudahan perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

Jenis perizinan yang ditangani Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 11 jenis perizinan, terdiri dari : izin usaha perdagangan (SIUP), izin tempat usaha (SITU), TDP, IUI, TDI, IMB, HO, , IPT, izin reklame, IPLC dan izin jasa konstruksi. Lamanya waktu untuk pengurusan izin tersebut serta jumlah persyaratan dan biaya resmi dalam mengurus izin tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung
Tahun 2010

No.	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)
1.	SIUP	5	6	30.000
2.	SITU	5	6	400
3.	TDP	5	5	20.000
4.	IUI	14	10	75.000
5.	TDI	14	5	30.000
6.	IMB	60	12	8.000

No.	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)
7.	HO	14	11	250
8.	IPT	14	14	150
9.	Reklame	-	-	-
10.	IPLC	14	13	6.000.000
11.	Jasa Konstruksi	4	12	100.000

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung Tahun 2010.

C. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah realisasi serta macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2008-2010.

Tabel 2.43
Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah
di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2008-2010
(dalam rupiah)

No	Uraian	2008	2009	2010
1.	<i>Jumlah Pajak Daerah</i>	<i>51.654.333.709,60</i>	<i>47.951.110.528,00</i>	<i>59.385.578.062,00</i>
	Pajak Hotel	521.130.207,60	481.269.352,00	1.122.094.256,00
	Pajak Restoran	2.022.405.964,86	2.486.992.882,00	3.541.972.662,00
	Pajak Hiburan	1.822.568.665,00	2.146.174.144,00	2.063.299.025,00
	Pajak Reklame	1.818.712.879,50	1.599.992.419,00	2.022.621.402,00
	Pajak Penerangan Jalan	45.332.157.472,64	41.035.282.809,00	50.234.236.814,00

No	Uraian	2008	2009	2010
	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C	61.134.120,00	64.681.980,00	108.188.999,00
	Pajak Parkir	76.224.400,00	136.716.942,00	293.164.904,00
2.	Retribusi	36.067.479.245,10	40.870.885.107,00	60.370.841.839,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	29.122.980.499,00	32.380.883.654,00	50.640.948.750,00
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	1.609.269.878,00	1.840.236.134,00	2.451.180.000,00
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	5.335.228.868,10	6.649.765.319,00	8.022.691.887,00

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung Tahun 2011.

D. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha meliputi : Perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Berikut adalah gambaran ketersediaan perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2009.

Tabel 2.44
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2009

No.	Uraian	2008	2009
1.	Jumlah Perda terkait perijinan	-	-
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	4	4
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	1	1

Sumber : Bagian Hukum – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.

E. Status Desa (Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah desa/kelurahan swadaya, swakarya, dan swasembada di Kabupaten Bandung tahun 2008-2009.

Tabel 2.45
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	2008	2009
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	97	97
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	104	104
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	75	75
4.	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	276	276
5.	Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	27,17	27,17

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

B. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2008-2010.

Tabel 2.46
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	927.594	903.756	1.002.197
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	144.693	138.927	126.657
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	1.072.287	1.042.683	1.128.881
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	2.054.721	2.130.177	2.086.657
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)%	52,19	48,95	54,10

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009).

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD 2010-2015

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan Tahunan, yang kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, serta isu strategis dan prioritas pembangunan RPJMD yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2012, merupakan Tahun pertama RKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 – 2015, dan merupakan masa transisi dari RPJMD 2005 – 2010 ke RPJMD 2010 – 2015. Sedangkan RPJMD 2010 – 2015 adalah Periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP 2005 – 2025.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan Tahunan, keadaan Tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, serta isu strategis dan prioritas pembangunan RPJMD yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan RKPD tahun 2011 merupakan salah satu acuan untuk penyusunan RKPD tahun 2012, berikut merupakan prioritas Pembangunan RKPD tahun 2011 :

1. Kualitas pelayanan birokrasi
2. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan Pengembangan Pendidikan Vokasional.
3. Aksesibilitas Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
4. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial
5. Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Dasar Wilayah.
6. Aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Sumber Daya.
7. Kemampuan Daya Saing Produk Unggulan Daerah.
8. Kerusakan Lingkungan dan Penanganan Bencana
9. Keterpaduan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan.
10. Menjaga Stabilitas Keamanan dan ketertiban Masyarakat.
11. Menjaga stabilitas ketahanan pangan dan energi

Adanya perbedaan Isu Strategis antara RKPD tahun 2011 dan RKPD tahun 2012 disebabkan RKPD tahun 2011 masih berdasarkan RPJMD 2005-2010, sedangkan RKPD tahun 2012 sudah mengacu pada RPJMD 2010-2015.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 yaitu:

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan tetap terjaga dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung kinerja pembangunan secara umum. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang polhukam
2. Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan (birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar (substentif) dan pelayanan administrasi. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia pada Pemerintahan, terutama pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan perbaikan dan peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga publik perlu terus diperbaiki.

3. Berkaitan dengan lingkungan hidup dan bencana, dalam penanganan banjir dan genangan masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada. Masih tingginya degradasi dan longsor-anlongsoran tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi lebar dan dangkal.
4. Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berbicara mengenai kesehatan yang secara kontinyu diintervensi melalui program/kegiatan yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif. Akselerasi dan perbaikan perlu dilakukan dalam mengantisipasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih belum memadai serta kurang dan belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga medis.
5. Kabupaten Bandung menetapkan *core business* pada sektor pertanian, karena sektor ini memegang peranan yang cukup strategis dengan luas lahan 48,6% dari luas wilayah Kabupaten Bandung digunakan untuk pertanian 20,66%, penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hal ini dapat terlihat juga dari produksi pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Bandung, salah satu contohnya bahwa kabupaten Bandung masih sebagai salah satu produsen padi, sayuran, daging yang berkontribusi terhadap Jawa Barat dan Nasional. Walaupun demikian, kenyataan tersebut belum menjamin kemampuan individu ditingkat RT untuk memperoleh bahan pangan dengan kemampuan individu ditingkat RT untuk memperoleh bahan pangan dengan jumlah cukup. Hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh lemahnya daya beli tetapi juga dalam arti yang sebenarnya di beberapa daerah terpencil distribusi bahan pangan sulit dilakukan, terutama pada musim paceklik. Tantangan kedepan yang harus dihadapi adalah bagaimana hubungan kelembagaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan pangan. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa mandiri pangan dan pengembangan lumbung pangan serta diversifikasi pangan dengan baik, hal ini untuk mengurangi dominasi Komsumsi yang cukup tinggi(102,2 kg/th) dengan pola komsumsi pangan yang lebih baik.
6. Infrastruktur merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Sektor infrastruktur terdiri atas : prasarana transportasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman, yang berperan sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat antar-wilayah. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur harus terus dilakukan dalam mendukung perekonomian. Keterpaduan pembangunan dan saling keterkaitan antar wilayah yang terangkum dalam dokumen ketataruangan masih perlu ditingkatkan efektivitas dan pelaksanaannya, begitu pun dengan pengendaliannya. Beberapa masalah yang masih perlu langkah penanganan lanjutan, di antaranya ialah perlu adanya perda tentang RDTR sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen RDTR Baleendah-Dayeuhkolot, Soreang, Kutawaringin dan Tegalluar. Hal ini menyebabkan terhambatnya rencana dan pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat umum, karena beberapa dokumen harus mengacu terhadap RDTR dan Peraturan Zonasinya.

7. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan standar terkait dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Berbagai program dari beberapa sektor yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam mengurangi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung. Hal tersebut, terutama karena belum terpadunya berbagai program penanggulangan kemiskinan (ego sektor) serta belum terukur secara jelas mengenai upaya pengurangan kemiskinan pada setiap program, hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman data jumlah keluarga miskin sehingga target yang ingin dicapai setiap sektor belum jelas.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

RKPD 2012 Kabupaten Bandung merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2010 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2010. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Dalam hal penentuan Rencana Kegiatan haruslah mengacu pada 3 (tiga) hal, Prioritas Permasalahan yang belum terselesaikan dari tahun RKPD 2010, sejalan dengan Isu Strategis RPJMD 2010-2015, Tidak bertentangan dengan Isu Strategis RKP Provinsi dan RKPN tahun 2012. Kemudian dari ketiga acuan diatas disusun menjadi Prioritas Pembangunan RKPD tahun 2012.

Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2012 disusun berdasarkan nomenklatur permendagri nomor 13 tahun 2006 juncto permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan – kegiatan strategis yang diusung oleh SKPD dan wilayah

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 yang belum terselesaikan, Isu Strategis Pembangunan Nasional 2012, Isu Strategis RKP Provinsi tahun 2012 serta pertimbangan lainnya terkait permasalahan strategis yang aktual dan faktual, maka dirumuskan **Isu Strategis** yang akan menjadi bahan kebijakan dalam perencanaan kegiatan Tahun 2012.

Isu Strategis yang akan ditetapkan dalam RKPD 2012 tidak terlepas dari tema pembangunan nasional Tahun 2012 yaitu "*Percepatan dan perluasan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat*", isu strategis provinsi serta isu strategis yang aktual dan faktual. Isu Pembangunan Nasional 2011 meliputi :

1. Memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin
3. Pembangunan inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan peran serta semua pemangku kepentingan
4. Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam, bonus demografi potensi industri dan pasar domestik yang besar
5. Penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (pro-environment)

Sedangkan Isu Strategis RKP Provinsi Jawa Barat tahun 2011 adalah:

1. Ketahanan pangan masyarakat
2. Peningkatan desa membangun menuju desa peradaban
3. Kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan
4. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan
5. Apresiasi dan pengembangan budaya daerah serta menggali potensi wisata
6. Kualitas lingkungan dan penanganan bencana
7. Ketersediaan dan infrastruktur wilayah
8. Kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi
9. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga
10. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan
11. Apresiasi dan pengembangan budaya daerah serta menggali potensi wisata
12. Iklim usaha dan jaminan investasi
13. Pemenuhan kebutuhan energi berkelanjutan
14. Permodalan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Dengan memperhatikan Isu Strategis RPJMD 2010-2015, Evaluasi Kegiatan Pada RKPD 2012, dan Isu Strategis RKP Provinsi dan Tema Pembangunan Nasional 2012, maka isu strategis Kabupaten Bandung Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik;
2. Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan kesalehan sosial);
3. Pembangunan Perdesaan dan ketahanan pangan;
4. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. Pembangunan infrastruktur dan Tata Ruang;
6. Kemiskinan.
7. Lingkungan hidup dan bencana alam;

Berdasarkan telaah diatas, dan analisa mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dari tiap SKPD tahun 2010. Diperoleh rancangan awal Prioritas Kabupaten Bandung Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik yang profesional;
2. Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan pendidikan;
3. Peningkatan dan perluasan pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan kesejahteraan petani;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah;
7. Peningkatan kualitas pengelolaan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap sumber daya;

8. Perluasan Pelayanan air bersih dan air baku;
9. Penanggulangan bencana secara terpadu;
10. Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang;
11. Pemantapan pembangunan daerah dan perdesaan;
12. Penguatan budaya lokal dan peningkatan destinasi wisata;
13. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian.

Berikut Hubungan antara Isu Strategis Kabupaten Bandung dengan Prioritas Daerah RKPD tahun 2012

Tabel 2.47
Hubungan antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah RKPD 2012

No.	Isu strategis	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2012
1	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
2	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang professional
		Perluasan Pelayanan air bersih dan air baku
		<i>Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap sumber daya</i>
3	Lingkungan hidup dan bencana alam	Penanggulangan bencana secara terpadu
4	Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan kesalehan sosial)	Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan pendidikan
		Peningkatan dan perluasan pelayanan kesehatan
5	Pembangunan Perdesaan, ketahanan pangan dan energi.	Peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani
		Pemantapan pembangunan daerah dan perdesaan
		<i>Penguatan budaya lokal dan peningkatan destinasi wilayah terpadu</i>
6	Pembangunan infrastruktur dan Tata Ruang	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah
		<i>Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang</i>
7	Kemiskinan	Peningkatan perluasan kesempatan kerja
		Peningkatan sarana dan Prasarana Perekonomian.

Bila dilihat keterkaitan Isu Strategis antara Daerah dan Provinsi dan Nasional. Seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.48
Matriks Hubungan Isu Strategis
Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung

Nasional 2012	Prov. Jawa Barat 2012	RKPD Kab. Bandung 2012
Memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pembangunan Perdesaan, ketahanan pangan dan Energi
Percepatan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Kemiskinan dan Pengendalian Penduduk; • Aksesibilitas Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) • Perbaiki Iklim usaha yang kompetitif dan peningkatan investasi serta pelibatan dunia usaha; • Pengembangan budaya Daerah dan Destinasi Wisata 	Kemiskinan
Pembangunan inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan peran serta semua pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas dan mutu dan pendidikan, peran pemuda dan prestasi olahraga; • Pelayanan Publik bermutu dan kuantitas, kinerja aparatur dan keterbukaan informasi serta menggali karya inovasi masyarakat; • Kinerja pemerintahan desa dan peran masyarakat dalam pembangunan kewilayahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Publik • Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam, bonus demografi potensi industri dan pasar domestik yang besar	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas dan mutu pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); • Ketahanan Energi dan Diversifikasi Sumber Energi 	Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan kesalehan sosial)
Penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (pro-environment)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Wilayah secara merata; • Pengelolaan Bencana, Pengendalian Lingkungan dan Antisipasi perubahan iklim; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dan tata ruang • Lingkungan hidup dan bencana alam

Memperhatikan keterkaitan hubungan antar Isu Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten memberi gambaran bahwa terdapat beberapa agenda bersama yang harus diselesaikan melalui program kegiatan pembangunan di Tahun 2012. Dalam rangka penyelesaian isu strategis tersebut, masing – masing tingkatan pemerintahan (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) diharapkan dapat dalam mengalokasikan anggaran.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Secara umum Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap SKPD dan urusan yang menjadi tupoksi masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain. Namun dalam setiap permasalahan harus selalu diusahakan solusi yang terbaik bagi perkembangan dan kelanjutan pembangunan Kabupaten Bandung, berikut identifikasi permasalahan pembangunan daerah tahun 2010:

Tabel 2.48
Permasalahan Bidang/Urusan Kabupaten Bandung
Tahun 2010

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
1	2	3	4
1	Pendidikan	a. Kendala yang muncul terkait pengembangan pendidikan di Kabupaten Bandung diantaranya dapat dilihat dari perbandingan mutu SDM yang berada di daerah perkotaan cenderung relatif lebih baik dibanding di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena akses ke berbagai fasilitas dan pelayanan masyarakat terutama yang berhubungan dengan pendidikan lebih mudah diperoleh sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang cenderung lebih baik sehingga kesempatan untuk meningkatkan mutu SDM lebih baik.	Pemerataan distribusi tenaga pendidik yang kompeten disertai dengan mekanisme insentif dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana menuju pusat-pusat pengembangan pendidikan, Penyediaan bantuan operasional (transportasi dan biaya) terutama bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan, pengembangan sekolah berbasis rumah (home schooling), serta peningkatan kesehatan dan daya beli masyarakat di daerah pedesaan.
		b. Fakta lain menunjukkan bahwa partisipasi sekolah di Kabupaten Bandung khususnya untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi masih relatif rendah. Hal ini terjadi karena masih rendahnya motivasi orang tua peserta didik untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan lanjutan dan tinggi, serta penerimaan pegawai yang berpendidikan SD/SMP masih lebih banyak diterima oleh dunia usaha dan industri.	Tingginya partisipasi sekolah untuk pendidikan menengah dan tinggi

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		c. Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan relokasi SD yang terkena proyek jalan Lingkar Nagreg, sebagai akibat dari ketersediaan lahan yang tidak memenuhi standar untuk pembangunan USB dan harga pasaran setempat lebih tinggi dari yang telah dianggarkan.	Tersedianya lahan standar untuk pembangunan sekolah baru
		d. Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi, sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum optimal.	Tersedianya tenaga pelelangan Barang jasa yang bersertifikat
		e. Terbatasnya Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.	Tersedianya Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
		f. Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.	Adanya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
		g. Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP.	adanya Perbaikan kerusakan dan tersedianya fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP.
		h. Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan.	Tingginya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan.
		i. Masih adanya pihak rekanan yang tidak sungguh-sungguh dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.	Penyelesaian pihak rekanan dalam penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati
		j. Terlambatnya transfer anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBN.	Adanya anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBN.
		k. Terlambatnya penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi dan APBN.	tersediannya penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi dan APBN.

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
2	Kesehatan	a. Pengembangan kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan belum dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada saat anggaran masih tersedia.	adanya Pengembangan kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan
		b. Pembiayaan kesehatan yang masih cenderung pada aspek kuratif dibandingkan aspek promotif dan preventif yang mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien	Adanya Pemerataan pembiayaan kesehatan pada semua aspek
		c. Masih sulitnya akses jalan menuju lokasi rumah sakit karena belum terlewati kendaraan umum dan lalu lintas yang semrawut.	Penerbitan lalulintas dana akses menuju lokasi rumah sakit
		d. Tingginya angka BOR Rawat Inap Kelas III dan menyebabkan pasien miskin tidak terlayani	Tersedianya gedung rawat inap kelas III
		e. Masih kurang lengkapnya peralatan kesehatan terutama untuk penyakit bedah dan IGD	Tersedianya kelengkapan peralatan kesehatan terutama untuk penyakit bedah dan IGD
		f. Masih kurang lengkapnya dokter spesialisik untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan	Tersedianya dokter spesialis untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan
		g. Dari aspek kuantitas SDM sangat belum memenuhi standar	Meningkatnya kuantitas SDM yang memenuhi standar
		h. Masih mahal dan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Murahnya dan terjangkaunya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
		i. Masih kurang lengkapnya peralatan kesehatan terutama untuk penyakit rujukan	Tersedianya kelengkapan peralatan kesehatan terutama untuk penyakit rujukan
3	Pekerjaan Umum	a. Kondisi dan daya tahan infrastruktur jaringan jalan dan bangunan pelengkapanya dipengaruhi oleh cuaca akibat global warming sehingga mempengaruhi kondisi eksisting dan umur rencana.	Tersedianya infrastruktur jaringan jalan dan bangunan pelengkapanya yang tahan terhadap cuaca

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		b. Kurang terkendalinya pengguna jalan tentang batasan tonase angkutan berat yang diizinkan sesuai dengan kelas jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST).	Terkendalinya pengguna jalan tentang batasan tonase angkutan berat yang diizinkan sesuai dengan kelas jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST).
	Pekerjaan Umum	a. Pembuatan saluran tidak terlepas dari peran serta masyarakat terutama yang melewati rencana pembuatan saluran. Pada implementasinya tidak semua warga bersedia dilewati oleh saluran, hal ini terjadi pada saat pembangunan saluran Cikambuy.	terlaksananya pembuatan saluran serta peran serta masyarakat
		b. Belum tersedianya master plan drainase dan belum terintegrasinya sistem drainase Metropolitan Bandung sehingga penanganannya akan terlihat terpisah-pisah.	Tersedianya master plan drainase dan terintegrasinya sistem drainase Metropolitan Bandung
		c. Sumber air baku untuk irigasi mengalami penurunan dengan disparitas tinggi, yang diakibatkan perubahan fungsi lahan dan semakin sempitnya daerah irigasi.	- Optimalisasi pengaturan dan operasional irigasi.
		d. Alih fungsi lahan beririgasi sulit dikendalikan.	tidak adanya Alih fungsi lahan beririgasi
		e. Garis sempadan saluran irigasi sulit diatur.	Adanya Garis sempadan saluran irigasi yang baku
4	Perumahan	a. Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2010 mencapai 3.006 unit, hal ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 5000 unit.	terlaksananya target Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2010
		b. Cakupan pelayanan air bersih pedesaan yang dilaksanakan Dinas Pertasih Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2010 baru mencapai 16,00 % terhadap total jumlah penduduk daerah pelayanan (2.310.587 jiwa).	Tersedianya dokumen master plan air bersih pedesaan dan sanitasi sehingga memudahkan dalam menyusun target yang sebenarnya untuk setiap tahun berikutnya.
5	Penataan ruang	Pembuatan dokumen RDTR yang mengacu kepada RTRW sampai tahun 2010 baru sebanyak 7 dokumen/kota dari rencana sampai tahun 2010 sebanyak 10 dokumen/ kota.	Adanya dokumen RDTR yang mengacu kepada RTRW akan dilanjutkan kembali pada tahun 2011 sebanyak 3 dokumen/kota sehingga dapat mencapai target 10 dokumen/kota.

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
6	Perencanaan Pembangunan	1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.	Cukupnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.
		2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, terutama pada Bidang Perencanaan.	Tersedianya struktur organisasi yang memadai.
		3. Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga DPA yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran.	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.
		4. Pada tahun anggaran 2010 jadwal kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bandung sangat padat, hal ini mengakibatkan terhadap terbitnya beberapa peraturan daerah.	Terselesainya dokumen kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bandung sesuai dengan jadwal
		5. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.	Ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.
		6. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran.	Optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran.
		7. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan	Bermanfaatnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan
7	Perhubungan	a. Masih banyak terminal-terminal bayangan yang berpotensi mengganggu.	tidak adanya terminal-terminal bayangan yang berpotensi mengganggu.
		b. Meluasnya titik-titik rawan kemacetan dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas.	berkurangnya titik-titik rawan kemacetan sehingga menurunnya kecelakaan lalu lintas.
		Adanya kejelasan status petugas harian lepas (PHL) dan data jumlah PHL	Tertatanya status dan jumlah petugas harian lepas (PHL) .

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		a. Dari jumlah keseluruhan TC yang ada, idealnya untuk pemeliharaan PJU setiap tahunnya adalah sebesar 40 % dari jumlah keseluruhan TC, namun karena terbatasnya anggaran maka pemeliharaan PJU tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya.	Meratanya Anggaran jumlah keseluruhan TC terhadap Pemeliharaan PJU
		b. Faktor keamanan alat-alat PJU seperti contactor magnet, kabel, foto cell, MCB yang masih minim dan kurangnya sarana prasarana seperti kendaraan crane.	Tersedianya kelengkapan keamanan alat-alat PJU dan sarana prasarana seperti kendaraan crane.
		a. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke sungai, terutama masyarakat yang tinggal berdekatan dengan sungai.	Adanya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembuangan sampah ke sungai.
8	Lingkungan Hidup	a. Masih rendahnya partisipasi sekolah dalam Program Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL).	Tingginya partisipasi sekolah dalam Program Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL).
		b. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai
		c. Masih banyak timbunan sampah yang tidak terkelola.	terangkutnya timbunan sampah
9	Pertanahan	a. Masih sulitnya pelaksanaan pembebasan/pengadaan lahan/tanah disebabkan oleh beberapa permasalahan terutama penentuan harga tanah dan administrasi pertanahan;	Adanya koordinasi pelaksanaan pembebasan/pengadaan lahan/tanah disebabkan oleh beberapa permasalahan terutama penentuan harga tanah dan administrasi pertanahan;
		b. Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan;	terselesaikannya permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan;
		c. Masih kurangnya sosialisasi program-program strategis kepada masyarakat yang memerlukan fisik lahan.	banyaknya sosialisasi program-program strategis kepada masyarakat yang memerlukan fisik lahan.
10	Kependudukan dan catatan sipil	a. Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) sehingga sering terjadi data ganda.	Tersedianya data penduduk yang akurat (valid)

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		b. Belum tercapainya Masyarakat Kabupaten Bandung yang sadar hukum dan tertib Adminduk	Meningkatnya kecadaran Masyarakat Kabupaten Bandung akan hukum dan tertib Adminduk
		c. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan	Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan
		d. Kegiatan pendataan belum dapat dilaksanakan, yang dikhawatirkan terjadinya overlap dari sumber anggaran (APBD dan APBN) dalam kegiatan pemutakhiran data.	Terlaksananya pendataan sesuai dengan jadwal
11	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	a. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia pelaksana program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia pelaksana program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
		b. Program dan kegiatan yang dilakukan masih bersipat sosialisasi belum operasional secara teknis	Adanya pendalaman program dalam kegiatan sehingga tercapai dengan baik
		c. Masih Kurangnya data penunjang yang akan mendukung tentang kegiatan Trafiking, KDRT, Perlindungan HAK-hak anak	Tersedianya data penunjang yang akan mendukung tentang kegiatan Trafiking, KDRT, Perlindungan HAK-hak anak
		d. Masyarakat secara umum belum memahami tempat rujukan ketika terjadi pelanggaran terhadap gender dan anak.	Adanya Sosialisasi terhadap Masyarakat secara umum yang belum memahami tempat rujukan ketika terjadi pelanggaran terhadap gender dan anak.
		e. Belum optimalnya pembuat kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan perlindungan anak dan Pemberdayaan Perempuan.	adanya Optimalisasi pembuat kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan perlindungan anak dan Pemberdayaan Perempuan.
12	Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	a. Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program.	a. Tersedianya Petugas Lapangan KB yang berpengalaman melaksanakan mekanisme operasional program
		b. Makin berkurangnya jumlah PLKB dan PKB sebagai petugasfungsional lapangan menjadi 124 orang sehingga perlu penambahan tenaga fungsional program KB.	b. Makin berkurangnya jumlah PLKB dan PKB sebagai petugasfungsional lapangan menjadi 124 orang sehingga perlu penambahan tenaga fungsional program KB.

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		c. Peran Pria dalam KB masih rendah hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya Pencapaian peserta KB baru MOP dan akseptor KB Kondom.	c. Peran Pria dalam KB masih rendah hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya Pencapaian peserta KB baru MOP dan akseptor KB Kondom.
		d. Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.	d. Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
13	Sosial	a. Penanganan pengemis, gelandangan, preman, geng jalaan, PSK yang belum optimal	Penanganan pengemis, gelandangan, preman, geng jalaan, PSK yang belum optimal
		b. Adanya kecenderungan peningkatan kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak	Menurunnya kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak
		c. Penanganan upaya penanggulangan kemiskinan masih bersifat sektoral dan dilakukan oleh masing-masing SKPD	Adanya koordinasi terhadap Penanganan upaya penanggulangan kemiskinan disetiap SKPD
		d. Proses pendataan korban bencana alam masih belum akurat, sehingga mempengaruhi akurasi pemberian jatah logistik dan bantuan lainnya bagi korban bencana.	Tersedianya data korban bencana alam yang akurat.
14	Ketenagakerjaan	a. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum memenuhi standar keahlian / keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha / industri.	tercetaknya tenaga kerja yang memenuhi standar keahlian / keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha / industri.
		b. Masih banyaknya masyarakat pencari kerja	berkurangnya pengangguran
		c. Banyaknya jumlah perusahaan yang kurang modal dan kemampuan manajemen serta pemasaran	Bertambahnya jumlah perusahaan yang berkemampuan manajemen serta pemasaran baik
		d. Banyaknya jumlah penanggungjawab BKK yang belum mempunyai keahlian dalam pemanduan BKK	Tercetaknya penanggungjawab BKK yang capable
		e. Fluktuasi harga selalu berubah dari waktu-kewaktu sesuai dgn pertumbuhan ekonomi	Terjaga Stabilitas ekonomi

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		f. Banyaknya perusahaan dan pekerja yang belum memahami peraturan ketenagakerjaan	terciptanya saling kesepahaman antara perusahaan dan pekerja mengenai peraturan ketenagakerjaan
		g. Tidak adanya pemilihan terhadap Pekerja teladan tingkat kabupaten	adanya pemilihan terhadap Pekerja teladan tingkat kabupaten
		h. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan	adanya pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan
		i. Tingginya kasus-kasus ketenagakerjaan	menurunnya kasus-kasus ketenagakerjaan
		j. Masih rendahnya pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
15	Koperasi, UKM	Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi, manajemen dan wawasan bisnis, di mana hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi UKM/IKM untuk menciptakan peluang usaha.	meningkatnya wirausaha-wirausaha baru yang bisa mempunyai capabilitas memadai untuk berkembang
		Terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil Menengah.	meningkatnya perbankan atau bidang keuangan lainnya yang memberikan permodalan bagi yang Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan bunga rendah
		Masih banyaknya koperasi yang tidak memenuhi persyaratan operasional (tidak/kurang sehat)	banyaknya koperasi yang memenuhi persyaratan operasional (sehat)
		Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang diperhatikan	terbukanya akses pemasaran terhadap pasar industri kecil menengah

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
16	Penanaman Modal	Belum lengkapnya sarana dan prasarana Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Bandung, dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi dan promosi investasi bagi para calon investor;	Tersedianya sarana dan prasarana Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Bandung, dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi dan promosi investasi bagi para calon investor;
		Peluang investasi yang dipromosikan belum memenuhi syarat perbankan sehingga berpengaruh terhadap calon investor yang akan berinvestasi;	Meningkatnya Investor luar
		Regulasi yang baik pusat maupun daerah yang belum sepenuhnya mendukung arus investasi.	Ada Regulasi yang sejalan baik pusat maupun daerah dalam mendukung arus investasi.
		Proyek-proyek yang akan dikerjasamakan masih tidak ditunjang dengan regulasi dalam bentuk insentif sehingga menjadi daya tarik mitra dari kalangan swasta untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah;	Tersusunnya regulasi mengenai insentif terhadap investor-investor baru;
		Belum siapnya pihak swasta untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dibidang proyek-proyek infrastruktur;	meningkatnya pihak swasta yang melakukan kerjasama dengan pemerintah dibidang proyek-proyek infrastruktur;
		Terbitnya ijin dari pusat menyangkut investasi dalam realisasinya cukup lama	adanya pelayanan yang cepat dan profesional terhadap Terbitnya ijin dari pusat menyangkut investasi
		Kesadaran pengusaha untuk membuat laporan belum optimal	Tingginya Kesadaran pengusaha untuk membuat laporan belum optimal
		Kegiatan usaha yang tidak memperhatikan potensi daerah	adanya kesadaran terhadap Kegiatan usaha untuk memperhatikan potensi daerah
		Terlalu banyaknya perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasinya	Terciptanya standar dokumen-dokumen perijinan yang profesional namun lebih taktis.
		Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan perlunya investasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya investasi bagi pembangunan daerah
		SDM pengelola perijinan yang harus ditingkatkan	meningkatnya profesionalisme dan SDM pengelola perijinan
17	Kebudayaan	Kurangnya kepedulian dan rasa memiliki akan nilai-nilai budaya sunda	meningkatnya kepedulian dan rasa memiliki akan nilai-nilai budaya sunda

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		Belum optimalnya inventarisasi data kebudayaan	Optimalisasi pendataan kebudayaan
		Kurangnya sumberdaya manusia kebudayaan	meningkatnya sumberdaya manusia tentang kebudayaan
		Kurangnya sarana dan prasarana kebudayaan	terbangunnya sarana dan prasarana kebudayaan yang baru
18	Pemuda dan Olahraga	Kurang teridentifikasinya bakat dan potensi pelajar dalam bidang olah raga yang spesifik.	bermunculnya bakat-bakat dan potensi pelajar dalam bidang olah raga .
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana olah raga, terutama di pedesaan.	terbangunnya sarana dan prasarana olah raga, terutama di pedesaan.
		Masih kurangnya pemanfaatan iptek dalam pengembangan olah raga baik dari sarana maupun prasarananya.	bertambahnya pemanfaatan iptek dalam pengembangan olah raga baik dari sarana maupun prasarananya.
19	Kesbangordagri	Masih banyaknya rumah tinggal yang dijadikan tempat peribadatan di wilayah Kabupaten Bandung	Adanya kesadaran dari warga untuk memahami kerukunan agama
		Masih banyaknya sempalan- sempalan aliran keagamaan di wilayah Kabupaten Bandung	
		Adanya sejumlah tempat di Kabupaten Bandung yang diindikasikan sering terjadinya tempat kegiatan pelatihan kelompok radikal/teroris.	Timbulnya kesepahaman antara masyarakat dan aparat untuk meradam radikalisasi/terorisme
		Banyaknya LSM, ORMAS dan Yayasan yang belum mendaftarkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, tetapi mereka sering melakukan aktivitas/kegiatannya di Wilayah Kabupaten Bandung.	Meningkatnya rasa kesadaran masyarakat tentang pentingnya perijinan
		Semakin banyak dan berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah yaitu dengan berjualan diatas jalur-jalur terlarang seperti berjualan dibahu jalan dan trotoar yang umumnya mengganggu pejalan kaki	Meningkatnya rasa kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan/kepentingan umum, dan tata cara berdagang yang baik
		Makin banyaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung	banyak terbongkarnya penjualan minuman keras beralkohol yang terselubung
		Masih banyaknya jumlah penyandang masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bandung	berkurangnya jumlah penyandang masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bandung

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		Masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan daerah	Bertambahnya kesadaran akan pentingnya tertib peraturan daerah
		Masih banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan asset pemerintah dan masih banyaknya masyarakat yang melanggar Perda No.21 tahun 1996 tentang kepemilikan KTP	berkurangnya masyarakat-masyarakat yang menyalahgunakan asset pemerintah dan aturan Perda No.21 tahun 1996 tentang kepemilikan KTP
		Koordinasi anatar stakeholder dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah belum sibnergis dan terpadu	terjalinnya koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah belum sibnergis dan terpadu
		Program dan kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah belum dipahami dan diketahui masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat, mengingat BPBD Kabupaten Bandung baru trbentuk melalui Perda No. 11 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010.	bertambahnya pemahaman tentang fungsi dan wewenang BPBD
20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	a. Sistem pelaporan dari tingkat kecamatan dan kelurahan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya (masih terdapat keterlambatan).	bertambahnya pemahaman tentang pelaporan dari tingkat kecamatan dan kelurahan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya (masih terdapat keterlambatan).
		b. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.	optimalisasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
		a. Dalam pengusulan penerbitan kepbup, MoU, perjanjian dan instruksi bupati data – data yang disampaikan kepada Bagian Hukum tidak dilengkapi dengan lampiran – lampiran data produk hukum yang mendasari proses pembuatan produk hukum dimaksud.	meningkatnya koordinasi dengan SKPD terkait berkenaan dengan penerbitan keputusan bupati, MoU, perjanjian dan instruksi bupati.

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		b. Kurangnya pemahaman aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum, sehingga hal ini seringkali menimbulkan salah persepsi dari aparat bahwa setiap permasalahan baik pidana, perdata, maupun Tata Usaha Negara dianggap sama.	bertambahnya pemahaman aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum,.
		c. Kurangnya koordinasi dari aparat/SKPD yang terkait. Pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti pemberian informasi dan data pendukung, sehingga seringkali menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus.	bertambahnya koordinasi dari aparat/SKPD yang terkait.
		d. Masih belum memasyarakatnya JDI Hukum, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat.	Peningkatan pemahaman JDI Hukum, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat.
		a. Masih kurangnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten kepada camat maupun lurah	meningkatnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten kepada camat maupun lurah
		b. Penyajian data potensi wilayah baik tingkat kecamatan maupun desa kurang lengkap sehingga tingkat validitasnya cenderung rendah.	tersedianya data-data Penyajian data potensi yang valid
		c. Aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah, khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan belum terakomodir seluruhnya pada tahun anggaran 2010, hal ini terkait dengan besaran anggaran.	Meningkatnya pemahaman tentang Aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah, khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan belum terakomodir seluruhnya pada tahun anggaran 2010, hal ini terkait dengan besaran anggaran.
		a. Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang belum memenuhi azas ketaatan peraturan perundang – undangan, perwaktuan dan tertib administratif.	a. Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang belum memenuhi azas ketaatan peraturan perundang – undangan, perwaktuan dan tertib administratif.

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		b. Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.	b. Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
		a. Masih belum optimalnya penyerapan bantuan keuangan sehingga, bantuan keuangan belum seluruhnya dapat direalisasikan, karena data – data penerima bantuan tidak jelas.	a. Masih belum optimalnya penyerapan bantuan keuangan sehingga, bantuan keuangan belum seluruhnya dapat direalisasikan, karena data – data penerima bantuan tidak jelas.
		b. Adanya keterbatasan modal PD. BPR yang bersumber dari penyertaan modal, sehingga belum dapat melayani sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung dalam pemberian kredit dengan bunga yang murah.	b. Adanya keterbatasan modal PD. BPR yang bersumber dari penyertaan modal, sehingga belum dapat melayani sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung dalam pemberian kredit dengan bunga yang murah.
		a. Masih kurangnya pemahaman peserta pemantapan petugas sosial bencana mengenai penanganan bencana alam.	a. Masih kurangnya pemahaman peserta pemantapan petugas sosial bencana mengenai penanganan bencana alam.
		b. Masih kurangnya koordinasi antara SKPD pengolah rekomendasi bantuan yang telah direkomendasikan dengan realisasi yang ada.	b. Masih kurangnya koordinasi antara SKPD pengolah rekomendasi bantuan yang telah direkomendasikan dengan realisasi yang ada.
		a. Kegiatan SIMDA Barang Milik Daerah yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum dapat diselesaikan 100%, dikarenakan masih terdapat data aset SKPD yang belum dapat dirinci secara jelas sehingga perlu dilakukan kegiatan lanjutan untuk tahun anggaran 2011.	a. Kegiatan SIMDA Barang Milik Daerah yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum dapat diselesaikan 100%, dikarenakan masih terdapat data aset SKPD yang belum dapat dirinci secara jelas sehingga perlu dilakukan kegiatan lanjutan untuk tahun anggaran 2011.

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		<p>b. Dalam rangka pengamanan aset milik Pemkab.Bandung khususnya aset tanah sebagai dokumen yang sah wajib dimiliki sertifikat yang diterbitkan dari kantor BPN, namun pada kenyataannya masih adanya kesulitan di dalam pemenuhan persyaratan – persyaratan yang diminta BPN sebagai syarat dapat diterbitkan sertifikat. Penerbitan sertifikat belum dilakukan terkendala dengan tidak adanya asal – usul data kepemilikan.</p>	<p>b. Dalam rangka pengamanan aset milik Pemkab.Bandung khususnya aset tanah sebagai dokumen yang sah wajib dimiliki sertifikat yang diterbitkan dari kantor BPN, namun pada kenyataannya masih adanya kesulitan di dalam pemenuhan persyaratan – persyaratan yang diminta BPN sebagai syarat dapat diterbitkan sertifikat. Penerbitan sertifikat belum dilakukan terkendala dengan tidak adanya asal – usul data kepemilikan.</p>
		<p>c. Penggunaan tanah khususnya yang digunakan sekolah dari SD sampai dengan SMU sebagian besar masih menggunakan tanah – tanah bukan milik pemda. Ada yang menggunakan milik masyarakat maupun milik desa sehingga seringkali timbul gugatan – gugatan dari pemilik terhadap pemda.</p>	<p>c. Penggunaan tanah khususnya yang digunakan sekolah dari SD sampai dengan SMU sebagian besar masih menggunakan tanah – tanah bukan milik pemda. Ada yang menggunakan milik masyarakat maupun milik desa sehingga seringkali timbul gugatan – gugatan dari pemilik terhadap pemda.</p>
		<p>d. Kurangnya pemahaman dari SKPD terhadap prosedur yang harus dilakukan dikala adanya barang milik daerah yang akan dihapuskan sehingga hal ini akan mempengaruhi terhadap perhitungan neraca.</p>	<p>d. Kurangnya pemahaman dari SKPD terhadap prosedur yang harus dilakukan dikala adanya barang milik daerah yang akan dihapuskan sehingga hal ini akan mempengaruhi terhadap perhitungan neraca.</p>
		<p>e. Adanya keterlambatan penyampaian DKBMD dan DKPBMD dari masing – masing SKPD sehingga berdampak pada terlambatnya penyusunan DKBMD dan DKPBMD.</p>	<p>e. Adanya keterlambatan penyampaian DKBMD dan DKPBMD dari masing – masing SKPD sehingga berdampak pada terlambatnya penyusunan DKBMD dan DKPBMD.</p>
		<p>a. Terbatasnya sarana untuk pendistribusian surat, sehingga surat yang sifatnya segera atau mendesak sering terlambat diterima.</p>	<p>a. Terbatasnya sarana untuk pendistribusian surat, sehingga surat yang sifatnya segera atau mendesak sering terlambat diterima.</p>
		<p>b. Arus informasi dari SKPD kurang lancar sehingga terjadinya duplikasi kegiatan dengan SKPD, sehingga sangat mempengaruhi informasi kepada mass media.</p>	<p>b. Arus informasi dari SKPD kurang lancar sehingga terjadinya duplikasi kegiatan dengan SKPD, sehingga sangat mempengaruhi informasi kepada mass media.</p>

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		a. Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Salah satu penyebabnya adalah :	a. Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Salah satu penyebabnya adalah :
		- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.	- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
		- Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak.	- Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak.
		- Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.	- Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.
		- Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah.	- Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah.
		b. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya.	meningkatkan kesadaran hukum kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF.
		c. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.	Luasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
		d. Kurangnya pemahaman aparat mengenai esensi pemberian bantuan hukum, sehingga menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan baik pidana, perdata maupun tata usaha negara adalah sama.	Adanya pemahaman aparat mengenai esensi pemberian bantuan hukum.
		e. Masih adanya ketidaksesuaian proses dan mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.	tidak adanya ketidaksesuaian proses dan mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		Implementasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat sesuai Kepbup Nomor 8 Tahun 2004 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum diikuti oleh juklak dan juknis serta pembinaan dari instansi terkaaitnya.	meningkatnya pemahaman Implementasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat sesuai Kepbup Nomor 8 Tahun 2004.
		a. Bahwa Rancangan Keputusan Bupati Bandung tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Lurah belum di syahkan sehingga tidak berjalan secara optimal mengingat belum terbitnya Keputusan Bupati tentang Kewenangan tersebut.	tersusunnya Rancangan Keputusan Bupati Bandung tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Lurah
		b. Sebagaimana Keputusan Bupati Bandung No 63 Tahun 2001, tentang Tata Laksana Pelayanan Umum bahwa Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan sebagai koordinator pelayanan umum belum diatur, dilengkapi adanya aturan mengenai prosedural, mekanisme serta standar minimum yang berkaitan dengan pelayanan umum tersebut.	tersusunnya standar operasional pelayanan di tingkat Kelurahan.
		Kebijakan pemerintah pusat dalam mengeluarkan peraturan masih dianggap kurang jelas	adanya konsultasi terhadap aturan yang kurang jelas dengan pemerintah pusat.
		a. Perlu adanya penambahan anggaran mengingat tingkat kebutuhan administrasi dan penambahan beban kerja operasional juga meningkat	tercukupinya anggaran kebutuhan administrasi dan bertambahnya beban kerja operasional
		b. Dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengalami kendala sehubungan adanya latar belakang pendidikan yang beraneka ragam sehingga memerlukan pemahaman yang sama mengenai pengawasan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan tenaga kerja profesional di bidang pengawasan, dengan upaya mengikutsertakan dalam pelatihan teknis dan fungsional diantaranya sertifikasi pemeriksaan dan peningkatan kemampuan terhadap pemeriksaan aset

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		c. Kesadaran para pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah masih belum optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan, kurangnya perhatian dan tanggapan Pimpinan satuan kerja yang menjadi objek pemeriksaan terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Fungsional mengakibatkan terjadinya temuan ulang pada pemeriksaan berikutnya	Meningkatnya kesadaran para pimpinan satuan kerja Perangkat Daerah mengenai pentingnya pengawasan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional / APF (BPK-RI) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah / APIP (Irjen, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Bandung), selain itu supaya memutakhirkan data yang dimiliki oleh masing-masing SKPD sesuai dengan data yang ada di DPPK dengan upaya Sosialisasi dalam setiap kesempatan rapat staff, dinas dan koordinasi
		d. Data yang diperlukan oleh auditor sebagai dasar pemeriksaan tidak disajikan secara akurat	Meningkatnya Profesionalisme aparat-aparat tiap SKPD
		e. Kurang tanggapnya Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, baik hasil pengawasan / pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (BPK-RI) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah / APIP (Irjen, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Bandung)	tumbuhnya kesadaran dan profesionalisme Para kepala SKPD untuk merespon setiap hasil temuan pengawasan
		f. Sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum memadai, diantaranya sarana kantor, kendaraan operasional, serta sarana dan prasarana lainnya	Tercukupinya Sarana penunjang operasional pengawasan
		g. Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengawasan, dengan upaya sosialisasi secara langsung maupun melalui Media Massa baik cetak maupun elektronika

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		h. Dana pengawasan yang dialokasikan dalam APBD tidak seimbang dengan dana penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan lainnya, bertambahnya beban tugas pengawasan seiring dengan Otonomi Daerah belum disertai dengan dukungan dana yang memadai	Terpenuhinya Dana pengawasan
		a. Belum adanya tahap kegiatan evaluasi terhadap kelayakan SOP dan strategi mengaplikasikannya.	Terselenggaranya kegiatan evaluasi terhadap kelayakan SOP dan strategi mengaplikasi
		b. Collecting dan scanning takah PNS untuk takah elektronik masih terbatasnya alat scanner (satu unit), ketidaklengkapan berkas pegawai yang layak scan	tersedianya Collecting dan scanning takah PNS untuk takah elektronik
		c. Akuisisi database dan display informasi kepegawaian kadalaman data PNS tidak lengkap, jumlah pegawai tidak sesuai dengan data yang terdapat di SKPD dan PNS kurang peduli dengan data pribadi	Tersedianya database dan display informasi kepegawaian data PNS yang lengkap, dan akurat
21	Ketahanan Pangan	Kurangnya ketersediaan data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD	Tersedianya data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD
		Kurangnya ketersediaan data untuk produksi komoditas pertanian dan konsumsi terhadap pangan dari SKPD	Tersedianya data untuk produksi komoditas pertanian dan konsumsi terhadap pangan dari SKPD
		Terbatasnya ketersediaan data primer dan skunder untuk kajian rantai, pasokan dan pemasaran pangan	Tersedianya data primer dan skunder untuk kajian rantai, pasokan dan pemasaran pangan
		MASih terdapat desa-desa yang realisasinya tidak sesuai pagu dan keterkaitan pembayaran raskin	Adanya kesesuaian antara realisasi dan pagu dan keterkaitan pembayaran raskin
		Sulitnya menentukan lokasi lumbung dan masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung yang baik	Tersusunnya petunjuk pelaksanaan lumbung dan pembinaan pengelolaan lumbung pangan

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		Pemahaman program Desa Mandiri Pangan masih kurang dan masih adanya masyarakat yang belum menerima fasilitasi kegiatan melalui kelompok afinitas	Meningkatnya Pemahaman program Desa Mandiri Pangan
		Kurangnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan	Bertambahnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan
		Pada aspek ketersediaan bahan Pangan (Produksi), masih belum optimalnya pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi yang ada.	optimalisasi pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi yang ada.
22	Pemberdayaan Masy Desa	a. Ketercapaian kegiatan pada umumnya disebabkan karena belum optimalnya SDM di desa dan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pencapaian tujuan kegiatan.	Meningkatnya SDM desa dan partisipasi masyarakat
		b. Tertundanya pelaksanaan Pilkades disebabkan adanya pelaksanaan Pemilukada.	Adanya Penjadwalan ulang untuk pelaksanaan Pilkades
		c. Tertundanya sebagian kegiatan karena belum terpetakannya jadwal kegiatan dalam pencapaian target kinerja	Tersusunnya jadwal kegiatan dari setiap bidang secara terperinci setiap bulan selama satu tahun anggaran
23	Statistik	a. Masih ada SKPD yang belum memahami tentang indikator makro ekonomi maupun sosial secara menyeluruh	Bertambahnya pemahaman SKPD tentang indikator makro ekonomi maupun sosial secara menyeluruh
		b. Ketidakepahamanan tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait	Adanya Kesamaan tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait
24	Kearsipan	Belum optimalnya arsip sejarah dan budaya Kabupaten Bandung yang disimpan di depo arsip daerah	Optimalisasi kearsipan sejarah dan budaya Kabupaten Bandung yang disimpan di depo arsip daerah
		Prasarana gedung depo arsip yang telah memenuhi standar nasional belum dilengkapi dengan sarana perangkat keras dan perangkat lunak kearsipan yang memadai	Tersedianya Sarana dan Prasarana gedung depo arsip yang telah memenuhi standar nasional

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		Belum optimalnya penataan arsip di SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab seperti : kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM Kearsipan, Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan	Optimalisasi penataan arsip di SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab
		Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat	Terselenggaranya pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat secara optimal
		Belum optimalnya pemahaman, wawasan dan pengetahuan pejabat fungsional arsiparis dan petugas pengelola kearsipan terhadap produk-produk hukum atau peraturan-peraturan kearsipan	meningkatnya pemahaman, wawasan dan pengetahuan pejabat fungsional arsiparis dan petugas pengelola kearsipan terhadap produk-produk hukum atau peraturan-peraturan kearsipan
25	Informasi dan komunikasi	Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;	Bertambahnya pegawai dengan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
		Tingkat pemanfaatan dan efektivitas kegiatan bidang teknologi informasi, tidak merata di semua kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara rutin, untuk menemukan kendala yang terjadi di lapangan dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan ulang jika diperlukan. Adanya surat dari Sekretaris Daerah perihal Pemanfaatan Sarana Prasarana TIK di lingkungan kecamatan;
		Tidak semua lokasi kunjungan mempunyai kekuatan sinyal yang baik, sehingga berpengaruh terhadap media akses internet yang digunakan oleh Tim M-CAP (Mobile Community Access Point);	Tercovernya kekuatan sinyal secara merata,
		Belum optimalnya upaya penyebaran informasi melalui media pameran, radio, dan majalah Pemda yang disebabkan terbatasnya SDM, sarana dan prasarana;	Terselenggaranya penyebaran informasi melalui media pameran, radio, dan majalah Pemda
		Masih adanya keengganan SKPD untuk mengalihkan penggunaan perangkat lunaknya ke open source;	Meningkatnya Penggunaan software yang open source untuk setiap SKPD .
		Belum seragamnya pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik	adanya keseragam pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
26	Perpustakaan	a. Belum optimalnya penyeleng-garaan semua jenis perpustakaan	adanya peningkatan penyeleng-garaan semua jenis perpustakaan secara optimal
		b. Terbatasnya karyawan/karya-wati Bidang Perpustakaan dalam melayani kebutuhan pemakai/pengguna perpustakaan keliling dan GMB (Gebyar Minat Baca)	Tercukupinya karyawan/karya-wati Bidang Perpustakaan dalam melayani kebutuhan pemakai/pengguna perpustakaan keliling dan GMB (Gebyar Minat Baca)
		c. Masih terbatasnya koleksi majalah dan surat kabar yang didayagu-nakan oleh pemakai	Terpenuhinya/tercukupi koleksi majalah dan surat kabar yang didayagu-nakan oleh pemakai
		d. Belum adanya jabatan fungsional pustakawan	Adanya jabatan fungsional pustakawan
27	P Pertanian	Penerapan Teknologi belum Optimal. Penerapan teknologi terutama teknologi unggul tepat guna, spesifik lokasi, efisien dan ramah lingkungan, baik pada tahapan pra produksi, produksi, pengamanan hasil, maupun pasca panen masih belum optimal dan merata diterapkan di berbagai lokasi. Paket teknologi yang diterapkan sebagian besar masih bersifat rekomendasi umum.	
		Belum tercapainya kontinuitas serta kualitas produksi yang maksimal sehingga dipasaran bebas kita masih kalah bersaing dengan yang lain dan mengakibatkan harga jual pun menjadi minimal,	
		Masih terjadinya flukstasi harga akibat dari cara serta pola tanam para petani	
		Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan penduduk yang masih didominasi oleh kelompok bahan pangan padi-padian.	
		Masih terjadinya peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian.	
		Administrasi kelompok belum lengkap, pemahaman tentang LDPM dan UEP masih kurang	

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		Kurang berkembangnya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis pedesaan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan	
		sistem alih teknologi lemah	
		Masih tingginya ancaman penyakit pada ternak yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha.	
		Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat peternakan dalam melaksanakan usaha budidaya peternakan dan perikanan sesuai dengan standar teknis budidaya.	
		Penanggulangan PHMS di Kabupaten Bandung masih terkendala oleh faktor sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kelembagaan.	
		Kondisi RPH-RPH yang ada di Kabupaten Bandung (tersebar di 9 kecamatan) masih belum sesuai dengan standar teknis, sehingga pelayanan pemotongan ternak menjadi kurang optimal serta masih tingginya tingkat pencemaran badan air oleh limbah peternakan khususnya pada sentra budidaya peternakan sapi perah dan sapi potong.	
		Wilayah pengembangan sapi potong tersebar dan sangat luas sementara jumlah inseminator sapi potong masih terbatas dan masih merangkap dengan tugas lain yaitu sebagai paramedis veteriner	
		Penurunan kualitas air sebagai akibat pencemaran oleh limbah dan keterbatasan lahan budidaya karena alih fungsi lahan.	
		Terbatasnya adopsi teknologi yang menunjang peningkatan kualitas produksi usaha yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah	

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas	
		Sebagai dampak upaya penataan kota kecamatan Pangalengan yang didalamnya mengharuskan dipindahkannya Rumah Potong Hewan ke lokasi bar	
28	Kehutanan	Adanya praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta banyaknya penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama telah mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis di Kabupaten Bandung	Terlaksananya praktek-praktek budidaya pertanian yang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air sehingga akan mengurangi luas lahan kritis
		Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Kabupaten Bandung cukup memprihatinkan sehingga menyebabkan tingkat erosi yang terjadi di Kabupaten Bandung berkisar mulai dari kategori sedang sampai dengan berat	
		Masih kurangnya kesepakatan desa dalam melarang penduduk desa menebang kayu di kawasan hutan dan penebangan liar yang dilakukan pihak luar	
		Masih kurangnya volume fisik yang ditargetkan dan memenuhi kualitas yang dikehendaki	Bertambahnya volume fisik yang sesuai dengan target dan memenuhi kualitas yang dikehendaki
29	Energi dan SDMINeral	Adanya keterbatasan jumlah alat ukur listrik (kWh) di PLN, dan pemesanannya membutuhkan waktu cukup lama sehingga proses "penyalan" listrik mengalami keterlambatan	Tersedianya jumlah alat ukur listrik (kWh) di PLN, sehingga proses "penyalan" listrik tidak mengalami keterlambatan
		Tidak seimbangnnya Recharge dan Discharge air tanah (pengambilan dan pengisian kembali air tanah),	Seimbangnnya Recharge dan Discharge air tanah (pengambilan dan pengisian kembali air tanah),

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		Rendahnya kesadaran dan pengetahuan teknis air tanah dari pelaku usaha pemboran/ perusahaan pembora air tanah	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan teknis air tanah dari pelaku usaha pemboran/ perusahaan pembora air tanah
		Belum optimalnya koordinasi antara pelaksana pengawasan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dengan pengelola pajak air tanah, dimana	
		Belum optimalnya pelaksanaan Good Mining Practice oleh pengusaha pertambangan, antara lain akibat dari rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (rata-rata berpendidikan SMP, SMA/STM) umumnya merupakan pemodal kecil sehingga kegiatan penambangan dilaksanakan secara manual tidak secara mekanis	Adanya Optimalisasi pelaksanaan Good Mining Practice oleh pengusaha pertambangan, antara lain akibat dari rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (rata-rata berpendidikan SMP, SMA/STM) umumnya merupakan pemodal kecil sehingga kegiatan penambangan dilaksanakan secara manual tidak secara mekanis
30	Pariwisata	a. Belum adanya pembinaan yang berkesinambungan terhadap paguyuban mojang jajaka, dalam rangka tindak lanjut dari hasil seleksi pasanggiri Mojang Jajaka.	Adanya pembinaan yang berkesinambungan terhadap paguyuban mojang jajaka, dalam rangka tindak lanjut dari hasil seleksi pasanggiri Mojang Jajaka.
		b. Masih kurangnya materi pameran produk unggulan yang berpotensi dari para pelaku jasa usaha pariwisata di Kabupaten Bandung	banyaknya peminat yang mengikuti materi pameran produk unggulan
		c. Masih belum memadai data kepariwisataan secara komprehensif berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bandung.	memadainya data kepariwisataan secara komprehensif berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bandung.
		d. Belum adanya pembinaan yang berkesinambungan terhadap paguyuban mojang jajaka, kompepar dalam rangka sinergitas kelompok-kelompok tersebut dengan jasa usaha pariwisata dan dengan Pemerintah.	Adanya pembinaan yang berkesinambungan terhadap paguyuban mojang jajaka, kompepar dalam rangka sinergitas kelompok-kelompok tersebut dengan jasa usaha pariwisata dan dengan Pemerintah.
		e. Masih belum memadai data permasalahan kepariwisataan secara komprehensif berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bandung.	adanya Monev yang berkesinambungan yang sesuai dengan potensi pariwisata di Kabupaten Bandung.

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
31	Kelautan & Perikanan	Masih kurangnya volume fisik yang ditargetkan dan memenuhi kualitas yang dikehendaki	Tercukupinya volume fisik yang ditargetkan dan memenuhi kualitas yang dikehendaki
		Masih tingginya ancaman penyakit pada ternak yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha.	Berkurangnya ancaman penyakit pada ternak yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha.
		Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat perikanan dalam melaksanakan usaha budidaya perikanan sesuai dengan standar teknis budidaya.	Meningkatnya pengetahuan, Sikap dan Keterampilan peternak dan Petani ikan melalui diseminasi dan penerapan teknologi Perikanan
32	Perdagangan	a. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan.	Terselenggaranya rutinitas penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan.
		b. Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan masih adanya berat bersih barang yang terdapat pada kemasan tidak sesuai dengan berat fisik sebenarnya.	Tidak adanya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan masih adanya berat bersih barang yang terdapat pada kemasan tidak sesuai dengan berat fisik sebenarnya.
		c. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri dan perdagangan	Tercukupinya tenaga penyuluh di sektor industri dan perdagangan
		d. Masih adanya komoditi LHE yang tidak sesuai dengan standar dan etika label yang berlaku dan masih beredarnya BJLS dan BJPB yang belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Tidak adanya komoditi LHE yang tidak sesuai dengan standar dan etika label yang berlaku dan masih beredarnya BJLS dan BJPB yang belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
		e. Secara teknis mesin pompa BBM atau nozzel selalu mengalami perubahan volume, isi atau takaran yang dapat merugikan konsumen akhir serta masih terdapatnya penggunaan alat UTTP oleh sebagian pedagang yang tidak sesuai dengan ukuran standar yang diatur oleh UUML No. 2 Tahun 1981.	Adanya kesadaran dari SPBU untuk pemeriksaan secara rutin pompa BBM atau nozzel selalu mengalami perubahan volume, isi atau takaran yang dapat merugikan konsumen akhir serta masih terdapatnya penggunaan alat UTTP oleh sebagian pedagang yang tidak sesuai dengan ukuran standar yang diatur oleh UUML No. 2 Tahun 1981.
		f. Untuk mencapai target pendapatan masih kurangnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku.	Meningkatnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku.

No	Urusan	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
		Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya.	
32	Industri	a. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri dan perdagangan.	Tersedianya/tercukupinya tenaga penyuluh di sektor industri dan perdagangan.
		b. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya.	Adanya pemahaman dari perusahaan untuk menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya
		c. Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah.	Meningkatnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah.
		d. Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM.	Meningkatnya akses pemasaran produk IKM.
		e. Masih kurangnya sarana dan prasarana produksi dan permodalan.	Tersedia/terpenuhinya sarana dan prasarana produksi dan permodalan.
33	Ketrasmigrasian	a. Terbatasnya alokasi target penempatan transmigran di wilayah luar Jawa.	Tercukupinya alokasi target penempatan transmigran di wilayah luar Jawa.
		b. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal.	Penambahan waktu pelatihan
		c. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat.	Adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2012, disusun berpedoman pada RKP Tahun 2012 yang dipedomani RPJMN Tahun 2010 – 2014 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 yang dipedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 serta dokumen rancangan RPJMD Tahun 2010-2015. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

a. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

1) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena pertumbuhan ini, dapat menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kesempatan kerja baru bagi rakyat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akumulasi modal dan memacu inovasi teknologi yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan produktivitas, dapat berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima rakyat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Dalam rangka terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2012 diharapkan meningkat rata-rata 6,7 persen per tahun. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan investasi sebesar 11,5 persen, pertumbuhan ekspor sebesar 10,2 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,4 persen, dan pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 6,8 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian dengan rata-rata sebesar 3,2 persen dan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh rata-rata sebesar 5,6 persen (industri pengolahan non migas sebesar 6,3 persen).

a) Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh.

Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan, baik luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN).

Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh, diharapkan tingkat inflasi dapat dijaga sebesar rata-rata 5,5 persen per tahun pada tahun 2012, stabilitas nilai tukar rupiah terjaga, defisit anggaran terjaga pada tingkat 1,4 persen dari PDB dan stok utang pemerintah terhadap PDB menurun menjadi 25,0 persen.

b) Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut.

Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di sisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan skill bagi tenaga kerja sehingga memudahkan untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan begitu, semakin banyak orang terlibat dalam proses pembangunan.

Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui (1) dampak pertumbuhan ekonomi akan meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi, (2) pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. Dengan begitu, mereka yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat kesempatan, dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Selain kebijakan diketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus didukung oleh kebijakan UKM untuk pengembangan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal.

Dalam rangka terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan, pada tahun 2014 target penduduk miskin diharapkan dapat diturunkan menjadi sekitar 8 – 10 persen, dan tingkat pengangguran dapat diturunkan menjadi 6,6 persen.

2) Peningkatan Investasi

Arah kebijakan investasi adalah meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing di seluruh wilayah Indonesia. Strategi untuk mencapai sasaran investasi tahun 2012 antara lain sebagai berikut: (i) penyederhanaan prosedur investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang dilakukan secara bertahap di kabupaten/kota, (ii) mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui penetapan lokasi KEK, (iii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) terutama dalam investasi penyediaan infrastruktur dan energi, dan (iv) meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi melalui peningkatan investasi unggulan daerah (*regional champions*) dan pengembangan sektor unggulan seperti infrastruktur, energi dan pangan; dan (v) meningkatkan upaya penyebaran investasi dan alih teknologi melalui akselerasi pemanfaatan berbagai kebijakan berbagai kebijakan fiskal dan non fiskal terkait peningkatan daya tarik investasi yang telah ada serta meningkatkan penggunaan komponen lokal.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas Peningkatan Investasi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas 1 : Fokus Prioritas Peningkatan Harmonisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Perijinan Investasi

Fokus Prioritas 2 : Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitas Investasi

3) Peningkatan Ekspor

Peran ekspor dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diupayakan untuk terus meningkat, terutama ekspor nonmigas. Oleh sebab itu, untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas dilakukan melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk. Namun demikian, Kebijakan Perdagangan Luar Negeri tersebut akan didukung pula oleh penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

4) Peningkatan Daya Saing Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Prioritas Peningkatan Ekspor diarahkan untuk mendorong peningkatan penerimaan devisa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui penguatan pariwisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi pariwisata bahari dan budaya, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, dan berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan iptek, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun strategi untuk mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan destinasi pariwisata melalui penataan dan penguatan manajemen destinasi pariwisata, peningkatan daya tarik wisata bahari dan budaya; mendorong dan memfasilitasi perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; melakukan konsolidasi akses transportasi mancanegara dalam dan luar negeri; meningkatkan daya

tarik pariwisata di pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan yang mempunyai potensi pariwisata; dan mengembangkan desa wisata melalui PNPM Mandiri;

- b) Mengembangkan usaha, industri dan investasi pariwisata, terutama yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja antara lain melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan penataan kebijakan usaha pariwisata; penyusunan dan penerapan pedoman sertifikasi usaha, pengaturan usaha dan kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan;
- c) Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri melalui peningkatan efektifitas pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar; pengembangan analisa dan informasi pasar; dan memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- d) Mengembangkan sumber daya pariwisata melalui penguatan sumber daya pariwisata dengan mendorong peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia; pengembangan dan penguatan kelembagaan kepariwisataan, dan mendorong peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan.

Kebijakan dan strategi tersebut di atas didukung oleh peningkatan koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, terutama di bidang (a) pelayanan kepabeanan keimigrasian, dan karantina; (b) keamanan dan ketertiban; (c) prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; (d) transportasi darat, laut, dan udara; dan (e) bidang promosi dan kerjasama luar negeri; serta koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan tahun 2012, maka fokus prioritas pembangunan kepariwisataan adalah:

Fokus Prioritas 1: Pengembangan Industri Pariwisata

Fokus Prioritas 2: Pengembangan Destinasi Pariwisata

Fokus Prioritas 3: Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Fokus Prioritas 4: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

5) Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Upaya meningkatkan daya beli masyarakat ditujukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sebagai salah satu komponen permintaan domestik yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat dijaga terutama melalui: (i) menjaga stabilitas harga; (ii) mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial; (iii) meningkatkan kelancaran arus barang untuk menjaga ketersediaan barang terutama bahan pokok; dan (iv) meningkatkan perdagangan dalam negeri untuk mendorong transaksi perdagangan domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha. Penjelasan secara terperinci mengenai upaya menjaga stabilitas harga dapat dilihat pada prioritas bidang stabilitas moneter (harga), sedangkan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dapat dilihat secara lebih terperinci pada Bab I mengenai Pengarusutamaan dan Isu Lintas Bidang.

Upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dilakukan antara melalui kebijakan perdagangan dalam negeri yang diarahkan pada peningkatan penataan sistem distribusi nasional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik.

Adapun strategi yang akan dilakukan dalam perdagangan dalam negeri pada tahun 2012: (a) mendorong upaya integrasi perdagangan antar dan intra wilayah, melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga; (b) meningkatkan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat, pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerja sama yang saling menguntungkan antarpelaku usaha; (c) mendorong pengelolaan transparansi dan risiko harga, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan perdagangan berjangka dan pengelolaan sistem informasi harga; serta (d) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik dan ekonomi kreatif;

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas Peningkatan Daya Beli Masyarakat pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional

Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi

Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan

6) Keuangan Negara

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014, kebijakan fiskal tahun 2012 akan tetap diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan fiskal dapat berkontribusi dalam pencapaian sasaran perluasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, keberlanjutan ketahanan fiskal diupayakan melalui penurunan stok utang pemerintah relatif terhadap PDB dengan meningkatkan penerimaan negara utamanya penerimaan yang berasal dari perpajakan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Adapun arah kebijakan keuangan negara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Pertama, penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui: (a) peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal secara terbatas; (b) merumuskan pembiayaan defisit anggaran sehingga tidak menyebabkan berkurangnya pembiayaan sektor swasta (*crowding out effect*). Kedua, Peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan, administrasi, dan pengawasan perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNBP, baik dari jenisnya maupun perbaikannya. Ketiga, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama ditempuh melalui: (a) penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran; (b) perbaikan sistem administrasi keperbendaharaan demi peningkatan kualitas pelayanan publik; (c) pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Keempat, peningkatan

pengelolaan pinjaman pemerintah yang diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta.

Untuk mencapai arah kebijakan yang dimaksud, terutama terkait dengan perbaikan pengawasan kepebeanaan dan perbaikan sistem administrasi keperbendaharaan demi peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2012 kebijakan baru yang akan ditempuh adalah:

- a) Pengadaan peralatan sarana pengawasan berupa 1 unit body scanning, 2 unit Hand Held Trace Detector, dan 6 unit Trace Detector
- b) 2. Standarisasi Unit Pelayanan Perbendaharaan
- c) Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas maka fokus prioritas optimalisasi pengeluaran pemerintah adalah:
- d) Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
- e) Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Pengelolaan Perimbangan Keuangan
- f) Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Pengelolaan Perbendaharaan Negara
- g) Fokus Prioritas 4: Fokus Prioritas Pengelolaan Kekayaan Negara
- h) Sementara itu Fokus prioritas pengelolaan APBN yang berkelanjutan adalah:
Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran dan Pengendalian Resiko
Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan Negara
Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Pengelolaan dan Pembinaan BUMN

7) Stabilitas Harga

Kebijakan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah termasuk pengamanan pasokan bahan pokok, diarahkan pada peningkatan dan pemantapan koordinasi otoritas fiskal, moneter dan keuangan serta sektor riil (produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor-impor). Hal tersebut disertai dengan peningkatan koordinasi kebijakan kerjasama luar negeri dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan/pertanian, energi dan infrastruktur transportasi, serta peningkatan kapasitas dan peran aktif para pemangku kepentingan daerah dalam pengendalian stabilitas ekonomi di tingkat lokal (Propinsi dan Kabupaten /Kota). Melalui kebijakan tersebut diharapkan laju inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga. Selain itu, upaya tersebut didukung pula oleh upaya pembangunan dan pengembangan sarana distribusi dan pergudangan, pengembangan pasar lelang daerah serta peningkatan perlindungan konsumen.

Adapun strategi yang akan ditempuh antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan terkait lainnya dalam rangka pengendalian inflasi sesuai dengan sasaran yang ditentukan (*inflation targetting framework*).
- b. Menjaga stabilitas harga dan pengamanan produksi/pasokan dan distribusi barang/jasa, terutama bahan makanan pokok yang harganya mudah bergejolak, baik di perkotaan maupun di perdesaan antara lain melalui percepatan pelaksanaan sistem logistik nasional;
- c. Mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat (kementerian/lembaga terkait serta asosiasi produsen/ pedagang dan asosiasi konsumen) maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam

pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga bahan pokok secara intensif. Untuk itu akan didorong perluasan pembentukan tim pengendali inflasi daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait;

- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi untuk mengatasi masalah struktural, seperti percepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi regulasi/kebijakan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, baik di pusat (kementerian/lembaga) maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta upaya-upaya untuk menghilangkan struktur pasar komoditas yang bersifat oligopolis;
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan termasuk pola pikir dunia usaha dan masyarakat bahwa kenaikan harga yang rendah dan wajar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan;
- f. Melakukan kajian-kajian di bidang ketahanan pangan/pertanian dan ketahanan energi dalam rangka optimalisasi subsidi pertanian dan energi, agar dapat dihasilkan kebijakan administered prices yang tepat waktu (time consistent) dan tepat sasaran (well targeted), maupun opsi-opsi kebijakan lainnya (seperti pengaturan konsumsi bbm yang tepat sasaran dan sebagainya).
- g. Meningkatkan peran lembaga konsumen dan lembaga-lembaga survei pemantau harga untuk ikut memantau perkembangan harga di daerah sehingga kenaikan harga selanjutnya dapat cepat diantisipasi.
- h. Meningkatkan upaya-upaya untuk mencegah pembalikan mendadak arus modal ke luar negeri (sudden reversal) sehingga tetap kondusif bagi stabilitas nilai tukar.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas, maka fokus prioritas Stabilitas Harga adalah peningkatan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah.

8) Stabilitas Sektor Keuangan

Pada tahun 2012 arah kebijakan yang terkait dengan stabilitas sektor keuangan adalah meningkatkan ketahanan sektor keuangan melalui:

- a. Pemantapan koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan termasuk kerja sama dengan otoritas pasar modal dan lembaga jasa keuangan di negara lain;
- b. Perkuatan lembaga pengawas jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) termasuk kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung;
- c. Perkuatan kualitas manajemen dan operasional lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan;
- d. Perkuatan perlindungan bagi konsumen/investor lembaga jasa keuangan termasuk pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga jasa keuangan.

Seiring dengan upaya perkuatan ketahanan sektor keuangan, arah kebijakan yang terkait dengan penyaluran dana kepada masyarakat adalah melakukan percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat termasuk peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan (LJK) kepada seluruh masyarakat, terutama yang miskin dalam rangka mewujudkan layanan keuangan yang inklusif (*financial inclusion*) antara lain melalui:

- a. Melakukan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan bukan bank termasuk pengembangan sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro (LKM);
- b. Memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah terutama dalam rangka memperluas cakupan pelayanan lembaga jasa keuangan terutama untuk sektor UMKM dan masyarakat miskin;
- c. Mengembangkan infrastruktur pendukung lembaga jasa keuangan, terutama LKNB dan LKM.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ketahanan sektor keuangan, diperlukan lembaga otoritas jasa keuangan yang kuat untuk melaksanakan pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank secara terpadu, independen, dan akuntabel. Diperkirakan bahwa pembahasan RUU OJK dengan Dewan Perwakilan Rakyat selesai dan diundangkan pada tahun 2011, sehingga pada tahun anggaran 2012 masa transisi pengoperasian OJK akan dimulai. Pada tahun 2012, prioritas yang akan dilakukan adalah penyediaan SDM yang handal dan kompeten, rancang bangun struktur organisasi dan *standard operating procedure* (SOP), pengembangan sistem IT, serta sarana dan prasarana lainnya (seperti gedung kantor dan peralatan lainnya). Oleh karena itu, pembentukan OJK diajukan menjadi inisiatif baru untuk tahun anggaran 2012.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas maka fokus prioritas Stabilitas Sektor Keuangan adalah peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan.

9) Revitalisasi Industri

Pembangunan industri ke depan dilakukan secara lebih fokus pada industri-industri yang memiliki prospek jangka panjang untuk berkembang karena didukung sumber daya alam, sumber daya manusia terampil, dan permintaan pasar yang berkelanjutan. Melalui Peraturan Presiden nomor 28 Tahun 2008, pemerintah telah menetapkan Kebijakan Industri Nasional (*National Industrial Policy*) yang memuat daftar klaster industri prioritas.

Untuk tahun 2012, pembangunan sektor industri diarahkan pada:

- a. Mendukung pencapaian prioritas nasional yang meliputi dukungan pada revitalisasi industri gula dan pupuk, memfasilitasi pembngnan zona industri yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memfasilitasi pembangunan penyulingan minyak bumi (*oil refinery*), serta pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit dan kondest migas.
- b. Mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi (MP3EI) khususnya pengembangan 6 (enam) Koridor Ekonomi, yang meliputi: (1) pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit di Sei Mangke Sumatera Utara dan di Dumai – Kalimantan Timur; (2) pengembangan klaster industri hilir karet di Sorolangun – Jambi, Sei Bambi – Sumatera Utara, dan Muara Enim – Sumatera Selatan; (3) pengembangan klaster industri perkapalan di Lamongan – Jawa Timur; (4) pengembangan klaster industri mesin dan perkakas umum di Karawang – Jawa Barat; serta (5) pengembangan klaster industri besi baja di Batu Licin – Kalimantan Selatan.
- c. Mendukung percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui: fasilitas pembangunan industri semen di Manokwari – Papua Barat, memfasilitas pembangunan pabrik pupuk urea dan petrokimia di Tangguh – Papua, pengembangan industri garam di NTT, serta penumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) kakao, kopi, ubi jalar, rumput

laut, pengolahan ikan, pengolahan kayu, dan pengolahan rumput laut di ketiga provinsi tersebut.

- d. Membantu industri dalam negeri meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi produk-produk impor melalui: penggalakan penggunaan produksi dalam negeri dengan menyediakan data-data tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi produk industri dalam negeri, penguatan SNI yang disertai dengan peningkatan kemampuan infrastruktur laboratorium uji coba di berbagai balai besar dan bali resit dan standardisasi (Baristan).
- e. Mendukung terbangunnya industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (industri hijau).
- f. Mendukung pembangunan yang pro-rakyat miskin (pro-poor) melalui fasilitasi pembangunan kendaraan angkutan umum murah pedesaan.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi oleh BUMN di masa mendatang, maka arah kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi BUMN besar/penting/strategis yang meliputi (i) pembenahan organisasi, (ii) pembenahan budaya korporasi, (iii) peningkatan transparansi penempatan SDM yang tepat di semua tingkatan, (iv) penyiapan penyehatan keuangan, (v) peningkatan hubungan BUMN dengan para pemangku kepentingan;
- b. Penyusunan best practice GCG (good corporate governance);
- c. Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Mendorong BUMN khususnya BUMN sektor energi, ketahanan pangan dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah;
- e. Mendorong peningkatan profitisasi BUMN;
- f. Mendorong peningkatan pendayagunaan aset dan sinergi diantara BUMN;
- g. Mendorong BUMN melakukan kegiatan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan.

10) Daya Saing Ketenagakerjaan

Sesuai dengan RPJMN 2010-2014, prioritas bidang ekonomi Daya Saing Ketenagakerjaan terdiri dari tiga fokus prioritas yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja;
- b. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial;
- c. Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan untuk Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja.

Untuk tahun 2012, kebijakan baru yang akan ditempuh adalah terkait dengan fokus prioritas peningkatan fasilitasi dan perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja. Karena masih tingginya jumlah TKI bermasalah, maka pencegahan dan penanganan TKI bermasalah harus dilaksanakan dengan lebih terintegrasi. Penanganan pengaduan di *crisis center* menjadi inisiatif baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.

11) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Arah kebijakan pembangunan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2012 masih melanjutkan arah kebijakan sesuai RPJMN 2010-2014 dan dilengkapi dengan beberapa arah kebijakan untuk memfasilitasi inisiatif baru sebagai berikut.

- a. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penataan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan UMKM, serta pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi.
- b. Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penyediaan dukungan pemasaran, produksi, kemitraan, investasi dan pengembangan produk unggulan.
- c. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM, yang mencakup pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan, kapasitas dan kompetensi SDM, penyediaan layanan pengembangan bisnis, revitalisasi pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM koperasi dan UMKM.
- d. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif, yang meliputi peningkatan akses permodalan, pengembangan dan pengendalian koperasi simpan pinjam yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolanya, pengembangan jasa keuangan bagi koperasi dan UMKM, dan perluasan KUR.
- e. Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup peningkatan kualitas organisasi, badan hukum, dan ketatalaksanaan koperasi, pengembangan keanggotaan koperasi melalui gerakan masyarakat sadar koperasi, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan pengembangan program pendanaan melalui koperasi.

12) Jaminan Sosial

Sesuai dengan Prioritas Nasional untuk mencapai *universal coverage* pada asuransi kesehatan, maka DJSN telah menyusun *Road Map* Jaminan Kesehatan. *Road Map* tersebut akan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial, terutama kesehatan. Beberapa hal penting yang harus dicapai antara lain:

- a. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan, terutama pada kelompok pekerja informal sektor yang tidak miskin;
- b. Tersedianya nomor identitas tunggal bagi setiap peserta jaminan sosial; dan
- c. Tersedianya paket manfaat kesehatan dasar yang seragam (*equal*) bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mengawali proses pembangunan jaminan sosial lainnya yang juga diamanatkan melalui UU SJSN (Kematian, Kecelakaan Kerja, Pensiun, dan Tabungan Hari Tua), maka beberapa juga akan menjadi agenda nasional, diantaranya:

- a. Tersusunnya perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan SJSN yang mencakup UU BPJS, serta Peraturan Pemerintah turunan UU SJSN yang mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial;
- b. Terwujudnya harmonisasi regulasi di bidang jaminan sosial; dan
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

b. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat, tahun 2012 merupakan tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Jawa Barat, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah pembangunan perekonomian Jawa Barat dapat diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, Perdagangan, hotel dan restoran. Juga kepada sektor yang memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang serta tahan terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor KUMKM dan Pariwisata.

Sedangkan sektor lainnya menjadi pendukung. Kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 pada masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

1. **Sektor Pertanian** : Dengan tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu menyebabkan penurunan produksi pada beberapa komoditas pertanian Jawa Barat serta timbulnya hama-hama penyakit yang menyerang tanaman pertanian. Di samping itu terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk pertanian Jawa Barat maupun Nasional. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka arah pembangunan pertanian Jawa Barat perlu lebih ditekankan kepada peningkatan intensifikasi terutama proteksi tanaman dan hewan, peningkatan kapasitas penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat, peningkatan diversifikasi usaha, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung oleh fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.
2. **Industri Pengolahan** : perluasan produk olahan terutama produk agroindustri melalui pendekatan peningkatan rantai nilai dari hulu sampai hilir;
3. **Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih** : Optimalisasi pemanfaatan energi listrik, gas dan panas bumi sebagai energi alternatif untuk mewujudkan kemandirian energi dan mendukung berkembangnya perekonomian regional Jawa Barat dengan berbasis kepada potensi lokal.

Sebagai syarat percepatan dari pembangunan ekonomi Jawa Barat perlu didukung oleh beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing industri manufaktur;
2. Peningkatan investasi PMA maupun PMDN di Jawa Barat;
3. Pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya didukung infrastruktur;
4. Menginternalisasikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan;
5. Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam bisnis;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, irigasi, listrik, bandara, pelabuhan, pusat pemasaran secara bertahap;
7. Utilisasi energi air dan panas bumi;
8. Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) bagi produk Jabar melalui promosi;
9. Peningkatan skill pelaku ekonomi melalui berbagai strata UMKM dan industri, perdagangan;
10. Penguatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang tepat, fokus dan tepat sasaran, transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas);

11. Peningkatan enterpreneurshif sumberdaya manusia Jawa Barat, melalui peningkatan lingkage antara dunia bisnis dan dunia edukasi diantaranya melalui perbanyakkan sekolah kejuruan.

Rencana utama penguatan sektor pertanian adalah penambahan kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk perluasan produk agroindustri dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekaligus konservasi lingkungan. Tahapan pada tahun 2012 merupakan tahapan perluasan dan pemantapan bagi beberapa program unggulan Jawa Barat antara lain: (1) Pengembangan sistem usaha tani terpadu yang implementasinya melalui Program Gerakan Multi Agribisnis (GEMAR); (2) Pengembangan *agroforestry* di area lahan kritis; (3) Pengembangan ikan keramba di muara sungai sepanjang Pantai Selatan Jawa Barat, yang implementasinya melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Muara Pantai Selatan (GAPURA SELATAN); (4) Pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak, serta pengendalian perikanan tambak di Pantura Jawa Barat, yang implementasinya melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara (GAPURA UTARA); (5) Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEMPITA); dan (7) Pengembangan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri Pangan.

Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya mempertahankan industri yang ada dengan melakukan perbaikan iklim usaha, *product development*, perluasan pasar, aliansi startegi usaha dan pembenahan terhadap hambatan-hambatan untuk memperkuat struktur industri di Jawa Barat lebih kuat. Pada tahun 2011 dari lima kebijakan, yaitu: peningkatan daya saing, penguatan rantai nilai, pengembangan industri kreatif, optimalisasi dan pemantapan keberadaan PPTSP (Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu), dan pendekatan EPR (*Extended Producer Responsibility*). Pengembangan SDM dan teknologi dalam peningkatan daya saing melalui perintisan terwujudnya Greater Bandung Techno Park di kawasan cekungan Bandung dan dalam klaster-klaster industri, sebagai prasyarat bagi peningkatan ekonomi regional Jawa Barat.

Pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada tumbuh kembangnya lokasi dan tipe wisata unggulan di tiap kabupaten/kota di Jawa Barat sesuai karakteristik lokal masing-masing daerah. Pada tahun 2012, terdapat beberapa destinasi wisata yang dikembangkan diantaranya: Destinasi wisata unggulan Cekungan Bandung; Destinasi wisata sejarah kepurbakalaan: Kabupaten Sukabumi (SPA, Meditasi dan Relaxasi), Kabupaten Cianjur (Situs Megalith), Kabupaten Bandung Barat (Gua Pawon) dan Kabupaten Bandung; Destinasi wisata unggulan pilgrimise Sumedang Ciayumajakuning; dan Destinasi wisata unggulan Priangan Timur.

Pada tahun 2012 diharapkan lokasi dan tipe wisata sudah siap beroperasi, meningkatkan destinasi wisata dengan mempromosikan potensi-potensi wisata baru, meningkatkan jumlah pengunjung, ditopang dukungan promosi dan akomodasi wisata yang semakin baik untuk tinggal dalam kunjungan.

Rencana utama pemanfaatan sektor energi panas bumi dan air ditujukan untuk peningkatan utilisasi potensi energi panas bumi dan air dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi domestik terutama untuk sektor manufaktur yang relevan, maupun untuk di jual ke daerah lain. Pada tahun 2012, diharapkan database sudah memadai dan semakin mantap dengan tim pengelola sudah siap dengan pilihan teknologi eksploitasi energi panas bumi dan air.

Dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan, implementasi kebijakan *Common Goal* (CG) diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan ke depan, antara lain: (1) Mengintegrasikan berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan dapat lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program; (2) *output* kegiatan dapat lebih diarahkan untuk secara tegas mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat; (3) Pelaksanaan pembangunan dapat lebih mendorong *team work* dari OPD terkait dan antar Bidang di setiap OPD; (4) Mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan oleh setiap OPD; (5) Mengefisienkan penggunaan anggaran yang relatif terbatas jumlahnya; (6) Mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana; dan (7) Memudahkan dan mengefisienkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Secara kewilayahan Jawa Barat terbagi atas empat wilayah pembangunan yaitu wilayah Bogor, Wilayah Purwakarta, wilayah Cirebon, dan wilayah Priangan. Masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik khas terutama dalam potensi ekonomi berbasis potensi lokal. Untuk itu, kebijakan pembangunan ekonomi pada masing-masing wilayah tersebut diarahkan untuk memacu pembangunan ekonomi berbasis potensi local dalam kerangka pengembangan industri kreatif.

Untuk operasionalnya arah pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan ketersediaan pendanaan pada pemerintah relatif terbatas. Sinergitas pendanaan dari berbagai sumber baik dari masyarakat, sektor swasta, maupun pemerintah (daerah dan pusat) memerlukan pengorganisasian yang lebih kuat untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih baik.

Arah kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, serta dapat meningkatkan IPM sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Ekonomi Jawa Barat diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,2 sampai 6,4 persen di tahun 2011 didorong oleh konsumsi dan semakin membaiknya investasi. Perkembangan indikator makro ekonomi Provinsi Jawa Barat secara terinci disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Rencana Tahun 2011 (**)	Rencana Tahun 2012 (**)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,29	6,09	5,0 - 6,0	6,0 - 6,5
2.	Indeks Gini	0.36	N/A	0,19 - 0,20	0,18 - 0,19
3.	PDRB Perkapita (Rp Juta)	7,29	7,48	7.106 -7.500	7.106 - 7.500
4.	Kemiskinan (%)	11,96	11,27	10.31	9,45
5.	Inflasi (%)	3,09	6,46	4 - 6	3,5 - 5,5
6.	PDRB adhk Tahun 2000 (Rp Trilyun)	302,62	321,87	340,79	363,01
7.	Laju Pertumbuhan Investasi (%)	9,70	17,38	10,00 - 12,00	12,00 - 14,00
8.	IPM	71,64	72,08*	73,25 - 73,40	74,16 - 74,66
	a. Indeks Pendidikan	81,14	81,67*	82,92 - 83,29	83,80 - 84,36
	b. Indeks Kesehatan	71,67	72,00*	73,33 - 73,40	74,16 - 74,66
	c. Indeks Daya	62,10	62,57*	63,53	64,18

No	Indikator	Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Rencana Tahun 2011 (**)	Rencana Tahun 2012 (**)
	Beli				
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,96	10,33	10,47	10,24
10.	Investasi (PMA dan PMDN) (Rp triliun)	30,21	46,60	39,47	43,71
11.	LP Pertanian (%) adhk	13,00	1,00	12,73	12,68
12.	LP Industri (%) adhk	-1,74	2,90	44,54	44,49
13.	LP Perdagangan (%) adhk	10,12	11,77	17,22	17,24

c. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung

Arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012, mengacu kepada Misi Kepala Daerah, yaitu Misi Ketiga : "Memantapkan pembangunan perdesaan" dan Misi keenam : "Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing".

Mayoritas wilayah Kabupaten Bandung adalah perdesaan, oleh karena itu tumpuan pembangunan, salah satunya diarahkan pada wilayah perdesaan. Upaya dalam mewujudkan pembangunan perdesaan yang mantap, menuju Kabupaten Bandung yang "Maju, Mandiri dan Berdaya Saing" adalah melalui peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa; peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa; peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat; penguatan lembaga-lembaga keuangan mikro di desa; peningkatan pendapatan asli daerah desa; peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan; serta pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras.

Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Perekonomian Kabupaten Bandung yang berbasis potensi lokal dalam upaya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah Peningkatan kemampuan kelembagaan UMKM; peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan industri produktif berbasis UMKM; **peningkatan keterampilan kewirausahaan;** penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal; pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM; peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah; **penataan pedagang kaki lima dan asongan;** peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan; peningkatan kualitas SDM pencari kerja; peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja; pengembangan potensi agribisnis; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan; mempermudah akses permodalan; pengembangan kawasan pertanian dan perikanan penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui *One Village One Product (OVOP)*; pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan; pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu; serta pembangunan dan pengembangan kawasan wisata.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011

Rancangan Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran urutan untuk situasi Perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi Perekonomian Kabupaten Bandung tahun 2010 disampaikan dalam karakteristik serta prospek pada tahun 2011.

Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bandung
Tahun 2010 – 2011

No	Indikator	Keadaan Tahun 2010	Proyeksi Tahun 2011
1	PDRB		
	- ADH berlaku (dlm Jutaan Rp)	46.092.238,74	51.890.642,37
	- ADH Konstan (dlm Jutaan Rp)	21.734.661,19	23.012.659,27
2.	PDRB perkapita		
	- ADH berlaku (dlm Jutaan Rp)	14.519,53	15.554,85
3.	LPE (%)	5,88	5,91
4.	Angka Inflasi	5,66	5,83
5.	Laju Investasi (%)	7,17	7,43
6.	Jumlah Pengangguran	130.451	133.796
7.	Jumlah Penduduk Miskin	635.763	652.031

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Indikator-indikator makro yang bersifat ekonomi terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat/pendapatan per kapita.

Perkembangan kegiatan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari besarnya laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung tahun 2010 adalah sebesar 5,88% dan diproyeksikan naik sebesar 0,03 % menjadi 5,91 % pada tahun 2011. Jika melihat LPE Kabupaten Bandung ini masih lebih tinggi bila dibanding rata-rata Propinsi Jawa Barat yang tumbuh sebesar 6,0 -6,5%. Pertumbuhan yang masih positif ini merupakan momentum yang sangat berarti karena hal ini menunjukkan adanya proses *recovery* dalam perekonomian Kabupaten Bandung.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dan besarnya pendapatan per kapita tersebut diperoleh dari hasil bagi antara pendapatan regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Namun perlu diingat bahwa tidak seluruh PDRB Kabupaten Bandung dapat dinikmati oleh seluruh masyarakatnya, hal ini dikarenakan adanya sebagian nilai PDRB yang dibawa ke luar daerah. Oleh karena itu kesejahteraan ini diharapkan makin merata, baik antar golongan pendapatan masyarakat, antar sektor kegiatan/mata pencaharian maupun antar wilayah.

Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 5,66 %, naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,15%, walaupun meningkat namun nilai ini masih digolongkan sebagai inflasi ringan karena dibawah 10% pertahun. Berdasarkan persektor pada tahun 2010 inflasi tertinggi terjadi sektor pertanian yang mencapai 8,03%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,26, sector jasa-jasa sebesar 6,06%, sektor industri pengolahan sebesar 5,59%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,28%, sector listrik, gas dan air bersih sebesar 4,34%, sektor

keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,02%, sektor bangunan/konstruksi sebesar 2,46% dan yang paling kecil dari sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,80%. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar AS cenderung stabil selama tahun 2010 yaitu berada pada kisaran Rp.10.000 – 9.400 per dollar. Membaiknya perekonomian dunia berpengaruh pada Indonesia tahun 2011, sehingga perkiraan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada kisaran Rp.10.000 – 9.500 dan terus membaik hingga pada tahun 2012 sebesar Rp.9.200 per dollar AS.

Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Bandung tahun 2010 sebanyak 635.763 RTS dan proyeksi tahun 2011 sebanyak 652.031 RTS. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk, Sumber daya yang tidak merata, kemampuan penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang dan ketidaksamaan kesepakatan kerja dan berusaha yang dimiliki penduduk serta mentalitas kerja yang masih perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Dengan semakin tingginya komitmen pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diharapkan jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun berikutnya dapat terus menurun sejalan dengan kebijakan pemerintah dan komitmen MDG's untuk menurunkan penduduk miskin menjadi setengahnya pada tahun 2015.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 53,44 %, terdiri dari : TPAK laki-laki sebesar 70,56 % dan TPAK perempuan sebesar 35,72 %. TPAK tahun 2010 ini meningkat 1,44 point bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana TPAK tahun 2009 mencapai 52 %. Terdapat ketimpangan yang cukup tajam antara TPAK laki-laki dengan perempuan, perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.

Tingginya TPAK seyogyanya diimbangi dengan besarnya kesempatan kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Tahun 2010 kesempatan kerja pada lapangan usaha di Kabupaten Bandung mencapai 89,80 % sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,20 %.

Tabel 3.3
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2010

No.	Jenis Kelamin	2010 (%)			
		TPAK	TPAK	Kesempatan Kerja	Pengangguran
1.	Laki-laki	76,32	70,56	94,16	5,84
2.	Perempuan	27,46	35,72	80,88	19,12
	Jumlah	52,00	53,44	89,80	10,20

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM Tahun 2010.

Kontribusi perekonomian tiga terbesar atas dasar harga berlaku tahun 2010 dan 2011 dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan, yaitu dengan kontribusi tahun 2010 sebesar 59,60% dan tahun 2011 sebesar 58,75%. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2010 sebesar 16,991% dan tahun 2011 sebesar 17,52%. Untuk sektor pertanian, kontribusinya pada tahun 2010 sebesar 7,53% dan tahun 2011 sebesar 7,78%.

Berdasarkan tabel 3.3 di bawah ini, secara keseluruhan dapat kita gambarkan sebagai berikut bahwa pada sektor PDRB terdapat pergeseran atau peralihan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dari sektor industri ke sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan jasa serta sektor bangunan (lihat dari selisih kontribusi sektor tahun 2010-2011). Walau secara statistik menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri masih dominan.

Tabel 3.4.
Peranan NTB Atas Harga Berlaku Setiap Kelompok Sektor
Dalam Perekonomian Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2011

No.	Lapangan Usaha	Tahun		Selisih
		2010 (%)	2011 (%)	
A.	Primer			
1.	Pertanian	7,53	7,78	0,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,26	1,23	(0,03)
B.	Sekunder			
3.	Industri Pengolahan	59,60	58,75	(0,85)
4.	Listrik, Gas dan Air	1,61	1,58	(0,03)
5.	Bangunan	1,6	1,68	0,02
C.	Tersier			
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,91	17,52	0,60
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,19	4,11	(0,09)
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,95	1,93	(0,02)
9.	Jasa-jasa	5,28	5,43	0,15
	PDRB	100	100	

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2010-2011.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012.

Dengan arah kebijakan ekonomi makro dan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro ditandai dengan Laju pertumbuhan ekonomi, dimana proyeksi pada tahun 2011 dan 2012 yaitu:

Tabel 3.5
Proyeksi Indikator Makro Tahun 2011 dan 2012

No	Indikator	Proyeksi 2011	Proyeksi 2012
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.299.988	3.387.035
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,63	2,64
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,91	5,50
4	Inflasi PDRB (%)	5,41	
5	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	45,784,564	
6	PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	22,958,300	
7	Jumlah Keluarga Miskin*)	652.031	668.716
8	Laju Pertumbuhan Investasi***) (%)	7,43	7,55

No	Indikator	Proyeksi 2011	Proyeksi 2012
9	PDRB Perkapita pertahun (Rp) atas harga berlaku	15.554,86	17.050,50
10	IPM	75,03	75,66
11	Indeks Pendidikan	86,01	86,23
12	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,15	9,21
13	Angka Melek Huruf (%)	98,53	98,65
14	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,06	70,27
15	Indeks Kesehatan	75,11	75,45
16	Indeks Daya Beli	63,97	65,30
17	Daya Beli (ribuan rupiah)	576,80	582,57

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2010-2011.

Berdasarkan cerminan angka proyeksi indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2011 dan 2012, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap pencapaian, bahkan meningkatkan kondisi perekonomian daerah, yaitu sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari beberapa sektor ekonomi yang menjadi andalan Kabupaten Bandung.
- Stabilitas ekonomi terjaga dengan baik, salah satunya tercermin dari tingkat pertumbuhan investasi yang meningkat dari 7,43% tahun 2011 menjadi 7,55% pada tahun 2012.
- Terjaganya stabilitas ekonomi yang didukung oleh permintaan eksternal yang kuat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan diatas 5%.
- Pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang semakin ditekan melalui beberapa program prioritas dan upaya sinergitas dengan dukungan kebijakan pusat maupun provinsi Jawa Barat.
- Potensi ekonomi yang relatif besar di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata dengan berbasis UMKM dan mengedepankan ekonomi kerakyatan, diharapkan bisa berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentaskan kemiskinan.

3.1.3 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal

Berdasarkan Isu Strategis yang merupakan gambaran umum permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bandung, dapat diklasifikasikan dalam masing-masing isu aspek lingkungan internal dan eksternalnya, sebagai berikut:

1. Pelayanan publik yang profesional

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah aparatur yang sudah memadai • Adanya Sistem dan prosedur Perijinan Satu Pintu 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio jumlah pegawai terhadap pelayan publik cukup memadai • Budaya Good Governance dan Clean Governance. • Adanya ruang partisipasi public
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kualitas SDM • Rendahnya kinerja aparatur 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya implementasi hasil partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Belum jelasnya pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan

2. Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan pendidikan

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan • Tersedianya SDM bidang pendidikan 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Anggaran yang memadai • Adanya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menyelenggaraan pendidikan • Kebijakan pemerintah untuk sektor pendidikan
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya APS SMA/MA/SMK • Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah • Masih rendahnya rasio guru terhadap murid • Rendah kualitas pendidikan guru 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pemahaman orangtua akan pentingnya pendidikan • Rendahnya minat melanjutkan sekolah karena tuntutan ekonomi

3. Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan kesehatan

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya SDM bidang kesehatan • Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya peran serta masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat • Minat swasta untuk berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan cukup tinggi
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan belum merata untuk seluruh wilayah • Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan • Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minat tenaga kesehatan untuk melaksanakan tugas di wilayah perdesaan masih rendah • Aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan masih rendah

4. Peningkatan perluasan kesempatan kerja

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga kerja banyak • 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten penyangga Ibukota Provinsi •
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kualitas SDM • Masih kurangnya akses Informasi bursa kerja 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masuknya tenaga kerja dari luar Kabupaten Bandung • Globalisasi pasar

Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya minat tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru • Tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran tenaga kerja 	

5. Peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi SDA dan SDM yang bekerja di sektor pertanian cukup besar. • Pembinaan kelembagaan dan pelatihan usaha produksi pertanian serta upaya peningkatan ketahanan pangan • Sektor pertanian merupakan sektor andalan (Core business) • Masih tingginya partisipasi masyarakat dan petani dalam kelembagaan ekonomi desa dan kelompok tani ditandai dengan banyaknya lembaga mitra pertanian • Banyak tersedianya lumbung pangan desa • Telah terbentuknya Dewan Ketahanan pangan di Kabupaten Bandung 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberpihakan pemerintah terhadap sektor andalan pertanian dan kebijakan ketahanan pangan semakin meningkat • Cukup banyak dan beragamnya lembaga ekonomi pedesaan penunjang sektor pertanian. • Pasar pertanian kabupaten terbuka lebar baik untuk lokal, nasional maupun pasar global. • Regulasi dan kebijakan pemerintah yang cukup kuat untuk mendorong program ketahanan • Teknologi dan Informasi
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Kelembagaan masih bersifat tradisional • Stakeholder Pertanian masih terbatas untuk mengakses permodalan. • Masih rendahnya kualitas SDM pertanian • Rendahnya posisi tawar produk pertanian • Belum optimalnya program diversifikasi pangan • Jalur distribusi Pangan belum merata kesetiap pelosok daerah • Kualitas, Kuantitas, kontinuitas yang belum terjamin • Kurang optimalnya peranan koperasi unit desa (KUD) dalam pengembangan usaha sektor pertanian. 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya minat generasi muda di bidang pertanian • Maraknya produk pertanian yang masuk ke kabupaten baik dari produk tingkat lokal, nasional maupun global (perdagangan bebas) • Tradisi dan budaya untuk mengubah produk pangan andalan pangan masih rendah • Peningkatan tingkat konsumsi pangan yang ditandai dengan penambahan jumlah penduduk • Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung masih besar • Kurang diminatinya pengembangan sektor pertanian oleh sektor perbankan

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jaringan jalan kabupaten yang relatif baik • Tersedianya Sarana transportasi yang memadai 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya minat swasta untuk membangun sarana dan prasarana • Perkembangan wilayah yang cukup pesat

Internal	Eksternal
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya penyebaran infrastruktur di wilayah • Belum efisiennya pembangunan sarana dan prasarana • Sarana dan prasarana pendukung wilayah kurang memadai 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Topografi wilayah merupakan daerah pegunungan yang rentan terjadinya gerakan tanah/longsor • Curah hujan yang tinggi hampir sepanjang tahun/mengakibatkan kerusakan infrastruktur

7. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyerap tenaga kerja lokal yang cukup besar • Tingkat kreativitas & fleksibilitas cukup tinggi dalam mengembangkan usaha • Sumber bahan baku cukup besar tersedia • Tidak memerlukan modal usaha yang besar • Bahan baku mudah dan tersedia cukup banyak 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM semakin meningkat • Produk Khas UMKM Kabupaten Bandung sangat dikenal dan dimintai konsumen • Pasar terbuka lebar baik untuk lokal, nasional maupun pasar global • Cukup banyak dan beragamnya lembaga ekonomi koperasi non koperasi sebagai mitra UMKM.
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi dan pengelolaan lembaga belum optimal dan masih tradisional • Kurang optimalnya peranan koperasi dalam pengembangan usaha sektor UMKM • Akses permodalan masih terbatas • Lemahnya daya saing produk • Pola kemitraan lembaga belum terjalin optimal • Promosi dan akses pemasaran produk masih terbatas 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Asia Free Trade Area (AFTA) membuat tingkat persaingan semakin tajam. • Semakin maraknya usaha pengolahan produk unggulan daerah dengan basis UMKM

8. Perluasan pelayanan air bersih dan air baku

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber air baku tersedia cukup melimpah. • Adanya Lembaga Pengelola Air Bersih (PDAM dan BPBD) 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi pelanggan sangat besar. • Harga air bisa menutupi biaya produksi.
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pengelolaan Belum Optimal. • Lokasi dan Penyebaran Sumber Mata Air Jauh dari Kawasan Pemukiman 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konservasi lahan yang belum optimal • Meningkatnya Alih fungsi lahan terutama di bagian hulu.

9. Penanggulangan terpadu bencana

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya lembaga penanggulangan bencana • Sinergitas antar tingkatan pemerintahan • Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aturan mengenai penanggulangan bencana • Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya data dan informasi mengenai potensi daerah bencana • Belum terpetakannya daerah rawan bencana 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curah hujan yang tinggi dan tidak menentu • Kondisi topografi berupa dataran tinggi • Sulitnya aksesibilitas menuju daerah rawan bencana • Terjadinya pembangunan di daerah rawan bencana alam

10. Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi wilayah yang cukup luas • Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang memadai • Adanya penegakan hukum lingkungan • Kepedulian seluruh pemangku kepentingan terhadap pengelolaan lingkungan • Nilai ekonomi lahan yang cenderung semakin meningkat • Pola penggunaan lahan berkembang pesat • Tingginya tingkat pembangunan perkotaan di Kabupaten Bandung 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan • Adanya tradisi dan budaya peduli lingkungan • Adanya ketentuan dan peraturan pengelolaan lingkungan • Minat investasi terhadap lahan yang cukup tinggi
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan (pengelolaan sampah) • Masih rendahnya pengawasan terhadap kerusakan lingkungan • Tidak ada batas yang jelas antara kawasan perkotaan dan perdesaan • Masih rendahnya pengembangan wilayah di wilayah perdesaan • Masih kurangnya peta yang memadai 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim <i>global warming</i> (pemanasan global) • Semakin meningkatnya luas lahan kritis • Kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang tinggi • Tingginya tingkat pencemaran dari kegiatan industri • Tingginya tingkat alih fungsi lahan • Terjadinya pembangunan yang tidak memiliki ijin

11. Pemantapan pembangunan daerah dan perdesaan

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya lembaga masyarakat desa • Adanya sarana dan prasarana pendukung pembangunan perdesaan • Adanya badan yang menangani pemberdayaan masyarakat desa 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pembagian kewenangan terhadap pemerintahan desa • Adanya anggaran untuk pembangunan desa yang memadai
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengetahuan SDM masih rendah • Lemahnya pengelolaan lembaga desa • Kesenjangan infrastruktur • Rendahnya budaya gotongroyong di masyarakat 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seringnya kejadian bencana alam • Terjadinya berbagai konflik kepentingan

12. Penguatan budaya lokal dan peningkatan destinasi wisata terpadu

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan kabupaten (core business) • Berkembangnya paguyuban budaya sunda • Banyaknya lembaga paguyuban /asosiasi yang bergerak di sektor wisata dan budaya 	<p>(+) Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan sektor pariwisata pedesaan dan budaya lokal sangat dominan • Regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang mendukung terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah • Tingginya minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata alam dan wisata lainnya
<p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersusunnya data potensi dan permasalahan yang akurat tentang pariwisata kabupaten Bandung • Kurang optimalnya peranan lembaga mitra non pemerintah dalam mengembangkan pariwisata daerah. • Pola kemitraan lembaga belum terjalin optimal dalam pengelolaan objek wisata • Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang objek daerah tujuan wisata (ODTW) • Kurangnya promosi kebudayaan lokal daerah(budaya sunda) 	<p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekanan persaingan dari daerah lain dan dunia luar dalam pengembangan objek wusata daerah dan seni budaya lokal • Kurangnya pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap budaya sunda dan wisata daerah.

13. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan <ul style="list-style-type: none"> Suasana yang kondusif Kerjasama berbagai elemen baik masyarakat maupun pemerintah untuk menjaga keamanan 	(+) Peluang <ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban cukup tinggi Penegakan hukum melalui pendekatan persuasif
(-) Kelemahan <ul style="list-style-type: none"> Terjadinya kebebasan individu yang menyebabkan konflik Terjadinya polarisasi sosial Belum optimalnya Implementasi penegakan hukum 	(-) Ancaman <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya baik kuantitas maupun kualitas kejadian perkara pidana dan perdata Terjadinya migrasi dari luar daerah Terjadinya berbagai konflik kepentingan

14. Peningkatan sarana prasarana perekonomian kerakyatan

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan <ul style="list-style-type: none"> Variasi dan jumlah jenis usaha banyak Banyaknya akses permodalan di lembaga perbankan 	(+) Peluang <ul style="list-style-type: none"> Mudahnya mengikuti mekanisme pasar
(-) Kelemahan <ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya akses permodalan Lemahnya kualitas SDM tentang pengadministrasian Belum adanya skim kredit mikro bagi UMKM melalui lembaga non bank 	(-) Ancaman <ul style="list-style-type: none"> Banyaknya pasar/toko modern

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), dana perimbangan (meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) Lain-lain Pendapatan Yang Syah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya).

a. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 236.553.426.838,35; yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 105.813.342.679,19; Retribusi Daerah sebesar Rp 29.958.312.159,16; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 45.250.000.000,00; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 55.531.772.000,00.

b. Dana Desentralisasi

Selain dari PAD salah satu sumber pendanaan bagi APBD adalah dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada tahun 2012, mendapat dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 1.336.417.562.045,00, terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 135.281.622.105,00; Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.201.135.939.940,00; sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus belum dimasukan menunggu Peraturan Menteri Keuangan, dikarenakan DAK sifatnya *spesifik Grant*.

Terkait dengan kedudukan Pemerintahan Desa sebagai daerah otonom, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Dengan adanya kewenangan Desa tersebut, maka konsekuensinya terdapat dana APBD yang dialokasikan untuk membiayai urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut dalam bentuk Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD). Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Dalam struktur APBD, dana desentralisasi kepada Pemerintahan Desa dimasukkan ke dalam kode rekening Belanja Bagi Hasil.

c. Dana Tugas Pembantuan/APBN

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) kepada Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau Desa dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah. Selanjutnya kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pendanaan dari Kementerian/Lembaga yang merupakan tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Program/Kegiatan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah antara lain urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pertanian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun demikian, sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten belum mendapat informasi tentang Dana Tugas Pembantuan yang akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa pengadministrasian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian dana Desentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan secara bertahap akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

Pada Tahun 2012 alokasi Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan sebesar Rp 129.502.760.000,00 yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 129.502.760.000,00. Sedangkan alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan alokasi Bantuan Keuangan dari Pusat, Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya masih menunggu konfirmasi dari Pusat.

Secara lengkap, proyeksi Pendapatan Tahun 2012 baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang dibandingkan dengan APBD Tahun 2009 dan Tahun 2013, ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Bandung
Tahun 2009 sampai dengan 2013

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Tahun Berjalan 2011	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2012	Proyeksi/Target pada Tahun 2013
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	152.549.655.824,00	199.240.708.310,00	215.448.347.314,00	236.553.426.838,35	287.140.614.542,79
1.1.1.	Pajak Daerah	47.951.110.528,00	59.385.578.062,00	97.746.157.850,00	105.813.342.679,19	151.961.755.178,26
1.1.2.	Retribusi Daerah	40.870.885.107,00	60.254.329.366,00	26.158.989.464,00	29.958.312.159,16	31.717.661.630,93
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	43.280.145.688,00	52.790.345.015,00	44.000.000.000,00	45.250.000.000,00	45.750.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	20.447.514.501,00	26.810.455.867,00	47.543.200.000,00	55.531.772.000,00	57.711.197.733,60
1.2.	Dana Perimbangan	1.444.122.553.979,00	1.436.030.033.073,00	1.459.099.799.650,00	1.336.417.562.045,00	1.306.152.908.501,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	333.279.112.979,00	230.844.123.073,00	155.721.552.650,00	135.281.622.105,00	105.016.968.561,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.080.215.507.000,00	1.086.282.210.000,00	1.203.323.247.000,00	1.201.135.939.940,00	1.201.135.939.940,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	30.627.934.000,00	118.903.700.000,00	100.055.000.000,00	-	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	357.748.700.058,00	408.288.799.780,00	353.956.323.000,00	129.502.760.000,00	129.502.760.000,00
1.3.1.	Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Darurat	44.266.548.000,00	-	-	-	-
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dan Dari Pemerintah Daerah lainnya	112.040.363.851,00	118.058.122.758,00	129.502.760.000,00	129.502.760.000,00	129.502.760.000,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.130.359.000,00	172.051.700.400,00	224.453.563.000,00	-	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	148.311.429.207,00	118.178.976.622,00	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah (1.1 + 1.2 + 1.3)	1.954.420.909.861,00	2.043.559.541.163,00	2.028.504.469.964,00	1.702.473.748.883,35	1.722.796.283.043,79

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Adapun sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya) dan Pembiayaan Daerah (meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah).

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2012 mengacu kepada arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
 - a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
 - c. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - d. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan SKPD Penghasil,
 - f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
 - h. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 masih didominasi oleh belanja pegawai yaitu sebesar Rp 1.114.212.584.151,00 atau 59,87% sedangkan untuk dan belanja publik sebesar Rp 579.484.422.441,00 atau 31,14%.

Namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan realisasi IPM Tahun 2009 yang baru mencapai sebesar 73,39 sehingga diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2012 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah pada tahun 2012 dititikberatkan kepada prioritas pembangunan daerah dan program unggulan Kepala Daerah, yaitu:
 - a. Strategi Peningkatan Pendapatan Pertanian
 - b. Pengembangan Pasar Tradisional
 - c. Penataan PKL
 - d. Pengelolaan Sampah
 - e. Pembuatan Air Minum Mineral
 - f. Penanggulangan Akibat Banjir
 - g. Perbaikan Infra Struktur Jalan
 - h. Peningkatan Derajat Kesehatan
 - i. Penataan Taman Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan
 - j. Pemberdayaan Aparatur Pejabat Tiap Tingkatan
 - k. Wisata Terpadu
 - l. Perbaikan Rumah Kumuh
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
9. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 10% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
11. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
14. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - c) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

- d) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- f) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- g) Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai dan DAK sekurang-kurangnya 10%) kepada Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal Desa dalam melaksanakan otonomi daerah;
- h) Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tabel 3.7.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Bandung
Tahun 2009 s/d Tahun 2013

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Tahun Berjalan 2011	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2012	Proyeksi/Target pada Tahun 2013
1	2	3	4	5	6	7
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,279,421,739,311.38	1,444,066,504,276.70	1,450,973,889,792.00	1,281,451,243,804.94	1,280,861,557,113.53
2.1.1.	Belanja Pegawai	960,281,724,576.00	1,142,263,357,762.00	1,246,523,919,354.00	1,114,212,584,151.00	1,114,212,584,151.00
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	27,377,476,060.00	126,425,099,246.00	67,853,054,000.00	33,755,500,000.00	33,755,500,000.00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	25,421,455,142.00	29,679,615,500.00	16,069,979,382.00	10,248,815,700.00	10,248,815,700.00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa	38,133,822,632.00	30,712,472,971.70	31,526,794,788.00	35,394,636,693.94	34,804,950,002.53
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintahan Daerah	111,572,884,512.00	100,355,898,800.00	80,300,142,268.00	79,139,707,260.00	79,139,707,260.00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	116,634,376,389.38	14,630,059,997.00	8,700,000,000.00	8,700,000,000.00	8,700,000,000.00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,279,421,739,311.38	1,444,066,504,276.70	1,450,973,889,792.00	1,281,451,243,804.94	1,280,861,557,113.53

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Tahun Berjalan 2011	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2012	Proyeksi/Target pada Tahun 2013
2.2.	Belanja Langsung	504,664,906,369.00	661,952,799,649.00	899,798,631,274.00	579,484,422,441.60	624,367,971,463.83
2.2.1.	Belanja Pegawai	42,431,559,390.00	52,530,597,245.00	66,257,318,120.00	-	-
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	313,307,976,912.00	411,271,122,644.00	556,108,954,919.00	-	-
2.2.3.	Belanja Modal	148,925,370,067.00	198,151,079,760.00	277,432,358,235.00	-	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	504,664,906,369.00	661,952,799,649.00	899,798,631,274.00	579,484,422,441.60	624,367,971,463.83
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1,784,086,645,680.38	2,106,019,303,925.70	2,350,772,521,066.00	1,860,935,666,246.53	1,905,229,528,577.36

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam dua komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2012 arah kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2012 adalah :

- 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. SiLPA Pada tahun 2012 belum dapat dikeluarkan karena harus menunggu perhitungan APBD yang telah diaudit oleh BPKP.
- 2) Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2012 adalah :

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP.
- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman jika terjadi surplus anggaran.

- 3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
- 4) Penumpukan dana cadangan tahun 2012 dalam rangka persiapan Pemilukada Tahun Anggaran 2015.

Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bandung
Tahun 2009 s/d Tahun 2013

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Tahun Berjalan 2011	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2012	Proyeksi/Target pada Tahun 2013
1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	158.011.869.459,14	340.329.389.787,76	322.423.551.102,00	-	-
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	155.509.599.178,14	317.829.389.787,76	241.813.436.242,00	-	-
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	2.502.270.281,00	22.500.000.000,00	38.682.630.516,00	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	31.927.484.344,00	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	10.000.000.000,00	-	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.011.869.459,14	340.329.389.787,76	322.423.551.102,00	-	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.516.743.852,00	21.382.500.000,00	155.500.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000.000,00	-	-	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi)	2.999.811.041,00	21.382.500.000,00	155.500.000,00	-	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.2.5.	Koreksi SiLPA Tahun 2008	16.932.811,00	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.516.743.852,00	21.382.500.000,00	155.500.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	147.495.125.607,14	318.946.889.787,76	322.268.051.102,00	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, dan terintegrasi, konsisten serta mengikat, untuk tercapainya tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan pasal 86 ayat 4 bahwa Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun 2010 dan tahun berjalan 2011, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2012 yang merupakan tahun kedua masa RPJMD Kabupaten Bandung 2010 - 2015, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2012 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut :

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan serta Sasaran Pembangunan

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi kesatu : “Meningkatkan profesionalisme birokrasi”.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan. 2. Terlaksananya pengiriman CPNS peserta diklat prajabatan, peserta diklatpim, diklat teknis dan bintek. 3. Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah. 4. Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala daerah/Wakil kepala daerah 5. Tersedianya SDM aparatur pengelola keuangan daerah yang handal dan professional secara paripurna baik dalam pengelolaan pendapatn maupun belanja daerah.

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"		
Misi	Tujuan	Sasaran
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengembangkan system perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 7. Terwujudnya pelayanan Prima melalui tansparansi pengaduan masyarakat 8. Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 9. Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah. 10. Terciptanya kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam penyebaran informasi pembangunan
<p>Misi kedua : "Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda".</p>	<p>Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan angka melek huruf. 2. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (RLS). 3. Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) SMA/K/MA/Sederajat. 4. Meningkatkan kuantitas siswa untuk jenjang pendidikan menengah kejuruan. 5. Meningkatkan jumlah PAUD. 6. Meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Kependidikan. 7. Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. 8. Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan. 9. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 10. Menurunnya AKI dan AKB. 11. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial. 12. Meningkatkan kesalehan sosial. 13. Terwujudnya rasa memiliki atas budaya sunda.
<p>Misi ketiga : "Memantapkan Pembangunan Perdesaan".</p>	<p>Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan kelembagaan desa 2. Meningkatkan peran serta masyarakat desa 3. Meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah desa 4. Meningkatkan desa mandiri pangan.

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pematapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi keempat : "Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah" .	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya produk hukum yang implementatif. 2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. 3. Meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum. 4. Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
Misi kelima : "Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah" .	Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah. 2. Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah. 3. Tertatanya areal permukiman 4. Terlayannya penduduk oleh pelayanan air bersih. 5. Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni 6. Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu.
Misi keenam : "Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing" .	Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelaku KUMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu bersaing. 2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. 3. Meningkatnya pendapatan petani. 4. Meningkatnya potensi-potensi unggulan daerah.
Misi ketujuh : "Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan" .	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Melaksanakan mitigasi bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalinya dampak pembangunan terhadap lingkungan. 2. Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan bebas polusi 3. Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam 4. Terwujudnya sistem informasi lingkungan 5. Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. 6. Terwujudnya kawasan perkotaan yang hijau dan ramah lingkungan 7. Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan daerah hijau. 8. Berkurangnya luas lahan kritis. 9. Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran.

Tujuan dan sasaran pada Misi pertama yaitu Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi merupakan terkait penyelesaian isu strategis pelayanan publik.

Tujuan dan sasaran pada Misi kedua yaitu Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda, merupakan terkait penyelesaian isu strategis kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan kesalehan sosial)

Tujuan dan sasaran pada Misi ketiga yaitu Memantapkan Pembangunan Perdesaan, merupakan terkait penyelesaian isu strategis pembangunan perdesaan dan ketahanan pangan

Tujuan dan sasaran pada Misi keempat yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, yang merupakan terkait penyelesaian isu strategis keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan dan sasaran pada Misi kelima yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, merupakan terkait penyelesaian isu strategis pembangunan infrastruktur dan tata ruang

Tujuan dan sasaran pada Misi keenam yaitu Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan terkait penyelesaian isu strategis kemiskinan.

Tujuan dan sasaran pada Misi ketujuh yaitu Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan, merupakan terkait penyelesaian isu strategis Lingkungan hidup dan bencana alam.

4.2. Prioritas Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2012 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2011-2015. dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)
1	Pelayanan publik yang profesional	Pelayanan publik yang profesional
2	Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan pendidikan	Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan pendidikan
3	Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan kesehatan
4	Peningkatan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan perluasan kesempatan kerja
5	Peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)
7	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
8	Perluasan pelayanan air bersih dan air baku	Perluasan pelayanan air bersih dan air baku
9	Penanggulangan terpadu bencana	Penanggulangan terpadu bencana
10	Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang	Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang
11	Pemantapan pembangunan daerah dan perdesaan	Pemantapan pembangunan daerah dan perdesaan
12	Penguatan budaya lokal dan peningkatan destinasi wisata terpadu	Penguatan budaya lokal dan peningkatan destinasi wisata terpadu
13	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
14	Peningkatan sarana prasarana perekonomian kerakyatan	Peningkatan sarana prasarana perekonomian kerakyatan

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	Pelayanan publik yang profesional	Program Pengembangan data/informasi	Termanfaatkannya Data penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	1 Dokumen	Bappeda
		Program Kerjasama Pembangunan	Dokumen Perencanaan Berpedoman pada ISO 9001-2008 untuk	1 Dokumen	Bappeda

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya bahan/ dokumen perencanaan transportasi • Tersusunnya bahan/ dokumen perencanaan penanggulangan bencana. • Tersusunnya bahan/ dokumen perencanaan kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 	3 dokumen	Bappeda
		Program perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 • Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2012 • Perbub RKPD Tahun 2013. • Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun 2013 • KUA/PPAS Tahun 2013 • Nota Kesepakatan KUA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2012. • KUA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2012. • LKPJ Tahun 2011. • Laporan Monitoring Tahun Anggaran 2012. 	9 dokumen	Bappeda
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Pengembangan Kawasan Agropolitan • Dokumen Pendampingan Program OVOP • Dokumen Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu • Tersedianya Basis Data Perekonomian Daerah 	4 Dokumen	Bappeda
		Program perencanaan sosial budaya	Tersusunnya dokumen perencanaan Kesra dan Pemerintahan	2 dokumen	Bappeda

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> Dok. laporan hasil perenc. fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan Tahun 2010. Dokumen rencana tindak tahun 2011 terkait sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan 	2 dokumen	Bappeda
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terfasilitasinya proses persetujuan penlok untuk pengadaan tanah instansi pemerintah	82 SK	Setda
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Sudah memiliki KTP = 2501632,2555	Dinsosdukcasip
		Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terselenggarakannya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.	1 paket	Setwan
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pelaksanaan dinas dalam dan luar daerah	7 Lembaga	Setda
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya aparatur pengelola keuangan daerah yang handal dan profesional secara paripurna baik dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah.	69 SKPD	DPPK dan Setda
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Sinkronisasi kewibawaan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	40%	Setda, Inspektorat, Kec dan Kel
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			Inspektorat

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Kejasama antar Pemerintah Daerah			Setda
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan	40%	Setda dan Setwan
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Teranalisisnya penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bandung	237 titik pilar	Setda
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM CPNS, kinerja PNS dan profesionalisme Aparatur	Terlaksananya pengiriman peserta prajabatan gol I, II dan III sebanyak 340 orang dan adanya penambahan kuota dari gol II sebanyak 80 orang dan gol III sebanyak 120 orang, pengiriman peserta diklat pim 80 orang dan 280 teknis tugas dan fungsi	BKPP
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya Pejabat struktural sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh SKPD, terpenuhinya pengisian formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi. • Meningkatnya disiplin dan mental pegawai kualitas pelayanan aparatur, serta terdapatnya akurasi data pegawai kabupaten bandung 	Terselenggaranya sidang baper jakat sebanyak 12 kali	BKPP
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Ketersediaan Dokumen Statistik: <ul style="list-style-type: none"> • PDRB Kab • PDRB Kecamatan • IPM • SUSEDA • KBDA • IKM • IHK 	6 dokumen	Bappeda

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terlaksananya pemutakhiran data yang sudah ada dari kegiatan serupa sebelumnya	30 Narasumber	Bapapsi
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah SKPD yang dibina dalam pengelolaan kearsipan	20%	Bapapsi
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	20%	Bapapsi
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kpd pimpinan & masyarakat serta memperbaiki kinerja dalam menjalankan proses pemerintahan	20%	Bapapsi
		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas aparatur dan masyarakat dalam bidang TIK dan menciptakan masyarakat yang faham teknologi dan mampu mengantisipasi perubahan global	20%	Bapapsi
		Program kerjasama informasi dan media massa	Terlaksananya penyebar luasan informasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung	40%	Bapapsi dan Setda
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Meningkatkan layanan informasi bahan pustaka terhadap pengguna secara kontinue	20%	Bapapsi
		Program Transmigrasi Regional	Terdaftaranya calon transmigrasi (KK)	50 kk	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya kerusakan tanah akibat produksi bioassa sesuai dengan SPM • Terlaksananya kegiatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumberair • Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 	80%	BPLH
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya buku SLHD dan basis data tahun 2012	BPLH

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya pengetahuan dan pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan oleh pelaku kegiatan usaha	6 kali pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi	BPLH
			Meningkatnya kapasitas laboratorium pengujian kualitas udara dan air	50%	BPLH
			Penerapan manajemen lingkungan menuju green laboratorium dan GLP sesuai dengan standar	40%	BPLH
			Belum tersedianya IPAL, RPH, pilot project IPAL domestik serta pembangunan instalasi pengontrol air limbah	Pembangunan IPAL RPH	BPLH
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Meningkatnya kebersihan dan penghijauan lingkungan	Menaikkan nilai dan atau Adipura	BPLH
			Meningkatnya pemahaman pengelolaan lingkungan pada masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat	BPLH
			Meningkatnya kualitas lingkungan sesuai dengan SPM pada kegiatan industri, jasa dan pertanian		BPLH
			Tersedianya kebijakan bidang lingkungan dan dokumen lingkungan	- 1 Dok Pra PS instalasi pengontrol air limbah- 1 dok kajian aspek manajemen IPAL terpadu Cisirung	BPLH
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang wajib AMDAL dan UPL-UKL	100 keg dgn 23%	BPLH
			Terevaluasinya pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup		BPLH
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	meningkatkan rasa Kepercayaan diri, kemauan dan kemandirian PMKS	KTK =4 5	Dinsosdukcasip

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program pembinaan anak terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak	Anak Terlantar = 30	Dinsosdukcasip
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	meningkatnya rasa Kepercayaan diri, Kemauan dan Kemandirian Penyandang Cacat	PENY CACAT = 26	Dinsosdukcasip
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Meningkatnya kemampuan Pengelolaan Panti Asuhan/Jompo bagi Pengurus	PANTI = 25	Dinsosdukcasip
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	meningkatnya rasa Kepercayaan diri, Kemauan dan Kemandirian penyandang eks. Penyakit Sosial	ANAK NAKAL = 50	Dinsosdukcasip
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kinerja lembaga Kesejahteraan Sosial masyarakat dalam UKS	TKSK = 29	Dinsosdukcasip
2	Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	- Jumlah siswa pada jenjang Tk / Ra /penitipan anak - Jumlah anak usia 4 – 8 tahun - Jumlah Paud (TK/RA/Penitipan anak)	8763 42.715 20.52%	Dikbud
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	jumlah murid usia 7-12 thn SD/MI	80,183	Dikbud
			jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun SD/MI	80,536	Dikbud
			APS SD/MI	99,56	Dikbud
			jumlah murid usia 13-15 thn SMP/MTs	30.950	Dikbud
			jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun SMP/MTs	38.107	Dikbud
			APS SMP/MTs	81,22	Dikbud
			Angka Partisipasi Murni SD	99,57	Dikbud
			Angka Partisipasi Murni SMP	81,22	Dikbud
			Rata-Rata Lama Sekolah	9,02	Dikbud
			Jumlah sekolah SD/MI	1553	Dikbud
			Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun SD/MI	402,631	Dikbud
			Rasio SD/MI	38,78	Dikbud
			Jumlah sekolah SMP/MTs	411	Dikbud
			jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun SMP/MTs	190,535	Dikbud

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			Rasio SMP/MTs	19,9	Dikbud
			Jumlah Guru SD/MI	15,936	Dikbud
			Jumlah Kelas SD/MI	11474	Dikbud
			Jumlah Guru per Kelas SD/MI	1,39	Dikbud
			Jumlah Murid SD/MI	419,99	Dikbud
			Rasio SD/MI	0,003	Dikbud
			Jumlah Guru SMP/MTs	10003	Dikbud
			Jumlah Kelas SMP/MTs	3763	Dikbud
			Jumlah Guru per Kelas SMP/MTs	2,66	Dikbud
			Jumlah Murid SMP/MTs	192,851	Dikbud
			Rasio SMP/MTs	0,019	Dikbud
		Program Pendidikan Menengah	Jumlah sekolah SMA/MA/SMK	250	Dikbud
			jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun SMA/MA/SMK	171,552	Dikbud
			Rasio SMA/MA/SMK	14,03	Dikbud
			Jumlah Guru SMA/MA	6970	Dikbud
			Jumlah Kelas SMA/MA	2093	Dikbud
			Jumlah Guru per Kelas SMA/MA	3,33	Dikbud
			Jumlah Murid SMA/MA	177,124	Dikbud
			Rasio SMA/MA	0,048	Dikbud
			Angka Partisipasi Kasar SMA	54,04	Dikbud
			Angka Partisipasi Murni SMA	41,50	Dikbud
		Program Pendidikan Non Formal	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	435.581	Dikbud
			Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	439.936	Dikbud
			Angka Melek Huruf	99,01	Dikbud
			Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI	285	Dikbud
			Jumlah seluruh Siswa SD/MI	403,173	Dikbud
			Angka Putus Sekolah (Persentase) SD/MI	0,07	Dikbud
			Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs	844	Dikbud
			Jumlah seluruh Siswa SMP/MTs	143,328	Dikbud
			Angka Putus Sekolah (Persentase) SMP/MTs	0,59	Dikbud
			Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/MA	391	Dikbud
			Jumlah seluruh Siswa SMA/MA	67,476	Dikbud
			Angka Putus Sekolah (Persentase) SMA/MA	0,58	Dikbud

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang bersertifikasi		Dikbud
			Jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi		Dikbud
			Jumlah KKG,		Dikbud
			Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh unit sistem pendidikan		Dikbud
			Jumlah guru yang mendapat beasiswa		Dikbud
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Data Based Bidang Pendidikan Formal maupun Formal seluruh jenjang		Dikbud
			Jumlah Dewan sekolah		Dikbud
			Jumlah Komite sekolah		Dikbud
3	Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan obat perkapita penduduk dengan nilai 2 \$	5.000	Dinkes
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat disarana pelayanan maupun di luar sarana pelayanan kesehatan	65%	Dinkes
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat disarana pelayanan maupun di luar sarana pelayanan kesehatan	65%	RSD Majalaya
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat disarana pelayanan maupun di luar sarana pelayanan kesehatan	65%	RSUD Cicalengka
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Terlaksananya pengendalian dan pembinaan serta pengawasan farmasi dan makanan minuman	70%	Dinkes
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya upaya promosi kesehatan melalui berbagai media dan pemberdayaan masyarakat	43%	Dinkes
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Tertanggulangnya masalah gizi buruk balita di masyarakat	100%	Dinkes
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terlaksananya upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan	70%	Dinkes

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular	76%	Dinkes
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersusunya regulasi tentang upaya pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung	3	Dinkes
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersusunya regulasi tentang upaya pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung	3	Dinkes dan RSUD Cicalengka
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui sistem kapitasi	100%	Dinkes
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersedianya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang representatif di sarana pelayanan kesehatan dasar	35%	Dinkes
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk		RSD Soreang, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk		RSD Soreang, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Tersedianya kemampuan tenaga dokter dan paramedis dalam penanganan kegawat darurat	40%	Dinkes, RSD Soreang dan RSUD Cicalengka
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Terlaksananya penyelenggaraannya perawatan kesehatan bagi lansia	40%	Dinkes
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi keselamatan ibu melahirkan dan anak	91%	Dinkes
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menurunnya jumlah trafficking dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA, dan terbentuknya P2TP2 tingkat Kabupaten	25	BKBPP

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	kader posyandu mendapat pengetahuan tentang ekonomi dan kesejahteraan keluarga	250 Orang	BKBPP
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	tercapai 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin	90 KK	BKBPP
		Program Keluarga Berencana	tercapainya pelayanan Keluarga Berencana melalui : pelayanan KB MOP dan MOW Kesepakatan Pelayanan Dengan Medis Pelayanan KB Paska Pelayanan, Menurunnya LPP (laju pertumbuhan penduduk) melalui pengaturan kelahiran. Cakupan PUS dibawah 20 tahun Cakupan PUS menjadi peserta KB (CPR) Cakupan kontrasepsi MKJP Cakupan unmet need, Penyediaan informasi data mikro keluarga		BKBPP
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui: Lokakarya remaja Pembentukan Kelompok PKIR Pertemuan PIKR Percontohan pembinaan Remaja Di pesantren Pembinaan Remaja di Sekolah Pembentukan desa model PUP Pengembangan Kelompok PIKR	125 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 potren 5 SLTA 10 desa 31 Kecamatan	BKBPP
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa	300 Orang 930 Orang	BKBPP
		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Menurunkan kasus penularan Penyakit HIV/IADs	175 Orang	BKBPP

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Tersedianya data Potensi tentang Pengasuhan anak. Meningkatnya pengetahuan ibu melalui kartu kembang anak	31 Buku 1 Paket	BKBPP
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatkan peran kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di tingkat kecamatan	550 Orang 200 Orang 200 Orang 425 Orang BKB (40%) UPPKS (52%)	BKBPP
4	Peningkatan perluasan kesempatan kerja	Program Transmigrasi Regional	Terdaftaranya Calon Transmigran (KK)	50 orang	Disnaker
			Terlatihnya Calon Transmigran (KK)	40 orang	Disnaker
			Terjajaginya daerah Penerima Transmigrasi (Daerah)	3 prov	Disnaker
			Terwujudnya kerjasama antar Daerah (KSAD)	3 prov	Disnaker
			Tertempatkannya Transmigran (KK)	40 orang	Disnaker
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatkan Kemampuan Fm dan PMKS dalam memenuhi Kebutuhan dasar	KPM = 40 PKH = 8276	Dinsosdukcasip
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlatihnya angkatan kerja di kabupaten Bandung	640 org	Disnaker
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terserapnya pengangguran	1.213.507 org	Disnaker
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya lembaga P2K3	60%	Disnaker
			Terdaftaranya Calon Transmigran (KK)	50 orang	Disnaker
			Terlatihnya Calon Transmigran (KK)	40 orang	Disnaker
			Terjajaginya daerah Penerima Transmigrasi (Daerah)	3 prov	Disnaker
			Terwujudnya kerjasama antar Daerah (KSAD)	3 prov	Disnaker
			Tertempatkannya Transmigran (KK)	40 orang	Disnaker
5	Peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Jumlah kelompok yang mengembangkan aneka usaha kehutanan	30 Kelompok	BKP3
		Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Jumlah kecamatan yang dikendalikan dari gangguan hutan	8 Kecamatan	Distanbunhut

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya aneka usaha kehutanan	14 desa	Distanbunhut
		Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	4.415,34 ha	Distanbunhut
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP: 1 Sayuran 2. Tan Hias 3 Buah-buahan	25 kel 15 kel 20 kel	BKP3
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terlaksananya verifikasi pemantauan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok penerima LDPM usaha ekonomi produktif dan alat pengolahan pupuk organik	3 jenis	BKP3
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap ketersediaan pangan utama (ton)	65,32%	BKP3
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok agribisnis : 1.padi 2.Jagung Luas areal pengembangan SRI (Ha) Jumlah Unit Pengolahan Pupuk organic (UPPO) Luas areal pengembangan hortikultura aman konsumsi (Ha)	32 2 650 64 40	Distanbunhut dan BKP3
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Luas pemanfaatan Jitit/Jides, embung, sumur pantek dan sumur resepan (ha)	480	Distanbunhut
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah demplot pertanian	135	BKP3
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP: 1.Sayuran 2.Tan. Hias 3.Buah-buahan	25 kel 15 kel 20 kel	Distanbunhut
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah kelompok sasaran penyuluh	96	BKP3
		Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Jumlah sistem penyuluhan	1	BKP3

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jenis penyakit ternak yang ditanggulangi	4	Disnakan
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi Daging (ton) Produksi Telur (Ton) Produksi Susu (Ton)	45.183 8.323 62.876	Disnakan
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah pasar hewan	2	Disnakan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah penggunaan biogas (unit) Kompos (Unit)	796 114	Disnakan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah penggunaan biogas (unit)Kompos (Unit)	114	BKP3
		Program pengembangan budidaya perikanan	Target produksi benih ikan (ekor)	1.088.942.812	Disnakan
		Program pengembangan perikanan tangkap	-	-	Disnakan
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah kawasan budidaya ikan yang berwawasan lingkungan	7	Disnakan
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (dst...)	Penerapan GMP pada produk ikan (jenis pengolahan)		Disnakan
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan Produksi (ton) : 1.Padi 2.Jagung 3.Sayuran 4.Buah-buahan 5.Tan. Hias 6.Tan. Obat-obatan 7.Kopi 8.Teh 9.Cengkeh	472.564 51.000 1.039220 560.823 382.253 836.410 3.875 3.133 111	Distanbunhut
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah	Program Pengendalian Banjir	Berkurangnya Luas genangan di Kecamatan Cileunyi , Margaasih, Margahayu, Katapang, Soreang	327,848 ha	SDAPE
		Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Berkurangnya lama genangan/pembuatan trase dan tanggul saluran drainase serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya air/adanya dokumen rencana induk irigasi dan drainase	Terlaksananya rehabilitasi dan normalisasi saluran 4%	SDAPE

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jalan dan jembatan (pembangunan jalan lingkaran Banjaran, Jl Lingkaran Majalaya, Jl Lingkaran Katapang baleendah, Jl Lingkaran Baleendah-Majalaya), Jl Ibum-Monteng)	DED pemb. Jln dan jembatan dan dok. Amdal serta pembebasan lahan	Bina Marga
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran drainase/gorong serta berkurangnya tingkat genangan	Pemb. Draenase di 58 Lokasi	Bina Marga
		Program Pembangunan turap/talud/brojong	Meningkatnya kualitas jalan serta berkurangnya resiko pengguna jalan	Pemb. TPT di 25 Lokasi	Bina Marga
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan	Peningkatan jalan 60 Km, Pemel. Periodik 30 Km, Pemel. Rutin 147 km, Pemel Rutin 147 km Pemeliharaan Jembatan 78 Lokasi, Pemeliharaan Rutin Jembatan 127 Lokasi	Bina Marga
		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan serta tersedianya informasi rencana penanganan jalan dan jembatan	Dokumen Inspeksi Jalan sepanjang 300 Km	Bina Marga
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	tersedianya informasi jalan dan jembatan terkini	Dokumen Data Base Jalan di 8 Kecamatan	Bina Marga
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya kemampuan penunjang kegiatan kebinamargaan	Pembangunan Lab Tahap II , DED dan Pembebasan lahan untuk AMP , Pengadaan Alat Berat Buldozer dan sukucadang alat berat	Bina Marga
		Program Pembinaan Pengembangan Ketenagalistrikan	Rasio elektri		SDAPE
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	Meningkatnya kemampuan Jaringan Irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air		SDAPE

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Lainnya	Saluran Induk = 77,764 Km		SDAPE
			- 47,281 Km (60,8%) Kondisi baik		SDAPE
			-15,553 Km (20%) kondisi rusak berat	0,99 km	SDAPE
			- 14,931 Km (19,20%) kondisi rusak ringan	1,13 km	SDAPE
			Saluran sekunder 136 KM		SDAPE
			- 81,60 Km (60%) Kondisi baik		
			- 34 Km (25%) Kondisi rusak berat	2,71 km	SDAPE
			- 20,40 Km (15%) Kondisi rusak ringan	1,5 km	SDAPE
			Saluran Tersier 831,044 Km		SDAPE
			Jumlah Bangunan Air 933 buah		SDAPE
			Bangunan Utama 440 buah		SDAPE
			- 140 buah (31,80 %) Kondisi baik		
			- 180 buah (40,10 %) Kondisi rusak berat	9 Buah	SDAPE
			- 120 buah (28,10%) Kondisi rusak ringan	6 Buah	SDAPE
			Bangunan Bagi Sadap = 273 buah		SDAPE
			- 116 buah (42,49 %) Kondisi baik		
			- 58 buah (21,20 %) kondisi rusak berat	3 Buah	SDAPE
			- 99 buah (36,30 %) kondisi rusak ringan	4 Buah	SDAPE
			Bangunan Pelengkap = 220 Buah		SDAPE
			- 176 buah (80%) Kondisi baik		SDAPE
			- 14 Buah (6,36%) Kondisi rusak berat	1 Buah	SDAPE
			- 30 buah (13,64%) kondisi rusak ringan	6 Buah	SDAPE
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pembangunan infrastruktur di 9 Lokasi	Bina Marga
		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasana dan fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	Kalibrasi 12 item alat PKB	Dishub

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan secara memadai	1. Penyuluhan ke anak sekolah dan masyarakat di TMMD dan TMSS 2. Updating kinerja trayek	Dishub
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan		Dishub
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Pemasangan fasilitas lalu lintas, pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan pemeliharaan: 1. Rambu lalu lintas 2. Rambu Proteble 3. RPPJ 4. GUARD Rail 5. Trafic Light 6. Warning Light 7. Cermin Tikungan 8. Marka Jalan	1. Pengadaan rambu: 100 rambu, 4 RPPJ, Pemel Rambu 2. Pengadaan 500 m2 marka	Dishub
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya dan lancarnya lalu lintas yang aman serta tertib	Pemb. 980 TC Pemel 200 TC	Bina Marga
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya sewa terminal, kegiatan sosialisasi kebijakan, kegiatan rakonas, rakonis WTN	1. Sewa 10 lokasi terminal 2. Sosialisasi kpd juru parkir 3. Rakornas, Rakornis dan WTN 4.data angkutan barang 5. Pengadaan Tanah dan Pemb Terminal Soreang Type B	Dishub
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya informasi yang cepat dan online	0,71	Dispopar
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	0,50	Dispopar
7	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	- PIRT - Sertifikasi halal - Jumlah UMKM	21	Diskoperindag
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	- KUD/Koperasi - Usaha Mikro dan embrio mikro - Intermediasi usaha - Pola Kemitraan	16	Diskoperindag

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	- Jumlah BPR dan LKM - Jumlah UMKM - Rumah Kemasan - Bintek Kemasan - Kelompok Usaha (UMKM) - Fasilitasi usaha KUKM	15	Diskoperindag
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	- Jumlah koperasi aktif- Jumlah koperasi- Persentase koperasi aktif	15	Diskoperindag
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa -Alat UTTP yang diukur ulang - Jumlah LPKSM - Jumlah Kasus sengketa konsumen	16	Diskoperindag
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Pengembangan kelompok industri hulu hilir	17	Diskoperindag
8	Perluasan pelayanan air bersih dan air baku	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 50%	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 34%	Dispertasih
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 50%	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 34%	Dispertasih
9	Penanggulangan terpadu bencana	Program pengembangan data/informasi	Tersedianya data dan informasi kebencanaan	5 Kec	BPBD

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Berkurangnya korban bencana di daerah rawan bencana	5 Kec	BPBD
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Berkurangnya korban bencana	1 Tim	BPBD
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terselenggaranya penanganan darurat pasca bencana	50 Jiwa	BPBD
		Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Desa	Berkurangnya dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana	1 paket	BPBD
		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial	Berkurangnya dampak kerusakan lingkungan dan rumah akibat bencana	4 Paket	BPBD
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 40%	Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 30%	Dispertasih
10	Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah regulasi pertambangan	2	SDAPE
		Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Total luas penambangan tanpa izin	20,755 ha	SDAPE
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	a. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 10,2%	a. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 2,2%	Dispertasih
			b. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 22 %	b. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 13,26 %	

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,117% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,11% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Dispertasih
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terkendalinya kerusakan tanah akibat produksi bioassa sesuai dengan SPM Terlaksananya kegiatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumberair Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	80%	BPLH
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya buku SLHD dan basis data tahun 2012	BPLH
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya pengetahuan dan pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan oleh pelaku kegiatan usaha	6 kali pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi	BPLH
			Meningkatnya kapasitas laboratorium pengujian kualitas udara dan air	50%	BPLH
			Penerapan manajemen lingkungan menuju green laboratorium dan GLP sesuai dengan standar	40%	BPLH
			Belum tersedianya IPAL, RPH, pilot project IPAL domestik serta pembangunan instalasi pengontrol air limbah	Pembangunan IPAL RPH	BPLH
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Meningkatnya kebersihan dan penghijauan lingkungan	Menaikkan nilai dan atau Adipura	BPLH
			Meningkatnya pemahaman pengelolaan lingkungan pada masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat	BPLH
			Meningkatnya kualitas lingkungan sesuai dengan SPM pada kegiatan industri, jasa dan pertanian		BPLH

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			Tersedianya kebijakan bidang lingkungan dan dokumen lingkungan	- 1 Dok Pra PS intalasi pengontrol air limbah - 1 dok kajian aspek manajemen IPAL terpadu Cisirung	BPLH
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang wajib AMDAL dan UPL-UKL	100 keg dgn 23%	BPLH
			Terevaluasinya pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup		BPLH
		Program Pengembangan Perumahan	a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,20%	a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,08%	Dispertasih
			Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan /kota sebesar 1,6%	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan /kota sebesar 1,2%	Dispertasih
			Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 1,35%	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 0.45%	Dispertasih
			Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%	Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%	Dispertasih
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 24,3%	Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 14,3%	Dispertasih
			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 13,9%	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 8,1%	Dispertasih

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 50%	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 34%	Dispertasih
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 50%	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 34%	Dispertasih
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat PERMENDAGRI NO. 9 Thn. 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman mencapai 13,5%	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat PERMENDAGRI NO. 9 Thn. 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman mencapai 11%	Dispertasih

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 40,93%	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 29,25%	Dispertasih
			Terlaksananya penjarangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	Terlaksananya penjarangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	Dispertasih
		Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 40,93%	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 29,25%	Dispertasih
		Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya ketersediaan data spasial sebagai bahan interpretasi dan data yang akurat untuk pendataan ruang.		Bappeda
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 40%	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 32%	Dispertasih

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang sebesar 100%	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang sebesar 100%	Dispertasih
11	Pemantapan pembangunan daerah dan perdesaan	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	20 unit	Dispertasih
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tercapainya pemantapan pembangunan perdesaan	60%	BPMPD
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terbinanya pengelolaan pasar desa	60%	BPMPD
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya kemanunggalan TNI & Masyarakat	60%	BPMPD
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan kepala desa dan sekretaris desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa	60%	BPMPD
12	Penguatan budaya lokal dan peningkatan destinasi wisata terpadu	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya		Dikbud
			Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya		Dikbud
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		Dikbud
			Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah		Dikbud
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah jenis Kesenian		Dikbud
		Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Organisasi dan tenaga keolahragaan	0,74	Dispapar
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terlaksanya kompetensi olahraga pelajar Tk Kab. Bdg	0,80	Dispapar
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terlaksananya pembinaan atlet berbakat dan berpotensi	0,60	Dispapar
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (PNS, OKP dan masyarakat)	0,60	Dispapar

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (PNS, OKP dan masyarakat)	0,60	Dispopar
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terciptanya olahragwan berbakat dan berprestasi	0,74	Dispopar
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-Jumlah kunjungan wisata -Rata-Rata kunjungan per obyek wisata	18	Dispopar
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kualitas dan kauntitas sarana dan Prasarana wisata	18	Dispopar
		Program Pengembangan Kemitraan	- Potensi Wisata Desa Unggulan - SDM Wisata	18	Dispopar
13	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.	- 50 kali di 31 Kecamatan	Satpol PP
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk.	- 400 org - 5520 linmas	Kesbanglinmas
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	- Jumlah Demonstrasi Bidang Politik - Jumlah Demonstrasi Ekonomi - Jumlah Demonstrasi Kasus	65 kali di 31 Kec	Satpol PP
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	- Jumlah Demonstrasi Bidang Politik- Jumlah Demonstrasi Ekonomi- Jumlah Demonstrasi Kasus	430 org31 kec	Kesbanglinmas
		Program pengembangan wawasan kebangsaan		550 org	Kesbanglinmas
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terselenggaranya KFUU (Forum Komunikasi Ulama Umara) dan Kader Bimbingan Hidup Beragama	12	Setda
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Pelaksanaan penyuluhan miras dan narkoba bagi siswa SMA dan SMK	1 SMA dan SMK di Kecamatan margahayu	Satpol PP

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD	
			Indikator	Target		
		Program pendidikan politik masyarakat	Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat	400 org	Kesbanglinmas	
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya pengetahuan dalam penanganan bencana	250 org	Kesbanglinmas	
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya pengetahuan dalam penanganan bencana		Kesbanglinmas, BPBD, Setda	
14	Peningkatan sarana prasarana perekonomian kerakyatan	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	- PIRT - Sertifikasi halal - Jumlah UMKM	21	Diskoperindag	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	- KUD/Koperasi - Usaha Mikro dan embrio mikro - Intermediasi usaha - Pola Kemitraan	16	Diskoperindag	
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa - Alat UTTP yang diukur ulang - Jumlah LPKSM - Jumlah Kasus sengketa konsumen	16	Diskoperindag	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Konsep Pasar Terpadu - Jumlah Promosi Pameran - Jumlah UMKM peserta pameran - Pemantauan harga SEMBAKO - Bintek peningkatan kualitas produk kerajinan - Pengrajin yg dibina melalui kemitraan	19	Diskoperindag	
			Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha dengan mitra kerja lembaga			Diskoperindag
			Tertatanya pengelolaan dan pengembangan pasar di Kabupaten Bandung			Diskoperindag
			Meningkatnya pengawasan terhadap harga bahan pokok dan distribusi barang penunjang pertanian			Diskoperindag
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	- Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil (jumlah IK)	18	Diskoperindag			

No	Prioritas pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-Jumlah Industri Kecil yang melaksanakan standarisasi produksi dan kemasan	15	Diskoperindag
		Program Penataan Struktur Industri	- Pengembangan kelompok industri hulu hilir		Diskoperindag
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Penataan Pedagang kaki lima di 11 pasar tradisional	18	Diskoperindag
		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Basis data informasi potensi wilayah (sentra industri)	18	Diskoperindag
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	- Jumlah Persetujuan Proyek - Nilai Persetujuan Investasi - Jumlah Realisasi Proyek	18	BPMP
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Jumlah PMDN - Jumlah PMA - Total PMA PMDN	19	BPMP
		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Potensi investasi	25	BPMP

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung.

Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2012 disusun berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010, yang memaparkan Kegiatan – kegiatan strategis yang diusung oleh SKPD dan wilayah

RKPD 2012 Kabupaten Bandung merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2010 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh warga Kabupaten Bandung.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Rencana penganggaran pada tahun 2012 direncanakan untuk Belanja Langsung sebesar Rp 579.484.422.441,60, anggaran tersebut adalah total kebutuhan dana dari seluruh SKPD sebagaimana format terlampir:

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Sumber Dana	target capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
x xx 01 06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor BPMP	4 Unit roda 2 dan 5 Unit roda 4	110.858.000	APBD Kab	3 Unit roda 2 dan 5 Unit roda 4	110.858.000
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Tersedianya peralatan rumah tangga.	1 paket peralatan kebersihan rumah tangga.	48.688.800	APBD Kab	1 paket peralatan kebersihan rumah tangga.	48.688.800
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat-alat kantor	Tersedianya alat-alat kantor.	Satu paket alat tulis kantor.	85.000.000	APBD Kab	Satu paket alat tulis kantor.	85.000.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Satu paket alat tulis kantor.	69.118.800	APBD Kab	Satu paket alat tulis kantor.	69.118.800
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.	Tersedianya penerangan yang baik di setiap ruangan.	25 ruangan tempat kerja.	10.163.300	APBD Kab	25 ruangan tempat kerja.	10.163.300
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	3 Unit Komputer, 3 buah printer, 1 buah camera shooting video, 4 sepeda motor, 4 set sice, 1 set meja rapat, 4 buah lemari besi, 2 buah filling kabinet	86.500.000	APBD Kab	3 Unit Komputer, 3 buah printer, 1 buah camera shooting video, 4 sepeda motor, 4 set sice, 1 set meja rapat, 4 buah lemari besi, 2 buah filling kabinet	86.500.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan/koran.	5 jenis koran untuk 1 tahun.	10.000.000	APBD Kab	5 jenis koran untuk 1 tahun.	10.000.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman.	Tersedianya makanan dan minuman.	67 paket makanan utk pegawai dan 50 paket utk tamu	190.000.000	APBD Kab	67 paket makanan utk pegawai dan 50 paket utk tamu	190.000.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi.	30 kali koordinasi dan konsultasi	41.000.000	APBD Kab	30 kali koordinasi dan konsultasi	41.000.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi.	60 kali koordinasi dan konsultasi	25.500.000	APBD Kab	60 kali koordinasi dan konsultasi	25.500.000
x xx 01 22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang hari-hari bersejarah	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan alat-alat hari-hari bersejarah.	umbul-umbul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat.	15.000.000	APBD Kab	umbul-umbul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat.	15.000.000
x xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.							
x xx 02 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Terpeliharanya ruangan ruangan kantor.	26 ruangan kerja dan teras.	117.196.350	APBD Kab	26 ruangan kerja dan teras.	117.196.350
x xx 02 05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas sebagai penunjang operasional BPMP	1 buah kendaraan roda dua 200 cc	0		4 buah kendaraan roda dua 200 cc	0
x xx 02 29	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair.	Terpeliharanya mebeulair kantor. Kondisi mebeulair tetap terawat dengan baik.	75 meja dan 75 kursi kantor.	6.500.000	APBD Kab	75 meja dan 75 kursi kantor.	6.500.000
x xx 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.							
x xx 03 29	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	pengadaan pakaian hari-hari tertentu.	2 x 64 stel pakaian.	0		2 x 64 stel pakaian.	0
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan.							
x xx 06 01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan.	Penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.	Renstra, LAKIP, Laporan Tahunan, Renja, RKA, DPA, IKK, LKPJ.	23.693.750	APBD Kab	Renstra, LAKIP, Laporan Tahunan, Renja, RKA, DPA, IKK, LKPJ.	23.693.750
x xx 06 02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan.	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Tersusunnya laporan keuangan semesteran.	bulanan, triwulan, semesteran dan laporan keuangan tahunan.	10.500.000	APBD Kab	bulanan, triwulan, semesteran dan laporan keuangan tahunan.	10.500.000
1 16 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.		Jumlah 1		849.719.000			849.719.000
1 16 15 06	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.	Aparatur penanaman modal (Pemerintah) dan dunia usaha (investor dan masyarakat)	Paket	340.000.000	APBD Kab	Pengusaha besar yang berminat berinvestasi di Kab. Bandung baik dalam maupun luar negeri.	350.000.000
1 16 15 08	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal.	100 PMA, 100 PMDN dan 100 Non PMA/PMDN	Paket	200.000.000	APBD Kab	100 PMA, 100 PMDN dan Non 150 PMA/PMDN.	200.000.000

1	16	15	09	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Kegiatan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.	SDM aparatur penyelenggara pelayanan perijinan (PPTSP)	30 orang	150.000.000	APBD Kab		Aparatur BPMP	150.000.000
1	16	15	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi.	Calon investor dalam dan luar negeri	4 kali event promosi	400.000.000	APBD Kab		Calon investor dalam dan luar negeri.	400.000.000
1	16	15	11	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Masyarakat di lingkup 31 Kecamatan	31 Kali	150.000.000	APBD Kab		Masyarakat di lingkup 31 kecamatan.	150.000.000
1	16	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.								
1	16	16	01	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	Kegiatan penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.	Raperbup dan Perda yang terkait dengan perijinan dan penanaman modal	buah	350.000.000	APBD Kab		7 buah Perbup, 3 buah Raperda	350.000.000
1	16	16	04	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	Pengembangan system informasi Penanaman modal pelayanan perijinan	system informasi pelayanan perijinan	1 buah	100.000.000	APBD Kab		1 buah	130.000.000
1	16	17		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.								
1	16	17	01	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.	Kajian potensi potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.	Seluruh potensi sumberdaya Kabupaten Bandung yang berpeluang untuk di gali dan di kembangkan	1 Paket	225.000.000	APBD Kab		1 Paket	265.000.000
						Jumlah 2		1.915.000.000				1.995.000.000
						Jumlah (1+2)		2.764.719.000				2.844.719.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013			
			Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
x xx 01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							3.536.217.000		
x	xx	01	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbawarnya rekening telepon	Diskoperindag	12 Bulan	6.000.000	APBD Kab	12 Bulan	6.000.000
x	xx	01	05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya penyediaan jasa untuk sewa lahan Pasar	Diskoperindag	12 Bulan	150.000.000	APBD Kab	12 Bulan	150.000.000
x	xx	01	08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih	Diskoperindag	100%	90.000.000	APBD Kab	100%	90.000.000
x	xx	01	10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis	Diskoperindag	12 Bulan	85.775.000	APBD Kab	12 Bulan	85.775.000
x	xx	01	11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya percetakan karcis dan penggandaan	Diskoperindag	12 Bulan	421.112.000	APBD Kab	12 Bulan	421.112.000
x	xx	01	12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat penerangan kantor	Diskoperindag	100 Titik	5.750.000	APBD Kab	100 Titik	5.750.000
x	xx	01	13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana penunjang kantor	Diskoperindag	Unit/Paket	193.420.000	APBD Kab	100%	193.420.000
x	xx	01	15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kegiatan penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah	Diskoperindag	12 Bulan	23.760.000	APBD Kab	12 Bulan	23.760.000
x	xx	01	17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makan dan minum	Tercapainya jumlah makanan dan minuman untuk rapat Dinas, pegawai piket UPTD dan Piket Dinas.	Diskoperindag	100%	1.450.000.000	APBD Kab	100%	1.450.000.000
x	xx	01	18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan Dinas	Diskoperindag	40%	60.000.000	APBD Kab	50%	60.000.000
x	xx	01	18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan Dinas	Diskoperindag	40%	75.000.000	APBD Kab	50%	75.000.000
x	xx	01	19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dst. (Penyediaan tenaga Pendukung administrasi teknis dan perkantoran)	Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pendukung teknis dan perkantoran yaitu 75 Orang TTK	Diskoperindag	75 Orang	975.400.000	APBD Kab	75 Orang	975.400.000
x xx 02				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								1.098.864.500
x	xx	02	42	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Rehabilitasi Kantor UPTD Pasar Soreang dan Sayati Indah	Soreang dan Sayati Indah	2 Pasar	300.000.000	APBD Kab	kantor Dinas	300.000.000
x	xx	02	22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Dinas dan Kantor UPTD dan Pemagaran batas TPA Pasar Baru Majalaya di Ds. Cikancung Luas Tanah 840m2	Diskoperindag	kantor Dinas, kantor UPTD dan Pemagaran TPA Baleendah jelekong.	314.864.500	APBD Kab	kantor Dinas, kantor UPTD dan Pemagaran TPA Baleendah jelekong.	314.864.500
x	xx	02	24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan Terbawarnya perpanjangan STNK	Diskoperindag	12 bulan	484.000.000	APBD Kab	12 Bulan	484.000.000
x xx 03				Program peningkatan disiplin aparatur								259.865.000
x	xx	03	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya Pakaian Kamtib dan Kebersihan	Diskoperindag	300 Orang	125.000.000	APBD Kab	300 Orang	125.000.000
x	xx	03	02	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas harian (PDH, Batik) beserta atributnya	Diskoperindag	LINMAS 417, Batik 417 dan Pakaian Olahraga 130	134.865.000	APBD Kab	PDH dan Batik 417 Stel	134.865.000
x	xx	03	05	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olahraga						
x xx 06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								31.797.000
x	xx	06	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dinas, RKA dan laporan tahunan	Diskoperindag	100%	18.137.000	APBD Kab	100%	18.137.000
x	xx	06	02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran dinas	Diskoperindag	100%	6.830.000	APBD Kab	100%	6.830.000
x	xx	06	04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan dinas	Diskoperindag	100%	6.830.000	APBD Kab	100%	6.830.000
						Jumlah 1			4.926.743.500			4.926.743.500
1	15	15		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku UMKM tentang kebijakan dan perundang - undangan						
1	15	15	08	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Para pelaku UMKM dan Pembentukan LKM bagi Koperasi Kelurahan	Cimencyan	300 UMKM dan 20 UMKM Unggulan	100.000.000	APBD Kab	160 Org dan 300 brosur UMKM	125.000.000
1	15	15	11	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Para pelaku UMKM	Kab. Bandung	500 UMKM	50.000.000	APBD Kab	100 UMKM	50.000.000
1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan tentang manajerial UMKM dan Perkoperasian.						

1	15	16	03	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pelatihan Fasilitas Pengembangan Usaha Industri Kecil Menengah yang berkaitan dengan Agribisnis	Pameungpeuk	30 orang	35.000.000	APBD Kab		300 Org	35.000.000
1	15	16	06	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	UMKM dan Koperasi	Soreang, Pasirjambu, Ciwidey, Cangkuang, Pameungpeuk, Cileunyi, Dayeuhkolt dan Margahayu.	470 Orang	560.000.000	APBD Kab		190 Org	485.000.000
1	15	16	07	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pelatihan Manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Pengurus dan pengawas koperasi	Rancabali, Solokanjeruk, Baleendah dan Margahayu.	210 Pengurus dan pengawas koperasi	295.000.000	APBD Kab		120 Org	295.000.000
1	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah									
1	15	17	08	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Sertifikasi Label Halal Bagi Industri Menengah/Kecil.	Cimencyan	250 UMKM/IKM	100.000.000	APBD Kab		50 SP-PIRT dan 50 Labelisasi Halal	275.000.000
1	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi									
1	15	18	01	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Aparat Kecamatan, Kelurahan, Dekopinda dan Notaris.	Kab. Bandung	268 Orang	50.000.000	APBD Kab			50.000.000
1	15	18	04	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	para pengurus koperasi	Kab. Bandung	152 Koperasi	75.000.000	APBD Kab		150 UMKM dan masyarakat	75.000.000
1	15	18	05	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.	Koperasi se-Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	180 Koperasi	55.000.000	APBD Kab		150 Koperasi	55.000.000
1	15	18	06	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Koperasi se-Kabupaten Bandung		200 Koperasi	125.000.000	APBD Kab		160 koperasi	94.000.000
1	15	18	07	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertindakannya Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang menerima bantuan seperti BanSos, BanGub, Kementerian modal penyertaan (BRI) Program keluarga Miskin dan pengangguran.		150 Koperasi				100 koperasi	
1	15	18	07	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Tertindakannya kegiatan penyebaran model model pola pengembangan koperasi.	Kab. Bandung	150 Ormas dan Masyarakat umum				150 Org	
2	06	15		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan									
2	06	15	01	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Pelaku Usaha (pengecer, Pasar Modern/tradisional).	Kab. Bandung	Tersusunnya laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa oleh 4 LPKSM	20.000.000	APBD Kab		3 Kali	20.000.000
2	06	15	02	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Fasilitasi penyelesaian permasalahan permasalahan pengaduan konsumen	Konsumen dan para pelaku usaha (BPSK)	Kab. Bandung	Terselesaikannya sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen	35.000.000	APBD Kab		43 Org	35.000.000
2	06	15	03	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Konsumen dan para pelaku usaha	Kab. Bandung	Terawasanya alat UTTP dan BDKT yang tidak sesuai dengan standar	85.000.000	APBD Kab		15 Kali	70.000.000
2	06	15	04	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Konsumen dan para pelaku usaha	Kab. Bandung	7 Pasar dan 2200 Unit	30.000.000	APBD Kab		7 Pasar dan 2200 Unit	30.000.000
2	06	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									
2	06	17	02	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Atase/ITPC KBRI, Dinas dan Asosiasi terkait	dalam dan luar negeri	29 Atase/ITPC KBRI dan 25 Dinas kota/Kab dan Asosiasi Terkait.	150.000.000	APBD Kab		1 Kali Even Pameran	170.000.000
2	06	17	03	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Pelaku Usaha dan Aparat di Kab. Bandung.	Kab. Bandung	30 Org pelaku Usaha ekspor, 40 org UMKM, Koperasi dan 10 org aparat.	30.000.000	APBD Kab		40 Pelaku Usaha	75.000.000
2	06	17	13	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dst... Pelatihan Ekspor Bagi IKM, UMKM dan Koperasi							25 Pelaku Usaha	
2	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri									

2	06	18	01	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyempurnaan Perangkat peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan operasional	Pendataan perusahaan di wilayah kab. Bandung	Kec. Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang, Arjasari, Cimaung, Pangalengan, Cileunyi, Rancaekek, Cicalengka, Nagreg dan Cikarang	11 Kecamatan	55.000.000	APBD Kab			55.000.000
2	06	18	02	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Fasilitasi Kemudahan perijinan pengembangan Usaha	-Study kelayakan pasar menjadi PD Pasar - Grand design /pemetaan pasar modern/toko modern		11 Pasar	105.000.000	APBD Kab		11 Pasar	105.000.000
2	06	18	08	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan distribusi dan promosi barang / produk	Promosi produk unggulan Para Pelaku Usaha/pengrajin dan UMKM dari seluruh Kab. Bandung	Kab. Bandung, Kota Bandung dan DKI Jakarta	20 Kecamatan (42 UMKM untuk 4 event pameran dan 80 peserta pasar murah ramadan	250.000.000	APBD Kab		9 Event	250.000.000
2	06	18	03	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	Pembebasan tanah pasar Banjaran, DED Pasar Soreang, serta Rehab Gorong-gorong pasar sayati, soreang dan Baleendah, Peninggian Lokasi Pasar St. Majalaya dan pembangunan lahan parkir pasar savati		4 Pasar	9.253.650.000	APBD Kab	Investasi Pembangunan dan Penataan pasar tradisional	2 Pasar	15.315.000.000
2	06	18	04	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Pengrajin	Kab. Bandung dan luar Kab. Bandung		150.000.000	APBD Kab		2 Kali Pameran	150.000.000
2	06	18	04	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Meningkatkan pangsa pasar produk hasil kerajinan para UMKM		2 kali pameran				2 kali pelatihan	
2	06	18	04	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Meningkatkan keterampilan pengrajin melalui pelatihan pelatihan		2 kali pelatihan				1 kali kunjungan kerja	
2	06	18	04	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Meningkatkan wawasan pengrajin melalui kunjungan kerja		1 kali kunjungan kerja					
2	06	18	06	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	UPTD Pasar Distributor Kios/pengecer pupuk	Soreang, Ciwidey, Banjaran, Baleendah, Margahayu, Pangalengan, Majalaya, Cicalengka, Cileunyi	- 9 UPTD Pasar	75.000.000	APBD Kab		9 UPTD Pasar	75.000.000
2	06	18	06	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	UPTD Pasar Distributor Kios/pengecer pupuk	Soreang, Ciwidey, Banjaran, Baleendah, Margahayu, Pangalengan, Majalaya, Cicalengka, Cileunyi	- Distributor 9 kecamatan					
2	06	18	06	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	UPTD Pasar Distributor Kios/pengecer pupuk	Pangalengan, Pacet, Pasirjambu, Rancaekek, Soreang, Ciwidey, Cicalengka, Baleendah, Arjasari, Ibum, Majalaya dan Cileunyi	- Kios/pengecer pupuk 12 kecamatan					
2	06	18	07	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Sosialisasi Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Aparat/SKPD, Asosiasi, pelaku usaha.		60 org	75.000.000	APBD Kab		31 Kecamatan	75.000.000
2	06	18	07	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Kab. Bandung	31 Kecamatan					
2	06	19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan									
2	06	19	02	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin pedagang Kaki lima dan Asongan							2 Pasar	
2	06	19	03	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kegiatan Penataan Tempat berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Penataan pedaganag kaki lima dan asongan di pasar tradisional	Kec. Margahayu, Banjaran dan soreang		250.000.000	APBD Kab		2 Pasar	275.000.000
2	07	15		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi									
2	07	15	05	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terwujudnya kemampuan pelaku IKM di bidang teknik produksi dan desain.	7 Desa	140 IKM		APBD Kab		180 IKM	355.000.000

2	07	15	05	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Para pelaku IKM	Ds. Panyocokan Kec. Ciwidey	1 kelompok	35.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Para pelaku IKM	Ds. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi	1 Kelompok	35.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Para pelaku IKM	Ds. Jati Endah Kec. Cilengkrang	1 kelompok	35.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Para pelaku IKM	Ds. Ciporet Kec. Cilengkrang	1 Kelompok	35.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Para pelaku IKM	Kel. Manggahang Kec. Baleendah	1 kelompok	35.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Para pelaku IKM	Ds. Gajah Mekar Kec. Kutawaringin	1 kelompok	35.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Para pelaku IKM	Ds. Pamekaran Kec. Soreang	1 kel	35.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Pelatihan Pengemasan Produk dari kripik singkong	Kab. Bandung			APBD Kab		20 kelompok	340.000.000	
2	07	15	06	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Mendorong tumbuhnya industri andalan masa depan	Kab. Bandung			APBD Kab			210.000.000	
2	07	15	06	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Pelatihan IKM Konveksi RW 06	Pameungpeuk	1 kelompok	35.000.000	APBD Kab		40 Org Pelaku TPT		
2	07	15	06	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Pelatihan Menjahit (Konveksi)	Baleendah	1 Kelompok	35.000.000	APBD Kab		20 Org Pelaku IK KPK		
2	07	15	06	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Sosialisasi Barcode bagi para IKM	Kab. Bandung	100 Orang	75.000.000	APBD Kab		150 Org pelaku IKM		
2	07	15	07	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Dst.... Pengembangan Industri Kreatif berbasis Fashion	Terlaksananya kegiatan pembninaan industri kreatif berbasis fashion	Pameungpeuk dan Cileunyi	70 Orang pelaku IK pakaian jadi.	70.000.000	APBD Kab		20 Org Pelaku TPT	115.000.000	
2	07	15	07	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Dst.... Pengembangan Industri Kreatif berbasis Fashion	Pelatihan Konveksi Pakaian	Ciwidey	2 Kelompok	70.000.000	APBD Kab		20 Org Pelaku IK KPK		
2	07	15	07	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Dst.... Pengembangan Industri Kreatif berbasis Fashion	Pembinaan Pelatihan IKM Pakaian Jadi, Gelar produk dan Temu bisnis	Kec. Cangkung dan Pulau Batam	30 Orang pelaku IK pakaian jadi.		APBD Kab				
2	07	15	05	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Pelatihan Pengemasan Produk dari kripik singkong	Cileunyi	2 kelompok	60.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Pelatihan Pengemasan Produk Jamur	Majalaya	1 Kelompok	30.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Pelatihan Kemasan Home Industri Ranginang	Ciparay	40 Orang	30.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Pelatihan Pengemasan Produk Home	Ciparay	1 Kelp	30.000.000	APBD Kab				
2	07	15	05	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Pelatihan pengemasan	Margahayu	1 kel	30.000.000	APBD Kab				
2	07	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah										
2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Terlaksananya Pembinaan IK dalam memperkuat jaringan klaster industri bagi kelompok IK kulit	10 kel	Pembinaan dan pelatihan pelaku IKM unggulan		APBD Kab			370.000.000	
2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Para Pelaku IKM	Ds. Sukajadi kec. Soreang	20 orang pelaku IK Alas kaki sepatu	35.000.000	APBD Kab				
2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Para Pelaku IKM	Ds. Sukamenak Kec. Margahayu	20 orang pelaku IK sepatu	35.000.000	APBD Kab				
2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Para Pelaku IKM	Ds. Cangkung Kulon Kec. Daveuhkolot	20 orang pelaku IK sepatu	35.000.000	APBD Kab				
2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Para Pelaku IKM	Ds. Cempaka Mulya Kec. Soreang dan PKL ke Bogor	20 orang pelaku IK tas, sepatu dan Sabuk.	55.000.000	APBD Kab				
2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Para Pelaku IKM	Ds. Jelekong Kec. Baleendah dan PKL ke Bali	20 orang pelaku IK lukisan	65.000.000	APBD Kab				
2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Para Pelaku IKM	Ds. Pamentasan Kec. Kutawaringin	20 orang pelaku IK Topi	35.000.000	APBD Kab				
2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Para Pelaku IKM	Ds. Jelekong Kec. Baleendah	25 orang pelaku IK kerajinan Wayang	40.000.000	APBD Kab				

2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Para Pelaku IKM	Pameungpeuk	Pelatihan Industri Sepatu RW. 14	35.000.000	APBD Kab		120 Org IKM	
2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Para Pelaku IKM	Solokjaneruk	Terlaksananya pembinaan teknik industri bagi pengrajin kesed	35.000.000	APBD Kab		80 Org IKM	
2	07	16	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Para Pelaku IKM	Ciparay	Pelatihan Home Industri Sepatu Kulit	70.000.000	APBD Kab		60 Org IKM	
2	07	16	05	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses perbankan bagi IKM	Para Pelaku IKM	Dayeuh Kolot	Pelatihan Menyulam dengan menggunakan peta dan manik-manik	35.000.000	APBD Kab			
2	07	16	05	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses perbankan bagi IKM	Para Pelaku IKM	Kab. Bandung	50 org pelaku IKM	40.000.000	APBD Kab		40 Org Pelaku IKM	60.000.000
2	07	16	06	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya Kegiatan Gelar produk, temu Bisnis bagi 90 orang pelaku IKM							
2	07	16	06	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Gelar Produk temu Bisnis						90 Org Pelaku IKM	
2	07	16	07	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dst... Monitoring dan Evaluasi IKM Kab. Bandung	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi IKM Kab. Bandung							
2	07	16	07	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dst... Monitoring dan Evaluasi IKM Kab. Bandung	Monitoring dan evaluasi IKM Kab. Bandung						10 IKM	
2	07	16	07	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dst... Monitoring dan Evaluasi IKM Kab. Bandung	Diagnosa dan Identifikasi IKM Kab. Bandung						8 IKM	
2	07	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				180 Pelaku IKM					
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Olahan makanan	Kab. Bandung	25 Kelompok		APBD Kab			540.000.000
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Teknik Produksi IK Pengolahan Ubi Jalar	Ds. Pasirhuni Kec. Cimaug	20 Pelaku IKM	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Teknologi Produksi IK Pengolahan singkong	Ds. Melatiwangi Kec. Cilengkrang	20 Pelaku IKM	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Teknologi Produksi IK Pengolahan makanan ringan dn kemasan	Ds. Parungserab Kec. Soreang	20 Pelaku IKM	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan teknologi kemasan IK Goreng Bawang Merah	Ds. Maruyung Kec. Pacet	20 Pelaku IKM		APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan teknologi Produksi IK Pengolahan Singkong	Ds. Cipaku Kec. Singkong	20 Pelaku IKM	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Teknologi Kemasan IK dodol Tomat	Ds. Nengkelan Kec. Pasirjambu	20 Pelaku IKM	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Teknologi Kemasan IK makanan Ringan	Ds. Cikoneng Kec. Ciparay	20 Pelaku IKM	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Teknologi Kemasan IK Daging ayam	Ds. Rancakole Kec. Ariasari	20 Pelaku IKM	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Teknologi Produksi IK Pengolahan Kerupuk Elod	Kel. Manggahang Kec. Baleendah	20 Pelaku IKM					
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Olahan daging ayam, abon, susu karamel	Pasirjambu	2 Kelompok	60.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan olahan makanan	Ciwidey	1 Kelompok	35.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan untuk olahan makanan kelontong	Pameungpeuk	1 Kelompok	35.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan pengrajin makanan ringan Opak (Home Industri) Kp. Kaum RW. 06	Pameungpeuk	2 Kelompok	35.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan pengolahan makanan dari singkong	Cileunyi	1 Kelompok	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Fasilitasi pelatihan Home Industri	Cileunyi	1 kelompok	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan untuk kelompok UMKM (Pengrajin makanan asinan 1 kel, Kerudung 1 Kel dan telur asin 1 kel.	Cileunyi	2 kelompok	60.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan dan UKM (Keripik Singkong dan Sangkar Burung)	Cileunyi	2 kelompok	60.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Keterampilan Makanan Olahan dari Ikan	Arjasari	20 org	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan Makanan dari singkong 2 kelompok	Cimencyan	2 Kelompok	60.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan usaha-usaha Makanan hasil pangan	Margahayu	1 kel	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan pengembangan olahan wortel	Kertasari	1 Kelompok	30.000.000	APBD Kab			

2	07	17	01	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pelatihan dan pengembangan home industri pengemasan	Kertasari	1 Kelompok	30.000.000	APBD Kab			
2	07	17	02	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri									
2	07	17	02	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri								
2	07	17	02	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Platihan <i>Good Manufacturing Practice</i> untuk IK Tahu	Ds. Canguang Kec. Canguang	20 pelaku IKM Tahu					
2	07	17	02	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Platihan <i>Good Manufacturing Practice</i> untuk IK Tempe	Ds. Malakasari Kec. Baleendah	20 pelaku IKM tmpe					
2	07	17	03	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Terlaksananya Sosialisasi dan Penerapan SNI bagi IKM							
2	07	17	03	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Sosialisasi dan Penerapan SNI bagi IKM							20 Org Pelaku IKM
2	07	18		Program Penataan Struktur Industri									
2	07	18	02	Program Penataan Struktur Industri	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Terlaksananya penyediaan informasi industri potensial yang dapat di akses masyarakat	Kab. Bandung	website untuk IKM					
2	07	18	03	Program Penataan Struktur Industri	Pembinaan Keterkaitan Hulu hingga Hilir								40 Org Pelaku IKM
2	07	18	04	Program Penataan Struktur Industri	Dst.. Pembuatan Leaflet /booklet/ Profil, Pemetaan Komoditi Industri Kecil dan menengah Unggulan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu bagi IKM.								31 IKM, 1 Paket dan 60 Org Pelaku IKM
2	07	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial									
2	07	19	02	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya data/informasi sebagai sarana media informasi, promosi dan bentuk pengembangan selanjutnya bagi IK	2 Kecamatan		115.000.000	APBD Kab			270.000.000
2	07	19	02	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Pendataan kondisi IK Unggulan	Kec. Cileunyi dan Cilengkrang	Unit Uaha IK					2 Kec
2	07	19	02	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Pembuatan Buku perkembangan dan profil IK unggulan	Kec. Cileunyi dan Cilengkrang	Buku Profil					2 Kec
2	07	19	02	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Pembuatan Leaflet produksi IK unggulan	Kec. Cileunyi dan Cilengkrang	Lembar Leflet					2 Kec
2	07	19	02	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Pembuatan website IKM	Kec. Cileunyi dan Cilengkrang	Lembar Leflet					
						Jumlah 2			14.083.650.000				20.499.000.000
						Jumlah (1+2)			19.010.393.500				25.425.743.500

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS PERTERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kantor Disnakan					
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Jasa telepon, pembuangan air kotor dan perbaikan listrik selama 12 bulan	Kantor Disnakan	40%	36.620.000	APBD Kab	40%	36.620.000
x xx 01 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa perbaikan dan sewa Peralatan/Perlengkapan kantor	Kantor Disnakan	40%	17.300.000	APBD Kab	40%	17.300.000
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas serta bahan dan peralatan kebersihan kantor	Kantor Disnakan	40%	70.596.000	APBD Kab	40%	70.596.000
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Disnakan	40%	97.397.000	APBD Kab	40%	97.397.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak	Kantor Disnakan	40%	50.000.000	APBD Kab	40%	50.000.000
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pengadaan alat-alat listrik dinas	Kantor Disnakan	40%	7.000.000	APBD Kab	40%	7.000.000
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya proses pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Disnakan	40%	48.000.000	APBD Kab	40%	48.000.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pembayaran Langganan Koran dan Majalah	Kantor Disnakan	40%	15.000.000	APBD Kab	40%	15.000.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman kebutuhan rapat dan tamu	Kantor Disnakan	40%	287.122.500	APBD Kab	40%	287.122.500
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kantor Disnakan	40%	98.100.000	APBD Kab	40%	98.100.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Kantor Disnakan	40%	91.700.000	APBD Kab	40%	91.700.000
x xx 01 22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peringatan Hari-Hari Bersejarah	Peran serta Dinas dalam 5 even peringatan hari bersejarah	Kantor Disnakan	40%	19.346.000	APBD Kab	40%	19.346.000
x xx 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Kantor Disnakan					
x xx 02 10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Mebeulair	Terlaksananya pengadaan Mebeulair (Kursi, meja, Meja Rapat)	Kantor Disnakan	40%	16.275.000	APBD Kab	40%	16.275.000
x xx 02 22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kantor Disnakan	40%	85.240.000	APBD Kab	40%	85.240.000
x xx 02 24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhiya kebutuhan Pemeliharaan dan kebutuhan BBM untuk Kendaraan dinas	Kantor Disnakan	40%	358.080.000	APBD Kab	40%	358.080.000
x xx 02 26	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung	Kantor Disnakan	40%	16.345.000	APBD Kab	40%	16.345.000
x xx 02 28	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor							
x xx 02 29	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler							
x xx 03	Program peningkatan disiplin aparatur			Kantor Disnakan					
x xx 03 05	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terlaksananya proses pengadaan seragam dan pakaian olahraga	Kantor Disnakan	40%	-		40%	-
x xx 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kantor Disnakan					
x xx 06 01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terfasilitasinya monitoring, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi perencanaan program Dinas	Kantor Disnakan	40%	77.500.000	APBD Kab	40%	77.500.000
x xx 06 02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan dan administrasi keuangan	Kantor Disnakan	40%	18.940.000	APBD Kab	40%	18.940.000
Jumlah 1						1.410.561.500			1.410.561.500
2 01 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		Jenis Penyakit Ternak yang ditanggulangi	Kab. Bandung	17				
2 01 21 02	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Vaksinasi hewan ternak di RW 01 s/d 20	Ciengkrang	1 Paket		APBD Kab		
2 01 21 02	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pemeliharaan kesehatan dan penyakit ternak	Vaksinasi flu burung	Dayeuh Kolot	1 paket		APBD Kab		

2	01	21	02	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pemeliharaan kesehatan dan penyakit ternak	Tertatanya pemeliharaan unggas di pemukiman dan Tersedianya Vaksin PHMS (AI Rabies Brucellosis)	Rancaekek, Cileubyi, 31 Kec	1 Paket	345.000.000	APBD Kab		1 Paket	353.483.607
2	01	21	03	Program pengembangan dan peningkatan hasil peternakan	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Kompensasi unggas yang dimusnahkan eliminasi HPR	31 Kecamatan	1000 ekor	30.000.000	APBD Kab		1 Paket	30.737.705
2	01	21	06	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium	Terbangunnya sarana dan prasarana puskesmas	Katapang	1 Paket	135.000.000	APBD Kab		1 Paket	138.319.672
2	01	21	07	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pengawasan dan pembinaan penerapan kesmavet dan kesrawan	Tersedianya kualitas produk ternak yang HAUS	Pangalengan, Kertasari, dan Cilengkrang	1 Paket	100.000.000	APBD Kab		1 Paket	102.459.016
2	01	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan		Produk daging (ton), produksi telur (ton), dan produksi susu (ton)	Kab. Bandung	16					
2	01	22	01	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan produksi hasil peternakan	Terpeliharanya ternak pemerintah	UPTD Pembibitan ternak Kec. Pasirjambu		375.000.000	APBD Kab			322.340.426
2	01	22	02	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pembibitan dan Perawatan ternak	Meningkatnya pengetahuan para Peternak dan pembibitan kambing ettawa	pm	100 ekor	870.000.000	APBD Kab			747.829.787
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Meningkatnya Jumlah Petugas PKB, Meningkatnya Populasi Kelinci Pembibitan dan pengetahuan dan Keterampilan peternak dan populasi sapi	Tersebar di 31 Kec.	1 paket	1.340.000.000	APBD Kab			1.151.829.787
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pelatihan Pakan Ternak	Ciparay	5 kelompok			APBD Kab		
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pembinaan pengembangan usaha ternak	Dayeuh Kolot	1 paket			APBD Kab		
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pengembangan Teknologi Pembuatan Pakan	Arjasari	1 Kelompok			APBD Kab		
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pengadaan Mesin Pakan Kelinci	Pangalengan	2 kelompok			APBD Kab		
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pelatihan teknologi pakan ternak	Margaasih	5 desa			APBD Kab		
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pelatihan Budidaya Domba	Cicalengka	25 orang			APBD Kab		
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pelatihan untuk peternak kambing ettawa	Kertasari	1 Kelompok			APBD Kab		
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pengembangan Budidaya Kelinci	Kertasari	1 paket			APBD Kab		
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pelatihan budidaya ternak domba	Pacet	10 Kelompok			APBD Kab		
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pelatihan ternak Kelinci	Pacet	2 kelompok			APBD Kab		
2	01	22	08	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Pelatihan Budidaya Domba	Pacet	1 paket			APBD Kab		
2	01	23		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Terinformasinya potensi peternakan dan perikanan kepada masyarakat	Jumlah Pasar Hewan	Kab. Bandung	18					
2	01	23	01	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	Pelatihan pembuatan susu yogurt	Cilengkrang	1 Paket	300.000.000	APBD Kab			185.185.185
2	01	23	07	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pameran dan temu bisnis bidang peternakan dan perikanan	Kab. Bandung	1 Paket	105.000.000	APBD Kab			64.814.815
2	01	24		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Terpenuhinya penerapan teknologi pengolahan limbah ternak yang ramah lingkungan bagi masyarakat								
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Meningkatkan penerapan teknologi pengolahan limbah	9 kec	1 paket	1.274.000.000	APBD Kab			1.592.241.148
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Permodalan dan pelatihan peternakan	Ciwidey	1 Kelompok			APBD Kab		
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bio Gas (pemanfaatan limbah sapi)	Ciwidey	1 Paket			APBD Kab		
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan biogas Kelompok Ternak sapi Perah	Rancabali	6 Paket			APBD Kab		
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Mesin Penggiling pakan Ternak RW. 03	Pameungpeuk	1 Paket			APBD Kab		
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Penambahan modal mesin penetas telur RW. 03	Pameungpeuk	4 bok			APBD Kab		

2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan mesin penetas Telur	Pameungpeuk	3 unit		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan mesin penetas Telur RW. 01	Pameungpeuk	4 unit		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan mesin tetas	Pameungpeuk	12 unit		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Kandang Ternak Domba	Cimaung	60 unit		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Biogas	Arjasari	1 Paket		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	PEMBUATAN RAKTOR BIOGAS RW 25	Pangalengan	4 unit		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan Biogas RW 03	Cilengkrang	1 Paket		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pelatihan Pembuatan Kompos/ Pupuk Organik dari Kotoran Sapi	Cikancung	2 Paket		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengelolaan Limbah Ternak Menjadi Kompos	Cikancung	2 Kelompok		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan mesin pengolahan limbah sapi	Kertasari	1 unit		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pelatihan Biogas	Kertasari	20 orang		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengembangan Bio Gas	Kertasari	1 paket		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pelatihan Biogas dan pengolahan kompos Kohe	Paseh	6		APBD Kab			
2	01	24	02	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan alat pengolah bulu domba	Pacet	1 unit		APBD Kab			
2	01	24	07	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi rumah potong hewan	Terbangunnya sarana dan prasarana RPH	Cicalengka, Baleendah, Pangalengan, banjaran, cangkuang, solokan jeruk, sareang	7 paket	383.395.000	APBD Kab			479.165.852
2	05	20		Program pengembangan budidaya perikanan									
2	05	20	01	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan Budidaya perikanan	Tersedianya tenaga kerja pemeliharaan kolam ikan, terlaksananya pengendalian penyakit ikan, tersedianya kebutuhan penunjang untuk proses pembenihan ikan, dan pakan ikan	UPTD Pembenihan ikan Kec. Ciparay	1 Paket	225.000.000	APBD Kab			236.464.968
2	05	20	02	Program pengembangan budidaya perikanan	Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan	Mendorong pembenihan ikan yang bersertifikat	6 Kec (Majalaya, Ciparay, Pacet, Banjaran, Soreang, Bojongsoang)	15 Paket	200.000.000	APBD Kab			210.191.083
2	05	20	03	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan Budidaya perikanan	Terwujudnya Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan bersertifikasi	Majalaya, Ciparay, Pacet, Banjaran, Soreang, Rancaekek	15 Paket		APBD Kab			
2	05	20	03	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan Budidaya perikanan	Pemodal dan Pelatihan Perikanan	Ciwidey	1 kelompok		APBD Kab			
2	05	20	03	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan Budidaya perikanan	Terwujudnya Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan bersertifikasi	Majalaya, Ciparay, Pacet, Banjaran, Soreang, Bojongsoang	15 Paket	360.000.000	APBD Kab			378.343.949
2	05	20	03	Program pengembangan budidaya perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Bantuan Peralatan dan benih ikan	Cileunyi	1 kelompok		APBD Kab			
2	05	20	03	Program pengembangan budidaya perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Pelatihan Sertifikasi CPIB Ikan Lele Sangkuriang	Cileunyi	1 Paket		APBD Kab			

2	05	20	03	Program pengembangan budidaya perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Pelatihan Budidaya ikan	Cimaung	1 Kelompok		APBD Kab		
2	05	20	03	Program pengembangan budidaya perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Pelatihan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Margahayu	1 Paket		APBD Kab		
2	05	20	03	Program pengembangan budidaya perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Pelatihan budidaya leledumbo	Nagreg	1 Paket		APBD Kab		
2	05	20	03	Program pengembangan budidaya perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Pelatihan pembuatan pakan ikan	Nagreg	2 kelompok		APBD Kab		
2	05	20	03	Program pengembangan budidaya perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Pelatihan budidaya ikan mas & lele	Pacet	1 Paket		APBD Kab		
2	05	23		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan								
2	05	23	01	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan	Berkembangnya pasca panen dan pengolahan Hasil Perikanan	Baleendah, Pasirjambu, Margaasih, Ciparay, Cangkuang, Soreang	1 Paket	335.000.000	APBD Kab		350.000.000
2	05	23	01	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan	Pelatihan Pengelolaan Ikan Lele	Margahayu	1 Kelompok		APBD Kab		
2	05	24		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar								
2	05	24	01	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Terwujudnya kawasan budidaya ikan yang berwawasan lingkungan, terkendalinya hama dan penyakit ikan, teroptimisasi pengelolaan Perairan Umum melalui restocking dan CBF, serta terwujudnya pelestarian ikan langka	Pangalengan, Rancabali, Banjaran, Baleendah, Rancaekek	1 paket	160.000.000	APBD Kab		200.000.000
Jumlah 2									6.537.395.000			6.543.407.000
Jumlah (1+2)									7.947.956.500			7.953.968.500

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Bandung	100%	12.163.000	APBD KAB		100%	12.163.000
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Bandung	100%	4.800.000	APBD KAB		100%	4.800.000
x xx 01 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bandung	100%	20.510.000	APBD KAB		100%	20.510.000
x xx 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Bandung	100%	16.800.000	APBD KAB		100%	16.800.000
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Bandung	100%	8.000.000	APBD KAB		100%	8.000.000
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Bandung	100%	83.156.000	APBD KAB		100%	83.156.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Bandung	100%	47.767.200	APBD KAB		100%	47.767.200
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Bandung	100%	4.233.000	APBD KAB		100%	4.233.000
x xx 01 14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Bandung	100%	6.625.000	APBD KAB		100%	6.625.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Bandung	100%	15.804.000	APBD KAB		100%	15.804.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Bandung	100%	222.330.000	APBD KAB		100%	222.330.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Bandung	100%	64.750.000	APBD KAB		100%	64.750.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Kab. Bandung	100%	40.300.000	APBD KAB		100%	40.300.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Bandung	100%	54.750.000	APBD KAB		100%	54.750.000
x xx 01 21	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Kab. Bandung	100%	7.250.000	APBD KAB		100%	7.250.000
x xx 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
x xx 02 07	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Bandung	100%	38.970.000	APBD KAB		100%	38.970.000
x xx 02 08	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Bandung	100%	7.500.000	APBD KAB		100%	7.500.000
x xx 02 22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Bandung	100%	73.798.800	APBD KAB		100%	73.798.800
x xx 02 24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Bandung	100%	296.845.000	APBD KAB		100%	296.845.000
x xx 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
x xx 06 01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Bandung	100%	30.085.000	APBD KAB		100%	30.085.000
x xx 06 02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kab. Bandung	100%	9.800.000	APBD KAB		100%	9.800.000
x xx 06 04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Bandung	100%	8.975.000	APBD KAB		100%	8.975.000
					1.075.212.000				1.075.212.000
2 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						M-7		
2 01 15 01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Berkembangnya kelompok-kelompok usaha agribisnis		281.000.000	APBD KAB			527.000.000
2 01 15 01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	hortikultura						
2 01 15 01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Peningkatan kemampuan, keterampilan pelaku agribisnis hortikultura	Pangalengan, Kertasari, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Cimencyan,					

2	01	15	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Kelompok usaha hortikultura organik (GAP) (kelompok)	Arjasari, Cileunyi, Cimaung, Cikancung	3						
2	01	15	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Adopsi teknologi sub sistem hulu (GAP) untuk komoditas buah-buahan, tanaman Hias dan biofarmaka (kelompok)			3					
2	01	15	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	penerapan teknologi GHP dan GMP hortikultura (paket)			2					
2	01	15	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Peningkatan kemampuan manajemen agribisnis dan wirausaha hortikultura (paket)			2					
2	01	15	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Fasilitasi proses kemitraan usaha agribisnis berbasis komoditas hortikultura (Sayuran Eksklusif, Stroberi, Buah-buahan, dan Tanaman Hias)			3					
1	21	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan							M-5			
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	Pengembangan Manajemen Database berbasis komputerisasi	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan		500.000.000	APBD KAB			510.930.870	
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	a. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi agribisnis, pembangunan pertanian dan kehutanan melalui website dan multimedia (Paket)		1						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	b. Pengembangan local areal network (LAN) (Paket)		1						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	c. Tersusunnya laporan dan sasaran database produk pangan (luas tanam, panen, produksi, dan produktivitas) hortikultura, perkebunan bulanan, triwulan semesteran, dan tahunan (buku)		7						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	d. Tersusunnya inventarisasi alat mesin pertanian dan bencana alam dan OPT bulanan dan tahunan, (paket)		2						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	e. Fasilitasi petugas pengumpul data statistik kecamatan		2						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	f. Sinkronisasi data dan informasi statistik pertanian, kali		2						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	g. Tersusunnya data potensi dan pelaku usaha agribisnis komoditas unggulan pertanian, perkebunan, dan kehutanan		1						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan								
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	a. Rapat koordinasi perencanaan pembangunan		1						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	b. Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan								
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	- Rencana Kerja Dinas Tahunan, (buku)		1						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	- Rencana Detail (Roadmap) Pembangunan, (buku)		1						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	- Tersusunnya roadmap (rencana detail) kemitraan bisnis produk padi, hortikultura, dan perkebunan organik		1						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	- Peta sentra produksi komoditas hortikultura		1						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan								
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	a. Laporan Tahun (buku)		1						
1	21	16	02	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penyusunan data base potensi produk pangan	b. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi		31						
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Pengembangan pertanian padi organik (SRI)	Baleendah, Bojongsoang, Solokanjeruk, Ciparay, Banjaran		315.000.000	APBD KAB			321.886.448	
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	a. Peningkatan mutu dan produktivitas produk padi organik untuk penyesuaian standar kualitas dan keamanan pangan								
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Sosialisasi dan Penerapan Teknologi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen (GHP dan GMP)		1						
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Stimulan sarana pengolahan hasil dan pasca panen (pkt)		5						
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	b. Tersertifikasinya produk padi organik								
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Sertifikasi keamanan Pangan GAP (P3) (kelompok)		5						
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	c. Penumbuhan forum kemitraan bisnis produk organik								
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Tersusunnya roadmap (rencana detail) kemitraan bisnis produk padi organik		1						

1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Berkembangnya kemitraan bisnis produk padi organik			1										
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Penumbuhan grup pasca panen													
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	a. Jumlah Grup Pengolahan Hasil dan Pasca Panen Komoditas Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu)	Majalaya, Ciparay, Solokanjeruk, Baleendah, Banjaran, Arjasari, Cimaung, Kutawaringin, Soreang, Cicalengka,Ranc abali, Paseh, Ibutn, Bojongsoang, Cimaung, Pameungpeuk, Nagreg, Cikancung, Cilengkrang, Cimaung, Nagreg, Cicalengka, Cimencyan		5										
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	b. Bimbingan teknis pengolahan hasil dan penanganan pasca panen (padi, jagung, dan ubi kayu), kelompok				2									
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	c. Bimbingan teknis manajemen kelembagaan (kelompok)				5									
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	d. Fasilitas stimulan alat mesin pengolahan hasil dan pasca panen				2									
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi data losis, Penumbuhan grup pasca panen, (paket)				4									
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Inventarisasi pelaku olahan hasil pertanian dan Penggilingan padi, jagung, dan ubi kayu (paket)				1									
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Meningkatnya penanganan hasil pertanian tanaman pangan													
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	a. % penurunan kehilangan/kerusakan tanaman pangan				0,2-5/tahun									
1	21	16	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	b. Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu				5									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Pengembangan pertanian padi organik (SRI)	Baleendah, Bojongsoang, Solokanjeruk, Ciparay, Banjaran				1.896.490.000	APBD KAB							1.937.950.570
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	a. Perluasan Areal Pengembangan Padi Organik (hektar)				60									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	b. Jumlah kelompok usaha padi organik				3									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	c. Meningkatnya kinerja sistem pemenuhan input produksi (stok, distribusi dan akses usahatani terhadap input)													
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Stimulasi sarana produksi (benih, pupuk organik), (paket)				3									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	pupuk organik (Ton)													
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	pupuk cair (liter)													
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	agen Hayati (Paket)													
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Jumlah fasilitas sistem penyediaan sarana produksi													
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Fasilitas alat pengolahan pupuk organik (UPPO)				5									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	d. Peningkatan mutu dan produktivitas produk padi organik untuk penyesuaian standar kualitas dan keamanan pangan													
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Sosialisasi dan Bimbingan teknis penerapan SOP GAP				3									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Penerapan teknologi pupuk berimbang untuk sterilisasi lahan pertanian (kecamatan)				6									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Pengembangan Agribisnis Jagung dan Ubi kayu	Nagreg, Cikancung, Cicalengka, Arjasari, Cilengkrang, Cimaung, Nagreg, Arjasari, Cimencyan												
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	a. Perluasan Areal Pengembangan Jagung (hektar)													
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	b. Jumlah kelompok usaha agribisnis jagung (kelompok)													
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	c. Meningkatnya kinerja sistem pemenuhan input produksi (stok, distribusi dan akses usahatani terhadap input)													
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Stimulasi sarana produksi (benih, pupuk) (paket)				2									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	d. Peningkatan mutu dan produktivitas produk untuk penyesuaian standar kualitas dan keamanan pangan													
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Penyusunan Standar Operasional Prosedur Teknologi Keamanan Pangan (GAP)				1									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Sosialisasi dan Bimbingan teknis penerapan SOP GAP				2									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan agribisnis tanaman pangan(paket)				18									
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan													

1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	a. Produksi (ton)						
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Padi	468.393					
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Jagung	51.039					
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Ubi kayu	57.779					
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	b. Produktivitas (kuintal/ha)						
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Padi	61.5					
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Jagung	63					
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Ubi kayu	112					
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Luas areal penerapan budidaya serealia, umbi, dan kacang-kacangan yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati						
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	a. SLPTT Padi (hektar)	6.000					
1	21	16	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	b. SLPTT Jagung (hektar)	1.500					
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	berkembangnya diversifikasi tanaman pangan untuk pengembangan tanaman umbi-umbian dan kacang-kacangan yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati		75.000.000	APBD KAB			76.639.630
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	a. Perluasan Areal Pengembangan SLPTT (hektar)						
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	- Ubi kayu	Cimaung, Nagreg, Cicalengka, Cilengkrang, Arjasari, Cimencyan	50				
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	b. Jumlah kelompok usaha agribisnis (kelompok)						
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	- Ub kayu		1				
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	c. Meningkatkan kinerja sistem pemenuhan input produksi (stok, distribusi dan akses usahatani terhadap input)						
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	- Stimulasi sarana produksi (benih, pupuk) (paket)	Cimaung, Nagreg, Cicalengka, Cilengkrang, Arjasari, Cimencyan, Arjasari, Cimaung, Cikancung	2				
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	d. Peningkatan mutu dan produktivitas produk untuk penyesuaian standar kualitas dan keamanan pangan	Cimaung, Nagreg, Cicalengka, Cilengkrang, Arjasari, Cimencyan, Arjasari, Cimaung, Cikancung					
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	- Penyusunan Standar Operasional Prosedur Teknologi		1				
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	Keamanan Pangan (GAP dan GHP)						
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	- Sosialisasi dan Bimbingan teknis SOP GAP dan GHP		1				
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi pengembangan agribisnis tanaman pangan (paket)		18				
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Pengembangan pertanian hortikultura organik (sayuran, buah-buahan, paprika)	Pangalengan, Pasirjambu, Ciwidey, Arjasari	250.000.000	APBD KAB			255.465.435
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	a. Perluasan Areal Pengembangan hortikultura organik (hektar)						
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Sayuran dataran rendah						
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Paprika						

1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Buah-buahan							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	b. Jumlah kelompok usaha hortikultura organik							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Sayuran dataran rendah							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Paprika							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Buah-buahan							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	c. Meningkatkan kinerja sistem pemenuhan input produksi (stok, distribusi dan akses usahatani terhadap input)							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Stimulasi sarana produksi (benih, pupuk organik), (paket)							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	pupuk organik (Ton)		50					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	pupuk cair (liter)		75					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	agen Hayati (Paket)		1					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Jumlah fasilitas sistem penyediaan sarana produksi							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	terfasilitasinya unit pengolahan pupuk organik (UPPO)		1					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	terfasilitasinya unit green house dan screen house		1					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	register lahan pertanian hortikultura							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	d. Peningkatan mutu dan produktivitas produk padi organik untuk penyesuaian standar kualitas dan keamanan pangan							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Sosialisasi dan Bimbingan teknis penerapan SOP GAP		1					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Sosialisasi dan Penerapan Teknologi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen (GHP dan GMP) (kel)		2					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Sosialisasi sertifikasi produk hortikultura organik (kel)		2					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Stimulan sarana pengolahan hasil dan pasca panen (pkt)		3					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Pengembangan usaha agribisnis stroberi untuk menunjang pengembangan OVOP di wilayah paciran							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	a. Jumlah kelompok usaha							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	b. Meningkatkan kinerja sistem pemenuhan input produksi (stok, distribusi dan akses usahatani terhadap input)							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Stimulan sarana produksi (benih/bibit) polibag		5000					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- terfasilitasi prasarana penunjang							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Unit Pengolahan Pupuk Organik		1					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Infrastruktur pengairan (Embung, Irigasi Sprinkler, Tetes)		6					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	c. Peningkatan mutu dan produktivitas produk organik untuk penyesuaian standar kualitas dan keamanan pangan							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Sosialisasi dan Bimbingan teknis penerapan SOP GAP		3					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Sosialisasi dan Penerapan Teknologi Pengolahan dan		3					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	dan Penanganan Pasca Panen (GHP dan GMP) (kel)							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Stimulan pengolahan dan pasca panen stroberi		3					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Sertifikasi benih stroberi		1					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian sarana produksi untuk menunjang konservasi di DAS hulu dan daerah rawan bencana							
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	a. Bantuan bibit buah-buahan (pohon)		3.000					
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	b. SL Pertanian Konservasi (kel)		1					

1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Peningkatan aksesibilitas petani terhadap lembaga pemodal						
1	21	16	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi pengembangan agribisnis hortikultura organik dan stroberi (pkt)		8				
1	21	16	20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Terfasilitasinya penyediaan benih bermutu dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan	Solojaneruk, Baleendah	250.000.000	APBD KAB			255.465.435
1	21	16	20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan perbenihan/perbibitan	a. Peningkatan ketersediaan benih bermutu pangan (%)		2				
1	21	16	20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan perbenihan/perbibitan	b. Peningkatan ketersediaan benih bermutu hortikultura (%)						
1	21	16	20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Berkembangnya benih lokal melalui teknologi mutu benih dan penerapan sistem pengujian benih pada tanaman pangan hortikultura						
1	21	16	20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan perbenihan/perbibitan	a. Jumlah benih tanaman pangan yang tersertifikasi (unit)						
1	21	16	20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan perbenihan/perbibitan	b. Jumlah benih/bibit hortikultura tersertifikasi (unit)						
1	21	16	20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi pengembangan perbenihan (paket)		5				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	Pengembangan kemitraan usaha agribisnis produk higienis berbasis komoditas perkebunan		325.000.000	APBD KAB			332.105.065
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	a. Terlaksananya forum pembangunan perkebunan	Kabupaten Bandung					
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	b. Terlaksananya sosialisasi pengembangan green product perkebunan						
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	- Sosialisasi peluang pengembangan perkebunan higienis		1				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	- Sosialisasi Sertifikasi produk dan bibit perkebunan		1 (kopi)				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	c. Fasilitasi proses kemitraan usaha agribisnis berbasis perkebunan						
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	- Jumlah forum kemitraan dan peningkatan mutu hasil lokal		2 (kopi)				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	Penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan pengembangan agribisnis perkebunan dan pengelolaan lahan dan air melalui kegiatan konservasi						
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	a. Terlaksananya penyusunan Informasi SID konservasi lahan perkebunan	Pasirjambu	1				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	Terkendalinya Gangguan Usaha Perkebunan (OPT dan lain-lain) di wilayah sentra perkebunan						
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	a. Sosialisasi SLPHT perkebunan		2 (kopi/ Pbko, teh)				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	b. Proporsi luas serangan OPT utama perkebunan terhadap total luas panen		maksimal 5% dari luas serangan				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	c. Terlaksananya Uji Coba Penanganan/Pengendalian OPT di perkebunan rakyat	Pasirjambu, Pangalengan, Cikancung dan Cimenvan	1 (teh)				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	d. Terlaksananya Pert.Kebijakan Teknis Operasional Perlindungan Perkebunan	Distanbunhut	1				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	e. Fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT (paket)	Sentra perkebunan rakvat	4				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	f. Sosialisasi IBK (Indikator Kinerja Blok) Perkebunan	Distanbunhut	1				
1	21	16	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi forum kemitraan, pengembangan green product dan konservasi lahan (paket)		5				
1	21	16	29	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Pengembangan Agribisnis Tembakau	Cicalengka, Cileunyi, Pacet,					
1	21	16	29	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	a. Perluasan areal tembakau (hektar)	Paseh, Ibum, Cikancung,	50				
1	21	16	29	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	b. Jumlah Kelompok tani tembakau (kelompok)	Arjasari, Cimaung, Soreang, Pasirjambu, Kutawaringin, Ciwidev	5				

2	01	17	07	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi pengembangan pemasaran hasil komoditas unggul daerah (pkt)		31					
2	01	17	09	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarkan	Berkembangnya usaha rumah kemasan	Pasirjambu, Pangalengan, Rancabali		434.300.000	APBD KAB			
2	01	17	09	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarkan	a. terfasilitasinya sarana dan prasarana penunjang pengembangan rumah kemasan hortikultura (kec)		3					
2	01	17	09	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarkan	b. terbentuknya kerjasama petani dengan pasar modern dan tradisional							
2	01	17	09	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarkan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi pengembangan rumah kemasan (pkt)		3					
2	01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan							M-7		1.207.859.000
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan sarana	Ciparay, Bojongsong		250.000.000	APBD KAB			
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	produksi tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di							
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	lokasi penerapan budidaya yang tepat							
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	a. Bantuan traktor R-2 (unit)		6					
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	b. Bantuan paddy transplanter		1					
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	c. Bantuan pompa air (unit)		18					
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	d. Penguatan UPJA pemula (unit)		27					
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	e. Penguatan UPJA berkembang (unit)		2					
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	f. Penguatan UPJA profesional (unit)							
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	g. Tersusunnya roadmap kebutuhan pupuk dan alsintan (pkt)		1					
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terkendalinya serangan OPT di lokasi penerapan budidaya							
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	a. Jumlah luas areal yang terserang OPT (hektar)							
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	b. Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit)		1					

2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	c. Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (model)		3				
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	d. Jumlah kecamatan yang menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (kecamatan)		16				
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	e. Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen		maksimal 5% dari luas serangan				
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	f. Fasilitas sarana prasarana pengendalian OPT (paket)		31				
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	g. Pembentukan brigade proteksi tanaman dan forum komunikasi desa		1				
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	h. Sosialisasi SLPHT (paket)		3				
2	01	18	02	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi (pkt)		20				
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya pengembangan fasilitas dalam pengelolaan lahan	Kab. Bandung		945.900.000	APBD KAB		
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian,						
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian						
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	a. Terlaksananya 36,212 (ha), 64 unit kegiatan pengelolaan air irigasi						
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	b. Terlaksananya 1.810 Ha optimasi lahan pertanian (pupuk organik), dan 9 km JUT/Jalan produksi		2				
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	c. Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala irigasi pedesaan, pengembangan air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi		3				
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	d. Tersedianya optimasi pemanfaatan Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES) yang berfungsi (ha)		314				
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	e. Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, cek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi		5				
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya pengembangan fasilitas dalam pengelolaan lahan						
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	dan air melalui upaya pemberdayaan kelembagaan petani						
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	a. Revitalisasi P3A Mitra Cai		1				
2	01	18	03	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	b. Revitalisasi GP3A Mitra Cai		1				

2	01	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Peningkatan Produksi (ton) : 1. Padi 2. Jagung 3. Sayuran 4. Buah-buahan 5. Tanaman Hias 6. Tan. Obat-obatan 7. Kopi 8. The 9. Cengkeh		6			M-7	11	1.878.978.000
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan agribisnis komoditas unggulan perkebunan	Kopi dan Teh:		275.000.000	APBD KAB			
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	a. Perluasan Areal Pengembangan perkebunan (hektar)	Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, Kertasari,						
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Kopi	Rancabali, Ibun, Pacet	100					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Teh'		200					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Cengkeh	Cengkeh: Tersebar di Kab, Bandung	100					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	b. Jumlah kelompok usaha agribisnis tanaman pangan							
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Kopi		1					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Teh'		1					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Cengkeh		1					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	c. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan							
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Kopi (ton)		18.119					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Teh (ton)		467					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Cengkeh (ton)		16.307					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	d. Meningkatnya kinerja sistem pemenuhan input produksi (stok, distribusi dan akses usahatani terhadap input)							
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	benih/bibit bersertifikat (unit)		benih kopi 100.000 biji, Bibit kopi 150.000 pohon, teh 15.000 pohon, cengkeh 10.000 pohon					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- terfasilitasinya prasarana penunjang							
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Unit Pengolahan Pupuk Organik (unit)		1					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Infrastruktur pengairan (Embung) (unit)		1					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Infrastruktur jalan produksi (meter)		3.000					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	c. Peningkatan mutu dan produktivitas produk kebun untuk penyesuaian standar kualitas dan keamanan pangan	Pangalengan, Kertasari, Ciwidey, Ibun, Pacet						
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Penyusunan Standar Operasional Prosedur Teknologi		1					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Keamanan Pangan (GAP, GHP, dan GMP)							
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Sosialisasi dan Bimbingan teknis penerapan SOP GAP		1					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Sosialisasi dan Penerapan Teknologi Pengolahan dan dan Penanganan Pasca Panen (GHP dan GMP) (kel)		1					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Stimulan pengolahan dan pasca panen kopi (paket)		1					
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	- Terlaksananya pembangunan pusat penampungan pucuk hasil perkebunan	Pangalengan, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Soreang						
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya pengembangan fasilitasi Terpadu dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan pengembangan agribisnis perkebunan	Pasirjambu, Cimencyan, Cikancung, Ibun, Nagreg, Kutawaringin,						

2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	a. Bantuan bibit kopi (pohon)	Pasirjambu, Soreang	25.000				
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	b. Bantuan benih rumput pengeras teras (kg)		1.000				
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	c. Bantuan ternak domba (ekor)		16				
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	d. Pengembangan kebun rakyat bibit kopi (benih/ka)		75.000				
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	e. Fasilitasi Alat Pengolahan Pupuk Organik		1				
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	f. Terlaksananya Kegiatan konservasi lahan Terpadu pada lahan kering untuk menunjang perluasan tutupan vegetasi pada potensi lahan kritis (hektar)		40				
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	g. Terlaksananya Kegiatan konservasi lahan terpadu untuk menunjang perluasan tutupan vegetasi pada potensi lahan kritis melalui pemberdayaan lembaga petani (hektar)		1				
2	01	19	02	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi pengembangan agribisnis perkebunan dan konservasi lahan (nkt)		10				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas hortikultura unggulan lokal	Pangalengan, Kertasari, Cimaung, Arjasari, Ciwidey, Pasirjambu		175.709.550	APBD KAB		
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	a. Produksi (Ton)	Rancabali, Cimenvan, Margaasih					
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Bawang Merah		23.593				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Cabe		20.603				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Kentang		175.026				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Tomat		66.458				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Kubis		136.557				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Laju Peningkatan Produktivitas kebun/lahan usaha hortikultura (mengajukan registrasi)						
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	a. Buah (kebun)		1,50%				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	b. Sayuran (lahan usaha)		2,50%				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	c. Biofarmaka (lahan usaha)		1%				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	d. Tanaman Hias (lahan usaha)		1%				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Meningkatnya kinerja sistem pemenuhan input produksi (stok, distribusi dan akses usahatani terhadap input)						
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	a. Pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan sarana produksi						
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Stimulan benih/bibit bersertifikasi (pkt)			Buah 7.500 pohon, stroberi 5.000 polybag, sayuran eksklusif 2 kg, tan. Hias 2 paket, biofarmaka 1 pkt			
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Stimulan pupuk organik (paket)		4				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Fasilitasi Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) (unit)		3				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	b. Pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan prasarana produksi						
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Fasilitasi pengelolaan lahan dan irigasi (Embung, irigasi tetes, dan irigasi springkle) (paket)		3				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Fasilitasi pompa air (unit)		5				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Fasilitasi screen house dan green house untuk menunjang pengembangan produk yang berdaya saing (paket)		3 (tanaman hias, sayuran, stroberi)				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT (paket)		1				
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	- Fasilitasi rumah Kompos (unit)		1				

2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Peningkatan mutu dan produktivitas produk organik untuk penyesuaian standar kualitas dan keamanan pangan							
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	a. Stimulan sarana pengolahan produk segar hortikultura (kel)		2					
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	b. Stimulan sarana pengolahan produk olahan hortikultura (kel)		2					
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan pemberdayaan kelembagaan petani							
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	a. Bantuan bibit buah-buahan (pohon)		2.000					
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	b. Bantuan bibit biofarmaka untuk menunjang pemberdayaan kelompok posvandu (pohon)		2.000					
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	c. Bantuan bibit buah-buahan dan biofarmaka untuk menunjang pemberdayaan kelompok (P2WKSS, TMMD, Lomba Desa, dan Lomba Sekolah)		3.000					
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	d. SL Pertanian Hortikultura (kel)		4					
2	01	19	03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi pengembangan agribisnis hortikultura dan konservasi lahan (pkt)			1.367.090.450				
2	02	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan				9					
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Pengembangan agribisnis hasil non-kayu berbasis komoditas:			300.000.000	APBD KAB		476.000.000	
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	lebah madu							
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	a. Jumlah kelompok tani (kelompok)		7					
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	b. Bantuan bibit/benih lebah madu (stup)	Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Cangkuang, Paseh	500					
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Pengembangan agribisnis hasil non-kayu berbasis komoditas							
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Jamur Tiram							
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	a. Jumlah kelompok tani (kelompok)			5 Unit (Ciwidey, Pasirjambu, Kutawaringin, Cicalengka, Pangalengan)				
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Pengembangan agribisnis hasil non-kayu berbasis komoditas							
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Ulat Sutera							
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	a. Jumlah kelompok tani (kelompok)			2 unit (Pangalengan, Pasirjambu)				
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Pengembangan agribisnis hasil non-kayu berbasis komoditas							
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Bambu							
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	a. Jumlah kelompok tani (kelompok)			1 unit (Banjaran, 10 ha)				
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Pemanfaatan di lahan bawah tegakan (hektar)			20 ha (Arjasari)				
2	02	15	10	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi pengembangan agribisnis kehutanan dan konservasi lahan, penyusunan database (pkt)		5					
2	02	15	07	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Pengembangan kemitraan agribisnis kehutanan	Kabupaten Bandung						
2	02	15	07	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	a. Terlaksananya forum pertemuan petani kayu rakyat dengan industri		1					
2	02	15	07	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	b. Terlaksananya forum pertemuan petani hasil hutan non-kayu dengan industri		1					
2	02	15	07	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi pengembangan agribisnis kemitraan dan penyusunan database (pkt)		2					
2	02	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi		22				1.629.360.000	

2	02	16	02	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Tersedianya kebun bibit tanaman untuk penghijauan (unit)	Pasirjambu, Kutawaringin, Baleendah, Soreang, margasih, Dayeuhkolot, Katapang, Margahayu, Pameungpeuk	2 unit	1.495.600.000	APBD KAB					
2	02	16	02	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Tersedianya kebun bibit rakyat untuk mengurangi luasan lahan kritis (unit)		40 unit (3.000 ha)							
2	02	16	02	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Tersedia lahan Agroforestry (hektar)		10 unit (250 ha) soreang, kutawaringin, cangkuang, banjaran, cimaung, pangalengan, arjasari, ciparay, baleendah, pacet, kertasari, ibun, nagreg, paseh, cicalengka, cikancung, cilengkrang, cileunyi, cimanyar							
2	02	16	06	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya pencangan Bulan Menanam Nasional			75.000.000	APBD KAB					
2	02	16	06	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya pencanangan JABAR hijau berbasis sekolah (hektar)	Arjasari	50							
2	02	16	06	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya pembuatan bangunan sipil teknis (unit)	Ciparay	50							
2	02	16	06	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Penanganan Rehabilitasi Lahan Kritis (hektar)	Kertasari, Pangalengan, Cikancung, Paseh, Pacet, Arjasari, Cimaung, Ibum, Ciparay, Baleendah, Cilengkrang, Rancaekek	500							
2	02	16	06	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya pembuatan bangunan sipil teknis untuk mengendalikan terjadinya bencana (unit)	Kertasari, Pangalengan, Cikancung, Paseh, Pacet, Arjasari, Cimaung	43							
2	02	16	06	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi rehabilitasi lahan dan hutan (pkt)		1							
2	02	17		Program Perlindungan dan Konservasi Hutan		Jumlah kecamatan yang dikendalikan dan gangguan hutan									
2	02	17	06	Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat yang menggunakan hasil hutan kayu dengan terlaksananya sosialisasi Permenhut peredaran hasil hutan	Kabupaten Bandung	5 kec							
2	02	17	06	Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Terlaksananya pemasangan rambu/ papan larangan untuk pencegahan kerusakan hutan (Paket)		1							
2	02	17	06	Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat pengusaha industri kayu dalam perijinan hasil dengan terlaksananya sosialisasi Permenhut ijin usaha industri hasil hutan kayu		5 kec							
2	02	17	02	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	Meningkatnya kepedulian masyarakat kelestarian hutan	Kabupaten Bandung		64.616.349	APBD KAB					143.100.000
2	02	17	02	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	Meningkatnya ketrampilan dan keahlian masyarakat dalam pengendalian gangguan/kebakaran hutan		1							
2	02	17	02	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan		31 kec							
2	02	17	02	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi perlindungan, pengendalian, dan konservasi hutan (pkt)		1							
						Jumlah 2			9.725.706.349						10.492.883.452
						Jumlah (1+2)			10.800.918.349						11.568.095.452

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : BADAN KETAHANANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat dan administrasi perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat dan administrasi perkantoran	20.000.000	APBD KAB	Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat dan administrasi perkantoran	20.000.000
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran kewajiban telepon dan listrik		Terpeliharanya Komunikasi dan penerangan pada BKPPP dan UPT	45.000.000	APBD KAB	Terpeliharanya Komunikasi dan penerangan pada BKPPP dan UPT	45.000.000
x xx 01 06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya STNK kendaraan dinas (Roda 4=5 Unit dan Roda 2=164 Unit)		Terpenuhinya kewajiban pembayaran STNK kendaraan Dinas	17.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya kewajiban pembayaran STNK kendaraan Dinas	17.000.000
x xx 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan,		Terpenuhinya Laporan Keuangan,	15.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya Laporan Keuangan,	15.000.000
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor 9 org		Meningkatnya Prosentase kebersihan ruangan BKPPP dan 8 BPP/UPT	110.000.000	APBD KAB	Meningkatnya Prosentase kebersihan ruangan BKPPP dan 8 BPP/UPT	110.000.000
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK pada Kantor BKPPP dan 8 UPT		Terpenuhinya kebutuhan ATK pada Kantor BKPPP dan 8 UPT	120.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya kebutuhan ATK pada Kantor BKPPP dan 8 UPT	120.000.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan Kantor BKPPP dan 8 UPT		Terpenuhinya kebutuhan cetakan & penggandaan pada BKPPP & 8 UPT	100.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya kebutuhan cetakan & penggandaan pada BKPPP & 8 UPT	100.000.000
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan yang baik setiap ruangan		Terpenuhinya penerangan yang baik setiap ruangan	15.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya penerangan yang baik setiap ruangan	15.000.000
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Belanja Modal Pengadaan Infokus/OHV beserta kelengkapannya,		Terpenuhinya prosentase Peralatan dan perlengkapan kantor	35.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya prosentase Peralatan dan perlengkapan kantor	35.000.000
x xx 01 14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor		Terpenuhinya sebagian peralatan rumah tangga kantor	30.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya sebagian peralatan rumah tangga kantor	30.000.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa Koran dan Buku Pertanian		Meningkatnya pengetahuan aparatur	18.000.000	APBD KAB	Meningkatnya pengetahuan aparatur	18.000.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Harian dan Rapat Dinas maupun Staff		Terpenuhinya makanan dan minuman harian dan rapat - rapat	650.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya makanan dan minuman harian dan rapat - rapat	650.000.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	210.000.000	APBD KAB	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	210.000.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Terfasilitasinya tenaga honorer non PNS 1 Org,		Terlaksananya tenaga THL-TB dan Honorer Non PNS	-	-	Terlaksananya tenaga THL-TB dan Honorer Non PNS	-
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	130.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	130.000.000
x xx 01 22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang perayaan Hari-hari Bersejarah	Terpenuhinya Kebutuhan Peringatan Hari-Hari Bersejarah		Terpenuhinya Sarana & Prasarana Penunjang Hari-Hari Bersejarah	25.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya Sarana & Prasarana Penunjang Hari-Hari Bersejarah	25.000.000
x xx 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
x xx 02 09	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan penunjang kerja BKPPP berupa Lap top 8 unit, Infocus 3 unit, Printer 2 unit. Wailes 9 bh, Speker (sound system, mic) 1 unit		Tersedianya peralatan penunjang kerja UPT berupa Lap top 8 unit, Infocus, Printer. Wailes 9 bh, Speker (sound system, mic) 1 unit	60.000.000	APBD KAB	Tersedianya peralatan penunjang kerja UPT berupa Lap top 8 unit, Infocus, Printer. Wailes 9 bh, Speker (sound system, mic) 1 unit	60.000.000
x xx 02 10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan mebeleur	Tersedianya peralatan penunjang kerja BKPPP berupa mebeleur kantor Kursi rapat 25 buah (1 BKPPP dan 8 UPT). Meja kerja 5 bh x 8 UPT. 9 buah Lemari arsip 10 buah, lemari besi pintu kecil 5 bh.		Terpenuhinya meubelair BKPPP	100.000.000	APBD KAB	Terpenuhinya meubelair BKPPP	100.000.000
x xx 02 22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gd. kantor BKPPP, dan 8 UPT secara baik dan teratur		Terpeliharanya gd. kantor secara baik dan teratur	500.000.000	APBD KAB	Terpeliharanya gd. kantor secara baik dan teratur	500.000.000

x	xx	02	24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 5 unit kendaraan roda 4 dan 164 unit roda 2 serta terpenuhinya BBM pada kantor BKPPP		Terpeliharanya kondisi kendaraan operasional tetap baik	90.000.000	APBD KAB		Terpeliharanya kondisi kendaraan operasional tetap baik	90.000.000
x	xx	03	03	Program peningkatan disiplin aparatur									
x	xx	03	05	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas PLH, Batik, Olah raga dan KORPRI.	Terpenuhinya Pakaian Dinas PLH, Batik, Olah Raga, KORPRI sebanyak masing-masing 299 Stel		Terpenuhinya Pakaian Olah Raga BKPPP.	275.000.000	APBD KAB		Terpenuhinya Pakaian Olah Raga BKPPP.	275.000.000
x	xx	05	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
x	xx	05	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Penilaian Angka Kredit	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh		Meningkatnya kemampuan Tenaga Penyuluh BKPPP	40.000.000	APBD KAB		Meningkatnya kemampuan Tenaga Penyuluh BKPPP	40.000.000
x	xx	06	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
x	xx	06	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan capaian kerja & ikhtisar realisasi kinerja BKPPP		Terpenuhinya Laporan capaian kerja & ikhtisar realisasi kinerja BKPPP	56.449.000	APBD KAB		Terpenuhinya Laporan capaian kerja & ikhtisar realisasi kinerja BKPPP	56.449.000
x	xx	06	02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran		Terpenuhinya Laporan keuangan semesteran BKPPP	7.000.000	APBD KAB		Terpenuhinya Laporan keuangan semesteran BKPPP	7.000.000
x	xx	06	03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran		Terpenuhinya Prognosis Realisasi Anggaran BKPPP	5.000.000	APBD KAB		Terpenuhinya Prognosis Realisasi Anggaran BKPPP	5.000.000
x	xx	06	04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		Terpenuhinya Laporan keuangan Akhir Tahun BKPPP	6.000.000	APBD KAB		Terpenuhinya Laporan keuangan Akhir Tahun BKPPP	6.000.000
						Jumlah 1			2.679.449.000				2.679.449.000
1	21	16	13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan									
1	21	16	13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pengembangan cadangan pangan daerah	Pembinaan dan fasilitasi permodalan pengelolaan lumbung pangan desa/masyarakat (Kodering Bantuan)			70.000.000	APBD KAB			75.600.000
1	21	16	14	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pengembangan desa mandiri pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan di Desa yang berpotensi rawan pangan melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan			160.000.000	APBD KAB			172.800.000
1	21	16	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Terlaksananya Sosialisasi, pembinaan Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam Bergizi,berimbang dan Aman berbasis Sumber Daya Lokaserta pelaksanaan Operasional Dewan Ketahanan Pangan dan HBKN		Tim DKP/Tim Pokja DKP, Kelompok KWT/Sd/MI dan Kelompok Bisnis Pangan (tepungan -tepungan)	110.000.000	APBD KAB			118.800.000
1	21	16	22	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan serta Pengawasan Mutu Produk pangan segar Hasil Pertanian tanaman pangan apapun pangan olahana		Pelaku Usaha pertanian di Kabupaten Bandung	45.000.000	APBD KAB			48.600.000
1	21	16	01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Penanganan Daerah rawan Pangan	Pemetaan daerah Rawan Pangan dan Pemantauan stuaasi Gizi secara Dini operasinal pemantauan Kadarzi dan Linbasranagan		Peta Rawan Pangan dan 10 Kecamatan Rawan Pangan	100.000.000	APBD KAB			108.000.000
1	21	16	07	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Monitoring evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan	Terlaksananaya Monitoring dan Evaluasi pendistribusian Program Raskin dari titik Distribusi sampai ke penerima manfaat		Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS -PM)	70.000.000	APBD KAB			75.600.000
2	01	15	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani									
2	01	15	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Mimbar Saresehan			611.000.000	APBD KAB			651.875.900
2	01	15	02	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Penguatan Modal untuk Gapoktan (PUAP)		Rakor PUAP, Pelatihan Penyuluh dan Money.	250.000.000	APBD KAB			266.725.000
2	01	15	03	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Kemampuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)		Gapoktan, UEP, Penyuluh Pendamping,	110.000.000	APBD KAB			117.359.000
2	01	18	01	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan									
2	01	18	01	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Demplot		Penyuluh pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan	348.750.000	APBD KAB			372.081.375
2	01	19	02	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan									
2	01	19	02	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Persemaian Induk Tanaman Keras Alpukat	Kertasari	75000 pohon	40.000.000	APBD KAB			42.676.000
2	01	19	02	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Persemaian Induk Tanaman Keras Jeruk Mipis/Furat	Kertasari	10000 pohon	40.000.000	APBD KAB			42.676.000
2	01	19	02	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Persemaian Induk Tanaman Keras Jambu Aer/Merah	Kertasari	10000 pohon	40.000.000	APBD KAB			42.676.000
2	01	19	02	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Persemaian Induk Tanaman Keras Kopi Arabica	Kertasari	100000 pohon	40.000.000	APBD KAB			42.676.000

2	01	19	02	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Persemaian Induk Tanaman Keras Terong kori/Blackberry	Kertasari	100000 pohon	40.000.000	APBD KAB			42.676.000
2	01	20		Prgram Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan									
2	01	20	01	Prgram Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan Swadaya		Penyuluh Swadaya Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	215.000.000	APBD KAB			229.383.500
2	01	24	05	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan teknologi tepat guna	Bintek peternakan di balai peternakan Bintek SOP pengelolaan Susu sapi, Bintek Penyamakan kulit kelinci, Bintek Pengendalian hama penyakit ternak		Penyuluh peternakan	60.000.000	APBD KAB			64.014.000
2	02	17	05	Preogram Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan	Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan	Magang dalam rangka peningkatan SDM kehutanan		Penyuluh kehutanan	55.000.000	APBD KAB		#DIV/0!	58.630.000
2	02	17	05	Preogram Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan	Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan	Sentral Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)		Penyuluh kehutanan	56.000.000	APBD KAB			59.696.000
2	02	17	05	Preogram Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan	Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan	Bintek PKSM		Penyuluh kehutanan	20.000.000	APBD KAB			21.320.000
2	02	17	05	Preogram Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan	Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan	Kebon Bibit Desa (KBD)		Penyuluh kehutanan	50.000.000	APBD KAB			53.300.000
						Jumlah 2			2.530.750.000				2.707.164.775
						Jumlah (1+2)			5.210.199.000				5.386.613.775

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD :DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan lelang dan hari-hari besar nasional tepat waktu	Terlaksananya kegiatan lelang dan hari-hari besar nasional tepat waktu	22.800.000	APBD KAB		Terlaksananya kegiatan lelang dan hari-hari besar nasional tepat waktu	22.800.000
x xx 01 04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya kompensasi kecelakaan petugas pemadam kebakaran dan pengangkutan sampah	Tersedianya kompensasi kecelakaan petugas pemadam kebakaran dan pengangkutan sampah	25.050.000	APBD KAB		Tersedianya kompensasi kecelakaan petugas pemadam kebakaran dan pengangkutan sampah	25.050.000
x xx 01 05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan lelang dan hari-hari besar nasional tepat waktu	Terlaksananya kegiatan lelang dan hari-hari besar nasional tepat waktu	75.000.000	APBD KAB		Terlaksananya kegiatan lelang dan hari-hari besar nasional tepat waktu	75.000.000
x xx 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materi/buku cek kegiatan	Tersedianya materi/buku cek kegiatan	10.100.000	APBD KAB		Tersedianya materi/buku cek kegiatan	10.100.000
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	100.000.000	APBD KAB		Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	100.000.000
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dinas	Tersedianya ATK dinas	117.912.500	APBD KAB		Tersedianya ATK dinas	117.912.500
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas	Terpenuhi kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas	110.000.000	APBD KAB		Terpenuhi kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas	110.000.000
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat-alat listrik dinas	Tersedianya kebutuhan alat-alat listrik dinas	10.000.000	APBD KAB		Tersedianya kebutuhan alat-alat listrik dinas	10.000.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhi kebutuhan bahan bacaan pegawai	Terpenuhi kebutuhan bahan bacaan pegawai	20.000.000	APBD KAB		Terpenuhi kebutuhan bahan bacaan pegawai	20.000.000
x xx 01 16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhi kebutuhan pengisian gas elpiji 4 tabung elpiji	Terpenuhi kebutuhan pengisian gas elpiji 4 tabung elpiji	4.200.000	APBD KAB		Terpenuhi kebutuhan pengisian gas elpiji 4 tabung elpiji	4.200.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat dinas	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat dinas	800.000.000	APBD KAB		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat dinas	800.000.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan luar daerah (koordinasi dengan pemerintah pusat)	Tersedianya anggaran perjalanan luar daerah (koordinasi dengan pemerintah pusat)	130.000.000	APBD KAB		Tersedianya anggaran perjalanan luar daerah (koordinasi dengan pemerintah pusat)	130.000.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & perkantoran	Terpenuhi honor tenaga kontrak kerja (TKK)	Terpenuhi honor tenaga kontrak kerja (TKK)	221.000.000	APBD KAB		Terpenuhi honor tenaga kontrak kerja (TKK)	221.000.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000	APBD KAB		Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000
x xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
x xx 02 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Dinas, UPTD Damkar dan UPTD Sampah)	Terpeliharanya gedung kantor (Dinas, UPTD Damkar dan UPTD Sampah)	150.000.000	APBD KAB		Terpeliharanya gedung kantor (Dinas, UPTD Damkar dan UPTD Sampah)	150.000.000
x xx 02 24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas	310.000.000	APBD KAB		Terpeliharanya kendaraan operasional dinas	310.000.000
x xx 02 28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (Dinas, UPTD Damkar dan UPTD Sampah)	Terpeliharanya peralatan kantor (Dinas, UPTD Damkar dan UPTD Sampah)	35.000.000	APBD KAB		Terpeliharanya peralatan kantor (Dinas, UPTD Damkar dan UPTD Sampah)	35.000.000
x xx 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
x xx 03 02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas / upacara UPTD Damkar	Tersedianya pakaian dinas / upacara UPTD Damkar	50.000.000	APBD KAB		Tersedianya pakaian dinas / upacara UPTD Damkar	50.000.000
x xx 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan UPTD Pengangkutan sampah	Tersedianya pakaian kerja lapangan UPTD Pengangkutan sampah	40.000.000	APBD KAB		Tersedianya pakaian kerja lapangan UPTD Pengangkutan sampah	40.000.000
x xx 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

x	xx	05	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi peraturan perundang undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan2 bidang keciptakarya		Terlaksananya sosialisasi peraturan2 bidang keciptakarya	50.000.000	APBD KAB		Terlaksananya sosialisasi peraturan2 bidang keciptakarya	50.000.000
x	xx	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
x	xx	06	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja Dinas (RKA/DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, Lap. Bulanan, Lap. Triwulan, Lap. Semesteran, Laptah, Lap prognosis dan Lap Keuangan akhir tahun)		Tersedianya laporan kinerja Dinas (RKA/DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, Lap. Bulanan, Lap. Triwulan, Lap. Semesteran, Laptah, Lap prognosis dan Lap Keuangan akhir tahun)	60.000.000	APBD KAB		Tersedianya laporan kinerja Dinas (RKA/DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, Lap. Bulanan, Lap. Triwulan, Lap. Semesteran, Laptah, Lap prognosis dan Lap Keuangan akhir tahun)	60.000.000
Jumlah 1									2.441.062.500				2.441.062.500
1	04	15		Program Pengembangan Perumahan									
1	04	15	01	Program Pengembangan Perumahan	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	Pendataan perumahan terorganisir dalam bentuk peta digital	5 Kecamatan	1 paket	50.000.000	APBD KAB		1 paket	72.599.730
1	04	15	01	Program Pengembangan Perumahan	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	Sosialisasi Raperda Fasos Fasum		1 paket	50.000.000	APBD KAB		1 paket	72.599.730
1	04	15	02	Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)	Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan		1 paket	75.000.000	APBD KAB		1 paket	108.899.600
1	04	15	02	Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)	Penyusunan Review RPIJM		1 paket	75.000.000	APBD KAB		1 paket	108.899.602
1	04	15	02	Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)	Penyusunan RKPP	6 Kecamatan	1 paket	150.000.000	APBD KAB		1 paket	217.799.200
1	04	15	02	Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)	Inventarisasi dan Verifikasi PSU perumahan terorganisir	5 lokasi	1 paket	10.000.000	APBD KAB		1 paket	14.519.940
1	04	15	03	Program Pengembangan Perumahan	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	penyelesaian serah terima PSU perumahan formal		15 perumahan	65.000.000	APBD KAB		15 perumahan	94.379.650
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Musrenbang 2012	600 unit	500.000.000	APBD KAB		700 unit	725.997.340
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pendampingan program Penataan kawasan perumahan (DAK)	10 lokasi		300.000.000	APBD KAB			435.598.400
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pemeliharaan rusunawa	3 lokasi		211.832.150	APBD KAB			307.579.150
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Penataan prasarana Rusunawa	3 lokasi		750.000.000	APBD KAB			900.000.000
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Penataan prasarana perumahan pada kawasan pedesaan	15 lokasi		400.000.000	APBD KAB			580.797.870
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pendampingan program PNPM Perkotaan		1 paket	325.000.000	APBD KAB		1 paket	400.000.000
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Penataan sarana sanitasi komunal (Pendamping DAK)	Musrenbang 2012	12 unit	400.000.000	APBD KAB		12 unit	400.000.000
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pembebasan tanah	Jatisari Kutawaringin	...Ha	10.578.717.850	APBD KAB	Investasi dalam pembebasan lahan		15.360.242.180
1	04	15	09	Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan Data Bangunan	Penyusunan data bangunan	10 Kecamatan	1 paket	50.000.000	APBD KAB		1 paket	72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehab Rumah	Soreang	10 unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rutilahu	Soreang	20 UNIT	100.000.000	APBD KAB			145.199.460
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehabilitasi rumah tidak layak huni Masyarakat tidak mampu	Rancabali	10 unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rutilahu	Cangkuang	40 Unit	400.000.000	APBD KAB			400.000.000
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pengadaan MCK	Cangkuang	14 Unit	196.000.000	APBD KAB			200.000.000
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Perbaikan Rutilahu 14 RW	Pameungpeuk	0	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	MCK RW. 02 & 03	Pameungpeuk	2 Unit	250.000.000	APBD KAB			362.998.670

1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	MCK	Pameungpeuk	1 Unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pembangunan MCK RW. 01,02,06,07,09 dan 10	Pameungpeuk	7 Unit	35.000.000	APBD KAB			50.819.810
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rumah Tidak Layak Huni	Katapang	10 unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (pemb. rutilahu)	Rancaekek	10 Unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni	Solokanjeruk	20 unit	100.000.000	APBD KAB			145.199.460
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	pembangunan TPST	Solokanjeruk	7	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rumah Tidak layak huni RW.11,02,13,16,05,12,08,18	Cileunyi	10 Unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehab rumah tidak layak huni (lanjutan) RW 05, 06, 03, 04	Cileunyi	10 unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pembangunan MCK	Cileunyi	3 unit	18.000.000	APBD KAB			26.135.900
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	MCK	Cileunyi	1 unti	12.000.000	APBD KAB			17.423.930
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pembangunan RTLH	Bojongsong	20 Unit	100.000.000	APBD KAB			145.199.460
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehab RTLH	Dayeuh Kolot	10 Unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Dayeuh Kolot	10 unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan TPS dan Daur Ulang Sampah (1 Paket)	Dayeuh Kolot	1 unit	60.000.000	APBD KAB			87.119.680
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu RTLH	Majalaya	20 unit	100.000.000	APBD KAB			145.199.460
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pembangunan RTLH	Ciparay	20 Unit	100.000.000	APBD KAB			145.199.460
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rumah Tidak Layak Huni	Baleendah	10 Unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pembangunan MCK	Cimaung	5 Unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rumah Tidak Layak Huni	Cimaung	10 Unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pembangunan MCK	Cimaung	1 Unit	30.000.000	APBD KAB			43.559.840
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Arjasari	10 Unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Arjasari	10 Unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	RTLH se-wilayah Desa	Banjaran	10 UNIT	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pembangunan RTLH	Pangalengan	10 unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pembangunan Rumah Tidak layak Huni di RW 01 s/d 19	Ciengkrang	10 Unit	50.000.000	APBD KAB			72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Batas Ds. Ciengkrang-Pasir Jirak RW 09,03,04,05	Ciengkrang	9.000	100.000.000	APBD KAB			145.199.460
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Rehab MCK RW 10	Margahayu	8 unit	200.000.000	APBD KAB			290.398.930

1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Nagreg	20 Unit	100.000.000	APBD KAB		145.199.460
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni	Cicalengka	10 Unit	50.000.000	APBD KAB		72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Perbaikan Rumah Tak Layak Huni	Cicalengka	10 Unit	50.000.000	APBD KAB		72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Cikancung	10 Unit	50.000.000	APBD KAB		72.599.730
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pembuatan MCK	Cikancung	2 Unit	120.000.000	APBD KAB		174.239.360
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehab RTH Kp.Sayang	Ibun	10 UNIT	45.000.000	APBD KAB		65.339.760
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehab RLH	Ibun	10 UNIT	50.000.000	APBD KAB		72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rehab RTLH	Paseh	10 unit	50.000.000	APBD KAB		72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	rehab RTLH	Paseh	10 Unit	50.000.000	APBD KAB		72.599.730
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	RLTH	PACET	10 unit	50.000.000	APBD KAB		72.599.730
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pembangunan MCK	PACET	1 paket	15.000.000	APBD KAB		21.779.920
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pemb RTLH	Pacet	10 Unit	50.000.000	APBD KAB		72.599.730
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pengadaan MCK RW. 05	Pameungpeuk	1 Unit	7.000.000	APBD KAB		10.163.960
1	04	15	07	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	MCK RW. 01 s/d 11	Pameungpeuk	11 Unit	250.000.000	APBD KAB		362.998.670
1	04	15	07	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (Pembangunan MCK Rw 02.03.05.13.14.15.16.17) dan RTLH	Kutawaringin	20 Unit	150.000.000	APBD KAB		217.799.200
1	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan								
1	04	16	01	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Penyusunan CAP-RPP	Kecamatan: Cilengkrang-Cimenyang, Majalaya	Kecamatan: Cilengkrang-Cimenyang, Majalaya	400.000.000	APBD KAB		312.770.910
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Terbangunnya sarana air bersih pedesaan (pendamping DAK)	5 lokasi	5 lokasi	366.450.000	APBD KAB		286.537.250
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pipanisasi Air Bersih Dusun 1	Pasirjambu	2.500 m	80.000.000	APBD KAB		62.554.180
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Saluran air bersih	Ciwidey	15 unit				-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pengadaan saluran air bersih	Ciwidey					-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pengadaan Air bersih Cisuren	Ciwidey					-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pipanisasi Air Bersih Bayongbong	Ciwidey	500 m				-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pipanisasi air bersih Kp.Sindangreret	Rancabali	500 m	25.000.000	APBD KAB		19.548.180
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih Kp. Indragiri	Rancabali	2000 m	70.000.000	APBD KAB		53.258.778
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih Kp. Cipangisikan	Rancabali	2000 m	70.000.000	APBD KAB		54.734.900

1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih Kp. Sukamandi	Rancabali	1000 m	35.000.000	APBD KAB		27.367.450
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pipanisasi datar amlong	Rancabali	1500 m	-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pengadaan Sumur Artesis (sarana Air Bersih)	Cangkuang	1 Unit	75.000.000	APBD KAB		58.644.540
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Sarana Air Bersih RW. 02,09,13	Pameungpeuk	4 titik	-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pengadaan Air Bersih RW. 05	Pameungpeuk	1 Unit	-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pengadaan Pompa Air RW. 03	Pameungpeuk	1 Unit	-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pengadaan Sarana Air Bersih; 2 RW	Katapang	2 Unit	-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pengadaan sarana air bersih	Rancaekek	1 unit	0			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Sumur artesis rw 12 ipaket	Cimencyan	3 Paket	350.000.000	APBD KAB		273.674.540
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Penyediaan alat sarana air bersih dan sanitasi dasar/ air dalam RW 06	Margahayu	1 unit	350.000.000	APBD KAB		273.674.540
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Sarana air bersih RW 10, 11, 12(air dalam)	Margahayu	1 unit	350.000.000	APBD KAB		273.674.540
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pengadaan sarana air bersih	Rancaekek	1 unit	0			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pengadaan sarana air bersih	Rancaekek	1 unit	0			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pengadaan air bersih	Cileunyi	3 Titik	-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Sarana air bersih / pipanisasi	Cileunyi	250 m	-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi terutama bagi masyarakat miskin	Majalaya	2 Unit	600.000.000	APBD KAB		469.156.360
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pompanisasi Air Bersih	Baleendah	3 Unti	-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pembuatan Sumur Bor	Baleendah	4 Unit	-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Sarana Air Bersih RW	Arjasari		-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Sarana Air Bersih RW. 07	Arjasari		-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Sarana Air Bersih RW. 08	Arjasari		-			-
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Perpipaan Air Bersih	Ibun	1 paket	50.000.000	APBD KAB		39.096.360
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pipanisasi Air Bersih	PACET	1 Unit	90.000.000	APBD KAB		70.373.450
1	04	16	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	MCK & Pipanisasi Cihrg	PACET	200 M	30.000.000	APBD KAB		23.457.810
1	04	17		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan								
1	04	17	02	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Evaluasi Kinerja 140 KPPABD	Kab. Bandung	140 KPPABD	250.000.000	APBD KAB		250.000.000

1	04	19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran									
1	04	19	04	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Terlaksananya pemeriksaan berkala sistem proteksi	Kab. Bandung	100 gedung	40.000.000	APBD KAB			41.538.460
1	04	19	05	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Terpenuhinya kebutuhan SDM yang kompeten dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 3 orang (basic fire fighter/fire inspector/operator mobil pompa/ instruktur kebakaran/ petugas penyuluh lapangan/komandan regu/fire officer)	UPTD DAMKAR	3 orang/UPTD DAMKAR	40.000.000	APBD KAB			41.538.460
1	04	19	09	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pemeliharaan sapras mobil damkar dan kelengkapannya sebanyak 7 Unit mobil pemadam kebakaran dan mobil operasional.	7 unit mobil	7 unit mobil	400.000.000	APBD KAB			400.000.000
1	04	19	11	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Insentif petugas damkar sebanyak 65 orang/12 bulan	UPTD DAMKAR	65 orang/12 bulan	760.000.000	APBD KAB			789.230.760
1	04	19	14	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Pelatihan Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran	Terlatihnya 100 Satlakar di 10 desa/kelurahan	10 desa	100 orang	60.000.000	APBD KAB			62.307.690
1	04	20		Program pengelolaan areal pemakaman									
1	04	20	07	Program pengelolaan areal pemakaman	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Tertatanya TPU Pengembang perumahan	1 lokasi	1 lokasi	150.000.000	APBD KAB			70000000
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang									
1	05	15	05	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Penyusunan Reuew RDTR dan Animasi Soreang	Soreang dan KBT	3 paket	800.000.000	APBD KAB			500.000.000
1	05	16		Program Pemanfaatan Ruang									
1	05	16	05	Program Pemanfaatan Ruang	Survey dan pemetaan	Pembuatan peta skala 1 : 1000 seluas 2.300 Ha	Rancaekek	1 paket	300.000.000	APBD KAB			300.000.000
1	05	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang									
1	05	17	10	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian dan pengawasan bangunan	Pengawasan & pengendalian bangunan	31 Kecamatan		250.000.000	APBD KAB			250.000.000
1	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	- Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana/sarana persampahan	Kab. Bandung	bertambahnya 1 unit mobil truck dan 1 kendaraan operasional dan terlaksananya, penataan TPA Babakan dan TPST (hasil Musrenbang)	1.158.200.000	APBD KAB			1.171.731.810
1	08	15	04	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	- Tersedianya biaya operasi dan pemeliharaan UPTD Pengangkutan sampah dan lumpur tinja	Kab. Bandung	UPTD Pengangkutan Sampah Wil. I, II, III, IV	5.500.000.000	APBD KAB			5.500.000.000
1	08	15	04	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	- Tersedianya biaya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPAS Babakan, IPAL Soreang, IPLT Cibeet dan Workshop	TPA Babakan, IPAL Soreang, IPLT Cibeet	TPA Babakan, IPAL Soreang, IPLT Cibeet	1.800.000.000	APBD KAB			1.800.000.000
1	08	15	10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	- Terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah di 3 kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	75.000.000	APBD KAB			75.000.000
1	08	15	11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	- Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelola sampah di 3 kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100.000.000	APBD KAB			100.000.000
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	TPS Wilayah Desa Alamendah	Rancabali	10 unit	35.000.000	APBD KAB			35.000.000
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Rencana Pemb. tempat pembuangan sampah sementara	Cangkuang	2 Unit	150.000.000	APBD KAB			151.752.520
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan TPSS	Dayeuh Kolot	48 m2	40.000.000	APBD KAB			40.450.000
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembuatan Tempat Pembuangan sampah sementara	Arjasari		450.000.000	APBD KAB			455.000.000
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Perlindungan mata air	Banjaran	4 titik	-				-
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Pembangunan Sumur Dangkal	Nagreg	100 Titik	-				-
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembuatan TPST	Cikancung	2 Unit	36.800.000	APBD KAB			37.229.950
1	08	15	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan TPS / Bak Sampah 14 RW	Pameungpeuk	14 Unit	70.000.000	APBD KAB			70.817.880
1	08	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)									
1	08	24	05	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Penataan RTH	- Penataan RTH kawasan Stadion si Jalak Harupat	Kutawaringin	1 paket	225.000.000	APBD KAB			150.000.000

1	08	24	06	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Pemeliharaan RTH	- Terpeliharanya taman seluas 3,9 Ha	Kab. Bandung	10 lokasi	500.000.000	APBD KAB	500.000.000
									33.960.000.000		40.270.000.000
									36.401.062.500		42.711.062.500

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : SDAPE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa surat menyurat	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	Kantor Dinas	1 Th	3.850.000	APBD KAB		1 Th	3.850.000
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon	sda.	1 Th	27.500.000	APBD KAB		1 Th	27.500.000
x xx 01 09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan Peralatan Kerja (Komputer Printer dll.)	sda.	1 Th	4.950.000	APBD KAB		1 Th	4.950.000
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat tulis kantor	Kebutuhan Administrasi Alat Tulis Kantor	sda.	1 Th	55.000.000	APBD KAB		1 Th	55.000.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	Kebutuhan Barang cetakan & Penggandaan	sda.	1 Th	14.300.000	APBD KAB		1 Th	14.300.000
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pelayanan Penerangan Gd. Kantor	sda.	1 Th	3.850.000	APBD KAB		1 Th	3.850.000
x xx 01 14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebersihan Gedung Kantor	sda.	1 Unit	7.700.000	APBD KAB		1 Unit	7.700.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan Minum Harian Pegawai	sda.	238 Orang/1 Thun	660.000.000	APBD KAB		238 Orang/1 Thun	660.000.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi	sda.	1 Tahun	22.000.000	APBD KAB		1 Tahun	22.000.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Koordinasi dan Konsultasi	sda.	1 Tahun	211.643.000	APBD KAB		1 Tahun	211.643.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Hari-hari Bersejarah	Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Bersejarah Nasional	sda.		11.000.000	APBD KAB			11.000.000
x xx 02 03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembuatan Gedung Kantor	UPTD.Cirasea	UPTD Cirasea	1 Unit	-			1 Unit	-
x xx 02 05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	UPTD Ciwidey,Cisangkuy,Cirasea dan Citarik	UPTD Ciwidey, Cisangkuy, Cirasea dan Citarik	4 Bh	-			4 Bh	-
x xx 02 11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Komputer	- Pengadaan Server - Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	Kantor Dinas	2 Unit	-			2 Unit	-
x xx 03 24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Operasional Dinas SDAPE dan UPTD	Kantor Dinas	- Roda Dua 21 Bh - Roda Empat 8 Bh	250.000.000	APBD KAB		- Roda Dua 21 Bh - Roda Empat 8 Bh	250.000.000
x xx 02 26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Gd.Dinas dan Gd.Sekret.Komir	Kantor Dinas	2 Gedung	50.000.000	APBD KAB		2 Gedung	50.000.000
x xx 03 02	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta penengkapannya	PNS Dinas SDAPE	Kantor Dinas	230 Orang		APBD KAB		230 Orang	
x xx 06 01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Penyusunan LAKIP - Penyusunan LAPTAH dan RENJA Dinas	Kantor Dinas	3 Bh	12.100.000	APBD KAB		3 Bh	12.100.000
x xx 06 03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Kinerja Keuangan Dinas	Kantor Dinas	1 Th	6.600.000	APBD KAB		1 Th	6.600.000
x xx 06 04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir tahun	Laporan Kinerja Keuangan Dinas	Kantor Dinas	1 Th	6.600.000	APBD KAB		1 Th	6.600.000
			Jumlah 1			1.347.093.000				1.347.093.000
1 03 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Meningkatkan Kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air							
1 03 24 01	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi yang terarah	4 UPTD di Kab. Bandung	4	350.000.000	APBD KAB		4	360.000.000
1 03 24 01	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Kajian status 4 DI	Kab. Bandung	4				4	
1 03 24 02	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum	Masyarakat Pengguna dan Pemamfaat Air adanya acuan pembangunan	Kab. Bandung	1				1	
1 03 24 03	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Perencanaan pembangunan reservoir	Tersedianya dokumen perencanaan Reservoir untuk 2 (dua) UPTD	2 Daerah Irigasi	2	200.000.000	APBD KAB		2	220.000.000
1 03 24 05	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Perencanaan Normalisasi Saluran sungai				300.000.000	APBD KAB			310.000.000
1 03 24 07	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pembangunan reservoir	Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air	Kab. Bandung	6	900.000.000	APBD KAB		8	920.000.000
1 03 24 10	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Daerah Irigasi (DI)	Kab. Bandung	4	3.000.000.000	APBD KAB		5	3.000.000.000

1	03	24	14	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai			475.000.000	APBD KAB			475.000.000	
1	03	24	15	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Meningkatkan kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi	Kab. Bandung	4	858.653.482	APBD KAB		4	870.184.345
1	03	24	16	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) /WISMP	Meningkatkan kemampuan pengelola air irigasi	Kab. Bandung	12	350.000.000	APBD KAB		12	350.000.000
1	03	25		Program penyediaan dan pengolahan air baku			Soreang						-
1	03	25	04	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pembangunan sumur-sumur air tanah	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku							-
1	03	25	05	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	Pembangunan Prasarana Pengambilan Air dan Saluran Pembawa							-
1	03	26		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya									
1	03	26		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Master plan sumber daya air				397.260.542	APBD KAB			400.260.542
1	03	28		Program pengendalian banjir									
1	03	28	03	Program pengendalian banjir	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Berkurangnya daya rusak air/pembuatan dan perbaikan tanggul	Kab. Bandung	23	1.803.994.327	APBD KAB		30	1.929.251.295
1	03	28	05	Program pengendalian banjir	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	Berkurangnya daya rusak air/Terlaksananya sosialisasi dan pengadaan bahan banjir (penanggulangan sementara)	Kab. Bandung	4	330.000.000	APBD KAB		4	550.000.000
1	03	28	07	Program pengendalian banjir	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Mengurangi lamanya genangan/Pengerukan Saluran Sungai	2 Sub.Das	3	1.300.000.000	APBD KAB		6	1.450.000.000
1	03	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh									-
1	03	29	04	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Penataan dan Pedestrian Kota			9					-
2	03	15		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan									
2	03	15	02	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C	Tersosialisasinya Peraturan di bidang air tanah pada seluruh steak holder (Pertambangan)	Kab. Bandung	4	42.000.000	APBD KAB		8	47.000.000
2	03	15	03	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C	Terlaksananya pembangunan demplot reklamasi (Pertambangan)	Kab. Bandung	1	80.350.000	APBD KAB		2	119.000.000
2	03	15	04	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan (Panas bumi)				90.000.000	APBD KAB			120.000.000
2	03	15	05	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C	Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administratif (petambangan)	Kab. Bandung	20	179.116.911	APBD KAB		24	180.227.908
2	03	15	06	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pembangunan sumur imbuhan dalam di 3 (tiga) kecamatan	Kab. Bandung	2	45.000.000	APBD KAB		5	50.000.000
2	03	15	07	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Dst... Sosialisasi Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Tanah	Terpahaminya cara perhitungan nilai perolehan air (NPA) air tanah (Pertambangan)	Kab. Bandung	125	45.000.000	APBD KAB		125	46.000.000
2	03	15	08	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Rekonsiliasi DBH panas bumi				35.000.000	APBD KAB			40.000.000
2	03	16		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan									
2	03	16	01	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Pengawasan penertiban kegiatan	Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah	Kab. Bandung	75	185.000.000	APBD KAB		100	198.037.492
2	03	16	03	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi	Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi	Kab. Bandung	8	151.786.708	APBD KAB		8	184.502.860
2	03	16	08	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi				175.000.000	APBD KAB			200.000.000
2	03	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan									
2	03	17	01	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Pengawasan Pengendalian pendistribusian tataniaga Minyak dan Gas Bumi (56 Unit Usaha 3 kali)	Kab. Bandung		1.298.703.556	APBD KAB			1.353.146.055

2	03	17	01	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Sosialisasi Desa Mandiri Energi (3 Desa, 25 Org)			110.000.000	APBD KAB		160.000.000
2	03	17	03	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pengembangan Mikrohydro				65.000.000	APBD KAB		90.000.000
2	03	17	04	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pengembangan Desa Mandiri				95.000.000	APBD KAB		135.000.000
									12.861.865.525			13.757.610.497
									14.208.958.525			15.104.703.497

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kmunikasi telepon, air	100%	15.665.000	APBD KAB		100%	15.665.000
x xx 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan							-
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan	100%	31.514.600	APBD KAB		100%	31.514.600
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	100%	50.000.000	APBD KAB		100%	50.000.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100%	31.321.000	APBD KAB		100%	31.321.000
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	9.992.300	APBD KAB		100%	9.992.300
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100%	122.689.000	APBD KAB		100%	122.689.000
x xx 01 14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga		100%	6.250.000	APBD KAB		100%	6.250.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100%	13.680.000	APBD KAB		100%	13.680.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman		100%	96.675.000	APBD KAB		100%	96.675.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100%	142.245.000	APBD KAB		100%	142.245.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan tenaga Pendukung administrasi teknis dan perkantoran							-
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah		100%	58.500.000	APBD KAB		100%	58.500.000
x xx 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
x xx 02 10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan mebeleur		100%	98.388.000	APBD KAB		100%	98.388.000
x xx 02 22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100%	79.900.000	APBD KAB		100%	79.900.000
x xx 02 24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100%	112.680.000	APBD KAB		100%	112.680.000
x xx 03	Program peningkatan disiplin aparatur								
x xx 03 02	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya							0
x xx 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
x xx 06 04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			17.660.000	APBD KAB			17.660.000
			Jumlah 1		887.159.900				887.159.900
1 06 15	Program Pengembangan data/informasi								
1 06 15 06	Program Pengembangan data/informasi	Pemetaan kawasan rawan bencana	Tersedia peta rawan bencana		160.000.000	APBD KAB		3 Peta Rawan tingkat Kecamatan	160.000.000
1 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar								
1 06 19 03	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	Berkurangnya dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana		500.000.000	APBD KAB		1 paket	500.000.000
1 06 25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam								
1 06 25 03	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana		240.000.000	APBD KAB		10 Kecamatan	240.000.000
1 19 22	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam								

1	19	22	01	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Bimbingan teknis Satuan Tugas BPBD	Wilayah Kabupaten Bandung	2 Unit	100.000.000	APBD KAB	2 Unit	100.000.000
1	19	22	01	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Bimbingan teknis dan simulasi	Wilayah Kabupaten Bandung		100.000.000	APBD KAB		100.000.000
1	19	22	04	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara ;	Tersedianya Perlengkapan pendukung kedaruratan	Wilayah Kabupaten Bandung	1 Paket			1 Paket	
1	19	22	05	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Santunan korban kematian	Terlaksananya santunan duka cita ,(Santunan korban kematian)	Wilayah Kabupaten Bandung	20 orang			20 orang	
1	19	22	02	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Terlaksananya kegiatan penghilangan traumatik korban bencana (..Trauma healing)	Wilayah Kabupaten Bandung	1 Kegiatan			1 Kegiatan	
1	04	18		Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial								
1	04	18	01	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Terlaksananya Bantuan Stimulan pemulihan kawasan daerah bencana (Restorasi/pemulihan daerah kawasan bencana)	Wilayah Kabupaten Bandung	5 Kegiatan	52.989.334	APBD KAB	5 Kegiatan	133.283.032
1	04	18		Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial					-			-
1	04	18	04	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Bantuan stimulan rehabilitasi sarana dan prasarana umum		Wilayah Kabupaten Bandung	5 Paket			5 Paket	
1	04	18	01	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam		Wilayah Kabupaten Bandung	50 Unit			50 Unit	
						Jumlah 2			1.152.989.334			1.233.283.032
						Jumlah (1+2)			2.040.149.234			2.120.442.932

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program pelayanan administrasi perkantoran								
x xx 01 02	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pemakaian telepon, alat komunikasi, dan listrik	DISHUB	pemakaian selama 1 tahun	51.912.000	APBD KAB	pemakaian selama 1 tahun	51.912.000
x xx 01 07	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemutakhiran data keuangan dinas perhubungan kab.bandung selama 1 tahun	DISHUB	12 bulan	29.088.000	APBD KAB	12 bulan	29.088.000
x xx 01 08	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan di seluruh ruangan dan halaman kantor dinas perhubungan	DISHUB	selama 1 tahun	29.415.000	APBD KAB	selama 1 tahun	29.415.000
x xx 01 09	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya peralatan kerja	DISHUB	9 item peralatan kerja	25.000.000	APBD KAB	9 item peralatan kerja	25.000.000
x xx 01 10	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	DISHUB	1 paket alat tulis kantor selama 1 tahun	50.000.000	APBD KAB	1 paket alat tulis kantor selama 1 tahun	50.000.000
x xx 01 11	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan	DISHUB	1 paket barang cetakan selama 1 tahun	1.207.228.000	APBD KAB	1 paket barang cetakan selama 1 tahun	1.207.228.000
x xx 01 12	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	DISHUB	1 paket komponen listrik	19.805.000	APBD KAB	1 paket komponen listrik	19.805.000
x xx 01 13	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DISHUB	2 unit komputer server. 2 unit komputer pc. 1	50.000.000	APBD KAB	2 unit komputer server. 2 unit komputer pc. 1	50.000.000
x xx 01 15	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya media masa dan bahan bacaan	DISHUB	surat kabar, majalah, cd interaktif, dvd profil dan buklet selam 1 tahun	84.782.000	APBD KAB	surat kabar, majalah, cd interaktif, dvd profil dan buklet selam 1 tahun	84.782.000
x xx 01 17	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai dishub	DISHUB	mamin 211 org PNS dan 17 org TTK, 7 org Piket kantor, 4 (55 org) kali rapat per bulan, 4 kali (25 org) tamu perbulan	671.820.000	APBD KAB	mamin 211 org PNS dan 17 org TTK, 7 org Piket kantor, 4 (55 org) kali rapat per bulan, 4 kali (25 org) tamu perbulan	671.820.000
x xx 01 18	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya kelancaran pelaksanaan koodinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait	DISHUB	perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun	221.000.000	APBD KAB	perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun	221.000.000
x xx 01 19	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan pendukung administrasi teknis dan perkantoran	terlaksananya pembayaran kepada tenaga kontrak	DISHUB	17 org tenaka kontrak kerja	227.500.000	APBD KAB	17 org tenaka kontrak kerja	227.500.000
x xx 01 20	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terwujudnya kelancaran pelaksanaan koodinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait	DISHUB	perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	150.000.000	APBD KAB	perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	150.000.000
x xx 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
x xx 02 11	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan tahan	tersedianya tanah untuk emplacement	DISHUB	300 m ²	50.000.000	APBD KAB	300 m ²	50.000.000
x xx 02 24	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	DISHUB	12 kendaraan roda empat dan 11 kendaraan roda dua	490.560.000	APBD KAB	12 kendaraan roda empat dan 11 kendaraan roda dua	490.560.000
x xx 02 22	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung bangunan kantor	DISHUB	1 paket bahan baku bangunan	40.000.000	APBD KAB	1 paket bahan baku bangunan	40.000.000
x xx 03	Program peningkatan disiplin aparatur								
x xx 03 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian kerja lapangan	tersedianya topi dan pakaian seragam parkir, jas hujan petugas terminal, jas hujan petugas parkir	DISHUB	300 topi dan 300 pakaian seragam parkir, 75 jas hujan petugas terminal, 300 jas hujan petugas parkir	50.000.000	APBD KAB	300 topi dan 300 pakaian seragam parkir, 75 jas hujan petugas terminal, 300 jas hujan petugas parkir	50.000.000
x xx 06	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
x xx 06 01	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terjadinya buku laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD	DISHUB	12 buku laporan capaian kinerja	80.000.000	APBD KAB	12 buku laporan capaian kinerja	80.000.000
x xx 06 02	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersedianya buku laporan keuangan semesteran	DISHUB	2 buku laporan keuangan semesteran	6.220.000	APBD KAB	2 buku laporan keuangan semesteran	6.220.000
x xx 06 03	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersedianya buku laporan prognosis realisasi keuangan	DISHUB	4 buku laporan prognosis keuangan	11.000.000	APBD KAB	4 buku laporan prognosis keuangan	11.000.000
x xx 06 04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun	DISHUB	2 buku laporan akhir tahun	7.078.000	APBD KAB	2 buku laporan akhir tahun	7.078.000

					Jumlah 1		3.552.408.000				3.552.408.000	
1	07	15		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan								
1	07	15	01	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Buku DED Terminal Tipe A	Wilayah Kabupaten Bandung	DED Terminal Tipe A	1.100.000.000	APBD KAB		1.450.000.000
1	07	15	07	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Tersedianya Terminal sewa di Wilayah Kabupaten Bandung	Kec.Ciwidey, Kec.Margaasih, Kec.Dayeuh Kolot, Kec.Ciparay, Kec.Cileunyi, Kec.Pangalengan, Kec.Ibun, Kec.Pacet, Kec.Margahayu.	10 Lokasi Terminal	220.000.000	APBD KAB		250.000.000
1	07	15	04	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Tersosialisasinya Peraturan dan kebijakan di bidang perhubungan	Wilayah Kabupaten Bandung	Sosialisasi kepada Petugas Terminal	74.000.000	APBD KAB		60.000.000
1	07	15	03	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dengan Pusat dan Daerah lainnya	Kabupaten Bandung	Rakornis, Rakornas, WTN	121.581.660	APBD KAB		140.000.000
1	07	15	08	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Pengawasan database PKB - Website Dishub - Pendataan radio komunikasi	DISHUB Kab.Bandung		166.000.000	APBD KAB		66.000.000
1	07	16		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasana dan fasilitas (LA)								
1	07	16	04	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasana dan fasilitas (LA)	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpeliharanya Terminal	Kec.Majalaya	1 Terminal	250.000.000	APBD KAB		334.000.000
1	07	16	01	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasana dan fasilitas (LA)	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat PKB	Terpeliharanya Sarana Alat PKB	DISHUB Kab.Bandung	12 Item Alat PKB	125.000.000	APBD KAB		150.000.000
1	07	17		Program Peningkatan pelayanan angkutan								
1	07	17	05	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Penyuluhan tiblantas kepada anak sekolah & masyarakat di Lokasi TMMP & TMMS			65.000.000	APBD KAB		85.023.510
1	07	17	05	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang		DISHUB Kab.Bandung					
1	07	17	05	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terlaksananya PAM Rutin, Lebaran, Natal dan Tahun baru	Wilayah Kabupaten Bandung	Pam Rutin, Lebaran, Natal dan Tahun Baru	700.000.000	APBD KAB		735.000.000
1	07	17	05	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Updating kinerja trayek angkutan umum & barang	Wilayah Kabupaten Bandung		120.000.000	APBD KAB		125.000.000
1	07	18		Program pembangunan prasarana dan sarana								
1	07	18	01	Program pembangunan prasarana dan sarana	Pembangunan gedung terminal	Pembebasan Lahan terminak Soreang	Soreang		5.500.000.000	APBD KAB		6.150.000.000
1	07	19		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas								
1	07	19	01	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan pemeliharaan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	Wilayah Kabupaten Bandung	50 Rambu 2 RPPJ 20 Beam GR 2 Traffic Light 1 warning light 5 cermin tikungan	125.000.000	APBD KAB		150.000.000
1	07	19	02	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan marka jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	Wilayah Kabupaten Bandung	1,250 m2	100.000.000	APBD KAB		135.000.000
					Jumlah 2				8.666.581.660		9.830.023.510	
					Jumlah (1+2)				12.218.989.660		13.382.431.510	

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2012				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
						15			
x xx 01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :							
x xx 01 02	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air Dan listrik		Terwujudnya pelaksanaan kegiatan dalam kondisi kerja yang nyaman	100%	24.840.000	APBD KAB	100%	24.840.000
x xx 01 08	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terciptanya kebersihan ruang, gedungkantor	100%	33.000.000	APBD KAB	100%	33.000.000
x xx 01 09	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Terciptanya kelancaran pelayanan aparatur dan kinerja dinas	100%	15.000.000	APBD KAB	100%	15.000.000
x xx 01 10	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	24.656.000	APBD KAB	100%	24.656.000
x xx 01 11	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		Pelayanan yang tertib, cepat, dan tepat	100%	15.350.000	APBD KAB	100%	15.350.000
x xx 01 12	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Pelayanan yang capat, tepat dan akurat	100%	1.685.000	APBD KAB	100%	1.685.000
x xx 01 13	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Kelancaran pelayanan aparatur	100%	92.025.000	APBD KAB	100%	92.025.000
x xx 01 15	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Persediaan bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya pengetahuan dan wawasan	100%	7.200.000	APBD KAB	100%	7.200.000
x xx 01 17	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Penyediaan Makanan Dan Minuman		Terpebihnya kebutuhan mamin karyawan dan tamu sehingga tercipta kenyamanan dalam pelayanan aparatur.	100%	185.595.000	APBD KAB	100%	185.595.000
x xx 01 18	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah		Laporan hasil koordinasi	100%	110.200.000	APBD KAB	100%	110.200.000
x xx 01 20	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah		Laporan hasil koordinasi	100%	40.250.000	APBD KAB	100%	40.250.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						APBD KAB		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kelancaran pelayanan aparatur dan kinerja dinas.	100%	18.300.000	APBD KAB	100%	18.300.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional		Kelancaran pelayanan aparatur dan kinerja dinas.	100%	222.360.000	APBD KAB	100%	222.360.000
x xx 03	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							
x xx 03 05	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Terciptanya kedisiplinan dan kerapihan tampilan aparatur					
x xx 06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dan KEUANGAN	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dan KEUANGAN							
x xx 06 01	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dan KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kelancaran pelayanan aparatur dan kinerja dinas.	100%	5.940.000	APBD KAB	100%	5.940.000
x xx 06 02	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dan KEUANGAN	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Kelancaran pelayanan aparatur dan kinerja dinas.	100%	6.354.000	APBD KAB	100%	6.354.000
			Jumlah 1			802.755.000			802.755.000
1 08 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
1 08 16 01	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura		Meningkatkan peran serta Stake Holder dalam penanganan kota bersih dan hijau		160.000.000	APBD KAB		140.000.000
1 08 16 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemantauan Kualitas Lingkungan		Pemantauan lingkungan pada 31 kecamatan, 150 industri, 2 TPA, 12 RS/Puskesmas, 7 RPH/Peternakan, 10 agroindustri, 5 RM/hotel, 2 Lapangan Golf, 75 lokasi sungai, 10 lokasi pemeriksaan kualitas udara ambien. - SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air - SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak - Pemantauan pngendalian BPO pada 30 kegiatan	100% 80% 80% 0%	375.000.000	APBD KAB	100% 80% 80% 0%	343.000.000

1	08	16	04	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. SPM : Pelayanan tindak lanjut pengaduan msyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100%	100.000.000	APBD KAB	100%	80.000.000
							80%			80%	
1	08	16	11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan .	-Penyusunan Juklat dan Juknis Kegiatan produksi bersih bagi jenis usaha di Kab. Bdg.	100%	70.000.000	APBD KAB	100%	60.000.000
1	08	16	14	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemahaman pengelolaan lingkungan pada guru dan siswa sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan masyarakat.		100.000.000	APBD KAB		80.000.000
1	08	16	16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan AMDAL dan UKL-UPL	Pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL		58.000.000	APBD KAB		48.000.000
1	08	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM					APBD KAB		
1	08	17	06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa SPM : Pelayanan Informasi Status kerusakan laha dan/atau tanah untuk produksi biomassa	80%	140.000.000	APBD KAB	80%	173.000.000
1	08	17	07	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumber-sumber air	Meningkatnya upaya konservasi air melalui biopori dan pembersihan sungai		132.000.000	APBD KAB		162.000.000
1	08	17	14	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam konservasi SDA		80.000.000	APBD KAB		110.000.000
1	08	19		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM Dan LINGKUNGAN HIDUP							
1	08	19	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM Dan LINGKUNGAN HIDUP	Pengembangan data dan Informasi Lingkungan	Meningkatnya kualitas dan akses informasi pengendalian pencemaran lingkungan	100%	110.000.000	APBD KAB	100%	110.000.000
1	08	20		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI							
1	08	20	02	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	1. Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	- Pengujian kualitas udara -Penarapan Manajemen Lingkungan neuju Green Lab -Menjadi lab. Rujukan untuk pengujian kualitas lingk. dg kemampuan pengujian sesuai lingkup parameter yang dipersyaratkan - Menerapkan GLP	100% 30% 40% 30%	154.000.000	APBD KAB	100% 30% 40% 30%	164.000.000
1	08	20	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	2.Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Pengujian kualitas air	100%	240.000.000	APBD KAB	100%	252.000.000
1	08	20	05	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	kegiatan sosialisasi dengan peserta sebanyak 280 orang.	100%	42.000.000	APBD KAB	100%	54.000.000
						Jumlah 2		1.761.000.000			1.776.000.000
						Jumlah (1+2)		2.563.755.000			2.578.755.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS BINA MARGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2012		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013				
				target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
x	xx	01										
x	xx	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bina Marga	100%	5.000.000	APBD KAB		100%	5.000.000
x	xx	01	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Bina Marga	100%	25.000.000	APBD KAB		100%	25.000.000
x	xx	01	03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bina Marga	100%	6.000.000	APBD KAB		100%	6.000.000
x	xx	01	05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah							
x	xx	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan							
x	xx	01	08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bina Marga	100%	65.000.000	APBD KAB		100%	65.000.000
x	xx	01	09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bina Marga	100%	20.000.000	APBD KAB		100%	20.000.000
x	xx	01	10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bina Marga	100%	110.000.000	APBD KAB		100%	110.000.000
x	xx	01	11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bina Marga	100%	100.000.000	APBD KAB		100%	100.000.000
x	xx	01	12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bina Marga	100%	20.000.000	APBD KAB		100%	20.000.000
x	xx	01	13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bina Marga	100%	110.000.000	APBD KAB		100%	110.000.000
x	xx	01	14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga							
x	xx	01	15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Bina Marga	100%	20.000.000	APBD KAB		100%	20.000.000
x	xx	01	16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bina Marga	100%	676.000.000	APBD KAB		100%	676.000.000
x	xx	01	17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bina Marga	100%	70.000.000	APBD KAB		100%	70.000.000
x	xx	01	19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Bina Marga	100%	130.000.000	APBD KAB		100%	130.000.000
x	xx	01	20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bina Marga	100%	80.000.000	APBD KAB		100%	80.000.000
x	xx	02		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
x	xx	02	05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional							
x	xx	02	09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bina Marga	100%	20.000.000	APBD KAB		100%	20.000.000
x	xx	02	10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Mebeulair							
x	xx	02	22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Bina Marga	100%	114.858.000	APBD KAB		100%	114.858.000
x	xx	02	24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/ Operasional	Bina Marga	100%	628.077.000	APBD KAB		100%	628.077.000
x	xx	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
x	xx	03	01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Mesin Absensi							
x	xx	03	02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya							
x	xx	03	04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian KORPRI							
x	xx	03	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu							
x	xx	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
x	xx	05	01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan							
x	xx	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
x	xx	06	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

x	xx	06	02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Bina Marga	100%	20.000.000	APBD KAB		100%	20.000.000
x	xx	06	03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran								
x	xx	06	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Bina Marga	100%	5.000.000	APBD KAB		100%	5.000.000
Jumlah 1									2.224.935.000				2.224.935.000
1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan									
1	03	15	01	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum			DED Pemb. Jln dan jembatan, dok amdal, pembebsan lahan	500.000.000	APBD KAB		DED Pemb. Jln dan jembatan, dok amdal, pembebsan lahan	500.000.000
1	03	15	02	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum								
1	03	15	03	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan (pembangunan jalan lingkak Banjaran, lingkak majalaya, lingkak katapang-baleendah-majalaya, jalan ibun-monteng		terbangunnya jalan baru sebanyak 3 ruas jalan	30.000.000.000	APBD KAB			30.000.000.000
1	03	15	04	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum								
1	03	15	05	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum								
1	03	15	06	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum								
1	03	16		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong									
1	03	16	01	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan Draenase / Gorong - gorong		tersedianya dokumen perencanaan pembangunan draenase/ gorong-gorong	250.000.000	APBD KAB		tersedianya dokumen perencanaan pembangunan draenase/ gorong-gorong	300.000.000
1	03	16	03	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		tersedianya sarana drainase sepanjang 51.613 m		Pemb. Drainase di 58 lokasi	5.500.000.000	APBD KAB		Pemb. Drainase di 59 lokasi	6.200.000.000
1	03	17		Program Pembangunan turap/talud/brojong									
1	03	17	01	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Perencanaan turap/talud/brojong	Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	300.000.000	APBD KAB		tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	350.000.000
1	03	17	03	Program Pembangunan turap/talud/brojong				Pemb. TPT di 25 lokasi	3.700.000.000	APBD KAB		Pemb. TPT di 26 lokasi	3.900.000.000
1	03	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan									
1	03	18	01	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Perencanaan Rehab/Pemel Jalan		tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan jalan	1.200.000.000	APBD KAB		tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan jalan	1.200.000.000
1	03	18	02	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan	1.000.000.000	APBD KAB		tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan	1.000.000.000
1	03	18	03	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Kondisi jalan baik 355,57 km, rusak sedang 235,190 km, rusak 319,01 km, rusak berat 245,58. Kondisi jembatan baik 603 lokasi, rusak sedang 126 lokasi, rusak 53 lokasi		Peningkatan jalan 60 km, pemel. Periodik 30 km, pemel rutin 147 km, pemel. Jembatan 78 lokasi, pemel rutin jembatan 127 lokasi	71.033.861.523	APBD KAB	Perbaikan jalan dan jembatan	Peningkatan jalan 65 km, pemel. Periodik 38 km, pemel rutin 153 km, pemel rutin 147 km, pemel. Jembatan 67 lokasi, pemel rutin jembatan 124 lokasi	74.790.442.420
1	03	18	04	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Perencanaan Rehab/Pemel Jembatan		baiknya jumlah jembatan sebanyak 43 buah di 7 wilayah	9.000.000.000	APBD KAB			10.000.000.000
1	03	18	05	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monev, Evaluasi dan Pelaporan			650.000.000	APBD KAB			650.000.000
1	03	20		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan									
1	03	20	01	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Inspeksi kondisi Jalan	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta tersedianya informasi rencana penanganan jalan dan jembatan		dokumen inspeksi jalan sepanjang 300 km	1.000.000.000	APBD KAB		dokumen inspeksi jalan sepanjang 300 km	1.574.614.000
1	03	22		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan									
1	03	22	01	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan		dokumen data base jalan di 8 kecamatan	340.006.000	APBD KAB		dokumen data base jalan di 8 kecamatan	430.012.000
1	03	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan									

1	03	23	03	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pembangunan laboratorium kebinamargaan	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan		Pembangunan Lab dan bengkel UPCA	1.350.000.000	APBD KAB		Pembangunan Lab dan bengkel UPCA	2.000.000.000
1	03	23	04	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pengadaan alat-alat berat	Pengadaan Alat Berat			2.000.000.000	APBD KAB		Pengadaan alat berat	
1	03	23	05	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Perlengkapan Bengkel Alat Berat		Pengadaan suku cadang UPCA	150.000.000	APBD KAB		Pengadaan suku cadang UPCA	150.000.000
1	03	23	06	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Alat Ukur dan Labolatorium		Pengadaan alat-alat laboratorium	100.000.000	APBD KAB		Pengadaan alat-alat laboratorium	150.000.000
1	03	23	10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Pemel. Alat Berat		Pemeliharaan alat berat	600.000.000	APBD KAB		Pemeliharaan alat berat	700.000.000
1	03	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh									
1	03	29	01	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur		Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur cepat tumbuh	250.000.000	APBD KAB		Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur cepat tumbuh	300.000.000
1	03	29	02	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				Pembangunan infrastruktur di 9 lokasi	750.000.000	APBD KAB		Pembangunan infrastruktur di 9 lokasi	1.200.000.000
1	07	15		Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan									
1	07	15	09	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan		Meningkatkan dan lancarnya lalu lintas yang aman dan tertib		Pembangunan 980 TC, Pemel 200 TC	3.250.000.000	APBD KAB		Pembangunan 980 TC, Pemel 1.796 TC	4.000.000.000
						Jumlah 2			132.923.867.523				139.395.068.420
						Jumlah (1+2)			135.148.802.523				141.620.003.420

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : RSUD MAJALAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RSUD MAJALAYA	Terwujudnya peningkatan administrasi perkantoran rumah sakit	Karyawan dan Pasien rumah sakit					
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Utilitas Rumah Sakit	Karyawan dan Pasien rumah sakit	12	490.800.000	APBD KAB	12	490.800.000
x xx 01 09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Kerja	Karyawan rumah sakit	12	52.000.000	APBD KAB	12	52.000.000
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Rasio antara Karyawan dan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	2:1	213.507.000	APBD KAB	2:1	213.507.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Tenaga Administrasi rumah sakit	12	353.617.500	APBD KAB	12	353.617.500
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Suku Cadang Alat Listrik	Karyawan dan Pasien rumah sakit	12	73.700.000	APBD KAB	12	73.700.000
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rasio antara Karyawan dan Alat Pendukung Administrasi	Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	2:1	130.800.000	APBD KAB	2:1	130.800.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya konsumsi rapat dan tamu	Karyawan dan Tamu rumah sakit	12	55.375.000	APBD KAB	12	55.375.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya Biaya Perjalanan Dinas	Karyawan rumah sakit	12	134.360.000	APBD KAB	12	134.360.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Tercukupinya Biaya Perjalanan Dinas	Karyawan rumah sakit dan Pasien Rujukan	12	147.640.000	APBD KAB	12	147.640.000
x xx 01 22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Terselenggaranya Peringatan Hari Bersejarah	Masyarakat Kabupaten Bandung	12	15.000.000	APBD KAB	12	15.000.000
x xx 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya peralatan pendukung peningkatan sarana dan prasaran aparatur	Karyawan dan Pasien rumah sakit					
x xx 02 05	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional	Karyawan rumah sakit	1:1			1:1	-
x xx 02 24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan operasional	Karyawan rumah sakit dan Pasien Rujukan	12	115.020.000	APBD KAB	12	115.020.000
x xx 03	Program peningkatan disiplin aparatur		Tersedianya peralatan pendukung disiplin kerja	Terpenuhinya peralatan pendukung disiplin kerja					
x xx 03 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya perlengkapan pakaian kerja	Karyawan rumah sakit dan Pasien	325			325	-
			Jumlah 1			1.781.819.500			1.781.819.500
1 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung upaya kesehatan masyarakat	Karyawan dan Pasien rumah sakit					
1 02 16 13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Terlayannya Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit	5187 Pasien Rumah Sakit dan BOR 70%	5.187	14.864.224.860	BLUD	BLUD	5.706 15.899.363.300
			Jumlah 2			14.864.224.860			15.899.363.300
			Jumlah (1+2)			16.646.044.360			17.681.182.800

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya Prosentase materi yang Tersedia	Dinsosdukcasip	550	2.100.000	APBD KAB	550	2.100.000
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Meningkatnya Kinerja dinas sehingga Pelaksanaannya tercapai	Dinsosdukcasip	1	34.525.000	APBD KAB	1	34.525.000
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Kenyamanan Pekerjaan dan Tercapainya prosentase alat Listrik	Dinsosdukcasip	1	5.995.000	APBD KAB	1	5.995.000
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terdukungnya Kebersihan Kantor untuk ketenangan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas	Dinsosdukcasip	1	36.020.000	APBD KAB	1	36.020.000
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor	Pekerjaan akan Berjalan Lebih lancar	Dinsosdukcasip	1	99.872.500	APBD KAB	1	99.872.500
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Adm. Kependudukan dan casip dan Kegiatan lainnya berjalan lancar	Dinsosdukcasip	1	64.097.350	APBD KAB	1	64.097.350
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercapainya kebutuhan yang akan di laksanakan	Dinsosdukcasip	1	150.000.000	APBD KAB	1	150.000.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Wawasan Aparatur	Dinsosdukcasip	1	20.000.000	APBD KAB	1	20.000.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Penyediaan makan minum Pegawai, Rapat dan Tamu yang Belum Perpenuhi	Dinsosdukcasip	124	290.160.000	APBD KAB	124	290.160.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya Prosentase Rata-rata perjalanan Dinas PNS	Dinsosdukcasip	40	150.000.000	APBD KAB	40	150.000.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran	Tercapainya Prosentase Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Dinsosdukcasip	13	13.000.000	APBD KAB	13	13.000.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya Prosentase Rata-rata Kerja perjalanan Dinas PNS	Dinsosdukcasip	276	60.000.000	APBD KAB	276	60.000.000
x xx 01 22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Terselenggaranya Kegiatan PHBN dengan baik	Dinsosdukcasip	1	20.000.000	APBD KAB	1	20.000.000
x xx 02 05	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Dengan baik	Dinsosdukcasip	1	350.000.000	APBD KAB	1	350.000.000
x xx 02 07	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercapainya Kebutuhan Dinas yang Akan di laksanakan	Dinsosdukcasip	1	100.000.000	APBD KAB	1	100.000.000
x xx 02 22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Tercapainya Kantor secara Keseluruhan untuk Kenyamanan Bekerja	Dinsosdukcasip	1	175.000.000	APBD KAB	1	175.000.000
x xx 02 24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dengan Rata-rata Jumlah Kendaraan yang Belum dapat Pemeliharaan	Dinsosdukcasip	1	437.324.500	APBD KAB	1	437.324.500
x xx 02 30	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan	Tercapainya Prosentase Belanja Modal Keperluan yang dapat Terpenuhi	Dinsosdukcasip	21	35.000.000	APBD KAB	21	35.000.000
x xx 02 37	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor	Tercapainya Pemeliharaan Peralatan Kantor Dengan Sebaik mungkin	Dinsosdukcasip	1	35.000.000	APBD KAB	1	35.000.000
x xx 03 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan pakaian dinas/beserta perlengkapannya	Meningkatnya Perlengkapan PNS Selama Bekerja	Dinsosdukcasip	1	150.000.000	APBD KAB	1	150.000.000
x xx 03 05	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Meningkatnya Perlengkapan PNS Selama Bekerja	Dinsosdukcasip	1	100.000.000	APBD KAB	1	100.000.000
x xx 06 01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Tertibnya Administrasi Pelaporan	Dinsosdukcasip	1	64.467.500	APBD KAB	1	64.467.500
x xx 06 02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Dinsosdukcasip	1	45.000.000	APBD KAB	1	45.000.000
x xx 06 04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan	Dinsosdukcasip	1	15.000.000	APBD KAB	1	15.000.000
Jumlah 1						2.452.561.850			2.452.561.850
1 13 15 01	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya								
1 13 15 02	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS lainnya	29 Kecamatan	Pemantapan dan Bantuan Stimulan bagi 29 TKSK	100.000.000	APBD KAB	Pemantapan dan Bantuan Stimulan bagi 29 TKSK	110.000.000

1	13	15	03	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terbinanya Fakir Miskin dan Keterampilan Berusaha dalam memenuhi Kebutuhan Hidupnya	Kec. Paseh, Ibut, Cileunyi, Ciparay, Pangalengan, Soreang, Majalaya, Banjaran, Margaasih, Nagreg	313	407.000.000	APBD KAB		313	445.000.000
1	13	15	04	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terbinanya Kel. Migran dalam me ningkatkan kualitas dan ketahanan kelga sehingga kesejahteraan sosialnya terpenuhi		30 kk	60.000.000	APBD KAB		30 kk	66.000.000
1	13	15	05	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Terbinanya Keluarga Miskin dan Keterampilan Berusaha dalam memenuhi Kebutuhan Hidupnya	Kec. Soreang, Banjaran, Paseh, Pacet, Cikancung, dan Solokan Teruk	Bintek Lanjutan FM 66 KK	220.000.000	APBD KAB		Bintek Lanjutan FM 66 KK	242.000.000
1	13	15	06	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terbinanya Wanita Rawan Sosial Ekonomin, dan Memiliki Keterampilan Berusaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya	Kec. Paseh, Pangalengan, Kutawaringin, Soreang, Pameungpeuk dan Lokasi P2WKSS	WRSE 150 Org,	240.000.000	APBD KAB		WRSE 150 Org,	264.000.000
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									
1	13	16	01	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Terjalinnnya Koordinasi dengan Dirjen Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Dinsosdukcap	15 Pejabat Eselon 3 & 4 Dan Staf	10.000.000	APBD KAB		15 Pejabat Eselon 3 & 4 Dan Staf	11.000.000
1	13	16	02	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Tersosialisasikan dan terwujudnya Penanganan Korban Tindak Kekerasan	Kec. Soreang, Margahayu, Ciwidey, dan Arjasari	50 Orang Korban Tindak Kekerasan, 25 orang Tim Jejaring Kerja Penanggulangan KTK	80.400.000	APBD KAB		50 Orang Korban Tindak Kekerasan, 25 orang Tim Jejaring Kerja Penanggulangan KTK	82.614.433
1	13	16	03	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terselenggaranya Bimbingan Sosial Bagi Kader Pencegah Tuna Susila, HIV/AIDS, Anak Nakal dan Penanggulangan NAPZA	Kec. Ciwidey, Margahayu, Pameungpeuk, Banjaran, Cimenyan, Margaasih, Katapang, Kutawarinin, dan Ciparay	90 Toma, Toga, Toda, PSM/KT, Dan Kader PKK	100.000.000	APBD KAB		90 Toma, Toga, Toda, PSM/KT, Dan Kader PKK	109.000.000
1	13	16	04	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Terbinanya Anak Cacat dalam pemenuhan hak dasar anak	Kec. Katapang, Margaasih, Cangkuang, banjaran, Margahayu, Soreang, Pasirjambu, dan Pangalengan	40 orang anak Cacat Tuna rungu	102.000.000	APBD KAB		40 orang anak Cacat Tuna rungu	110.200.000
1	13	16	05	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terselenggaranya Bimbingan Sosial Bagi Keluarga dengan Anak Cacat	Kec. Paseh, Majalaya, Bojongsong, Ibut, Solokanienuk	100 Orang Tua ADK, Pengurus IK-DAC, FK- KDAC Kab. Bandung	90.000.000	APBD KAB		100 Orang Tua ADK, Pengurus IK-DAC, FK- KDAC Kab. Bandung	97.000.000
1	13	16	10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terselenggaranya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	31 Kecamatan	Bimbingan Sosial dasar dan Bintek UEP Untuk 62 orang Tagana, serta Bantuan UEP TAGANA untuk 31 Kecamatan	183.000.000	APBD KAB		Bimbingan Sosial dasar dan Bintek UEP Untuk 62 orang Tagana, serta Bantuan UEP TAGANA untuk 31 Kecamatan	198.300.000
1	13	16	12	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Jaminan Sosial Bagi Lansia	Terselenggaranya kegiatan penanganan bagi lanjut usia terlantar	Kec. Pangalengan, Kertasari, Ciparay dan majalaya, Pasirjambu	120 lanjut usia terlantar	256.500.000	APBD KAB		120 lanjut usia terlantar	260.149.991
1	13	17		Program pembinaan anak terlantar									
1	13	17	02	Program pembinaan anak terlantar	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Terbinanya Anak Terlantar dan Keterampilan Berusaha dalam memenuhi Kebutuhan Hidupnya	Kec. Soreang, Kutawaringin, Katapang, Dan Pasir Jambu	40 Orang Anak Putus Sekolah	80.000.000	APBD KAB		40 Orang Anak Putus Sekolah	100.000.000

1	13	17	05	Program pembinaan anak terlantar	Kegiatan Peningkatan Keterampilan tenaga pembina anak terlantar	Terbinanya tenaga pembina anak terlantar	Banjaran, Pangalengan, cimaung dan cangkuang	40 org, OT anak terlantar	50.000.000	APBD KAB		40 org, OT anak terlantar	67.000.000
1	13	17	07	Program pembinaan anak terlantar	Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar melalui Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga	Terbinanya Anak Terlantar dan Keterampilan Berusaha dalam memenuhi Kebutuhan Hidupnya	Banjaran, Pangalengan, cimaung dan cangkuang	40 orang OT anak terlantar	110.000.000	APBD KAB		40 orang OT anak terlantar	133.000.000
1	13	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan eks. trauma									
1	13	18	02	Program pembinaan para penyandang cacat dan eks. trauma	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	Fasilitasi Alat Bantu bagi Penyandang Cacat (Tuna Netra, Tuna Rungu dan Tuna Daksa)	Kec. Cimenyan, Baleendah, Margaasih, Cileunyi	40 buah alat bantu	280.500.000	APBD KAB		40 buah alat bantu	280.500.000
1	13	18	03	Program pembinaan para penyandang cacat dan eks. trauma	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Pengiriman kalayan ke BBRSD Solo dan BBRSPVC Bogor	Pengiriman kalayan ke BBRSD Solo dan BBRSPVC Bogor	10 orang Penyandang Cacat	80.000.000	APBD KAB		10 orang Penyandang Cacat	80.000.000
1	13	18	04	Program pembinaan para penyandang cacat dan eks. trauma	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terserapnya kuaota 1 % Tenaga Kerja Paca di Perusahaan dan Terpenuhinya Kebutuhan Hak dasar Anak dengan Kecacatan /ADK	Kecamatan Banjaran	30 Pelaku Dunia Usaha, dan 100 ADK	120.000.000	APBD KAB		30 Pelaku Dunia Usaha, dan 100 ADK	120.000.000
1	13	18	05	Program pembinaan para penyandang cacat dan eks. trauma	Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik	Terselenggaranya Bimbingan Sosial bagi Kader Rehabilitasi Paca berbasis Masyarakat	Kec. Katapang, Soreang, (Tersebar Di 31 Kec)	100 org TKSK se Kab. Bandung dan Kader RBM	116.000.000	APBD KAB		100 org TKSK se Kab. Bandung dan Kader RBM	116.000.000
1	13	18	06	Program pembinaan para penyandang cacat dan eks. trauma	Pemeliharaan Panti PMKS di Baleendah	Terpeliharanya Gedung PMKS	Kel. Baleendah Kec. Baleendah	1 Paket	45.000.000	APBD KAB		1 Paket	45.000.000
1	13	19		Program Pembinaan Panti Sosial/Panti Jompo									
1	13	19	04	Program Pembinaan Panti Sosial/Panti Jompo	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Panti Asuhan/Jompo	Kec. Pacet, Ciparay, Cimenyan, Cileunyi, Rancaekek, Banjaran, Paseh, Margahayu, Arjasari dan Margaasih	60 orang Pengurus Panti Sosial	90.000.000	APBD KAB		60 orang Pengurus Panti Sosial	90.000.000
1	13	19	07	Program Pembinaan Panti Sosial/Panti Jompo	Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan taraf Kesejahteraan Sosial Lanjut Usai.	Terselenggaranya kegiatan penanganan bagi lanjut usia terlantar	Kec. Kutawaringin, Katapang, Soreang dan Pasirjambu	150 Lanjut Usia Terlantar	188.000.000	APBD KAB		150 Lanjut Usia Terlantar	188.000.000
1	13	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)									
1	13	20	01	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi wanita Tuna Sosial, eks. Gelandangan dan pengemis	Kec. Cimaung, Cileunyi, Cangkuang, Katapang, majalaya, Ciparay, Cicalengka	30 orang wanita Tuna Susila dan 30 orang eks gelandangan dan pengemis	100.000.000	APBD KAB		30 orang wanita Tuna Susila dan 30 orang eks gelandangan dan pengemis	115.000.000
1	13	20	02	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Tersedianya data Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan) BWBP	Kec. Margahayu, Majalaya, Cicalengka, Cileunyi, Pasirjambu dan Cikancung	30 BWBP	50.000.000	APBD KAB		30 BWBP	57.500.000
1	13	20	06	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Bimbingan Sosial dan Latihan bagi eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terselenggaranya Bimbingan Sosial dan Latihan bagi eks. Penyandang Penyakit Sosial (Anak Nakal dan Eks. Napza)	Kec. Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, Majalaya, Solokanjeruk, rancaekek, Cicalengka, Ciwidey, Baleendah, Cimaung Cikancung, dan Pangalengan	30 orang Eks Napza, dan 30 Orang Anak Nakal	125.000.000	APBD KAB		30 orang Eks Napza, dan 30 Orang Anak Nakal	142.500.000

1	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									
1	13	21	01	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terisolasinya peraturan Perundang-undangan tentang izin undian dan izin Pengumpulan uang atau barang	31 Kecamatan	62 org (Dunia Usaha, PSM, Karang Taruna, Orsos, Tomas)	45.000.000	APBD KAB		62 org (Dunia Usaha, PSM, Karang Taruna, Orsos, Tomas)	45.000.000
1	13	21	03	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial pada Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Penilaian KT dan PSM berprestasi, Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Teknis Usaha Ekonomis Produktif KT dan PSM	31 Kecamatan	Bantuan UEP Untuk KT dan PSM, Serta Penilaian KT dan PSM di 31 Kec., Bimbingan Sosial dasar dan Bintek UEP 62 KT dan 62 PSM,	696.500.000	APBD KAB		Bantuan UEP Untuk KT dan PSM, Serta Penilaian KT dan PSM di 31 Kec., Bimbingan Sosial dasar dan Bintek UEP 62 KT dan 62 PSM,	696.500.000
1	13	21	05	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peringatan Hari Pahlawan, Pemeliharaan TMB dan Tugu Perjuangan	Terselenggaranya Peringatan Hari Pahlawan serta terpeliharanya TMB dan Tugu perjuangan	Kec. Soreang, Pangalengan, Majalaya dan Baleendah	Peringatan Hari Pahlawan, 3 TMB dan 1 Tugu Perjuangan	110.000.000	APBD KAB		Peringatan Hari Pahlawan, 3 TMB dan 1 Tugu Perjuangan	110.000.000
1	13	21	06	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pendidikan dan Pelatihan Bagi pengurus Yayasan Orsos	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus panti sosial	15 Kecamatan	30 orang	60.000.000	APBD KAB		30 orang	60.000.000
1	13	21	08	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosialisasi UUNo 11 Tahun 2009	Tersosialisasinya UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kessos	31 Kecamatan	Aparat Kabupaten dan Kecamatan	200.000.000	APBD KAB		Aparat Kabupaten dan Kecamatan	200.000.000
1	13	21	09	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Updating Data PMKS dan PSKS	Tersedianya Data PMKS dan PSKS secara lengkap dan akurat	31 Kecamatan	Updating Data PMKS & PSKS	75.000.000	APBD KAB		Updating Data PMKS & PSKS	75.000.000
1	13	21	10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Koordinasi pelak - sanaan Bidang Kesejahteraan sosial	Tersusunnya perencanaan program kesos secara partisipatif	Dinsosdukcasip	30 orang	179.736.535	APBD KAB		30 orang	179.736.535
1	13	21	11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Terlaksananya pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana.	Kab.Bandung	1	100.000.000	APBD KAB		1	100.000.000
1	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan									
1	10	15	01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Terpeliharanya jaringan SIAK onLine dari tingkat Kabupaten ke seluruh Kecamatan di Wilayah Kab. Bandung maupun ke Tingkat Provinsi dan Pusat (DDN)	31 Kecamatan		200.000.000	APBD KAB			230.000.000
1	10	15	03	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Implementasi Sistem Ad ministrasi Kependudukan	Terlaksananya Kordinasi, Konsultasi dan Konsolidasi data base Kependudukan	31 Kecamatan		80.000.000	APBD KAB			90.000.000
1	10	15	05	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Pelaksanaan koordinasi dengan pengadilan negeri tentang penetapan akta kelahiran terlambat	31 Kecamatan	Aparatur dan Masyarakat	45.000.000	APBD KAB		Aparatur dan Masyarakat	49.500.000
1	10	15	06	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan	Terolah dan tersusunnya Laporan Informasi Kependudukan	31 Kecamatan	31 Kecamatan	60.000.000			31 Kecamatan	68.000.000
1	10	15	10	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penyusunan kebijakan kependudukan	Pengembangan data base kependudukan	31 Kecamatan		75.000.000	APBD KAB			86.500.000
1	10	15	11	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kapasitas aparat Kependudukan dan Casip	Terpenuhinya tertib pengelola pendaftaran penduduk	31 Kecamatan	31 Kecamatan dan Masyarakat	180.000.000	APBD KAB		31 Kecamatan dan Masyarakat	208.000.000
1	10	15	12	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terinformasikannya Kebijakan Kependudukan	31 Kecamatan	31 Kecamatan	60.000.000	APBD KAB		31 Kecamatan	68.000.000
1	10	15	14	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya tertib Administrasi Kependudukan	31 Kecamatan	31 Kecamatan dan Masyarakat	60.000.000	APBD KAB		31 Kecamatan dan Masyarakat	68.000.000
1	10	15	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Penerapan E-KTP	Tersedianya petugas pelaksanaan perekaman foto, Sidik jari, dan Tanda tangan, serta terlaksananya mobilisasi penduduk wajib KTP bertempat pelayanan	31 Kecamatan	Penduduk wajib KTP dan petugas	900.000.000	APBD KAB		Penduduk wajib KTP dan petugas	992.000.000
									6.409.636.535				6.856.000.959
									8.862.198.385				9.308.562.809

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013		
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Disnaker		3.676.000	APBD KAB			3.676.000	
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Disnaker		35.603.617	APBD KAB			35.603.617	
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disnaker		57.718.883	APBD KAB			57.718.883	
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disnaker		51.532.000	APBD KAB			51.532.000	
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Disnaker		3.000.000	APBD KAB			3.000.000	
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker		100.480.000	APBD KAB			100.480.000	
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Disnaker		13.380.000	APBD KAB			13.380.000	
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Disnaker		233.505.000	APBD KAB			233.505.000	
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Disnaker		47.825.000	APBD KAB			47.825.000	
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Disnaker		64.200.000	APBD KAB			64.200.000	
x xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Disnaker							
x xx 02 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung/kantor	Disnaker		50.000.000	APBD KAB			50.000.000	
x xx 02 24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas	Disnaker		182.799.000	APBD KAB			182.799.000	
x xx 02 28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Disnaker		3.000.000	APBD KAB			3.000.000	
x xx 02 29	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur	Disnaker		3.549.000	APBD KAB			3.549.000	
x xx 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Disnaker							
x xx 06 01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker		11.404.000	APBD KAB			11.404.000	
x xx 06 02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Disnaker		2.768.000	APBD KAB			2.768.000	
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Disnaker		1.960.000	APBD KAB			1.960.000	
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Disnaker		2.182.500	APBD KAB			2.182.500	
		Jumlah 1			868.583.000				868.583.000	
1 14 15	Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja									
1 14 15 02	Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja	Pembangunan BLK	Terlaksananya pembangunan BLK	Kel Manggahang Kec Baleendah	2 unit workshop	3.000.000.000	APBD KAB	Investasi pembangunan BLK	2 unit workshop	10.000.000.000
1 14 15 06	Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Terlatihnya pencari kerja pada bidang industri, aqribisnis dan aneka kejuruan	Kab. Bandung	600 org	2.107.158.800	APBD KAB		620 org	2.317.874.680
1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja									
1 14 16 04	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	1. Penetapan lokal, AKAL, AKAN, penempatan BKK 2. Meningkatkan keterampilan untuk ekonomi masyarakat 3. Terbentuknya BKK	Kab. Bandung	1.213.507 org	1.641.756.000	APBD KAB		1.213.945 org	1.753.828.685
1 14 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									
1 14 17 04	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Sosialisasi berbagai peraturan pelaks	- Penetapan UMK 2012 - Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan - Terdeteksinya dan terpetakannya kasus ketenagakerjaan	Kab. Bandung	60	640.012.245	APBD KAB		60	640.012.245

1	14	17	05	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Peningkatan pengawasan dan penegakan	- Meningkatnya kepesertaan Jamsostek - Meningkatnya Lembaga P2K3 11 Perusahaan - Terlindunginya Tenaga Kerja Anak, Pekerja Wanita dan Terawasinya Tenaga Kerja Asing	Kab. Bandung	60	169.800.000	APBD KAB	60	169.800.000
2	08	17		Program Transmigrasi Regional								
2	08	17	03	Program Transmigrasi Regional	Monitoring dan Penempatan Transmigrasi	- Terselenggaranya penyiapan calon transmigran - Terdaftaranya calon transmigran - Terlatihnya calon transmigran - Terjajaginya daerah penerima transmigran - Terwujudnya kerjasama antar daerah - Tertempatkannya transmigran	Kab. Bandung	50	220.000.000	APBD KAB	50	230.000.000
									Jumlah 2			15.111.515.610
									Jumlah (1+2)			15.980.098.610

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KESBANGLINMAS

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013		
					Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x	xx	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
x	xx	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya pelayanan administrasi perkantoran melalui surat menyurat selama 1 tahun anggaran	Kab. Bandung	100%	500.000	APBD KAB		100%	500.000
x	xx	01	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Bandung	100%	6.000.000	APBD KAB		100%	6.000.000
x	xx	01	06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kab. Bandung						
x	xx	01	08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kab. Bandung	100%	1.750.000	APBD KAB		100%	1.750.000
x	xx	01	10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor		Kab. Bandung	100%	29.610.285	APBD KAB		100%	29.610.285
x	xx	01	11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kab. Bandung	100%	40.865.040	APBD KAB		100%	40.865.040
x	xx	01	14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga		Kab. Bandung	100%	3.020.000	APBD KAB		100%	3.020.000
x	xx	01	15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kab. Bandung	100%	4.800.000	APBD KAB		100%	4.800.000
x	xx	01	17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman		Kab. Bandung	100%	61.520.000	APBD KAB		100%	61.520.000
x	xx	01	18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kab. Bandung	100%	15.145.000	APBD KAB		100%	15.145.000
x	xx	01	19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan tenaga Pendukung administrasi teknis dan perkantoran		Kab. Bandung	100%	14.300.000	APBD KAB		100%	14.300.000
x	xx	01	20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah		Kab. Bandung	100%	210.405.259	APBD KAB		100%	210.405.259
x	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						APBD KAB			
x	xx	02	22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kab. Bandung	100%	16.215.000	APBD KAB		100%	16.215.000
x	xx	02	26	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kab. Bandung	100%	26.960.000	APBD KAB		100%	26.960.000
x	xx	02	30	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor		Kab. Bandung	100%	4.350.000	APBD KAB		100%	4.350.000
						Jumlah 1			435.440.584			435.440.584	
1	19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
1	19	15	01	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya motivasi anggota hansip/linmas dalam pemeliharaan kamtrantibmas di daerah	Kab. Bandung		4.000.000.000	APBD KAB		Terbinanya anggota satlinmas desa/kel periode siap sebanyak 5520 orang	4.000.000.000
1	19	15	03	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terbinanya anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan sebanyak 480 orang	Kab. Bandung	50 org	27.400.000	APBD KAB	50 org		27.400.000
1	19	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal									
1	19	16	02	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terselenggaranya analisa potensi konflik	Kab. Bandung	30 orang	150.000.000	APBD KAB	30 orang		150.000.000
1	19	16	04	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terbinanya anggota Satlinmas dalam Siskamswakarsa 400 orang	Kab. Bandung	75 org	50.000.000	APBD KAB	75 org		50.000.000
1	19	16	06	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.	Terselenggaranya kewaspadaan dini masyarakat	Kab. Bandung	31 Kecamatan	50.000.000	APBD KAB	31 Kecamatan		50.000.000
1	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan									
1	19	17	01	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya fasilitas peningkatan kerukunan hidup beragama bagi 20 orang tokoh agama dan masyarakat	Kab. Bandung	20 orang	70.000.000	APBD KAB	20 orang		70.000.000
1	19	17	02	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan bagi 30 orang tokoh masyarakat	Kab. Bandung	30 orang	105.000.000	APBD KAB	30 orang		105.000.000
1	19	17	03	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya analisa potensi konflik bagi 20 anggota pakem	Kab. Bandung	20 orang	61.933.407	APBD KAB	20 orang		91.933.407

1	19	17	04	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemantauan kegiatan orang asing tenaga kerja asing NGO dan lembaga asing	Terselenggaranya analisa data orang asing/tenaga kerja asing, NGO dan Lembaga asing bagi 20 orang	Kab. Bandung	20 org	65.000.000	APBD KAB		20 org	103.247.041
1	19	21		Program pendidikan politik masyarakat									
1	19	21	03	Program pendidikan politik masyarakat	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Terlaksananya pendidikan politik masyarakat bagi 200 orang	Kab. Bandung	200 orang	200.000.000	APBD KAB		200 orang	250.000.000
1	19	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam									
1	19	22	01	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Terbinanya Hansip/Linmas periode siap dalam penanganan bencana bagi 350 orang	Kab. Bandung	75 org	50.000.000	APBD KAB		75 org	50.000.000
						Jumlah 2			4.829.333.407				4.947.580.448
						Jumlah (1+2)			5.264.773.991				5.383.021.032

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013				
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
x	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
x	xx	01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dengan baik serta Tersedianya Perangko,materai dan benda Pos	Kab. Bandung	Perangko 714 bh, Materai,794 Bh	4.488.000	APBD KAB	Perangko 714 bh, Materai,794 Bh	4.488.000	
x	xx	01	02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya suasana kerja yang nyaman serta terpenuhi Jasa Komunikasi,air dan listrik	Kab. Bandung	1Paket	13.750.000	APBD KAB	1Paket	13.750.000	
x	xx	01	07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pencatatan dan pelaporan keuangan	Kab. Bandung					-	
x	xx	01	08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya suasana kerja yang nyaman serta Tersedia peralatan kebersihan kantor	Kab. Bandung	1 Paket Peralatan Kebersihan	9.068.950	APBD KAB	1 Paket Peralatan Kebersihan	9.068.950	
x	xx	01	09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya peralatan kerja yang efektif	Kab. Bandung	14 Unit Komputer, 5 Unit Mesin Tik	8.363.000	APBD KAB	14 Unit Komputer, 5 Unit Mesin Tik	8.363.000	
x	xx	01	10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	tersedia belanja Alat Tulis Kantor untuk mendukung kinerja	Kab. Bandung	1 Paket belanja alat tulis kantor	75.306.950	APBD KAB	1 Paket belanja alat tulis kantor	75.306.950	
x	xx	01	11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Kinerja dan pelayanan pada masyarakat berjalan dengan baik	Kab. Bandung	Cetakan Administrasi kantor,buku visum PKB 200 Buku, Buku SBBK=100 Eks Fotocopy=71894 Eks	107.800.000	APBD KAB	Cetakan Administrasi kantor,buku visum PKB 200 Buku, Buku SBBK=100 Eks Fotocopy=71894 Eks	107.800.000	
x	xx	01	13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan dengan baik	Kab. Bandung	Lemari 1 Buah, 2 Buah NoteBook, kursi kerja 5 buah,lemari pakaian 1 buah	77.637.450	APBD KAB	Lemari 1 Buah, 2 Buah NoteBook, kursi kerja 5 buah,lemari pakaian 1 buah	77.637.450	
x	xx	01	17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Terhadap semua pihak meningkat karena adanya penyediaan makanan dan minum untuk tamu dan rapat rutin UPT Pengendali Prog.KBPP	Kab. Bandung	1 Paket makanan dan minum untuk tamudan rapat rutin UPT Pengendali Prog.KBPP (233 Orang,Kegiatan)	371.893.500	APBD KAB	1 Paket makanan dan minum untuk tamudan rapat rutin UPT Pengendali Prog.KBPP (233 Orang,Kegiatan)	371.893.500	
x	xx	01	18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	adanya kesepakatan dan komitmen dengan lintas sektoral tentang program KB dan pemberdayaan perempuan	Kab. Bandung	Rapat di BKKBN Propinsi,Pusat dan PPKB Propinsi Jawa Barat (7Kegiatan)	144.630.000	APBD KAB	Rapat di BKKBN Propinsi,Pusat dan PPKB Propinsi Jawa Barat (7Kegiatan)	144.630.000	
x	xx	01	19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tekhnis dan Administrasi Perkantoran	TKK dua orang untuk membantu piket dan kebersihan	Kab. Bandung	TKK Satu orang	15.730.000	APBD KAB	TKK Satu orang	15.730.000	
x	xx	01	20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	adanya pembinaan dari tk. Kabupaten kepada UPT,dinas intansi terkait,Rakerda di wil kabuapten	Kab. Bandung	Rapat UPT,dinas intansi terkait,Rakerda (31 Kecamatan)	149.665.500	APBD KAB	Rapat UPT,dinas intansi terkait,Rakerda (31 Kecamatan)	149.665.500	
x	xx	01	21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Peringatan Hari Besar Nasional	Terselenggaranya hari besar Nasional. Hut RI,Hari jadi Kab.Bdg,Harganas, Hari Raya Idul Fitri,HUT Korpri	Kab. Bandung	(5 Hari Besar Nasional) Hut RI,Hari jadi Kab.Bdg,Harganas, Hari Raya Idul Fitri,HUT Korpri	17.625.000	APBD KAB	(5 Hari Besar Nasional) Hut RI,Hari jadi Kab.Bdg,Harganas, Hari Raya Idul Fitri,HUT Korpri	17.625.000	
x	xx	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
x	xx	02	05 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi	Kab. Bandung	1 unit Kendaraan dinas				1 unit Kendaraan dinas	-
x	xx	02	10 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan mebeleur		Kab. Bandung						-
x	xx	02	22 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pengadaan bahan untuk gedung kantor	Kab. Bandung	1 Paket material bangunan	15.950.000	APBD KAB	1 Paket material bangunan	15.950.000	
x	xx	02	24 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kab. Bandung	8 buah R4 ,218 R2	896.693.500	APBD KAB	8 buah R4 ,218 R2	896.693.500	
x	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur									
x	xx	03	02 Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kab. Bandung		56.500.000	APBD KAB			56.500.000
x	xx	03	05 Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Untuk semua pegawai	Kab. Bandung	233 orang pegawai BKBP				233 orang pegawai BKBP	-
x	xx	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
x	xx	05	02 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya perundang-undangan	Kab. Bandung	240 Orang (PKB,PLKB,UPT dan Kasubag TU)	27.335.000	APBD KAB	240 Orang (PKB,PLKB,UPT dan Kasubag TU)	27.335.000	
x	xx	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									

x	xx	06	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan keuangan (Lakip,Renstra,Lakta,Renja,RKA,DPA)	Kab. Bandung	7 Orang	44.000.000	APBD KAB		7 Orang	44.000.000
x	xx	06	02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (Laporan Tahunan,Semesteran,Triwulan)	Kab. Bandung	7 Orang	4.380.750	APBD KAB		7 Orang	4.380.750
x	xx	06	04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (Laporan akhir Tahun)	Kab. Bandung	7 Orang	9.141.000	APBD KAB		7 Orang	9.141.000
Jumlah 1									2.049.958.600				2.049.958.600
1	12	15		Program Keluarga Berencana		tercapainya pelayanan keluarga berencana melalui: pelayanan KB MOP dan MOW kesepakatan Pelayanan dengan medis, pelayanan KB paska pelayanan, menurunnya LPP (laju pertumbuhan penduduk) melalui pengaturan kelahiran,Cakupan PUS dibawah 20 tahun,Cakupan PUS menjadi peserta KB (CPR), Cakupan kontrasepsi MKJP, Cakupan unmet need, penyediaan informasi data mikro keluarga	Kab. Bandung	Tercapainya peserserta KB baru 94.000 akseptor, Meningkatnya Peserta KB aktif menjadi 560.000 akseptor Meningkatnya CPR, Dan Raio KB meningkat , Meningkatnya partisipasi masyarakat tentang KB, menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian balita			RJPMD, Rensta SKPD tahun 2010 -2015 Anggaran digunakan untuk mengatur kelahiran melalui pelayanan kb bagi keluarga miskin, sehingga rasio kb meningkat, CPR meningkat, AKB dan AKI menurun	Tercapainya peserserta KB baru 100.000 akseptor, Meningkatnya Peserta KB aktif menjadi 560.000 akseptor Meningkatnya CPR, Dan Raio KB meningkat , Meningkatnya partisipasi masyarakat tentang KB, menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian balita	
1	12	15	01	Program Keluarga Berencana	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	terlayannya kesertaan peserta KB baru dan Peserta KB Aktif dan tersedianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Keluarga miskin	Kab. Bandung	Tercapainya peserserta KB baru 94.000 akseptor, Meningkatnya Peserta KB aktif menjadi 560.000 akseptor Meningkatnya CPR, Dan Raio KB meningkat	200.000.000	APBD KAB	Rensta SKPD tahun 2010 -2015 Anggaran digunakan untuk mengatur kelahiran melalui pelayanan kb bagi keluarga miskin, sehingga rasio kb meningkat, CPR meningkat, AKB dan AKI menurun		200.000.000
1	12	15	02	Program Keluarga Berencana	Pelayanan KIE	Terselenggarannya pelayanan KIE KBPP, melalui Moment-moment Harganas,TKKK KB-KES	Kab. Bandung	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB 31 Kecamatan	150.000.000	APBD KAB	Dalam pembangunan keluarga berencana peran serta masyarakat perlu ditingkatkan sehingga melalui kegiatan pendukunga dapat meningkatkan pelayanan KB		150.000.000
1	12	15	04	Program Keluarga Berencana	Promosi Pelayanan Khiba	Menurunnya Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi melalu kegiatan promohi Kedehatan IBU dan Baliita	Kab. Bandung	Meningkatnya Peserta KB baru di 276 Desa,31 Kecamatan	35.000.000	APBD KAB		Menurunnya Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi melalu kegiatan promohi Kedehatan IBU dan Baliita	35.000.000,00
1	12	15	05	Program Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana melalui penyediaan data mikro keluarga sejahtera pada kegiatan pendataan R/1/KS tahun 2011, - terkendalinya data pengguna Gakinda melalui penyediaan kartu gakinda yang baru	Kab. Bandung	1.076.275 jiwa Miskin, dan 347.000 jiwa pengguna Gakinda	615.000.000	APBD KAB	implentasi perub Tahun 2010 tentang penyediaan data keluarga miskin sehingga perlu dibuatkan karu gakinda baru	pengendalian data keluarga miskin	615.000.000,00
1	12	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja		meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui: Lokakarya remaja, Pembentukan Kelompok PIKR, Pertemuan PIKR, Percontohan pembinaan Remaja di pesantren, Pembinaan Remaja di sekolah, Pembentukan desa model PUP,Pengembangan kelompok PIKR	Kab. Bandung	meningkatnya usia kawin pertama menjadi 20 tahun			RPJMD, Renstra SKPD Usia Kawin Pertama Naik Menjadi 20 tahun	meningkatnya usia kawin pertama menjadi 21 tahun	
1	12	16	02	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Terbinanya para remaja dalam kegiatan Re-Produksi Sehat	Kab. Bandung	Pembinaan kelompok PIKR sebanyak 70 kelompok di 31 kecamatan	155.359.600	APBD KAB			240.000.000
1	12	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Tercapainya Peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap Desa melalui pembinaan pos kb desa, sub pos kb desa,Kelompok KB, Paguyuban MOP dan Forum Pos KB desa	Kab. Bandung	Meningkatnya pengetahuan tentang KB bagi masyarakat di sebanyak 1000 kader KB				Tercapainya Peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap Desa melalui pembinaan pos kb desa, sub pos kb desa,Kelompok KB, Paguyuban MOP dan Forum Pos KB desa	

1	12	18	01	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Pembinaa Pos KB, Sub Pos KB, Forum Perduli,kependudukan	Kab. Bandung	31 Kecamatan	351.634.080	APBD KAB			350.000.000
1	12	21		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS		Menurunkan Kasus penularan Penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular	Kab. Bandung	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang HIV/Aids dan Penyakit Menular Kepada 500 pemuda			Implementasi Meliniu Depeloment Gols (MDGS), bantuan termasuk penularan haiv cukup tinggi sehingga perlu peneendalian	Menurunnya Penularan HIV/Aids	
1	12	21	01	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Kab. Bandung	1 Fasilitator, 100 Peserta,1 Paket ATK	86.452.416	APBD KAB			75.000.000
1	12	22		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		Meningkatnya pengetahuan ibu melalui kartu kembang anak sehingga tercapai tumbuh kembang anak yang ideal						Meningkatnya pengetahuan ibu melalui kartu kembang anak sehingga tercapai tumbuh kembang anak yang ideal	
1	12	22	01	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Tersosialisasinya bahan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Kab. Bandung	2270 KKA	37.700.000	APBD KAB			50.000.000
1	12	23		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		meningkatkan peran kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di tingkat kecamatan						meningkatkan peran kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di tingkat kecamatan	
1	12	23	01	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Meningkatnya Pengelolaan BKB,BKR,BKL,UPPKS, dan PKLK dalam upaya peningkatan Keluarga Sejahtera	Kab. Bandung	31 Kecamatan	140.655.000	APBD KAB			150.000.000
1	11	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Menurunnya jumlah trafiking dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA dan terbentuknya P2TP2 tingkat kabupaten						Menurunnya jumlah trafiking dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA dan terbentuknya P2TP2 tingkat kabupaten	
1	11	16	03	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Menurunnya jumlah permasalahan perempuan tentang permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan	Kab. Bandung	31 kecamatan	368.077.667	APBD KAB			300.000.000
1	11	16	04	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak dan pembentukan kota layak anak di 31 kecamatan sebagai program terpadu -Tersedianya wilayah garapan untuk menurunkan jumlah permasalahan perempuan dan anak melalui kegiatan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan., dan terbentuknya kota layak anak (KLA) di 31 Kecamatan	Kab. Bandung	31 Kelompok KLA, dan 276 buku data Potensi anak				Tersedianya wilayah garapan untuk menurunkan jumlah permasalahan perempuan dan anak melalui kegiatan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan., dan terbentuknya kota layak anak (KLA) di 31 Kecamatan	
1	11	16	05	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dst.. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Tersedianya pemetaan perlindungan anak	Kab. Bandung	31 Kecamatan,276 Desa					
1	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Kader Posyandu mendapat pengetahuan tentang ekonomi dan kesejahteraan keluarga						Kader Posyandu mendapat pengetahuan tentang ekonomi dan kesejahteraan keluarga	
1	11	17	01	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Bertambahnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan kader posyandu melalui refrening jambore posyandu dan meningkatnya ekonomi serta kesejahteraan keluarga.	Kab. Bandung	248 orang, 31 kec	120.627.833	APBD KAB			130.000.000,00
1	11	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Tercapainya 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin						Tercapainya 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin	
1	11	18	03	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Pembinaan 100 KK miskin secara terpadu melalui kegiatan P2WKSS dengan kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.	Kab. Bandung	100 KK Binaan	119.891.000	APBD KAB		Pembinaan 100 KK miskin secara terpadu melalui kegiatan P2WKSS dengan kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.	161.172.260,00

1	11	18	07	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Melaksanakan Pembinaan Organisasi Perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender	Kab. Bandung	31 Kecamatan				Melaksanakan Pembinaan Organisasi Perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender	
						Jumlah 2			2.380.397.596				2.456.172.260
						Jumlah (1+2)			4.430.356.196				4.506.130.860

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						19		
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya ketetapan waktu dan sasaran dalam informasi kedinasan	Inspektorat	4400 Surat	5.550.000	APBD Kab. Bandung	5000 Surat	5.550.000
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air, dan Listrik	Inspektorat	12 Bln Langganan Internet, dan Air PDAM, serta tersedia 456 galon air	18.900.000	APBD Kab. Bandung	12 Bln Langganan Internet, dan Air PDAM, serta tersedia 456 galon air	18.900.000
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya penunjang kebersihan lingkungan kerja	Inspektorat	11 Bln Honor OB, 30 Alat Kebersihan dan bahan pembersih	30.727.900	APBD Kab. Bandung	11 Bln Honor OB, 30 Alat Kebersihan dan bahan pembersih	30.727.900
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Inspektorat	60 Jenis Alat Tulis Kantor	135.000.000	APBD Kab. Bandung	80 Jenis Alat Tulis Kantor	135.000.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	35 Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	100.800.000	APBD Kab. Bandung	40 Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	100.800.000
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik beserta komponen-komponennya	Inspektorat	10 Buah Alat Listrik	9.500.000	APBD Kab. Bandung	10 Buah Alat Listrik	9.500.000
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor untuk Menunjang Tupoksi	Inspektorat	4 Buah Notebook	20.000.000	APBD Kab. Bandung	4 Buah Notebook	40.000.000
x xx 01 14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	24 Buah Tabung Gas	2.200.000	APBD Kab. Bandung	24 Buah Tabung Gas	2.160.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	1 Paket	10.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Paket	13.080.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makanan & Minuman	Inspektorat	12 Bulan	250.000.000	APBD Kab. Bandung	12 Bulan	250.000.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Inspektorat	2 Kali Tingkat Provinsi, 5 Kali Tingkat Pusat, 8 Kali	100.000.000	APBD Kab. Bandung	2 Kali Tingkat Provinsi, 5 Kali Tingkat Pusat, 8 Kali	100.000.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Inspektorat	1 Paket	10.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000
x xx 01 22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Peningkatan Hari-hari Bersejarah	Terlaksananya peringatan hari-hari bersejarah	Inspektorat	8 PHBN	9.500.000	APBD Kab. Bandung	8 PHBN	10.000.000
x xx 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.								
x xx 02 03	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Pembangunan gedung kantor	Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Nyaman	Inspektorat	1 Unit	200.000.000	APBD Kab. Bandung		-
x xx 02 05	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Inspektorat	1 Unit		APBD Kab. Bandung		-
x xx 02 22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Nyaman	Inspektorat	1 Paket Pemeliharaan	25.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Paket Pemeliharaan	150.000.000
x xx 02 24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	11 kend. roda empat & 13 kend. Dinas roda dua	420.000.000	APBD Kab. Bandung	11 kend. roda empat & 13 kend. Dinas roda dua	430.000.000
x xx 03	Peningkatan Disiplin Aparatur								
x xx 03 02	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Batik Beserta Perlengkapannya	Inspektorat	60 Stel Pakaian Batik		APBD Kab. Bandung	60 Stel Pakaian Batik	8.000.000
x xx 03 05	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah raga	Inspektorat	60 Stel Pakaian Olahraga		APBD Kab. Bandung	60 Stel Pakaian Olahraga	21.000.000
x xx 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
x xx 05 02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.	Inspektorat	250 Orang	138.056.100	APBD Kab. Bandung	250 Orang	155.000.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
x xx 06 01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	7 Dokumen Pelaporan	25.000.000	APBD Kab. Bandung	7 Dokumen Pelaporan	22.516.100
x xx 06 02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Inspektorat	2 Laporan	12.000.000	APBD Kab. Bandung	2 Laporan	10.000.000
			Jumlah 1			1.522.234.000			1.522.234.000
1 20 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						9		

1	20	20	01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya Pengawasan Secara Berkala pada 69 SKPD di Kabupaten Bandung	Inspektorat	42 SKPD	552.000.000	APBD Kab.Bandung		48 SKPD	600.000.000
1	20	20	02	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Tertanganinya Pemeriksaan Kasus atas pengaduan Masyarakat, Mas Media, SMS dan kasus Pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi	Inspektorat	188 Kasus	150.000.000	APBD Kab.Bandung		282 Kasus	170.000.000
1	20	20	03	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terevaluasinya LAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung	Inspektorat	1 Dokumen LAKIP	15.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Dokumen LAKIP	17.500.000
1	20	20	04	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah di Bawahnya	Meningkatnya Kualitas pembangunan berkat pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik di kabupaten	Inspektorat	120 Fisik Proyek	150.000.000	APBD Kab.Bandung		180 Fisik Proyek	150.000.000
1	20	20	05	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terinventarisinya Pengelompokan Temuan, Penyebab, Rekomendasi serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat	150 Temuan	15.000.000	APBD Kab.Bandung		150 Temuan	15.000.000
1	20	20	06	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI	Inspektorat	158 Temuan	330.039.641	APBD Kab.Bandung		250 Temuan	335.130.025
1	20	20	07	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	Inspektorat	1 Laporan REVIU LKPD	15.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Laporan REVIU LKPD	20.000.000
1	20	20	08	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terevaluasinya Temuan Hasil Pemeriksaan per triwulan	Inspektorat	4 Laporan	15.000.000	APBD Kab.Bandung		4 Laporan	20.000.000
1	20	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						APBD Kab.Bandung			
1	20	21	01	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme Aparat Pengawas Pemerintah Daerah	Inspektorat	8 Org Pembentukan JFA dan 6 Org Penulisan LHP yang Efektif	29.800.000	APBD Kab.Bandung		16 Org Pembentukan JFA dan 12 Org Penulisan LHP yang Efektif	32.780.000
						Jumlah 2			1.271.839.641				1.360.410.025
						Jumlah (1+2)			2.794.073.641				2.882.644.025

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	Kab.Bandung	1.000	14.802.150	APBD Kab.Bandung	1.000	14.802.150
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan komunikasi	Kab.Bandung	12	11.818.999.656	APBD Kab.Bandung	12	11.818.999.656
x xx 01 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				APBD Kab.Bandung		
x xx 01 05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pemenuhan kebutuhan pengamanan kantor selama 1 thn	Kab.Bandung	12	12.870.000	APBD Kab.Bandung	12	12.870.000
x xx 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemenuhan kebutuhan akan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	Kab.Bandung	12	11.276.100	APBD Kab.Bandung	12	11.276.100
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan kebutuhan akan jasa kebersihan kantor dan kesehatan lingkungan kantor selama 1 thn 12 kali dalam 1 thn	Kab.Bandung	12	14.300.000	APBD Kab.Bandung	12	14.300.000
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan akan ATK selama 1 Tahun	Kab.Bandung	2	154.000.000	APBD Kab.Bandung	2	154.000.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Pemenuhan kebutuhan akan cetakan dan pengadaan selama 1 tahun	Kab.Bandung	2	165.000.000	APBD Kab.Bandung	2	165.000.000
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan kebutuhan akan alat listrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun (1000 unit alat)	Kab.Bandung	650	26.400.000	APBD Kab.Bandung	650	26.400.000
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun (248 unit)	Kab.Bandung	12	220.000.000	APBD Kab.Bandung	12	220.000.000
x xx 01 14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun (8 unit)	Kab.Bandung	12	16.500.000	APBD Kab.Bandung	12	16.500.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan (1000 exp)	Kab.Bandung	50	53.662.400	APBD Kab.Bandung	50	53.662.400
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman kebutuhan kantor 1 tahun (3.284 orang)	Kab.Bandung	240	870.331.000	APBD Kab.Bandung	240	870.331.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	Kab.Bandung	12	273.152.000	APBD Kab.Bandung	12	273.152.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis dan Perkantoran	Kebutuhan tenaga pendukung administrasi selama 1 tahun (127 orang)	Kab.Bandung	40	104.390.000	APBD Kab.Bandung	40	104.390.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun (180 hari kerja)	Kab.Bandung	12	807.216.300	APBD Kab.Bandung	12	807.216.300
x xx 01 21	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Begawai SKPKD	Terlaksananya pencairan seluruh bantuan diwilayah Kabupaten Bandung	Kab.Bandung	12	330.000.000	APBD Kab.Bandung	12	330.000.000
x xx 01 22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional UPTD PAD dan UPTD PBB	Pemenuhan kebutuhan operasional petugas UPTD PAD dan UPTD PBB	Kab.Bandung	12	275.000.000	APBD Kab.Bandung	12	275.000.000
x xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						APBD Kab.Bandung		
x xx 02 05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional	Kab.Bandung		278.300.000	APBD Kab.Bandung		278.300.000
x xx 02 07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor dalam 1 tahun (2 unit)	Kab.Bandung	2	98.126.600	APBD Kab.Bandung	2	98.126.600
x xx 02 26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun (2 kali dalam 1 tahun)	Kab.Bandung	2	311.588.750	APBD Kab.Bandung	2	311.588.750
x xx 02 24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan jabatan selama 1 tahun (2 kali dalam 1 tahun)	Kab.Bandung		693.968.000	APBD Kab.Bandung		693.968.000
x xx 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
x xx 03 01	Program Peningkatan Disiplin	Pengadaan mesin/kartu absensi	Pemenuhan mesin absensi bagi pns	Kab.Bandung	1	27.967.500	APBD Kab.Bandung	1	27.967.500
x xx 03 02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase kebutuhan pakaian khusus	Kab.Bandung	1	46.524.500	APBD Kab.Bandung	1	46.524.500
x xx 03 05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prosentase kebutuhan pakaian khusus	Kab.Bandung	1	73.947.500	APBD Kab.Bandung	1	73.947.500
x xx 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
x xx 05 01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam 1 tahun	Kab.Bandung	60	82.500.000	APBD Kab.Bandung	60	82.500.000

x	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
x	xx	06	01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pemenuhan pelaporan capaian kinerja SKPD dalam 1 tahun (2 kali dalam 1 tahun)	Kab.Bandung	6	110.000.000	APBD Kab.Bandung	6	110.000.000	
x	xx	06	02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Pemenuhan pelaporan keuangan semesteran SKPD (1 kali kegiatan)	Kab.Bandung	2	275.000.000	APBD Kab.Bandung	2	275.000.000	
x	xx	06	04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pemenuhan pelaporan keuangan akhir SKPD selama 1 tahun (1 kali kegiatan)	Kab.Bandung						-
					Jumlah 1			17.165.822.456				17.165.822.456
1	20	17										
1	20	17	06 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Perda Kab. Bandung tentang APBD	Kab.Bandung	150	510.529.600	APBD Kab.Bandung	150	510.529.600	
1	20	17	07 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran APBD	Kab.Bandung	150	172.300.000	APBD Kab.Bandung	150	172.300.000	
1	20	17	08 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Kab. Bandung tentang Perubahan APBD	Kab.Bandung	150	252.000.000	APBD Kab.Bandung	150	252.000.000	
1	20	17	09 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraruran Bupati Bandung tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab.Bandung	150	160.000.000	APBD Kab.Bandung	150	160.000.000	
1	20	17	10 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya data administrasi keuangan daerah	Kab.Bandung	150	359.560.000	APBD Kab.Bandung	150	359.560.000	
1	20	17	11 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya data administrasi keuangan daerah	Kab.Bandung	150	256.586.000	APBD Kab.Bandung	150	256.586.000	
1	20	17	12 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	- Tersedianya laporan dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, DAU, Perda dan Perbup tentang APBD - Seluruh SKPD se-Kabupaten Bandung	Kab.Bandung	100	47.915.000	APBD Kab.Bandung	100	47.915.000	
1	20	17	13 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	- Tersedia dana pendamping penyusunan RKA, DPA, Perda dan Perbup tentang APBD - Seluruh SKPD se-Kabupaten Bandung	Kab.Bandung	70 dokumen RKA, DPA SKPD	252.319.829	APBD Kab.Bandung	70 dokumen RKA, DPA SKPD	253.319.829	
1	20	17	14 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Sosialisasi Perda Pajak Daerah berdasarkan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak	Kab.Bandung	100	250.000.000	APBD Kab.Bandung	100	250.000.000	
1	20	17	19 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	- Terlaksananya intensifikasi pajak daerah - Optimalisasi potensi penerimaan pajak daerah - Terlaksananya pemantauan dan pengendalian pajak daerah	Kab.Bandung		632.000.000	APBD Kab.Bandung		632.000.000	
1	20	17	20 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Penyusunan, Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Tersusunnya rencana hasil pemantauan dan laporan PAD	Kab.Bandung	30	352.500.000	APBD Kab.Bandung	30	352.500.000	
1	20	17	20 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah		Potensi penerimaan PAD							
1	20	17	22 Program peningkatan dan pengembangan pengolahan keuangan daerah	Tahapan Pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah	Terlaksananya pengrahalian Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah			3.500.000.000	APBD Kab.Bandung		1.723.571.043	
					Jumlah 2			6.745.710.429				4.970.281.472
					Jumlah (1+2)			23.911.532.885				22.136.103.928

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : BAPAPSI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Bapapsi	100%	5.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	5.000.000
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bapapsi	100%	59.470.000	APBD Kab.Bandung		100%	59.470.000
x xx 01 04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Bapapsi	100%	23.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	23.000.000
x xx 01 05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Bapapsi	100%	8.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	8.000.000
x xx 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bapapsi	100%	8.500.000	APBD Kab.Bandung		100%	8.500.000
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bapapsi	100%	75.074.100	APBD Kab.Bandung		100%	75.074.100
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Bapapsi	100%	44.349.000	APBD Kab.Bandung		100%	44.349.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bapapsi	100%	32.200.000	APBD Kab.Bandung		100%	32.200.000
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bapapsi	100%	9.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	9.000.000
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bapapsi	100%	22.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	22.000.000
x xx 01 14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bapapsi	100%	5.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	5.000.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bapapsi	100%	16.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	16.000.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Bapapsi	100%	172.470.000	APBD Kab.Bandung		100%	172.470.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bapapsi	100%	70.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	70.000.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran	Bapapsi	100%	40.300.000	APBD Kab.Bandung		100%	40.300.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koord. dan Konsultasi Dalam Daerah	Bapapsi	100%	50.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	50.000.000
x xx 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
x xx 02 10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Mebeulair	Bapapsi	100%	2.500.000	APBD Kab.Bandung		100%	2.500.000
x xx 02 22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bapapsi	100%	65.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	65.000.000
x xx 02 24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bapapsi	100%	120.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	120.000.000
x xx 02 30	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin Software, Hardware dan Jaringan	Bapapsi	100%	36.502.900	APBD Kab.Bandung		100%	36.502.900
x xx 02 31	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Arsip dan Ruang Buku Pustaka	Bapapsi	100%	61.340.000	APBD Kab.Bandung		100%	61.340.000
x xx 03	Program peningkatan disiplin aparatur								
x xx 03 02	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bapapsi	100%	32.500.000	APBD Kab.Bandung		100%	32.500.000
x xx 03 05	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu							-
x xx 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
x xx 06 01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bapapsi	100%	7.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	7.000.000
x xx 06 02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Bapapsi	100%	3.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	3.000.000
x xx 06 03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Bapapsi	100%	3.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	3.000.000
x xx 06 04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bapapsi	100%	5.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	5.000.000

				Jumlah 1			976.206.000			976.206.000	
1	24	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		Outcome/hasil : - Terlaksananya pemutakhiran data yang sudah ada dari kegiatan serupa sebelumnya					
1	24	15	02	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengumpulan Data	Output/keluaran : - Adanya hasil wawancara terhadap mantan Bupati, Tokoh Budaya, dan Tokoh Sejarah	Domisili para mantan Bupati, Tokoh Budaya, dan Tokoh Sejarah	30 narasumber	57.928.000	APBD Kab.Bandung	95.628.653
1	24	16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah		Outcome/hasil : - Adanya pembinaan kearsipan bagi seluruh SKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung - Tertata dan terkelolanya seluruh arsip yang ada di Depo Arsip BAPAPSI sesuai peraturan perundang-undangan - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Arsip - Tertatanya arsip yang berkaitan dengan keperdataan penduduk di SKPD, Kecamatan,					
1	24	16	01	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Output/keluaran : Meningkatnya sarana pengolahan dan penyiapan arsip sesuai standar nasional	Depo Arsip Kabupaten Bandung		50.000.000	APBD Kab.Bandung	100.000.000
1	24	16	02	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Output/keluaran : - Terlaksananya pembinaan kearsipan di desa-desa dalam rangka Arsip Masuk Desa - Bertambahnya khasanah arsip in aktif yang tertata di Depo Arsip - Terlaksananya observasi arsip sejarah dan budaya sebagai bahan informasi kesejarahan Kabupaten Bandung	Depo Arsip & Wil. Kab. Bandung		81.500.000	APBD Kab.Bandung	109.399.360
1	24	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Outcome/hasil : - Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Website Arsip, SIMARDA (Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah), dan SOP Pelayanan - Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Arsiparis					
1	24	18	02	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Output/keluaran : Terlaksananya pengkajian sistem administrasi kearsipan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini	BAPAPSI		40.000.000	APBD Kab.Bandung	60.960.350
1	24	18	03	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Output/keluaran : - Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan wawasan calon fungsional arsiparis dan petugas pengelola arsip. - Terciptanya Tim PAK (Penilaian Angka Kredit) Jafung Arsiparis yang mandiri dan Profesional.	Kab. Bandung		56.125.000	APBD Kab.Bandung	100.000.000
1	25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Outcome/hasil : - Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kpd pimpinan & masyarakat serta memperbaiki kinerja dalam menjalankan proses pemerintahan - Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pemberdayaan serta peningkatan efektivitas serta produktivitas CAP di wilayah pedesaan - Terciptanya kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam penyebaran informasi pembangunan - Terciptanya pemberdayaan dan pembinaan kelompok atau forum komunikasi - Terlaksananya penyebaran informasi publik yang transparan kepada masyarakat melalui berbagai media (radio, majalah, dan pameran) - Pemantapan kelembagaan untuk menerapkan keterbukaan informasi publik - Terlaksananya diseminasi informasi yang tidak dibatasi ruang dan waktu (borderless) - Terarah dan terpadunya Tata Kelola TIK di Kabupaten Bandung					

1	25	15	02	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Output/keluaran : - Terlaksananya pengembangan infrastruktur SIMDA ke tingkat kecamatan. - Terlaksananya pembangunan CAP di wilayah kecamatan. - Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pembinaan CAP yang sudah terbangun. - Terlaksananya pembangunan aplikasi KIP (Keterbukaan Informasi Publik). - Terlaksananya layanan internet mobile bagi siswa dan masyarakat	Wil. Kab. Bandung		1.300.000.000	APBD Kab.Bandung	Sarana Jaringan simda di kecamatan		339.800.000
1	25	15	03	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Output/keluaran : - Terselenggaranya siaran bersama, pembuatan radio streaming, pembuatan website Radio Kandaga - Meningkatnya jumlah SKPD yang menggunakan radio komunitas untuk mendiseminasikan kebijakan - Terlaksananya pemberdayaan kelompok melalui peningkatan peran serta dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah - Meningkatnya sarana prasarana radio - Terlaksananya penyusunan majalah - Penyelenggaraan pameran pembangunan - Tersusunnya Perbup dan Keppub tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)			445.700.000	APBD Kab.Bandung			679.702.025
1	25	15	06	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Output/keluaran : Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan (RIP) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		1 buah	100.000.000	APBD Kab.Bandung			
1	25	17		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		Outcome/hasil : Meningkatnya kualitas aparatur dan masyarakat dalam bidang TIK dan menciptakan masyarakat yang faham teknologi dan mampu mengantisipasi perubahan global							
1	25	17	01	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Output/keluaran : - Terselenggaranya pelatihan teknis bidang TIK bagi aparatur dan masyarakat. - Terselenggaranya sosialisasi tata kelola TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).			65.100.000	APBD Kab.Bandung			103.617.875
1	26	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Outcome/hasil : - Meningkatnya layanan informasi bahan pustaka terhadap pengguna secara kontinue - Terlaksananya penyebaran informasi bahan pustaka kepada masyarakat melalui layanan ekstensi - Terlaksananya pemantapan pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan KepMenPAN Nomor 132/2002 tentang Jafung Pustakawan dan Angka Kreditnya - Terlaksananya pengangkatan Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli dan Terampil pada Pemerintah Kabupaten Bandung - Meningkatnya sarana prasarana perpustakaan Pemda Kabupaten Bandung - Meningkatnya sarana prasarana perpustakaan Desa/Kelurahan - Tergalinya sumber informasi secara berkala - Para penerbit atau percetakan, baik di kalangan pemerintah maupun swasta menyadari akan kewajibannya untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)							
1	26	21	05	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	Output/keluaran : - Terlaksananya pengadaan koleksi buku Perpustakaan Pemkab Bdg. - Terlaksananya pengadaan mebeulair perpustakaan - Terhimpunnya bahan informasi (indeks artikel surat kabar/ majalah, accession list, directory & clipping) - Terselenggaranya Sosialisasi UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan Peraturan Pemerintah	Tersebar di 55 desa	1000 eksemplar 55 paket 4 judul/ 12 eksemplar	232.424.249	APBD Kab.Bandung			366.889.115

1	26	21	08	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	<i>Output/keluaran :</i> - Meningkatkan layanan sirkulasi dan layanan referensi/rujukan - Terselenggaranya Lomba-lomba Perpustakaan (Lomba Minat Baca) - Terlaksananya pemberdayaan SDM Perpustakaan - Meningkatkan layanan Pusling dan GMB kepada masyarakat - Terlaksananya pemberdayaan SDM pengelola perpustakaan desa/kelurahan secara handal - Terlaksananya pemberdayaan SDM bidang teknis perpustakaan dengan adanya jabatan fungsional pustakawan	Wil. Kab. Bdg	Pegguna perpustakaan sebanyak 15.000 orang 100 orang peserta 200 orang 15.000 orang 20 orang 4 orang	205.524.000	APBD Kab.Bandung			330.563.000
						Jumlah 2			2.634.301.249				2.286.560.378
						Jumlah (1+2)			3.610.507.249				3.262.766.378

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAYAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
							20			
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPP	Meningkatnya kualitas komunikasi	66.209.500	APBD Kab.Bandung		Meningkatnya kualitas komunikasi	66.209.500	
x xx 01 04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kab Bandung	Terseleenggaranya senam kesegaran jasmani (SKJ)	40.000.000	APBD Kab		Terseleenggaranya senam kesegaran jasmani (SKJ)	40.000.000	
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BKPP	Terpenuhi sarana kebutuhan kantor	17.025.000	APBD Kab		Terpenuhi sarana kebutuhan kantor	17.025.000	
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	BKPP	Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor	55.000.000	APBD Kab		Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor	55.000.000	
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPP	Tercapainya kelancaran operasional Badan	49.025.000	APBD Kab		Tercapainya kelancaran operasional Badan	49.025.000	
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPP	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	4.950.000	APBD Kab		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	4.950.000	
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKPP	Terpenuhi sarana dan prasarana kantor	69.025.000	APBD Kab		Terpenuhi sarana dan prasarana kantor	69.025.000	
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPP	Meningkatnya kualitas SDM BKPP	8.000.000	APBD Kab		Meningkatnya kualitas SDM BKPP	8.000.000	
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	BKPP	Meningkatnya kinerja pegawai	208.502.500	APBD Kab		Meningkatnya kinerja pegawai	208.502.500	
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKPP	Meningkatnya kinerja organisasi	113.750.000	APBD Kab		Meningkatnya kinerja organisasi	113.750.000	
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BKPP	Meningkatnya kinerja organisasi	45.000.000	APBD Kab		Meningkatnya kinerja organisasi	45.000.000	
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peringatan Hari-hari Bersejarah	BKPP	Tersampainya informasi dan kegiatan BKPP dengan momentum peringatan hari-hari besar nasional	4.000.000	APBD Kab		Tersampainya informasi dan kegiatan BKPP dengan momentum peringatan hari-hari besar nasional	4.000.000	
x xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Peningkatan sarana dan prasarana						
x xx 02 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BKPP	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	46.050.000	APBD Kab		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	46.050.000	
x xx 02 24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKPP	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	165.920.000	APBD Kab		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	165.920.000	
x xx 02 26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BKPP	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	4.200.000	APBD Kab		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	4.200.000	
x xx 03	Program peningkatan disiplin aparatur			Meningkatnya kesejahteraan Pegawai dan Disiplin pegawai						
x xx 03 02	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	BKPP	Terpenuhi pakaian Dinas dan atributnya		APBD Kab		Terpenuhi pakaian Dinas dan atributnya	0	
x xx 04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS									
x xx 04 01	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pemulangan pegawai yang pensiun	BKPP	Terpenuhi apresiasi pemulangan pegawai yang memenuhi batas usia pensiun	85.000.000	APBD Kab		Terpenuhi apresiasi pemulangan pegawai yang memenuhi batas usia pensiun	85.000.000	
x xx 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
x xx 05 01	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Bandung	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	319.347.500	APBD Kab		Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	319.347.500	
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan									
x xx 06 01	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPP	Terpenuhi peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar	30.000.000	APBD Kab		Terpenuhi peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar	30.000.000	
x xx 06 02	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BKPP	Tersusunnya laporan keuangan dua semester dan laporan keuangan bulanan	8.000.000	APBD Kab		Tersusunnya laporan keuangan dua semester dan laporan keuangan bulanan	8.000.000	
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BKPP	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	10.000.000	APBD Kab		Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	10.000.000	
			Jumlah 1				1.349.004.500		1.349.004.500	

1	20	30	01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Gol. III dan Gol. II	Kab Bandung	terlaksananya pengiriman CPNS, peserta diklat prajabatan gol.I sebanyak 61 org,gol II sebanyak 177 org,gol. III sebanyak 43 org	1.311.235.000	APBD Kab.Bandung		263 orang	1.288.885.000
1	20	30	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk.II,Tk.III,Tk.IV	Kab Bandung	terlaksananya pengiriman peserta diklatpim tk.II sebanyak 5 org,tk.III sebanyak 40 org	1.085.000.000	APBD Kab.Bandung		43 orang	1.005.000.000
1	20	30	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Diklat Teknis dan BinteK sesuai kebutuhan SKPD dan terlaksananya seminar lokakarya dan workshop	Kab Bandung	terlaksananya diklat teknis dan fungsi, penyelenggaraan diklat akuntabilitas kinerja pelayanan publik bagi para camat 31 org, diklat teknis penatausahaan keuangan daerah bagi kasubag keuangan SKPD 40 org, diklat teknis pengadaan barang jasa 40 org.	288.000.000	APBD Kab.Bandung		60 orang	150.000.000
1	20	31	01	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Kab Bandung	terlaksananya sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebanyak 24 kali kegiatan	166.337.000	APBD Kab.Bandung		24 kli kegiatan	134.337.000
1	20	31	01	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS			terlaksananya assesment dan mcu calon pejabat struktural sebanyak 6 kali kegiatan		APBD Kab.Bandung			
1	20	31	02	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi penerimaan calon PNS	Seleksi Penerimaan CPNSD Formasi Tahun Anggaran 2012	Kab Bandung	terlaksananya seleksi penerimaan CPNSD dari pelamar umum dan kontrak kerja sebanyak 500 orang	700.000.000	APBD Kab.Bandung		terlaksananya seleksi penerimaan CPNSD dari pelamar umum dan kontrak kerja sebanyak 500 orang	700.000.000
1	20	31	03	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penempatan PNS	sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional	Kab Bandung	terlaksananya sumpah dan pelantikan jabatan struktural sebanyak 6 kali kegiatan	33.000.000	APBD Kab.Bandung		terlaksananya sumpah dan pelantikan jabatan struktural sebanyak 6 kali kegiatan	33.000.000
1	20	31	04	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Proses Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober dan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS fungsional dan non fungsional	Kab Bandung	terlaksananya Proses Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober dan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS fungsional dan Non Fungsional sebanyak 1600 orang	75.000.000	APBD Kab.Bandung		terlaksananya Proses Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober dan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS fungsional dan Non Fungsional sebanyak 1600 orang	75.000.000
1	20	31	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Transformasi Takah PNS ke takah elektronik PNS, Program Aplikasi Integrasi Takah Elektronik dengan Simpeg, serta terselenggaranya peningkatan kedalaman Database PNS melalui Akuisisi	Kab Bandung	tersedianya 1 paket program aplikasi integrasi seluruh modul aplikasi ke dalam modul master, workshop implementasi SIMPEG/SAPK pada 71 pegawai, 1 paket pengadaan peralatan jaringan komputer, terlaksananya pemeliharaan database pada 22.000 pegawai, 1 paket sewa komputer, peremajaan Takah PNS dan transformasi ke takah elektronik terhadap 400 pegawai,penataan Tata Naskah 4000 pegawai,pengadaan map gantung sebanyak 5000 buah, kesesuaian data konversi NIP sebanyak 22.006 pegawai, 1 paket pengadaan scanner, 1 paket buku panduan simpeg, 1 paket buku profil,leaflet,booklet, booklet, dan brosur,500 eksemplar form biodata CPNS, 1 paket pengadaan handycam dan	84.000.000	APBD Kab.Bandung		Peremajaan takah PNS dan transformasi ke elektronik terhadap 4000 pegawai, 1 paket pengembangan aplikasi arsip digital, Penataan takah manual sebanyak 4000 pegawai, pengadaan map gantung sebanyak 5000 buah dan 1 paket buku profil leaflet booklet dan brosur.	50.000.000

1	20	31	08	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Pemberian penghargaan satya lencana karya satya dari Presiden RI dan Pemberian penghargaan PNS berprestasi dari Bupati Bandung	Kab Bandung	terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya satya dari Presiden RI sebanyak 200 orang dan pemberian penghargaan PNS berprestasi dari Bupati Bandung sebanyak 70 orang	30.000.000	APBD Kab.Bandung	terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya satya dari Presiden RI sebanyak 200 orang dan pemberian penghargaan PNS berprestasi dari Bupati Bandung sebanyak 70 orang	30.000.000
1	20	31	09	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, proses pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS, siraman rohani, serta penyelesaian karpeg, karis/karsu, askes, dan bapertarum	Kab Bandung	terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20 kasus, terselenggaranya proses penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian sebanyak 40 kasus, terlaksananya pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani bagi PNS sebanyak 12 kegiatan, terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS sebanyak 2 kegiatan, terselesaikannya kerpeg, karis/karsu, taspen, askes dan taperum sebanyak 600 buah	125.000.000	APBD Kab.Bandung	terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20 kasus, terselenggaranya proses penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian sebanyak 40 kasus, terlaksananya pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani bagi PNS sebanyak 12 kegiatan, terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS sebanyak 2 kegiatan, terselesaikannya kerpeg, karis/karsu, taspen, askes dan taperum sebanyak 600 buah	86.937.083
1	20	31	17		Formasi Pegawai	Analisa Kebutuhan Pegawai untuk semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (termasuk sampel Kelurahan, kecamatan, UPTD Dinas Pendidikan)	Kab Bandung	terselenggaranya analisa kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung secara lengkap menyeluruh yang didasari data objektif berupa hasil penghitungan beban kerja yang riil pada setiap SKPD sebanyak 30 unit	100.000.000	APBD Kab.Bandung	terselenggaranya analisa kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung secara lengkap menyeluruh yang didasari data objektif berupa hasil penghitungan beban kerja yang riil pada setiap SKPD sebanyak 30 unit	50.000.000
Jumlah 2									3.997.572.000	11		3.603.159.083
Jumlah (1+2)									5.346.576.500			4.952.163.583

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : RSUD SOREANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Sumber Dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 17	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman		% bulan kerja pegawai yang mendapat ULP	12 bln / 100%	990.000.000	APBD Kab. Bdg	12 bln / 100%	990.000.000
x xx 01 19	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan tenaga pendukung administrasi / teknis dan perkantoran		% bulan kerja TTK yang digaji	13 obk/100%	14.000.000	APBD Kab. Bdg	13 obk/ 100%	14.000.000
x xx 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						APBD Kab. Bdg		
x xx 02 24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		% kendaraan yang beroperasi	100%	252.040.000	APBD Kab. Bdg	100%	252.040.000
		Jumlah 1				1.256.040.000			1.256.040.000
1 02 26	program pengandaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata						10		
1 02 26 01	program pengandaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pembangunan rumah sakit		- terlaksananya pembebasan tanah - terlaksananya pembanunan RS	5 H	12.638.053.448	APBD Kab.Bandung	16000 M2	14.070.931.936
1 02 26 17	program pengandaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rehabilitasi bangunan rumah sakit		- jumlah minimal tempat tidur perawatan - lokal bangunan yang di rehab	200TT dan 2 lokal	1.250.000.000	APBD Kab.Bandung	200TT dan 2 lokal	1.000.000.000
1 02 26 18	program pengandaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengadaan alat-alat rumah sakit		% ketersediaan alat medis di tiap unit layanan medis tiap tahun	80%	1.200.000.000	APBD Kab.Bandung	80%	1.250.000.000
1 02 26 22	program pengandaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)		% kecukupan inventaris ruang pasien di tiap unit pelayanan keperawatan tiap tahun	95%	1.100.000.000	APBD Kab.Bandung	95%	1850000000
1 02 26 25	program pengandaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengembangan tipe rumah sakit		% capaian kinerja perunbahan stastu dan Capaian akreditasi RS	66,66% dan 12 layanan	75.000.000	APBD Kab.Bandung	100% dan 12 layanan	85.000.000
1 02 26 25	program pengandaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Monitoring evaluasi dan pelaporan		jumlah minimal unit kerja yang diaudit	5	10.000.000	APBD Kab.Bandung	5	10.000.000
1 02 28 05	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis		% tenaga medis dan teknis medis yg mengikuti pelatihan tiap tahun, Jml layanan spesialistik yg ada dan % minimal tenaga perawat yg mengikuti pelatihan internal dan eksternal tiap tahun	100%, 14 jenis dan 80%	725.000.000	APBD Kab.Bandung	100%, 15 jenis dan 80%	875.000.000
1 03 23 04	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pengadaan alat-alat berat		Tersedianya unit CSSD dan Tersedianya Genset	100% dan 2 unit	900.000.000	APBD Kab.Bandung		
1 02 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata								
1 02 27 16	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit		% kemampuan fungsi IPAL RS	100%	95.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	105.000.000
1 02 27 17	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit		% alat kesehatan yang berfungsi setiap tahun	90%	84.000.000	APBD Kab.Bandung	90%	90.000.000
		Jumlah 2				18.077.053.448			19.335.931.936
		Jumlah (1+2)				19.333.093.448			20.591.971.936

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Air dan Listrik Selama 1 tahun	100	1.000.000.000	APBD Kab.Bandung	100	1.000.000.000	
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan Jasa sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 tahun	100	400.000.000	APBD Kab.Bandung	100	400.000.000	
x xx 01 04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkungan SETDA untuk 1 tahun	100	100.000.000	APBD Kab.Bandung	100	100.000.000	
x xx 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan untuk 1 tahun	100	600.000.000	APBD Kab.Bandung	100	600.000.000	
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor	100	750.000.000	APBD Kab.Bandung	100	750.000.000	
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA	100	200.000.000	APBD Kab.Bandung	100	200.000.000	
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun anggaran	100	300.000.000	APBD Kab.Bandung	100	300.000.000	
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor Selama 1 Tahun	100	200.000.000	APBD Kab.Bandung	100	200.000.000	
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terseainya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	100	10.000.000,00	APBD Kab.Bandung	100	10.000.000,00	
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman selama 1 tahun anggaran	100	1.600.000.000	APBD Kab.Bandung	100	1.600.000.000	
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100	1.300.000.000	APBD Kab.Bandung	100	1.300.000.000	
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknik	Tersedianya Pegawai TTK yang mendukung pelaksanaan Administrasi Teknis	100	150.000.000	APBD Kab.Bandung	100	150.000.000	
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke DaLAM Daerah di Wilayah Dalam Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Skretariat	100	250.000.000	APBD Kab.Bandung	100	250.000.000	
x xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
x xx 02 07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercapainya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah	100	300.000.000	APBD Kab.Bandung	100	300.000.000	
x xx 02 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	100	200.000.000	APBD Kab.Bandung	100	200.000.000	
x xx 02 09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tercapainya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah	100	300.000.000	APBD Kab.Bandung	100	300.000.000	
x xx 02 10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeulair	Tercapainya Pengadaan Mebeulair selama 1 tahun anggaran	100	50.000.000	APBD Kab.Bandung	100	50.000.000	
x xx 02 11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	Tercapainya kebutuhan alat komunikasi untuk SETDA	100	150.000.000	APBD Kab.Bandung	100	150.000.000	
x xx 02 20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Tercapainya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan	100	300.000.000	APBD Kab.Bandung	100	300.000.000	
x xx 02 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	tercapainya Pemeliharaan Rutin/Brkala Rumah Dinas Selama 1 tahun anggaran	100	500.000.000	APBD Kab.Bandung	100	500.000.000	
x xx 02 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya bahan dan upah Pemeliharaan Rutin Gedung kantor	100	900.000.000	APBD Kab.Bandung	100	900.000.000	
x xx 02 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terapainya Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	100	300.000.000	APBD Kab.Bandung	100	300.000.000	
x xx 02 24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Pengurusan Rutin Kendaraan	100	2.200.000.000	APBD Kab.Bandung	100	2.200.000.000	
x xx 02 25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	tercapainya Peemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan	100	450.000.000	APBD Kab.Bandung	100	450.000.000	
x xx 02 27	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	tercapainya Peemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan	100	500.000.000	APBD Kab.Bandung	100	500.000.000	
x xx 02 28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya Peemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	100	120.000.000	APBD Kab.Bandung	100	120.000.000	
x xx 02 29	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair	Terapainya Peemeliharaan Rutin / Berkala mebeulair	100	15.000.000	APBD Kab.Bandung	100	15.000.000	
x xx 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
x xx 03 02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercapainya Kebutuhan Pengadaan Pakaian Dinas dilingkungan SETDA	100	100.000.000	APBD Kab.Bandung	100	100.000.000	
x xx 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

x	xx	05	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA		100	50.000.000	APBD Kab.Bandung	100	50.000.000
x	xx	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
x	xx	06	02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Dokumen Laporan keuangan Smsteran Bupati , Wabup dan SEKDA		100	50.000.000	APBD Kab.Bandung	100	50.000.000
x	xx	06	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA		100	50.000.000	APBD Kab.Bandung	100	50.000.000
					Bagian Humas							
x	xx	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x	xx	01	02	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya pelayanan dan pengelolaan administrasi surat menyurat	Kab. Bdg	100	830.136.200	APBD Kab.Bandung	100	830.136.200
x	xx	01	15	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan baca	Kab. Bdg	100	115.040.200	APBD Kab.Bandung	100	115.040.200
x	xx	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
x	xx	06	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat Daerah	Kab. Bdg	100	22.189.200	APBD Kab.Bandung	100	22.189.200
						Jumlah 1			14.362.365.600			14.362.365.600
1	20	17		program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah								
1	20	17	18	program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	Buku Laporan Neraca Aset Pemkab Bandung			800.000.000	APBD Kab.Bandung		1.000.000.000
1	20	17	20	program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan Manajemen / SIMDA Barang	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang daerah	Kab. BDG	100	600.000.000	APBD Kab.Bandung	100	800.000.000
1	20	17		program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah								
1	20	17	21	program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah Penyusunan Petunjuk pelaksanaan Kegiatan APBD Pemkab Bandung	Tersusunnya Buku Standar Biaya Belanja Daerah dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Pemkab. Bandung	Kab. BDG	100	175.000.000	APBD Kab.Bandung	100	175.000.000
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
1	20	26	04	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD dan Terlaksananya Pengadaan dan Pembentukan LPSE	Kab. BDG	100	800.000.000	APBD Kab.Bandung	100	1.000.000.000
1	20	26	02	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pembinaan peraturan dan Ketentuan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang / Jasa terhadap 75 SKPD, Penyedia Barang / Jasa dan Masyarakat	Kab. BDG					
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
1	20	20	09	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Survey Pengadaan Barang/jasa terhadap Penyedia Jasa SKPD dan Masyarakat	Tersedianya Hasil Monitoring , Evaluasi dan Data Pelaporan Kegiatan pada SKPD	Kab. BDG	100	200.000.000	APBD Kab.Bandung	100	250.000.000
1	20	20	03	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan dari BANGUB Jabar T.A 2012	Kab. BDG	100	100.000.000	APBD Kab.Bandung	100	150.000.000
1	20	20	03	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya analisis kajian sosial ekonomi dan aspek regulasi terhadap pembentukan BPR syariah Kab Bandung.	Kab. BDG					
1	20	20	10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penyusunan RENJA Rancangan Peraturan Perundang-undangan (rencana Pelaksanaan Program CSR)	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan CSR di wilayah Kab. Bandung	Kab. BDG	100	100.000.000	APBD Kab.Bandung	100	150.000.000
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
1	20	26	07	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Evaluasi Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat	Tersusunnya Evaluasi Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat	Kab. BDG	100	150.000.000	APBD Kab.Bandung	100	150.000.000

1	20	26	06	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	a. Tersusunnya Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan OTDA (EKPOD) b. Tersusunnya Julak Juknis Pelaksanaan Sebagai Kewenangan Bupati kepada Camat		100	250.000.000	APBD Kab.Bandung	100	250.000.000
1	20	26	02	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan Kajian Penataan Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek			250.000.000	APBD Kab.Bandung		250.000.000
1	20	28	01	Program Dst.. Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran	Fasilitasi Penataan Desa di Kecamatan Kabupaten Bandung Sinergitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kab. Bandung	a. Tersusunnya Data Informasi rencana Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kecamatan Margahayu, Dayeuhkolot dan Soreang b. Terwujudnya Sinergitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kab. Bandung pada Seluruh SKPD	Kab. BDG	100	400.000.000	APBD Kab.Bandung	100	400.000.000
1	20	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah								
1	20	16	01	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Terlaksananya Dialog/Audiensi antara Kepala Daerah dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, pimpinan anggota organisasi Sosial dan Masyarakat (Bidang Koord.Pend. dan Agama, Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Penanganan Bencana dan Pasca Bencana)	Kab.Bdg	100	150.000.000	APBD Kab.Bandung	100	150.000.000
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
1	20	20	03	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Koordinasi Sosial dan monitoring Penyaluran Bantuan yang dilaksanakandapat dikendalikan sehingga dapat tepat sasaran, tepat waktu serta tepat guna	Kab.Bdg	100	600.000.000	APBD Kab.Bandung	100	600.000.000
1	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								
1	19	18	01	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terselenggaranya KFUU (Forum Komunikasi Ulama Umaro) dan Kader Bimbingan Hidup Beragama	Kab.Bdg	100	100.000.000	APBD Kab.Bandung	100	100.000.000
1	19	18	01	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Tercapainya bantuan yang diberikan kepada Lembaga/Sarana Keagamaan tepat sasaran	Kab.Bdg	100	100.000.000	APBD Kab.Bandung	100	100.000.000
1	20	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah								
1	20	16	02	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terselenggaranya penerimaan kunjungan tamu	Kab. Bdg	100	600.000.000	APBD Kab.Bandung	100	600.000.000
1	20	16	04	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terselenggaranya koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Kab. Bdg	100	80.000.000	APBD Kab.Bandung	100	80.000.000
1	20	16	05	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terselenggaranya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kab. Bdg	100	248.160.000	APBD Kab.Bandung	100	248.160.000
1	20	16	06	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kab. Bdg	100	175.407.560	APBD Kab.Bandung	100	175.407.560
1	20	25		Program Peningkatan Kejasama antar Pemerintah Daerah								
1	20	25	05	Program Peningkatan Kejasama antar Pemerintah Daerah	1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya penyebarluasan informasi kepada publik	Kab. Bdg	100	462.274.350	APBD Kab.Bandung	100	462.274.350
1	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
1	20	20	03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH							
1	20	20	03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		1. Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian Fasilitasi Promosi Produk Unggulan	Kab. Bdg	100	200.000.000	APBD Kab.Bandung	100	200.000.000

1	20	20	03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		2. Fasilitasi dan Koordinasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	Kab. Bdg	100	150.000.000	APBD Kab.Bandung	100	150.000.000
1	20	20	03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		3. Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan BUMD	Kab. Bdg	100	400.000.000	APBD Kab.Bandung	100	400.000.000
1	20	20	03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		4. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Masyarakat	Kab. Bdg	100	75.000.000	APBD Kab.Bandung	100	75.000.000
1	20	20	03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		5. Fasilitasi, Pembinaan dan Koordinasi GEMAR	Kab. Bdg	100	100.000.000	APBD Kab.Bandung	100	100.000.000
1	20	20		Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Baiajan Pemum							
1	20	20	03	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kerjasama Daerah : a. Terfasilitasinya Kerjasama dengan Daerah Berbatasan dan pihak ketiga b. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kerjasama Daerah c. Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah d. Tersusunnya Draft Perbup Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Fasilitasi Pembinaan Perangkat Daerah : a. Penataan Administrasi Kelurahan sesuai dengan Permendagri No.34 tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan dan Penataan dan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai dengan Permendagri No.4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan b. Pelaksanaan Perombaan Kelurahan dan Kecamatan Tk. Kab. Bandung c. Pelaksanaan Pembinaan tugas dan fungsi aparat perangkat daerah dalam pelayanan Publik d. Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pem.Pus / Pemda Lainnya		100	600.000.000	APBD Kab.Bandung	100	600.000.000
1	20	20		Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Program Peningkatan Kerjasama antar daerah							
1	20	20	01	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	1. Tersusun Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam satu T.A 2. Terlaksananya Pengukuran Kinerja Mandiri untuk setiap penyelenggaraan urusan Pemerintahan dalam Rangka EPPD 3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
1	20	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah								
1	20	16	03	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Terselenggaranya Rapat-rapat Muspida sebagai bahan rumusan pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000	APBD Kab.Bandung		250.000.000
1	09	16		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah								
1	09	16	02	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penyuluhan hukum pertanahan	Meningkatnya Pemahaman dan penguasaan Hukum Pertanahan			240.000.000	APBD Kab.Bandung		240.000.000
1	09	16	01	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Percepatan penerbitan Kep. Bup mengenai persetujuan Penlok			82.426.235	APBD Kab.Bandung		82.426.235
1	20	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru								

1	20	27	03	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Tersedianya koordinat titik batas kab. Bandung dengan Kota Cimahi KBB dan Kota Bandung			400.000.000	APBD Kab.Bandung		400.000.000
1	20	27	05	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	.Pembinaan dan pengembangan aparatur	Terlaksananya pelaksanaan penyusunan, penganalisaan, pemeriksaan dan pengkajian terhadap pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan, tugas, fungsi, potensi dn beban pelaksana tugas ada : (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP, Kesbang Polinmas, BPMP, Dinas koperasi Ukm, perindustrian dan perdagangan, DPPK, Setda	Kab. BDG	100	300.000.000	APBD Kab.Bandung	100	300.000.000
1	20	26	02	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya rancangan peraturan tentang TP-PNS	Kab. BDG	100	150.000.000	APBD Kab.Bandung	100	150.000.000
1	20	26	06	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	1. Tersusunnya peraturan Bupati tentang : a. SPM bidang lingkungan hosup, administrasi pemerintahan dan bidng sosial. b. fasilitasi penyusunan SOP. C. Terpenuhinya kinerja pemerintahan daerah melalui citra bhakto abdi negra	Kab. BDG	100	350.000.000	APBD Kab.Bandung	100	350.000.000
1	20	26	04	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Fasilitasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan Tersusunnya rancangan peraturan tentang TP-PNS			100.000.000	APBD Kab.Bandung		100.000.000
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
1	20	26	01	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	terselesaikannya perkara hukum	Kab. BDG	100	156.000.000	APBD Kab.Bandung	100	156.000.000
1	20	26	02	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersedianya database produik hukum daerah	Kab. BDG	100	300.000.000	APBD Kab.Bandung	100	297.790.423
1	20	26	03	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	terselenggranaya program legislasi daerah tahun 2011 sesuai dengan rencana	Kab. BDG	100	18.740.000	APBD Kab.Bandung	100	18.740.000
1	20	26	04	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terciptanya peningkatan pengetahuan hukum, tertib hukum, kepatian hukum dan keadilan	Kab. BDG	100	200.000.000	APBD Kab.Bandung	100	200.000.000
1	20	26	06	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Terbentukny produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersidat spiratif dan akomodatif	Kab. BDG	100	125.000.000	APBD Kab.Bandung	100	125.000.000
									10.738.008.145			11.485.798.568
									25.100.373.745			25.848.164.168

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 02	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Dispopar		9.000.000	APBD Kab.Bandung		9.000.000	
x xx 01 10	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dispopar		15.534.975	APBD Kab.Bandung		15.534.975	
x xx 01 11	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispopar		14.059.125	APBD Kab.Bandung		14.059.125	
x xx 01 13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispopar		15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000	
x xx 01 14	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispopar		3.995.400	APBD Kab.Bandung		3.995.400	
x xx 01 15	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispopar		2.760.000	APBD Kab.Bandung		2.760.000	
x xx 01 17	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Dispopar		126.750.000	APBD Kab.Bandung		126.750.000	
x xx 01 18	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Dispopar		56.600.000	APBD Kab.Bandung		56.600.000	
x xx 01 07	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dispopar		12.000.000	APBD Kab.Bandung		12.000.000	
x xx 01 19	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah.	Dispopar		47.125.000	APBD Kab.Bandung		47.125.000	
x xx 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
x xx 02 22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.	Dispopar		64.185.000	APBD Kab.Bandung		64.185.000	
x xx 02 24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.	Dispopar		200.060.000	APBD Kab.Bandung		200.060.000	
x xx 02 29	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair.	Dispopar		1.332.000	APBD Kab.Bandung		1.332.000	
x xx 03	Peningkatan Disiplin Aparatur		Dispopar						
x xx 03 05	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.			-			-	
x xx 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
x xx 06 01	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Dispopar		14.412.500	APBD Kab.Bandung		14.412.500	
x xx 06 02	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.	Dispopar		4.660.000	APBD Kab.Bandung		4.660.000	
x xx 06 04	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.	Dispopar		3.847.000	APBD Kab.Bandung		3.847.000	
		Jumlah 1			591.321.000			591.321.000	
2 04 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata								
2 04 15 03	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Terlaksananya pasanggiri moka tingkat kabupaten dan provinsi kampanye sadar wisata	kab. Bandung	1 kali	150.000.000	APBD Kab.Bandung	1 kali	170.000.000
2 04 16	Program Pengembangan destinasi pariwisata								
2 04 16 02	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Pembangunan papan reklame wisata 10 desa wisata	soreang,pasirja mbu,ciwidaye, rancabali, pangalengan, banjaran, marabahu	1 Paket	250.000.000	APBD Kab.Bandung	1 Paket	300.000.000
2 04 16 06	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan daerah tujuan wisata	Pengembangan daerah tujuan wisata, wilayah kab.bandung, Penyusunan RIPDA kepariwisataan tahap II (final)	kab.bandung	1 Kali	350.000.000	APBD Kab.Bandung	1 Kali	390.000.000
2 04 16 01	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Terlaksananya gebyar objek wisata situ patenggang, situ cileunca, rancabali fair, pameran potensi 10 desa wisata	kab.bandung	2 Lokasi	120.000.000	APBD Kab.Bandung	1 Lokasi	150.000.000
2 04 16 03	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Terlaksananya event-event pameran baik di dalam maupun di luar kab.bandung	kab.bandung, kota bandung, jakarta,yogyakarta, surabaya, medan, halam	3 Kali	200.000.000	APBD Kab.Bandung	3 Kali	200.000.000

2	04	17		Program pengembangan Kemitraan									
2	04	17	01	Program pengembangan Kemitraan	Pengembangan dan penguatan, informasi dan database	Tersusunnya data base potensi objek wisata, aset fisik wisata, jumlah kunjungan serta jumlah sarpras wisata lainnya, serta daya dukung pariwisata lainnya	cimencyan, baleendah, ciwidey, pangalengan, paseh, nagreg, rancabali, maraasah	1 Kali	45.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Kali	75.000.000
2	04	17	08	Program pengembangan Kemitraan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terbangunnya pembinaan dan kemitraan masyarakat desa wisata serta sistem kemitraan terpadu diantara stakeholders pariwisata daerah melalui koordinasi intensif lintas sektoral dan asosiasi (Sinergitas PNPM pariwisata) dan pembinaan terhadap 10 desa wisata	cicalengka, ciwidey, rancabali, baleendah, cimencyan, cimaung, nasirambu	3 kali	125.000.000	APBD Kab.Bandung		3 Kali	112.000.000
2	04	17	07	Program pengembangan Kemitraan	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	pelatihan pemandu wisata	kab.bandung	2 kali	55.000.000	APBD Kab.Bandung		3 Kali	45.000.000
1	18	15		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		Tersusunnya Data potensi Kepemudaan							
1	18	15	01	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pendataan potensi kepemudaan	Tersusunnya data base Potensi Kepemudaan Usia 16 s/d 30 tahun	kab.bandung	50%	41.625.000	APBD Kab.Bandung		60%	44.525.000
1	18	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Terlaksananya Peran Serta Kepemudaan di Kab. Bandung							
1	18	16	01	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Anggota Marching Band	kab.bandung	80%	124.875.000	APBD Kab.Bandung		80%	133.575.000
1	18	16	04	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terbinanya Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Negara di Kabupaten	kab.bandung	60%	33.300.000	APBD Kab.Bandung		70%	35.620.000
1	18	16	05	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda		60%	41.625.000	APBD Kab.Bandung		70%	44.525.000
1	18	19		Pengembangan kebijakan dan manajemenn olahraga		Organisasi dan tenaga keolahragaan							
1	18	19	09	Pengembangan kebijakan dan manajemenn olahraga	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kebijakan Keolahragaan	Kab. Bandung	74%	62.437.500	APBD Kab.Bandung		71%	66.787.500
1	18	20		Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		Tersedianya SDM, Biaya, Lokasi, dan Waktu							
1	18	20	01	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Terlaksananya kompetisi olahraga pelajar kab.bandung	kab.bandung	80%	124.875.000	APBD Kab.Bandung		80%	133.575.000
1	18	20	05	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Adanya Peningkatan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Organisasi Pemuda dan Masyarakat	kab.bandung	60%	83.250.000	APBD Kab.Bandung		70%	89.050.000
1	18	20	05	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Adanya Peningkatan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Organisasi Pemuda dan Masyarakat	kab.bandung	60%	83.250.000	APBD Kab.Bandung		70%	89.050.000
1	18	20	06	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya atlet-atlet Berbakat dan berpotensi	kab.bandung	60%	208.125.000	APBD Kab.Bandung		70%	222.625.000
1	18	20	17	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya	Terciptanya olahragawan berbakat & berprestasi untuk membawa harum daerah/Nasional	kab.bandung	74%	83.250.000	APBD Kab.Bandung		71%	89.050.000
1	18	21		Peningkatan sarana dan prasarana olahraga		Tersedianya SDM, Biaya, Lokasi, dan Waktu							
1	18	21	07	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	kab.bandung	50%	749.250.000	APBD Kab.Bandung		60%	801.450.000
1	18	21	05	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK olahraga	kab.bandung	71%	41.625.000	APBD Kab.Bandung		71%	44.525.000
						Jumlah 2			2.972.487.500				3.236.357.500
						Jumlah (1+2)			3.563.808.500				3.827.678.500

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa Surat menyurat	Materai, paket pengiriman dokumen, buku cek giro, dokumen akte tanah	Kantor Dinkes	100%	45.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	45.000.000
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, dan listrik	Kantor Dinas & 61 Puskesmas	100%	190.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	190.000.000
x xx 01 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer, peralatan kantor, meubelair dan adanya penggantian alat listrik di kantor dinas	Kantor Dinas	100%	51.735.550	APBD Kab.Bandung	100%	51.735.550
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya alat kebersihan untuk kebutuhan Dinas Kesehatan dan jasa potong rumput	Kantor Dinas	100%	34.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	34.000.000
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya paket ATK	Kantor Dinas	100%	125.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	125.000.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas & 31 KCD	100%	300.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	300.000.000
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	Kantor Dinas	100%	125.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	125.000.000
x xx 01 14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat rumah tangga	Kantor Dinas	100%	12.500.000	APBD Kab.Bandung	100%	12.500.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan/ perundangan	Kantor Dinas	100%	28.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	28.000.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya penggantian makanan/minuman harian pegawai, mamin tamu dan rapat	Kantor Dinas	100%	550.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	550.000.000
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan rakon ke luar daerah	Dinkes Provinsi, Kemenkes	100%	130.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	130.000.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Tenaga Pendukung Administrasi & teknis Perkantoran	Terselenggaranya penggajian tenaga pendukung adm. & teknis perkantoran	Kantor dinas	100%	13.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	13.000.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Terlaksananya bahan bakar, mamin, dan perjalanan dinas dalam rangka perayaan hari-hari bersejarah	Kabupaten Bandung	100%	22.500.000	APBD Kab.Bandung	100%	22.500.000
x xx 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur								
x xx 02 01	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan	Rumah Dinas Kadis	100%	24.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	24.000.000
x xx 02 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan keamanan gedung kantor	Gedung Kantor Dinas	100%	170.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	170.000.000
x xx 02 03	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Motor dan mobil Kantor Dinas layak operasional	Kantor Dinas	100%	165.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	165.000.000
x xx 05	Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
x xx 05 01	Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan formal	Tersosialisasinya peraturan tata cara peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pengelola kegiatan Dinas dan UPTD	Kantor Dinas & UPTD	100%	85.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	85.000.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan								
x xx 06 01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersosialisasinya peraturan pengelolaan keuangan, keorganisasian, dan aset; terselenggaranya pemutakhiran data kepegawaian & bintek umum dan keuangan; tersusunnya dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Bidang dan Puskesmas setiap bulan	Kantor Dinas	100%	258.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	258.000.000
x xx 06 02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Semester I & II	Kantor Dinas	100%	15.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	15.000.000
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya dokumen prognosis realisasi anggaran	Kantor Dinas	100%	15.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	15.000.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan (LRA, Neraca & CALEK)	Kantor Dinas	100%	7.500.000	APBD Kab.Bandung	100%	7.500.000
x xx 06 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, LKPJ dan Lakip	Kantor Dinas	100%	300.000.000	APBD Kab.Bandung	100%	300.000.000
Jumlah 1						2.666.235.550			2.666.235.550

1	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
1	02	15	01	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terjaminnya ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya	Dinas	100%	14.758.030.751	APBD Kab.Bandung	100%	15.583.411.262
1	02	15	02	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pengelolaan obat yang baik dan terjaminnya mutu obat	Dinas Kesehatan & 61 Puskesmas	100%	42.670.000	APBD Kab.Bandung	100%	45.508.500
1	02	15	04	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah Sakit	Terkelolanya obat dan pelaporan SIPNAP yang optimal di apotek dan toko obat	Dinas Kesehatan, Apotek, Toko Obat	100%	43.219.000	APBD Kab.Bandung	100%	45.638.500
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1	02	16	01	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	Terlayannya masyarakat miskin dengan kasus penyakit risiko tinggi	Kab. Bandung	100%	63.126.010	APBD Kab.Bandung	100%	63.126.000
1	02	16	09	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terlaksananya penjurangan kesehatan bagi murid sekolah dasar dan sekolah lanjutan serta pembinaan sekolah sehat	Kab. Bandung	100%	45.883.627	APBD Kab.Bandung	100%	45.883.600
1	02	16	11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana	Meningkatnya pelayanan kesehatan matra di wilayah Kabupaten Bandung yang rawan bencana dan kecelakaan	lokasi bencana; 10 lokasi hari-hari besar	100%	230.943.500	APBD Kab.Bandung	100%	230.943.500
1	02	16	12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Terlayannya kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung dan calon jemaah haji	Kab. Bandung	100%	109.525.510	APBD Kab.Bandung	100%	109.525.500
1	02	16	13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Tersedianya biaya operasional	Kab. Bandung	100%	2.550.521.353	APBD Kab.Bandung	100%	2.550.521.400
1	02	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan								
1	02	17	02	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terpantaunya keamanan pangan dan bahan berbahaya serta peredaran makanan dan minuman di wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	100%	152.164.550	APBD Kab.Bandung	100%	160.686.500
1	02	17	04	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	Terkendalinya bidang obat dan makanan dalam aspek hukum	Kab. Bandung	100%	19.785.450	APBD Kab.Bandung	100%	20.893.500
1	02	19		Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat								
1	02	19	01	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat	Terinformasinya pesan-pesan kesehatan melalui pameran pembangunan, media elektronik, dan media cetak	Kab. Bandung	100%	341.915.600	APBD Kab.Bandung	100%	361.048.500
1	02	19	02	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Terselenggaranya peran aktif dari masyarakat dan meningkatnya jumlah desa siaga aktif di tiap kecamatan	Kab. Bandung	100%	68.066.100	APBD Kab.Bandung	100%	71.875.000
1	02	19	03	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Tersedianya tenaga konselor kesehatan	Kab. Bandung	100%	53.367.700	APBD Kab.Bandung	100%	56.354.100
1	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
1	02	20	01	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Data status gizi balita yang selanjutnya dipetakan dalam Peta Rawan Pangan dan Gizi	Kab. Bandung	D/S: 80%	154.442.800	APBD Kab.Bandung	D/S: 80%	163.085.265
1	02	20	02	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Tertanggulangnya masalah gizi masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Cakupan vit. A Balita 85 %; vit. A Bufas 80%; Balita kurus sekali yg mendapat PMT 100%	499.211.400	APBD Kab.Bandung	Cakupan vit. A Balita 85 %; vit. A Bufas 80%; Balita kurus sekali yg mendapat PMT 100%	527.146.300
1	02	20	03	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemi Gizi Besi, Gangguan akibat Kurang Iodium (GAKI), Kurang vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Terlaksananya kegiatan UPGK di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Fe 1 : 90%, Fe 3 : 80%, Desa baik : 90%	124.926.707	APBD Kab.Bandung	Fe 1 : 90%, Fe 3 : 80%, Desa baik : 90%	131.917.300
1	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
1	02	21	01	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Terciptanya kualitas air dan lingkungan pemukiman yang memenuhi syarat kesehatan sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh lingkungan pemukiman yang tidak sehat	Kab. Bandung	100%	499.733.210	APBD Kab.Bandung	100%	527.697.370
1	02	21	05	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Petani Tembakau	Terkendalinya dampak negatif pestisida pada penjamah pestisida/petani tembakau dan lingkungan sekitarnya	-	-			-	
1	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								

1	02	22	01	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Tertunggulangnya setiap kejadian penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk	Titik fokus Demam Berdarah Dengue (DBD), daerah endemis DBD dan, lokasi penyakit Demam Chikungunya	100%	122.841.500	APBD Kab.Bandung	100%	131.689.700
1	02	22	02	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Terkendalanya penyebaran penyakit yang disebabkan vektor nyamuk	Lokasi terjangkau dan masyarakat di wilayah endemik	100%	80.215.500	APBD Kab.Bandung	100%	85.993.000
1	02	22	04	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Tercegahnya anak usia sekolah dari penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) serta tercapainya target nasional pencegahan penyakit PD3I	SD/MI di Kab. Bandung	100%	44.591.500	APBD Kab.Bandung	100%	47.803.000
1	02	22	05	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penduduk di lokasi terjangkau dan daerah rawan Pnemonia, Diare dan TBC serta penduduk di daerah rawan penyakit menular lainnya	Kab. Bandung	100%	246.801.057	APBD Kab.Bandung	100%	264.577.000
1	02	22	06	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik	Terkendalanya penularan penyakit filariasis	Kab. Bandung	100%	2.048.167.400	APBD Kab.Bandung	100%	2.195.698.724
1	02	22	08	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Imunisasi	Tercegahnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	Kab. Bandung	100%	813.544.600	APBD Kab.Bandung	100%	872.143.000
1	02	22	09	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Terpantainya masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dan tertunggulangnya kasus kesehatan akibat KLB dan bencana	Kab. Bandung	100%	125.720.000	APBD Kab.Bandung	100%	134.775.000
1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1	02	23	01	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan Standart Jaminan Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Kepesertaan, Premi dan Model Bapel Jamkesda Kabupaten Bandung serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan SOP	Dinkes dan Puskesmas	100%	133.238.650	APBD Kab.Bandung	100%	140.694.000
1	02	23	02	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD yankes dan UPF	UPTD yankes dan UPF	100%	35.664.890	APBD Kab.Bandung	100%	37.661.950
1	02	23	03	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Tersusunnya Perda SKD dan inventori data	Dinkes Kab. Bandung	100%	128.484.450	APBD Kab.Bandung	100%	135.674.000
1	02	23	06	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan, Analisa Data Profil, Pembuatan profil kesehatan dan pemutakhiran data	61 Pusk dan Dinas Kesehatan	100%	277.144.190	APBD Kab.Bandung	100%	292.652.000
1	02	24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin								
1	02	24	01	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Operasi Katarak	Meningkatnya pemulihan kesehatan bagi masyarakat miskin	Kab. Bandung	100%			100%	
1	02	24	11	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Baqi Masyarakat Miskin	Meningkatnya status kesehatan masyarakat miskin	Kab. Bandung	100%	23.438.049.315	APBD Kab.Bandung	100%	24.749.591.508
1	02	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya								
1	02	25	01	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pembangunan Puskesmas	Tersedianya gedung puskesmas yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan	Kab. Bandung	100%				
1	02	25	02	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Tersedianya gedung puskesmas pembantu dan poskesdes yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan	Kab. Bandung	100%				
1	02	25	07	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tersedianya sarana dan prasarana Polindes/Poskesdes dan puskesmas	Kab. Bandung	100%	1.200.099.750	APBD Kab.Bandung	100%	1.267.255.000

1	02	25	14	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Terpelihara dan meningkatnya fungsi puskesmas, puskesmas pembantu, polindes/poskesdes	Kab. Bandung	100%	2.842.019.000	APBD Kab.Bandung	100%	3.001.053.300
1	02	25	17	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	Terpelihara dan meningkatnya fungsi sarana dan prasarana puskesmas keliling	Kab. Bandung	100%				
1	02	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan								
1	02	28	05	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Meningkatnya kualitas tenaga dokter dan paramedis yang profesional dalam pelayanan kesehatan	Kab. Bandung	100%	375.423.176	APBD Kab.Bandung	100%	396.431.168
1	02	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia								
1	02	30	04	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pembangunan Pusat - Pusat Pelayanan Kesehatan	Tersedianya puskesmas dan petugas santun lansia	Kab. Bandung	100%	76.472.900	APBD Kab.Bandung	100%	80.752.200
1	02	32		Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak								
1	02	32	01	Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	Kab. Bandung	100%	1.154.836.858	APBD Kab.Bandung	100%	1.219.459.409
						Jumlah 2			52.900.848.004			55.749.166.056
						Jumlah (1+2)			55.567.083.554			58.415.401.606

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013		
					Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
x	xx	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar	Kab. Bandung	Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk sebanyak 2115 buah surat	10.000.000	APBD Kab.Bandung		Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk sebanyak 2115 buah surat	10.000.000
x	xx	01	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya produktivitas kerja berkat penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yang baik selama 1 tahun anggaran.	Kab. Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya air minum. • Terselenggaranya komunikasi melalui telepon. • Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet 	55.000.000	APBD Kab.Bandung		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya air minum. • Terselenggaranya komunikasi melalui telepon. • Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet 	55.000.000
x	xx	01	08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan selama 1 tahun anggaran.	Kab. Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya petugas 2 org • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan 	50.000.000	APBD Kab.Bandung		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya petugas 2 org • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan 	50.000.000
x	xx	01	09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku cadang operasional peralatan kerja selama 1 tahun anggaran.	Kab. Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya jasa servis peralatan kantor • Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer) 	40.000.000	APBD Kab.Bandung		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya jasa servis peralatan kantor • Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer) 	40.000.000
x	xx	01	10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun anggaran	Kab. Bandung	Tersedianya alat tulis kantor	119.682.350	APBD Kab.Bandung		Tersedianya alat tulis kantor	119.682.350
x	xx	01	11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun anggaran.	Kab. Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bahan cetakan • Penggandaan 	40.000.000	APBD Kab.Bandung		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bahan cetakan • Penggandaan 	40.000.000
x	xx	01	12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan selama 1 tahun anggaran.	Kab. Bandung	Terpenuhinya penggantian alat-alat listrik dan elektronik	7.500.000	APBD Kab.Bandung		Terpenuhinya penggantian alat-alat listrik dan elektronik	7.500.000
x	xx	01	13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun anggaran.	Kab. Bandung	1 paket	75.000.000	APBD Kab.Bandung		1 paket	75.000.000
x	xx	01	14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun anggaran.	Kab. Bandung	1 paket	3.000.000	APBD Kab.Bandung		1 paket	3.000.000
x	xx	01	15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan karyawan Bapeda.	Kab. Bandung	Tersedianya bahan informasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kabar • Buku Perundang-undangan 	15.000.000	APBD Kab.Bandung		Tersedianya bahan informasi berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kabar • Buku Perundang-undangan 	15.000.000
x	xx	01	17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Terjaminnya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan selama 1 tahun anggaran.	Kab. Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya makanan dan minuman harian. • Tersedianya makanan dan minuman rapat. • Tersedianya makanan dan minuman tamu • Tersedianya makanan dan minuman kegiatan 	160.000.000	APBD Kab.Bandung		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya makanan dan minuman harian. • Tersedianya makanan dan minuman rapat. • Tersedianya makanan dan minuman tamu • Tersedianya makanan dan minuman kegiatan 	160.000.000
x	xx	01	18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.	Kab. Bandung	Terlaksananya rapat koordinasi: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Regional • Tingkat Nasional 	160.000.000	APBD Kab.Bandung		Terlaksananya rapat koordinasi: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Regional • Tingkat Nasional 	160.000.000
x	xx	01	20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di dalam Kabupaten.	Kab. Bandung	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000	APBD Kab.Bandung		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000
x	xx	01	22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah	Meningkatnya rasa nasionalisme	Kab. Bandung	Terlaksananya pelaksanaan hari besar nasional	10.000.000	APBD Kab.Bandung		Terlaksananya pelaksanaan hari besar nasional	10.000.000

x	xx	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					APBD Kab.Bandung				
x	xx	02	22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan kantor, teratasinya kebocoran dan tertatanya ruangan kantor.	Kab. Bandung	Terpeliharanya secara rutin dan berkala gedung dan lingkungan kantor.	100.000.000	APBD Kab.Bandung	Terpeliharanya secara rutin dan berkala gedung dan lingkungan kantor.	100.000.000
x	xx	02	24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor selama 1 tahun anggaran.	Kab. Bandung	Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 sebanyak 9 unit dan Roda 2 sebanyak 13 unit	420.100.000	APBD Kab.Bandung	Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 sebanyak 9 unit dan Roda 2 sebanyak 13 unit	420.100.000
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
x	xx	06	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.	Kab. Bandung	Tersusunnya Laporan: Lakip 2011, Laptah 2011 dan Renja 2013	20.000.000	APBD Kab.Bandung	Tersusunnya Laporan: Lakip 2011, Laptah 2011 dan Renja 2013	20.000.000
x	xx	06	02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran.	Kab. Bandung	Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan II	3.000.000	APBD Kab.Bandung	Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan II	3.000.000
x	xx	06	03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terinformasikannya kinerja anggaran	Kab. Bandung	Tersusunnya Laporan realisasi Anggaran dan Prognosis	2.500.000	APBD Kab.Bandung	Tersusunnya Laporan realisasi Anggaran dan Prognosis	2.500.000
x	xx	06	04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terinformasikannya kinerja keuangan akhir tahun	Kab. Bandung	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun (Neraca, LRA dan CALK)	2.500.000	APBD Kab.Bandung	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun (Neraca, LRA dan CALK)	2.500.000
						Jumlah 1			1.333.282.350			1.333.282.350
1	05					PENATAAN RUANG						
1	05	16		Program Pemanfaatan Ruang		Meningkatnya ketersediaan data spasial berupa foto udara, peta dan data yang akurat untuk keperluan penataan ruang.						
1	05	16	05	Program Pemanfaatan Ruang	Survey dan pemetaan	Data spasial berupa foto udara, peta dan data yang akurat untuk keperluan penataan ruang.	Kab. Bandung	Photo Citra Peta Garis	500.000.000	APBD Kab.Bandung	Photo Citra Peta Garis	525.000.000
1	06					PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
1	06	15		Program Pengembangan data/informasi		Meningkatkan Pengembangan data/informasi	Kab. Bandung					
1	06	15	02	Program Pengembangan data/informasi	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Bandung	1 Dokumen	300.000.000	APBD Kab.Bandung	1 Dokumen	325.000.000
1	06	19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar						
1	06	19	02	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan fisik serta terarah dan terpadunya program kegiatan sektor transportasi.	Kab. Bandung	Masyarakat dan stakeholders transportasi	100.000.000	APBD Kab.Bandung	Masyarakat dan stakeholders transportasi	114.000.000
1	06	19	03	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	Terlaksananya koordinasi dan terintegrasinya penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Stakeholders dan masyarakat yang terkena bencana (Banjir, Gempa Bumi, Longsor dsb)	40.000.000	APBD Kab.Bandung	Stakeholders dan masyarakat yang terkena bencana (Banjir, Gempa Bumi, Longsor dsb)	45.000.000
1	06	19	09	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	- Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan. - Tersusunnya dokumen perencanaan berupa strategi sanitasi perkotaan (SSK)	Kab. Bandung	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kab.Bandung	1 Dokumen	170.000.000
1	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait		Stakeholders dan pemangku kepentingan			Stakeholders dan pemangku kepentingan	
1	06	21	08	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2013	Kab. Bandung	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kab.Bandung	1 Dokumen	65.000.000
1	06	21	09	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	- Tersusunnya Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2013 - Tersusunnya Dokumen RKPD 2013 dan Perkada RKPD 2013 - Tersusunnya Dokumen RKPD 2012 Perubahan dan Perkada RKPD 2012 Perubahan	Kab. Bandung	1 Dokumen	500.000.000	APBD Kab.Bandung	1 Dokumen	525.000.000
1	06	21	10	Program perencanaan pembangunan daerah	Penetapan RKPD	- Tersusunnya Perbub RKPD Tahun 2013 - Tersusunnya KUA/PPAS Perubahan Tahun 2012 - Tersusunnya KUA/PPAS Tahun 2013	Kab. Bandung	1 Dokumen	144.441.642	APBD Kab.Bandung	1 Dokumen	149.916.502
1	06	21	12	Program perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2011	Kab. Bandung	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kab.Bandung	1 Dokumen	175.000.000

1	06	21	13	Program perencanaan pembangunan daerah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-Tersusunnya daftar kegiatan per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2012 -Tersusunnya laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012 -Tersusunnya evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2011 -Tersusunnya Laporan Monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2011	Kab. Bandung	1 Dokumen	200.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Dokumen	225.000.000
1	06	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi		Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian dari berbagai sektor (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan & energi, industri, perdagangan, pariwisata dan penanaman modal daerah) agar dapat bersinergi	Kab. Bandung						
1	06	22	03	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersedianya grand design pengembangan ekonomi masyarakat	Kab. Bandung	1 Dokumen	175.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Dokumen	183.000.000
1	06	22	04	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, serta semakin terarahnya dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kab. Bda.	Kab. Bandung	1 Dokumen	275.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Dokumen	290.000.000
1	06	22	06	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya program penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	125.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Dokumen	140.000.000
1	06	23		Program perencanaan sosial budaya		Tercapainya Kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial tahun 2011.	Kab. Bandung						
1	06	23	03	Program perencanaan sosial budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	-Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya dengan Stakeholders terkait, wilayah dan SKPD sehingga terarah terpadu program dan kegiatan dibawah koordinasi bidang perencanaan kesos dan pemerintahan. -Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Kabupaten, Provinsi dan Pusat. -Rumusan perencanaan bidang sosial yang aspiratif, transparan, obyektif dan akuntabel.	Kab. Bandung	1 Dokumen	325.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Dokumen	335.000.000
1	06	24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		Terlaksananya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Kab. Bandung						
1	06	24	04	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dst... (Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan)	-Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup. -Terlaksananya kegiatan Water Irigation and Recouces Management Project/WISMP	Kab. Bandung	1 Dokumen	125.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Dokumen	130.000.000
1	23				STATISTIK		Kab. Bandung						
1	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		Meningkatnya kualitas data perstatistikan untuk menunjang perencanaan	Kab. Bandung	Stakeholders dan pemangku kepentingan				Stakeholders dan pemangku kepentingan	
1	23	15	02	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	-Tersusunnya Buku Data Sosial Ekonomi (SUSEDA) Kab. Bandung. -Tersusunnya buku IPM Kab. Bandung. -Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA). -Tersusunnya Buku IKM Kabupaten Bandung. -Tersusunnya Buku IHK Kabupaten Bandung.	Kab. Bandung	1 Dokumen	700.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Dokumen	725.000.000
1	23	15	04	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	-Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten. -Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan	Kab. Bandung	1 Dokumen	125.000.000	APBD Kab.Bandung		1 Dokumen	140.000.000
						Jumlah 2			3.984.441.642				4.261.916.502
						Jumlah (1+2)			5.317.723.992				5.595.198.852

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : RSUD CICALENGKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kab. Bandung					
x xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan jasa surat menyurat	terselenggaranya kegiatan surat menyurat	Kab. Bandung	1 pt	2.100.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	2.100.000
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Bandung	1 pt	36.000.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	36.000.000
x xx 01 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terselenggaranya peralatan untuk kegiatan administrasi kantor	Kab. Bandung	1 pt	51.035.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	51.035.000
x xx 01 06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kab. Bandung	1 pt	27.900.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	27.900.000
x xx 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan jasa administrasi keuangan	terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	Kab. Bandung	1 pt	55.200.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	55.200.000
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan jasa kebersihan kantor	terselenggaranya kegiatan penjagaan kebersihan kantor	Kab. Bandung	1 pt	120.000.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	120.000.000
x xx 01 09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Kab. Bandung	1 pt	10.000.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	10.000.000
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kab. Bandung	1 pt	61.985.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	61.985.000
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Bandung	1 pt	125.850.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	125.850.000
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan	Kab. Bandung	1 pt	6.000.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	6.000.000
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya peralatan untuk kegiatan administrasi kantor	Kab. Bandung	1 pt	127.625.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	127.625.000
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Kab. Bandung	1 pt	5.000.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	5.000.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan bahan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Kab. Bandung	1 pt	616.112.500	APBD Kab.Bandung	1 pt	616.112.500
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Kab. Bandung	1 pt	92.725.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	92.725.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis dan perkantoran	terselenggaranya kegiatan administrasi/teknis dan perkantoran	Kab. Bandung	1 pt			1 pt	-
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terpenuhinya kebutuhan perjalanan dalam daerah	Kab. Bandung	1 pt	63.150.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	63.150.000
x xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
x xx 02 05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	pengadaan kendaraan dinas operasional	terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional	Kab. Bandung	1 pt			1 pt	-
x xx 02 24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kab. Bandung	1 pt	178.923.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	178.923.000
x xx 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
x xx 03 03		pengadaan pakaian kerja lapangan	terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja	Kab. Bandung	1 pt	4.875.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	4.875.000
x xx 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
x xx 05 01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	pendidikan dan pelatihan formal	terpenuhinya kebutuhan petugas medis terlatih	Kab. Bandung	1 pt	83.245.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	83.245.000
x xx 05 02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	sosialisasi peraturan perundang-undangan	terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan dan perundangan	Kab. Bandung	1 pt	5.875.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	5.875.000
x xx 05 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan dan perundangan	Kab. Bandung	1 pt	6.050.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	6.050.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Kinerja dan Keuangan						APBD Kab.Bandung		
x xx 06 01	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terselenggaranya bimbingan penyusunan laporan realisasi keuangan	Kab. Bandung	1 pt	7.900.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	7.900.000
x xx 06 02	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersusunnya laporan semesteran	Kab. Bandung	1 pt	5.400.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	5.400.000
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kab. Bandung	1 pt	5.254.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	5.254.000

x	xx	06	04	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kab. Bandung	1 pt	7.625.000	APBD Kab.Bandung	1 pt	7.625.000
						Jumlah 1			1.705.829.500			1.705.829.500
1	02				KESEHATAN							
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						1		
1	02	16	12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan			160 CB	5.924.913.326	APBD Kab.Bandung		6.337.521.827
1	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
1	02	19	01	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			1 Kegiatan		APBD Kab.Bandung		
1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
1	02	23	01	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan standar kesehatan			20 Dokumen		APBD Kab.Bandung		
1	02	26		program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata								
1	02	26	07	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pemeliharaan/rutin/berkala ruang operasi			1 Unit		APBD Kab.Bandung		
1	02	26	18	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit			8 Paket		APBD Kab.Bandung		
1	02	26	19	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit			2 Paket		APBD Kab.Bandung		
1	02	26	21	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengadaan mebeulair Rumah Sakit			40 Unit/set		APBD Kab.Bandung		
1	02	26	22	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)			6 Paket		APBD Kab.Bandung		
1	02	26	23	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit			6 Paket		APBD Kab.Bandung		
1	02	26	24	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat Rumah sakit			277250 lbr		APBD Kab.Bandung		
1	02	26	25	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengembangan tipe Rumah Sakit			12 dokumen		APBD Kab.Bandung		
1	02	26	26	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			1 paket		APBD Kab.Bandung		
1	02	27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata								
1	02	27	01	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit			1 paket		APBD Kab.Bandung		

1	02	27	14	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pemeliharaan/rutin/berkala ruang laboratorium			4 kali/tahun		APBD Kab.Bandung		
1	02	27	16	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit			1 unit		APBD Kab.Bandung		
1	02	27	17	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit			84 unit		APBD Kab.Bandung		
1	02	27	20	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan Rumah Sakit			7 unit		APBD Kab.Bandung		
1	02	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan								
1	02	28	01	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat			8 Orang/kegiatan		APBD Kab.Bandung		
1	02	28	05	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis			40 OK		APBD Kab.Bandung		
1	02	28	06	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan			4 Kegiatan		APBD Kab.Bandung		
1	02	28	08	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			40 OK		APBD Kab.Bandung		
								Jumlah 2		5.924.913.326		6.337.521.827
								Jumlah (1+2)		7.630.742.826		8.043.351.327

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : SATPOL PP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Satpol PP	100	5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000	
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Satpol PP	100	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000	
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Satpol PP	100	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000	
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Satpol PP	100	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000	
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Satpol PP	100	35.000.000	APBD Kab.Bandung		35.000.000	
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Satpol PP	100	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000	
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Satpol PP	100	234.300.000	APBD Kab.Bandung		234.300.000	
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Satpol PP	100	92.000.000	APBD Kab.Bandung		92.000.000	
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Satpol PP	100	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000	
x xx 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
x xx 02 22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Satpol PP	100	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000	
x xx 02 24	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Satpol PP	100	220.710.600	APBD Kab.Bandung		220.710.600	
x xx 03 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Satpol PP	100	350.000.000	APBD Kab.Bandung		350.000.000	
x xx 03 03	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan						-	
x xx 03 05	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						-	
x xx 06	Program Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran								
x xx 06 01	Program Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan kinerja SKPD						-	
x xx 06 02	Program Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						-	
x xx 06 04	Program Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun							
		Jumlah 1			1.022.010.600			1.022.010.600	
1 19 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
1 19 15 01	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelaksana Operasi Ketentraman dan ketertiban umum	50 kali di 31 kec.	203.781.014	APBD Kab.Bandung	50 kali di 31 kec.	213.915.428	
1 19 15 03		Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk	100 org	80.000.000		100 org	80.000.000	
1 19 15 05	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan	Pelaksana Operasi Tipiring terhadap para pelanggar Perda dan Keputusan Kepala Daerah	20 kali	90.000.000	APBD Kab.Bandung	20 kali	108.000.000	
1 19 15 05	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan	Pelaksanaan Penyelidikan terhadap Pelanggaran PERDA	50 kali di 31 kec.	90.000.000	APBD Kab.Bandung	50 kali di 31 kec.	100.000.000	
1 19 15 05	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan	Pelaksanaan Operasi GDD terhadap Aparatur	50 kali di 31 kec.	65.000.000	APBD Kab.Bandung	50 kali di 31 kec.	75.000.000	
1 19 15 06	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelaksanaan Penyusunan Juklak juknis Satpol PP	100 buku	50.000.000	APBD Kab.Bandung	100 buku	50.000.000	
1 19 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
1 19 16 02	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	penyuluhan HAM	50 org	50.000.000	APBD Kab.Bandung	50 org	50.000.000	
1 19 16 02	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Pengamanan Aset	365 hari	365.000.000	APBD Kab.Bandung	365 hari	370.000.000	

1	19	16	02	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Pengamanan dan penjagaan		50 kali	50.000.000	APBD Kab.Bandung		50 kali	60.000.000
1	19	16	02	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	HUT sat pol PP		2 pleton	50.000.000	APBD Kab.Bandung		2 pleton	60.000.000
1	19	16	05	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				50.000.000	APBD Kab.Bandung			50.000.000
1	19	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)									
1	19	20	01	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Pelaksanaan Penyuluhan Miras dan Narkoba bagi Siswa SMA dan SMK	SMA dan SMK Di Kec Margahay		50.000.000	APBD Kab.Bandung		SMA dan SMK Di Kec soreang	60.000.000
						Jumlah 2			1.193.781.014				1.276.915.428
						Jumlah (1+2)			2.215.791.614				2.298.926.028

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013		
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA							
x	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
x	xx	01	02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPMPD	100	29.344.000	APBD Kab.Bandung	100	29.344.000
x	xx	01	08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPMPD	100	44.772.000	APBD Kab.Bandung	100	44.772.000
x	xx	01	09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	BPMPD	100	9.750.000	APBD Kab.Bandung	100	9.750.000
x	xx	01	10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	BPMPD	100	37.103.500	APBD Kab.Bandung	100	37.103.500
x	xx	01	11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPMPD	100	32.347.000	APBD Kab.Bandung	100	32.347.000
x	xx	01	12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPMPD	100	3.528.500	APBD Kab.Bandung	100	3.528.500
x	xx	01	13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPMPD	100	87.130.000	APBD Kab.Bandung	100	87.130.000
x	xx	01	14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						-
x	xx	01	15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPMPD	100	2.172.000	APBD Kab.Bandung	100	2.172.000
x	xx	01	17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	BPMPD	100	145.660.000	APBD Kab.Bandung	100	145.660.000
x	xx	01	18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPMPD	100	68.100.000	APBD Kab.Bandung	100	68.100.000
x	xx	01	19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran	BPMPD	100	14.300.000	APBD Kab.Bandung	100	14.300.000
x	xx	01	20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BPMPD	100	72.500.000	APBD Kab.Bandung	100	72.500.000
x	xx	01	22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang hari-hari besar bersejarah	BPMPD	100	8.000.000	APBD Kab.Bandung	100	8.000.000
x	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
x	xx	02	03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor						
x	xx	02	05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional						
x	xx	02	10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan mebeulair	BPMPD	100	2.280.000	APBD Kab.Bandung	100	2.280.000
x	xx	02	22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPMPD	100	10.881.000	APBD Kab.Bandung	100	10.881.000
x	xx	02	24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan / berkala kendaraan dinas operasional	BPMPD	100	193.640.000	APBD Kab.Bandung	100	193.640.000
x	xx	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
x	xx	03	02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						-
x	xx	03	05 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu						-
x	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan							
x	xx	06	01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPMPD	100	37.942.000	APBD Kab.Bandung	100	37.942.000
x	xx	06	02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPMPD	100	16.286.000	APBD Kab.Bandung	100	16.286.000
x	xx	06	04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	BPMPD	100	4.900.000	APBD Kab.Bandung	100	4.900.000
				Jumlah 1			820.636.000			820.636.000

1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan						31		
1	22	15	01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Dihasilkannya desa terbaik di Kab Bdg (Perlombaan Desa)	267 desa Sekab Bdg	Juara I,II dan III	100.000.000	APBD Kab.Bandung	120.000.000
1	22	15	01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	meningkatnya sarana & prasarana fisik desa (Program Pengembangan Infrastruktur Desa P2ID)	267 Desa	267 Desa	250.000.000	APBD Kab.Bandung	250.000.000
1	22	15	01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya operasional kelembagaan desa (Pembangunan Kelembagaan Desa P2KD)	267 Desa	267 Desa	75.000.000	APBD Kab.Bandung	75.000.000
1	22	15	02	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu	- Gedung Dewi Sartika Pemda Kab. Bandung - Temu Kader dilaksanakan di Kecamatan Pangalengan	Operator SIP Tk. Desa dan Kecamatan sebanyak 307 orang, Kader Posyandu Sebanyak 155 orang	75.000.000	APBD Kab.Bandung	100.000.000
1	22	15	02	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Pemda Kabupaten Bandung	1500 anak SD dari 10 desa	150.000.000	APBD Kab.Bandung	150.000.000
1	22	15	03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Tersusunnya data dasar Profil Desa/Kel (Profil Desa)	267 Desa 9 Kelurahan	276 Desa/Kel	276.000.000	APBD Kab.Bandung	276.000.000
1	22	15	04	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya dana penunjang penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)	11 Kecamatan (105 Desa)	Pelaku PNPMP TK Kec dan TK Desa (UPK 33, BKAD 33 Org, BPUPK 33 Orang, PJOK 11 Org, PL 11 Orang, KPMD 210 Org)	600.000.000	APBD Kab.Bandung	600.000.000
1	22	15	05	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Evaluasi Posyandu dan 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Wilayah Kab. Bandung	-Posyandu Terbaik Tingkat Kecamatan se Kabupaten Bandung -Desa Terbaik dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	75.000.000	APBD Kab.Bandung	100.000.000
1	22	15	06	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan	Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di desa dapat berjalan ditunjang dengan adanya program ADD, TPAPD dan BPD	Di Kabupaten Bandung	267 Desa (Penunjang ADD, TPAPD dan TOBPD)	100.000.000	APBD Kab.Bandung	130.000.000
1	22	15	06	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan	Penyelenggaraan Pemilihan Kades dapat berjalan ditunjang oleh bantuan PILKADES	56 Desa	55 Desa	150.000.000	APBD Kab.Bandung	175.000.000
1	22	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan							
1	22	16	02	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terbinanya Pengelola Pasar Desa		30 Pengelola Pasar Desa (Ketua, Bendahar & Sekretaris)	67.500.000	APBD Kab.Bandung	70.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
				target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x xx 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdikbud Kab.	100%	73.620.000	APBD Kab.Bandung		100%	73.620.000
x xx 01 05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Disdikbud Kab.	100%	62.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	62.000.000
x xx 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Disdikbud Kab.	100%	8.100.000	APBD Kab.Bandung		100%	8.100.000
x xx 01 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan	Disdikbud Kab. Dan UPTD	100%	204.978.610	APBD Kab.Bandung		100%	204.978.610
x xx 01 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis Kantor	Disdikbud Kab. Dan UPTD	100%	295.660.050	APBD Kab.Bandung		100%	295.660.050
x xx 01 11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdikbud Kab. Dan UPTD	100%	143.003.900	APBD Kab.Bandung		100%	143.003.900
x xx 01 12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Disdikbud Kab.	100%	4.512.500	APBD Kab.Bandung		100%	4.512.500
x xx 01 13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdikbud Kab.	100%	211.967.490	APBD Kab.Bandung		100%	211.967.490
x xx 01 15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Disdikbud Kab.	100%	12.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	12.000.000
x xx 01 17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Disdikbud Kab.	100%	1.043.486.600	APBD Kab.Bandung		100%	1.043.486.600
x xx 01 18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Disdikbud Kab.	100%	982.750.000	APBD Kab.Bandung		100%	982.750.000
x xx 01 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pendukung administrasi teknis dan perkantoran	Disdikbud Kab.	100%	165.600.000	APBD Kab.Bandung		100%	165.600.000
x xx 01 20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Disdikbud Kab. Dan UPTD	100%	2.412.197.900	APBD Kab.Bandung		100%	2.412.197.900
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			100%		APBD Kab.Bandung		100%	
x xx 02 03	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pembangunan Gedung kantor	UPTD TK/SD Katapang, Kutawaringin	100%	300.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	300.000.000
x xx 02 04	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disdikbud Kab dan UPTD.	100%	529.633.650	APBD Kab.Bandung		100%	529.633.650
x xx 02 05	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Disdikbud Kab.	100%	190.461.000	APBD Kab.Bandung		100%	190.461.000
x xx 05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			100%		APBD Kab.Bandung		100%	
x xx 05 03	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Disdikbud Kab.	100%	50.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	50.000.000
x xx 06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			100%		APBD Kab.Bandung		100%	
x xx 06 02	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Disdikbud Kab.	100%	60.000.000	APBD Kab.Bandung		100%	60.000.000
		Jumlah 1			6.749.971.700				6.749.971.700
1 01 15	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)								
1 01 15 18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Disdikbud Kab.	100%	432.840.367	APBD Kab.Bandung			450.000.000
1 01 15 57	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdikbud Kab.	100%	48.448.000	APBD Kab.Bandung			298.448.000
1 01 15 59	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Disdikbud Kab.	100%	181.300.000	APBD Kab.Bandung			250.000.000
1 01 15 62	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran PAUD	Disdikbud Kab.	100%	29.812.000	APBD Kab.Bandung			193.952.367
1 01 15 59	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Penataan PAUD Nurul Mauqif RW 03	Pasirjambu	1 Paket	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1 01 15 59	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Penataan PAUD RW 04	Pasirjambu	1 Paket	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1 01 15 59	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan PAUD Ciwidey	Ciwidey	1 unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000

1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Peralatan PAUD	Ciwidey	1 Unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Peralatan PAUD	Ciwidey	1 Unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Peralatan PAUD	Ciwidey	1 Unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Peralatan PAUD	Ciwidey	1 Unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Peralatan PAUD	Ciwidey	1 Unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Alat Peraga Edukatif Pendidikan Usia Dini (PAUD) RW_04	Pameungpeuk	3 Paket	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	AlatPeraga Edukatif PAUD RW. 01/02	Pameungpeuk	2 Unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	A P E PAUD rw. 06,01 & 05	Pameungpeuk	3 unit	120.000.000	APBD Kab.Bandung		120.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Alat Peraga edukatif PAUD 3 RW.	Pameungpeuk	3 Unit	22.500.000	APBD Kab.Bandung		22.500.000
1	01	15	59	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini; Warga Belajar	Katapang	2 Paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	APE PAUD	Katapang	2 Lokal	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	15	19	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Mebeulair sekolah	Peng. Meubeler dan permainan PAUD	Katapang	1 Unit	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	01	15	19	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubeler PAUD	Katapang	2 Unit	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	15	59	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	PAUD MAWAR HUDA	Katapang	2 Paket	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD Sesuai Standar	Solokanjeruk	3	45.000.000	APBD Kab.Bandung		45.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD Sesuai Standar	Solokanjeruk	2	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	15	03	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penambahan ruang kelas sekolah	Pengadaan Ruang Belajar PAUD	Cileunyi	1 unit	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	01	15	63	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD Non Formal dan Formal	Cileunyi	1 Paket	50.000.000	APBD Kab.Bandung		50.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Kober PAUD NIKITA Sarana dan Prasarana	Cileunyi	1 Paket	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	09	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Pembangunan Sarana PAUD	Cileunyi	1 paket	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Alat Peraga PAUD Bunga Mekar	Ciparay	1 Lokal	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	19	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Mebeulair sekolah	pengadaan meubeler Paud Ceria	Ciparay	2 Lokal	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	15	59	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Paud Bunga Mekar	Ciparay	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	15	59	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	PAUD Almuhaen	Ciparay	2 Lokal	45.000.000	APBD Kab.Bandung		45.000.000
1	01	15	59	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Paud Ceria	Ciparay	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	PAUD Alat Peraga	Ciparay	3 X 6 m	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	PAUD Alat Peraga	Ciparay	2 lokal	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Bantuan Kegiatan Pos PAUD RW 06,07, 08, 09 14	Bojongsong	5 Unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Bantuan Kegiatan Pos PAUD	Bojongsong	7 Unit	70.000.000	APBD Kab.Bandung		70.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Bantuan Kegiatan Pos PAUD RW 03 dan 08	Bojongsong	8 unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Alat Peraga PAUD	Dayeuh Kolot	1 unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Saran dan Prasarana APE Pendidikan PAUD	Dayeuh Kolot		25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Alat Peraga PAUD	Dayeuh Kolot	1 Paket	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	15	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan PAUD	Cimaung	2 Unit	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	15	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Peralatan PAUD	Arjasari		24.000.000	APBD Kab.Bandung		24.000.000
1	01	15	07	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Alat Permainan PAUD RT 01/01	Margahayu	45 M2	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	15	37	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa	Rehab Sarana Pendidikan PAUD	Ibun	1 paket	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	15	59	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan PAUD	PACET	1 Paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000

1	01	16		PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN		Disdikbud Kab.	-		APBD Kab.Bandung			
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Gedung Sekolah SD (Pengadaan Tanah SD)	Disdikbud Kab.	100%		APBD Kab.Bandung			0
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Gedung Sekolah (pengadaan tanah SMP)	Disdikbud Kab.	100%		APBD Kab.Bandung			
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD	Disdikbud Kab.	100%		APBD Kab.Bandung			
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	Disdikbud Kab.	100%		APBD Kab.Bandung			
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Disdikbud Kab.	100%	60.000.000	APBD Kab.Bandung			60.000.000
1	01	16	15	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan buku dan alat tulis siswa TK/SD (Pengadaan Buku raport TK/SD)	Disdikbud Kab.	100%	620.000.000	APBD Kab.Bandung			620.000.000
1	01	16	15	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan buku dan alat tulis siswa SMP (Pengadaan Buku Raport SMP)	Disdikbud Kab.	100%	380.000.000	APBD Kab.Bandung			380.000.000
1	01	16	18	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD (PSB TIK SD)	Disdikbud Kab.	100%	90.000.000	APBD Kab.Bandung			90.000.000
1	01	16	18	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD (PSB TIK SMP)	Disdikbud Kab.	100%	90.000.000	APBD Kab.Bandung			90.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair Sekolah Dasar (SD)	Disdikbud Kab.	100%	50.000.000	APBD Kab.Bandung			50.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Disdikbud Kab.	100%	75.000.000	APBD Kab.Bandung			75.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan Sedang / Berat Ruang Kelas TK/SD	Disdikbud Kab.	100%	120.000.000	APBD Kab.Bandung			120.000.000
1	01	16	58	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SD	Disdikbud Kab.	100%	30.000.000	APBD Kab.Bandung			30.000.000
1	01	16	58	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP	Disdikbud Kab.	100%	40.000.000	APBD Kab.Bandung			40.000.000
1	01	16	61	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembinaan SMP Terbuka	Disdikbud Kab.	100%	15.000.000	APBD Kab.Bandung			15.000.000
1	01	16	63	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP	Disdikbud Kab.	100%	16.380.183.693	APBD Kab.Bandung			18.045.971.512
1	01	16	75	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD dim memenuhi SPN	Disdikbud Kab.	100%	100.000.000	APBD Kab.Bandung			100.000.000
1	01	16	75	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP dim memenuhi SPN	Disdikbud Kab.	100%	75.000.000	APBD Kab.Bandung			150.000.000
1	01	16	67	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Disdikbud Kab.	100%	150.000.000	APBD Kab.Bandung			150.000.000
1	01	16	68	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Disdikbud Kab.	100%	150.000.000	APBD Kab.Bandung			75.000.000
1	01	16	69	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Disdikbud Kab.	100%	75.000.000	APBD Kab.Bandung			10.000.000
1	01	16	69	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP	Disdikbud Kab.	100%	10.000.000	APBD Kab.Bandung			180.000.000
1	01	16	70	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa SD	Disdikbud Kab.	100%	180.000.000	APBD Kab.Bandung			180.000.000
1	01	16	70	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa SMP	Disdikbud Kab.	100%	180.000.000	APBD Kab.Bandung			100.000.000
1	01	16	70	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa/Paskibra	Disdikbud Kab.	100%	300.000.000	APBD Kab.Bandung			20.000.000
1	01	16	70	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa/Budaya	Disdikbud Kab.	100%	100.000.000	APBD Kab.Bandung			
1	01	16	76	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Disdikbud Kab.	100%	20.000.000	APBD Kab.Bandung			0
1	01	16	79	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendamping DAK 2012 (0%)	Disdikbud Kab.	100%		APBD Kab.Bandung			
1	01	16	80	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penunjang DAK 2012 (0%)	Disdikbud Kab.	100%		APBD Kab.Bandung			0
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SD Tenjolaya 1	Pasirjambu	3 KELAS	105.000.000	APBD Kab.Bandung		105.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	SD Tenjolaya 4	Pasirjambu	2 KELAS	70.000.000	APBD Kab.Bandung		70.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Kelas SD N Ciranjang I RW 09	Pasirjambu	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000

1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Kelas SD N Sukamanah RW 06	Pasirjambu	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair SD N Ciranjang II RW 09	Pasirjambu	1 Lokal	35.000.000	APBD Kab.Bandung		35.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair SD N Patuha RW 07	Pasirjambu	1 Lokal	35.000.000	APBD Kab.Bandung		35.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair SD N Kendeng RW 06	Pasirjambu	1 Lokal	35.000.000	APBD Kab.Bandung		35.000.000
1	01	16	42	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rehab Rumah Dinas SDN Rancabolang RW 06	Pasirjambu		85.000.000	APBD Kab.Bandung		85.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	RB SD NEGERI CINSONDARI I	Pasirjambu	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	RB SD NEGERI CIHANJAWAR II	Pasirjambu	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	RB SD NEGERI SUKARASA	Pasirjambu	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	RB SD NEGERI SUKAMAJU	Pasirjambu	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	RB RDN SD NEGERI RANCBOLANG	Pasirjambu	1 Unit	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair SD Negeri Cisondari 1	Pasirjambu	3 Lokal	45.000.000	APBD Kab.Bandung		45.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	RB KANTOR UPTD TK dan SD Kec. Pasirjambu	Pasirjambu	1 Lokal	70.000.000	APBD Kab.Bandung		70.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Gedung Sekolah SD	Pembangunan SD Negeri Legok Jambu	Soreang	3(tiga) Ruang Kelas Baru	300.000.000	APBD Kab.Bandung		300.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pagar	Soreang	100 m	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemb. Pagar SD	Soreang	90 m2	120.000.000	APBD Kab.Bandung		120.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD	Soreang		80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemb. Pagar	Soreang		25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemb. Pagar	Soreang		25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemb. WC & Pagar	Soreang		25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemb. Pagar	Soreang	50 m	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Bojongjambu	Ciwidey	56 M2	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Rancagede	Ciwidey	56 M2	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Rawabogo	Ciwidey	56 M2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Panyocokan	Ciwidey	112 M2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Kinangki	Ciwidey	112 M2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Lebakmuncang 2	Ciwidey	168 M2	120.000.000	APBD Kab.Bandung		120.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Ciwidey I	Ciwidey	56 M2	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SMPN Ciwidey I	Ciwidey	189 M2	120.000.000	APBD Kab.Bandung		120.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair dan Sarana Olah Raga SDN Simpang	Ciwidey	2 Lokal	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair dan Sarana Olah Raga SDN Cijeruk	Ciwidey	2 Lokal	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair dan Sarana Olah Raga SDN Babakantiga	Ciwidey	2 Lokal	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair dan Sarana Olah Raga SDN Panyocokan	Ciwidey	2 Lokal	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair dan Sarana Olah Raga SDN Lebakmuncang 3	Ciwidey	2 Lokal	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair dan Sarana Olah Raga SDN Pasirpari	Ciwidey	2 Lokal	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair dan Sarana Olah Raga SDN Ciparigi	Ciwidey	2 Lokal	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair untuk siswa SMPN 2 Ciwidey	Ciwidey	40	14.000.000	APBD Kab.Bandung		14.000.000

1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair untuk Guru SMPN 3 Ciwidey	Ciwidey	2 Set	1.000.000	APBD Kab.Bandung		1.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Mebeulair untuk Siswa SMAN 1 Cwidey	Ciwidey	2 Set	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Bertingkat SDN Sodong	Cangkuang	4 Lkl (2 Lkl rhb 2 lkl bertingkat)	175.000.000	APBD Kab.Bandung		175.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Bertingkat SDN Nagrak 2	Cangkuang	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Bertingkat SDN Dahniar	Cangkuang	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Cisolak	Cangkuang	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang KelasSDN Jatisari	Cangkuang	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang KelasSDN Nagrak 1	Cangkuang	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang KelasSDN Ciluncat 2	Cangkuang	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang KelasSDN. Malakasari	Cangkuang	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang KelasSDN. Cikancang	Cangkuang	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang KelasSDN. Setragalih 2	Cangkuang	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pengadaan sarana & Prasarana TPA dan PAUD	Cangkuang	6 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Paving Blok SD I RW. 02	Pameungpeuk	45x15M	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Sarana dan prasarana olah raga tradisional	Pameungpeuk		40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Ranca Kasiat	Pameungpeuk	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Bojongmanggu	Pameungpeuk	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Langonsari	Pameungpeuk	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Sukasari III	Pameungpeuk	1 Lokal 56 m2	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Langensari	Pameungpeuk	3 Lokal 168 m2	120.000.000	APBD Kab.Bandung		120.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Palasari I	Pameungpeuk	4 Lokal 224 m2	160.000.000	APBD Kab.Bandung		160.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Pameungpeuk III	Pameungpeuk	2 Lokal 112 m2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Bojongwaru II	Pameungpeuk	2 Lokal 112 m2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Palasari II	Pameungpeuk	1 Lokal 56 m2	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Mengger I	Pameungpeuk	1 Lokal 56 m2	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Leuwidulang	Pameungpeuk	2 Lokal 112 m2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Sukasari I	Pameungpeuk	2 Lokal 112 m2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Bojongkunci III	Pameungpeuk	9 Lokal 504 m2	360.000.000	APBD Kab.Bandung		360.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Waas I	Pameungpeuk	2 Lokal 112 m2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang kelas SD Waas II	Pameungpeuk	2 Lokal 112 m2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tambah Ruang Kelas SD Sukasari Indah	Pameungpeuk	6 Lokal, 336 m2,	420.000.000	APBD Kab.Bandung		420.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tambah Ruang Kelas SD Pameungpeuk II	Pameungpeuk	6 Lokal, 336 m2	420.000.000	APBD Kab.Bandung		420.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tambah Ruang Kelas SD Bojongkunci II	Pameungpeuk	7 Lokal, 337 m2	420.000.000	APBD Kab.Bandung		420.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi berat sekolah (Rehab ruang kelas di SDN Jatisari dan SDN Buana Mekar)	Kutawaringin	3 kelas	120.000.000	APBD Kab.Bandung		120.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi berat tambah ruang kelasbertingkat (SDN Bobotong)	Kutawaringin	4 Lokal	400.000.000	APBD Kab.Bandung		400.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi ringan (Rehab SD Kutawaringin)	Kutawaringin	1 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	07	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Pembangunan sarana dan prasarana bermain (Pembangunan paqar SDN Jelegong I dan 3)	Kutawaringin	200 m	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000

1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Berat Pembangunan Gedung Sekolah (Pembangunan SD Sirnagalih Kp. Dukuh RW. 04)	Kutawaringin	3 Lokal	120.000.000	APBD Kab.Bandung		120.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Gedung Sekolah SD	Pembangunan jalan (Paving Blok Hal. SD Tegal Wangi)	Kutawaringin	50 m	60.000.000	APBD Kab.Bandung		60.000.000
1	01	16	07	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Pembangunan sarana dan prasarana bermain (Pemagaran sekolah SDN Kopo 3, SDN Tegalwangi dan SDN Cikundul)	Kutawaringin	1 paket	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi ringan gedung sekolah (Pembangunan SDN. Ciseah DS Pameantasan)	Kutawaringin	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Mebeulair SDN Cijagra I; Warga Belajar	Katapang	1 LOKAL	60.000.000	APBD Kab.Bandung		60.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tambah Ruang Kelas SDN Cijagra II; Sekolah	Katapang	6 x 8 m	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tambah Ruang Kelas SDN Muara Ciwidey; Warga Belajar	Katapang	4 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pengadaan Air Bersih SDN Cijagra I; Ling. Sekolah	Katapang	1 Unit	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pengadaan Air Bersih SDN Cijagra II; Ling. Sekolah	Katapang	1 Unit	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rumah Dinas SDN Muara Ciwidey; Sekolah	Katapang	6 x 8 m	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Sukanagara II; Warga Belajar	Katapang	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Sekepeuris II; Warga Belajar	Katapang	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	42	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rehab Rumah Dinas SDN Sukanagara II	Katapang	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	42	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rehab Rumah Dinas SDN Sekepeuris II	Katapang	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	42	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rehab Rumah Dinas SDN Sekepeuris I	Katapang	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	42	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rehab Rumah Dinas SDN Sukamukti II	Katapang	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	36	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa	Sarana Belajar KF	Katapang	1 Paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TRK 2 Lantai SMPN Katapang II	Katapang	2 Lokal	160.000.000	APBD Kab.Bandung		160.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TRK 2 Lantai SDN Junti Girang I	Katapang	2 LOKAL	200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Katapang	Katapang	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TRK SDN Babakan Sondari I	Katapang	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Kelas SDN Arjasari Barat	Katapang	2 Lokal	58.000.000	APBD Kab.Bandung		58.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pengadaan Air BersihSDN Arjasari Barat	Katapang	1 Unit	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat ruang kelas	Rancaekek	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat ruang kelas	Rancaekek	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat ruang kelas	Rancaekek	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat ruang kelas	Rancaekek	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat ruang kelas	Rancaekek	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat ruang kelas	Rancaekek	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat ruang kelas	Rancaekek	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat ruang kelas	Rancaekek	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat ruang kelas	Rancaekek	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat ruang kelas	Rancaekek	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000

1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran halaman	Rancaekek	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah SD	Solokanjeruk	1	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	51	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan sedang/berat lapangan upacara	Terlaksananya renovasi lapangan upacara dengan paving block	Solokanjeruk	200	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	mebeuleur	Solokanjeruk	200	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	68	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Terlaksananya penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B setara SMP	Solokanjeruk	80	35.400.000	APBD Kab.Bandung		35.400.000
1	01	16	68	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Terlaksananya penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B setara SMP	Solokanjeruk	80	35.400.000	APBD Kab.Bandung		35.400.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana air bersih SD	Solokanjeruk	1	10.200.000	APBD Kab.Bandung		10.200.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	mebeuleur	Solokanjeruk	1	10.200.000	APBD Kab.Bandung		10.200.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya renovasi ruang kelas SD	Solokanjeruk	2	99.200.000	APBD Kab.Bandung		99.200.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran SDN Keamanan Sekolah	Solokanjeruk	100	50.000.000	APBD Kab.Bandung		50.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Penambahan Ruang Kelas SDN. Cimekar	Cileunyi	1 unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Sarana prasarana(Paping Blok) SDN. Tirtayasa	Cileunyi	90 m'	4.000.000	APBD Kab.Bandung		4.000.000
1	01	16	75	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan beasiswa transisi	Bantuan Beasiswa	Cileunyi	200 orang	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Gedung Sekolah SD	Pembangunan Aula SMAN 1 Cileunyi	Cileunyi	10x25 m	200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Kirmir Benteng satu atap	Cileunyi	1000 m	50.000.000	APBD Kab.Bandung		50.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD. Mekarwangi	Cileunyi	2 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tambah Lokal SD. Sukasari	Cileunyi	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD. Cintaasih	Cileunyi	2 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD Mekarwari	Cileunyi	2 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD. Cikoneng	Cileunyi	2 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran SD. Neglasari	Cileunyi	60 x 2 m	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran SD. Cikudayasa	Cileunyi	170x2 m	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	TPT SD. Cibiru 08	Cileunyi	13x6 m	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran SD. Yasahidi	Cileunyi	60x2 m	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pengembangan penyelenggaraan PAUD	Cileunyi	3 unit	60.000.000	APBD Kab.Bandung		60.000.000
1	01	16	57	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Pelatihan Tenaga Pendidik	Cileunyi	3 Paket	50.000.000	APBD Kab.Bandung		50.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pengembangan PAUD 45 Lembaga	Cileunyi	1 Paket	50.000.000	APBD Kab.Bandung		50.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan Model Pembelajaran PAUD	Cileunyi	1 Paket	50.000.000	APBD Kab.Bandung		50.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	4 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	3 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000

1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	1 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 Unit	200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
1	01	16	25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas	Majalaya	2 unit	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Unit Sekolah Baru	Majalaya	11 Lokal,8x9x11	120.000.000	APBD Kab.Bandung		120.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Gedung Sekolah SD	Pembangunan SMP Al- Husaeni	Ciparay	2 Lokal	120.000.000	APBD Kab.Bandung		120.000.000
1	01	16	18	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Bantuan Perlengkapan anak sekolah SD yang tidak mampu	Ciparay	90 Orang	22.500.000	APBD Kab.Bandung		22.500.000
1	01	16	18	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Bantuan sarana prasarana TK. AL-ikhlas	Ciparay	3 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Madrasah Diniyah Al-Ikhlas	Ciparay	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab bangunan SDN Gunungleutik II	Ciparay	1 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab bangunan SDN Gunungleutik Liosari	Ciparay	1 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Gedung Sekolah SD	Pembangunan Gedung SD Bertingkat	Ciparay	6 Lokal	200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemb. Benteng SDN Mokhamad Ramdhan	Ciparay	60 m3	100.000.000	APBD Kab.Bandung		100.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD Tangjunglaya	Ciparay	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SDN Ciparay III	Ciparay	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SDN Bojong	Ciparay	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	RKB SD Cijagra 1	Bojongsong	2 unit	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab MI Cikoneng	Bojongsong	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Lanjutan Pembangunan SD Cijagra 2	Bojongsong	5 Unit	200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
1	01	16	03	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan ruang kelas sekolah	Pemb.Ruang Kelas Baru (RKB)SDN GBI	Bojongsong	6 unit	60.000.000	APBD Kab.Bandung		60.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemb.Lapang OR SMPN 2 Bojongsong	Bojongsong	360 m2	50.000.000	APBD Kab.Bandung		50.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pembangunan Toilet siswa SD Tarumsari	Bojongsong	2 unit	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pembangunan Toilet siswa SDN GBI	Bojongsong	4 unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pembangunan Toilet siswa SMPN 2 Bojongsong	Bojongsong	4 unit	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran/ Pembentengan SDN Tarumsari	Bojongsong	20 m2	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran/ Pembentengan SDN GBI	Bojongsong	80 m2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Baru SD Cipaqalo 3 dan 4	Bojongsong	2 unit 128 m	200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Ruang Keterampilan SMP Negeri 1 Bojongsong Luar Dalam	Bojongsong	18 X 12 m	150.000.000	APBD Kab.Bandung		150.000.000
1	01	16	18	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Perlengkapan Sarana Ruang PKBM	Dayeuh Kolot	1 lokal	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Sedang Ruang kelas	Dayeuh Kolot	1 unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Gedung Sekolah SD	Bangunan bertingkat SDN Canguang II	Dayeuh Kolot	2 lokal	100.000.000	APBD Kab.Bandung		100.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Berat SDN Sukapura II	Dayeuh Kolot	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000

1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Berat SDN Dayeuhkolot V	Dayeuh Kolot	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Berat SDN Dayeuhkolot IX	Dayeuh Kolot	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Berat SDN Cangkang XIII	Dayeuh Kolot	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Berat SDN Cangkang V	Dayeuh Kolot	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pengadaan air bersih dengan zat pam dan MCK SDN Cangkang XI	Dayeuh Kolot	1 unit	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pengadaan air bersih dengan zat pam dan MCK SDN Dayeuhkolot II	Dayeuh Kolot	1 unit	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Meubelair SDN Sayuran II	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Bojong Asih I	Dayeuh Kolot	3 unit	25.500.000	APBD Kab.Bandung		25.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Pasawahan I	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Pasawahan II	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Pasawahan VI	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Pasawahan VII	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Pasawahan VIII	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Cangkang II	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Dayeuhkolot VIII	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Cangkang VII	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Dayeuhkolot XII	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Leuwi Bandung III	Dayeuh Kolot	1 unit	8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab berat rumah dinas SDN Sukapura II	Dayeuh Kolot	1 unit	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	SD Andir I (bertingkat)	Baleendah	2	250.000.000	APBD Kab.Bandung		250.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	SD Cangkring III (bertingkat)	Baleendah	2	250.000.000	APBD Kab.Bandung		250.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	SD Rancapanjang (bertingkat)	Baleendah	2	250.000.000	APBD Kab.Bandung		250.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	SD Margaluyu	Baleendah	2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	SD Kawungsari Girang (bertingkat)	Baleendah	2	250.000.000	APBD Kab.Bandung		250.000.000
1	01	16	12	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan perpustakaan sekolah	Pengadaan Taman Bacaan	Cimaung	1 Unit	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitas SD Mulyabakti	Cimaung	1 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi MI Madarikul Huda	Cimaung	3 Kelas	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD Ciririp	Cimaung	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD Sukawening	Cimaung	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	rehab.SDN bunga lawang	Cimaung	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	SDN pasir huni 2	Cimaung	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	smpn 1 cimaung	Cimaung	646,18 m	240.000.000	APBD Kab.Bandung		240.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Panghegar	Cimaung	2 Lokal	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Meubelair SDN Cipinang 2	Cimaung	5 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Perbaikan Bangunan dan meubelair 5 SD	Arjasari		80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Perbaikan Bangunan dan meubelair SDN Batukarut 3	Arjasari		40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Perbaikan Bangunan dan meubelair SDN Simajaya 2	Arjasari		40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	68	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Penyelenggaraan Paket B & C	Arjasari		20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Peningkatan Prasarana SDN Cicumangala	Arjasari		80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000

1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Penataan prasarana SDN Pamucatan	Arjasari		15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Penataan prasarana SDN Parakanbolang	Arjasari		15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Penataan prasarana SDN Ciwaru	Arjasari		15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Penataan prasarana SDN Arjasari 1	Arjasari		15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Penataan prasarana SDN Arjasari 2	Arjasari		15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Penataan prasarana SDN Arjasari 3	Arjasari		15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD Negeri (4 SD)	Arjasari		80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab PAUD Nurul Muttaqien	Arjasari		25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab PAUD Tunas Harapan	Arjasari		25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab PAUD Al Huda	Arjasari		25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab PAUD At-Tarbiyah	Arjasari		25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD Negeri rancakole	Arjasari	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	75	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan beasiswa transisi	Beasiswa	Banjaran	50 siswa	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	RDTR SDN Tarajusari	Banjaran	1 unit	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SD Cipeundeuy	Banjaran	1 unit	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tambah ruang bertingkat SDN Kamasan III	Banjaran	2 lokal	250.000.000	APBD Kab.Bandung		250.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD Sekebalingbing (2 lokal)	Cimenyang	3	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Mebeulair SD Mekarjaya	Cimenyang	60	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Mebeulair SD Cikawari	Cimenyang	54	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah SD Arcamanik I	Cimenyang	1	45.000.000	APBD Kab.Bandung		45.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Lanjutan Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD Cimenyang III	Cimenyang	2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	lanjutan Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD Bojongsukihiang	Cimenyang	2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Lanjutan Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD Sukarahayu	Cimenyang	2	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan TRK SD Cimenyang I	Cimenyang	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran halaman SD Babakan Cicaheum	Cimenyang	1	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD Sukaakur (2)	Cimenyang	3	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Mebeulair SD Ciburial I	Cimenyang	40	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Mebeulair SD Pasirlayang I	Cimenyang	40	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Mebeulair SD Pasirlayang II	Cimenyang	40	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Mebeulair SD Panyandaan I	Cimenyang	40	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Mebeulair SD Panyandaan II	Cimenyang	40	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD Bojongsukihiang III (2 lokal)	Cimenyang	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD Bojongsukihiang I(2 Lokal)	Cimenyang	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Mebeulair SD Panggilingan II	Cimenyang	60	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	lanjutan Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD Kordon I (1 lokal)	Cimenyang	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	lanjutan Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD Pakar II	Cimenyang	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000

1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD Ciburial II	Cimencyan	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pengembangan PAUD(AP)	Margahayu	17 Unit	85.000.000	APBD Kab.Bandung		85.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pengembangan PAUD(AP)	Margahayu	17 Unit	85.000.000	APBD Kab.Bandung		85.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi SD Mekar Asih, Cigondewah, Cigugur, Giriharja 2 dan Cibisoro	Margaasih	5 unit	350.000.000	APBD Kab.Bandung		350.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Penambahan Ruang PAUD Adlitia, Cikuya, Cibisoro, Cigugur	Margaasih	6 unit	120.000.000	APBD Kab.Bandung		120.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Paving Blok Paud Al- Hidayah	Nagreg	50 m	5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab ruang kelas	Nagreg	1 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab ruang kelas	Nagreg	1 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab ruang kelas	Nagreg	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab ruang kelas	Nagreg	1 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tambahan Ruang Kelas	Nagreg	1 Unit	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tambahan Ruang Kelas	Nagreg	2 Unit	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Meubeulair	Nagreg	1 Unit	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Meubeulair	Nagreg	1 Unit	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Meubeulair	Nagreg	1 Unit	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Meubeulair	Nagreg	1 Unit	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pengadaan air bersih	Nagreg	1 Unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pengadaan air bersih	Nagreg	2 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pengadaan air bersih	Nagreg	3 Unit	60.000.000	APBD Kab.Bandung		60.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Pengadaan air bersih	Nagreg	4 Unit	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran/Paving Block	Nagreg	50 m ²	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran/Paving Block	Nagreg	50 m ²	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran/Paving Block	Nagreg	50 m ²	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran/Paving Block	Nagreg	50 m ²	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran/Paving Block	Nagreg	100 m ²	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Dana Alokasi Khusus	Nagreg	3 Unit	240.000.000	APBD Kab.Bandung		240.000.000
1	01	16	12	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan perpustakaan sekolah	Perpustakaan	Nagreg	1 Unit	125.000.000	APBD Kab.Bandung		125.000.000
1	01	16	12	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan perpustakaan sekolah	Perpustakaan	Nagreg	1 Unit	125.000.000	APBD Kab.Bandung		125.000.000
1	01	16	12	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan perpustakaan sekolah	Perpustakaan	Nagreg	1 Unit	125.000.000	APBD Kab.Bandung		125.000.000
1	01	16	12	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan perpustakaan sekolah	Perpustakaan	Nagreg	1 Unit	125.000.000	APBD Kab.Bandung		125.000.000
1	01	16	02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rumah Dinas	Nagreg	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rumah Dinas	Nagreg	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rumah Dinas	Nagreg	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000

1	01	16	02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rumah Dinas	Nagreg	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rumah Dinas	Nagreg	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Renovasi Ruang Kelas	Cicalengka	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Perbaikan Benteng Sekolah	Cicalengka		50.000.000	APBD Kab.Bandung		50.000.000
1	01	16	68	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Wajib Belajar Paket B&C	Cicalengka	I Pkt	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Berat SD Garogol	Cicalengka	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas SDN Warqaluyu 2	Cikancung	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas SDN Marqaasih	Cikancung	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas SDN Sindang Sari 1	Cikancung	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas SDN Ciheuleut 1	Cikancung	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas SDN Cikancung 6	Cikancung	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas SDN Cipeundeuy	Cikancung	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas SDN Ciheuleut 2	Cikancung	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TRK SDN Cihanyir 1	Cikancung	1 Lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas SDN Cikancung 3	Cikancung	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TRK SDN Cikancung 7	Cikancung	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TRK Bertingkat SDN Tanjunglaya 3	Cikancung	2 Lokal	220.000.000	APBD Kab.Bandung		220.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TRK SMAN 1 Cikancung	Cikancung	2 Lokal	160.000.000	APBD Kab.Bandung		160.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Seding/Ringan Ruang MCK Murid dan Guru SMPN 1 Cikancung	Cikancung	3 Unit	46.628.000	APBD Kab.Bandung		46.628.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Seding/Ringan Ruang MCK Murid dan Guru SMPN 2 Cikancung	Cikancung	2 Unit	46.628.000	APBD Kab.Bandung		46.628.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Meubeler SDN Cikasungka	Cikancung	3 Paket	22.500.000	APBD Kab.Bandung		22.500.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Paving Blok SDN Cikasungka	Cikancung	200 m	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TRK SDN Mandalasari 2	Cikancung	1 Lokai	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TRK Baru SDN Ridhoghali 2	Cikancung	1 Lokai	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SDN Cibeet III	Ibun	2 LokL	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SDN Cempaka	Ibun	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SDN P.Bitung	Ibun	2 lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SDN Talun VI	Ibun	1 LOKAL	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab Kls SDN P.Angin	Ibun	1 lokal	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehab SDN Talun I	Ibun	2 Lokal	80.000.000	APBD Kab.Bandung		80.000.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemagaran SDN P.Angin	Ibun	90 M2	17.500.000	APBD Kab.Bandung		17.500.000
1	01	16	09	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir	Pemb.MCK Wiwilan	Ibun	1 unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Engadaan Meubelair SDN Talun I	Ibun	1 LOKAL	7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Meubelair SMPN Ibun I	Ibun	1 lokal	7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Meubelair SDN Talun VI	Ibun	1 lokal	7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000
1	01	16	19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Mebeulair sekolah	Pengadaan Meubelair SDN P.Angin	Ibun	1 lokal	7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000

1	01	16	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TRK SDN Cikitu 4	Pacet	1 ruang	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	16	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Sarana air bersih SDN bojong	Pacet	1 unit	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	17		PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
1	01	17	01	Program Pendidikan Menengah	Pembangunan Gedung Sekolah (Pengadaan Tanah u/ USB-SMK)		Disdikbud Kab.	100%		APBD Kab.Bandung		
1	01	17	03	Program Pendidikan Menengah	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Disdikbud Kab.	100%	180.000.000	APBD Kab.Bandung		180.000.000
1	01	17	05	Program Pendidikan Menengah	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer,TPA,IPS, dll)		Disdikbud Kab.	100%	259.338.050	APBD Kab.Bandung		259.338.050
1	01	17	09	Program Pendidikan Menengah	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir		Disdikbud Kab.	100%	100.000.000	APBD Kab.Bandung		100.000.000
1	01	17	12	Program Pendidikan Menengah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Disdikbud Kab.	100%	100.000.000	APBD Kab.Bandung		100.000.000
1	01	17	14	Program Pendidikan Menengah	Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary		Disdikbud Kab.	100%	100.000.000	APBD Kab.Bandung		100.000.000
1	01	17	15	Program Pendidikan Menengah	Pengadaan buku dan alat tulis siswa (Pengadaan Buku Raport SMA/SMK)		Disdikbud Kab.	100%	280.000.000	APBD Kab.Bandung		280.000.000
1	01	17	18	Program Pendidikan Menengah	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa		Disdikbud Kab.	100%	100.000.000	APBD Kab.Bandung		100.000.000
1	01	17	19	Program Pendidikan Menengah	Pengadaan Mebeulair Sekolah		Disdikbud Kab.	100%	100.000.000	APBD Kab.Bandung		100.000.000
1	01	17	44	Program Pendidikan Menengah	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah		Disdikbud Kab.	100%	120.000.000	APBD Kab.Bandung		75.000.000
1	01	17	57	Program Pendidikan Menengah	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik		Disdikbud Kab.	100%	50.000.000	APBD Kab.Bandung		50.000.000
1	01	17	62	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SMA/SMK (Rintisan Wajar 12 Tahun)		Disdikbud Kab.	100%	15.364.600.000	APBD Kab.Bandung		18.671.287.350
1	01	17	63	Program Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan Paket C setara SMA		Disdikbud Kab.	100%	350.000.000	APBD Kab.Bandung		350.000.000
1	01	17	64	Program Pendidikan Menengah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS		Disdikbud Kab.	100%	100.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	01	17	64	Program Pendidikan Menengah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS		Disdikbud Kab.	100%	100.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	01	17	63	Program Pendidikan Menengah	Penyelenggraan paket C setara SMU	Kejar Paket C; Anak Putus Ski	Katapang	1 Paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	17	63	Program Pendidikan Menengah	Penyelenggraan paket C setara SMU	Kejar Paket C; Anak Putus Ski	Katapang	1 Paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	17	63	Program Pendidikan Menengah	Penyelenggraan paket C setara SMU	Terlaksananya penyelenggaraan kelompok belajar paket C setara SMA	Solokanjeruk	80	35.400.000	APBD Kab.Bandung		35.400.000
1	01	17	61	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan bantuan operasional manaiemen mutu (BOMM)	Peningkatan Mutu Guru dan Siswa SMP satu atap	Cileunyi	100 org	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	01	17	01	Program Pendidikan Menengah	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Pemagaran SMA N Kertasari	Kertasari	300 m	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	01	17	01	Program Pendidikan Menengah	Pembangunan qedung sekolah	Pembangunan SMK Pertanian (baru)	Kertasari	1 unit	300.000.000	APBD Kab.Bandung		300.000.000
1	01	17	63	Program Pendidikan Menengah	Penyelenggraan paket C setara SMU	Program Paket C	PACET	1 Paket	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	01	18		PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL								
1	01	18	01	Program Pendidikan Non Formal	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal		Disdikbud Kab.	100%	275.000.000	APBD Kab.Bandung		725.000.000
1	01	18	03	Program Pendidikan Non Formal	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan		Disdikbud Kab.	100%	325.000.000	APBD Kab.Bandung		734.020.000
1	01	18	04	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan		Disdikbud Kab.	100%	350.000.000	APBD Kab.Bandung		750.000.000
1	01	18	05	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup		Disdikbud Kab.	100%	250.000.000	APBD Kab.Bandung		700.000.000
1	01	18	06	Program Pendidikan Non Formal	Penyediaan sarana dan prasarana non formal		Disdikbud Kab.	100%	385.000.000	APBD Kab.Bandung		635.000.000
1	01	20		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						APBD Kab.Bandung		
1	01	20	01	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik		Disdikbud Kab.	100%	185.000.000	APBD Kab.Bandung		185.000.000
1	01	20	04	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pelaksanaan Lesson Study tahun ke-3		Disdikbud Kab.	100%	180.000.000	APBD Kab.Bandung		180.000.000
1	01	20	07	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (SD)		Disdikbud Kab.	100%	492.000.000	APBD Kab.Bandung		600.485.000

1	01	20	07	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (SMP)		Disdikbud Kab.	100%	150.000.000	APBD Kab.Bandung		150.000.000
1	01	20	08	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan Pengawas		Disdikbud Kab.	100%	150.000.000	APBD Kab.Bandung		150.000.000
1	01	20	08	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP dan pengawas		Disdikbud Kab.	100%	150.000.000	APBD Kab.Bandung		150.000.000
1	01	20	08	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK dan Pengawas		Disdikbud Kab.	100%	150.000.000	APBD Kab.Bandung		150.000.000
1	01	22		PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN						APBD Kab.Bandung		
1	01	22	01	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan (Evaluasi dan Pelaporan)		Disdikbud Kab.	100%	215.000.000	APBD Kab.Bandung		215.000.000
1	01	22	02	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan (data)		Disdikbud Kab.	100%	220.000.000	APBD Kab.Bandung		220.000.000
1	01	22	02	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan		Disdikbud Kab.	100%	220.000.000	APBD Kab.Bandung		359.973.525
1	01	22	04	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan		Disdikbud Kab.	100%	295.000.000	APBD Kab.Bandung		260.000.000
1	01	22	07	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Informasi)		Disdikbud Kab.	100%	260.000.000	APBD Kab.Bandung		260.000.000
1	17	15		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA						APBD Kab.Bandung		
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		Disdikbud Kab.	100%	227.000.000	APBD Kab.Bandung		227.000.000
1	17	15	06	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembangunan Gedung Kesenian kabupaten Bandung		Disdikbud Kab.	100%	13.775.000.000	APBD Kab.Bandung		13.775.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat degung/Bangkongreang	Ciwidey	1 paket	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat kesenian wayang golek	Rancabali	1 paket	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat kesenian Alat Calung	Rancabali	2 unit	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat kesenian Alat salendro di wil Kec. Rancabali	Rancabali	1 paket	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan Alat-alat Kesenian Gamelan dan Pencaksilat	Cangkuang	1 Unit	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Alat-alat Kesenian (Degung/Reog) Pencak Silat Pusaka Tanjung	Cangkuang	3 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Alat Peraga Edukatif PAUD (RW 1,3,5,7,9)	Pameungpeuk	5 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Alat - alat untuk kesenian: Degung, Pencak silat, Calung, Reog	Pameungpeuk	4 Paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan Alat Kesenian Pencak Silat	Katapang	1 Unit	5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat kesenian pencak silat	Rancaekek	1 set	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat musik rebana	Rancaekek	1 set	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat kesenian pencak silat dan jaijongan	Rancaekek	1 set	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan Alat kesenian tradisonal (alat degung)	Solokanjeruk	1	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan Alat kesenian tradisonal (alat degung)	Solokanjeruk	1	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan Alat kesenian tradisonal (alat Pencak silat)	Solokanjeruk	1	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan Alat kesenian tradisonal (alat Pencak silat)	Solokanjeruk	1	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Alat Kesenian Sunda Modern Organ	Solokanjeruk	1	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan alat kesenian calung	Cileunyi	1 unit	5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Penyediaan Karawitan (Gamelan Salendro)	Cileunyi	1 unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000

1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Singa Depok	Ciparay	1 Unit	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pencak Silat	Ciparay	1 Unit	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Calung	Ciparay	1 Unit	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Qosidah Modern	Ciparay	1 Unit	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan Peralatan Seni Pencak silat	Ciparay	1 Set	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pencak Silat	Ciparay	1 Set	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan alat-alat kesenian angklung dan degung	Dayeuh Kolot	1 paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan alat-alat kesenian dagiang sari	Dayeuh Kolot	1 pake	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan Alat Kesenian Pencak Silat dan Degung	Cimaung	1 Paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Penyediaan Alat Kesenian	Cimaung		25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	penyediaan alat kesenian	Cimaung		25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Sanggar seni	Banjaran	1 paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pelatihan seni	Banjaran	3 paket	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan peralatan gamelan, degung	Banjaran	1 paket	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan seragam seni beluk di RW 8	Banjaran	1 paket	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Calung	Banjaran	1 set	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Degung	Banjaran	2 set	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan Gendang	Banjaran	1 paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat Pencak Silat	Banjaran	2 paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Marawis	Banjaran	3 paket	5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat kesenian Pencak Silat RW 08	Banjaran	1 unit	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Alat kesenian Calung 1 set	Banjaran	1 paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Alat kesenian Gendang Pencak 1 set	Banjaran	1 paket	20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Alat kesenian Degung 1 set	Banjaran	1 paket	40.000.000	APBD Kab.Bandung		40.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat kesenian Qasidah Modern di RW06, 07, 08, 11, 15	Cilengkrang	5 grup	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat kesenian kecapi suling di RW 07, 09, 13, 14	Cilengkrang	1 grup	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan gamelan seni budaya sunda dan pencak silat	Cimencyan	4 set	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pengadaan alat kesenian angklung PKK Marsel	Margahayu	1 paket	8.000.000	APBD Kab.Bandung		8.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan Alat Kesenian Reog	Nagreg	1 Unit	5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan alat kesenian	paseh	1 set	25.000.000	APBD Kab.Bandung		25.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan alat kesenian	paseh	1 set	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan Matras Olah raga Pencak Silat	Pacet	1 SET	10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan Peralatan Musik Calung	Pacet	2 SET	5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
1	17	15	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bantuan Peralatan Musik Marawis	Pacet	1 SET	5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
1	17	16		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA						APBD Kab.Bandung		
1	17	16	01	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pusaka termasuk naskah kuno		Disdikbud Kab.	100%	80.000.000	APBD Kab.Bandung		100.000.000
1	17	16	04	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah		Disdikbud Kab.	100%	70.000.000	APBD Kab.Bandung		90.000.000
1	17	16	05	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peningkatan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air		Disdikbud Kab.	100%	550.000.000	APBD Kab.Bandung		549.000.000

1	17	16	02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Situs Ki Darman Wayang Golek Purwasah	Cileunyi	1 unit	50.000.000	APBD Kab.Bandung		50.000.000
1	17	17		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA						APBD Kab.Bandung		
1	17	17	01	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		Disdikbud Kab.	100%	135.137.255	APBD Kab.Bandung		170.137.255
1	17	17	05	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Disdikbud Kab.	100%	10.000.000	APBD Kab.Bandung		35.862.745
1	17	17	01	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Pembinaan Seni Budaya	Cileunyi	6 desa	25.000.000	APBD Kab.Bandung		115.000.000
						Jumlah 2			83.672.715.365			90.942.531.804
						Jumlah (1+2)			90.422.687.065			97.692.503.504

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : SEKERTARIAT DEWAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				32		
x	xx	01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	surat-surat dan naskah dinas disampaikan tepat waktu	100%	78.510.100	APBD Kab.Bandung	78.510.100
x	xx	01	02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi SDA & listrik	100%	155.110.200	APBD Kab.Bandung	155.110.200
x	xx	01	03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	meningkatnya pelayanan dan kinerja	3 pekerjaan jasa	43.234.000	APBD Kab.Bandung	43.234.000
x	xx	01	05 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	terpenuhinya kebutuhan pengamanan kantor	100%	41.184.000	APBD Kab.Bandung	41.184.000
x	xx	01	06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor	37 unit R4 dan 10 unit R2	12.480.000	APBD Kab.Bandung	12.480.000
x	xx	01	07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan					0
x	xx	01	08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tercapainya kebersihan lingkungan kerja	100%	125.931.000	APBD Kab.Bandung	125.931.000
x	xx	01	09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya perbaikan peralatan kerja	12 item peralatan	68.827.500	APBD Kab.Bandung	68.827.500
x	xx	01	10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	meningkatnya pelayannya administrasi setwan/DPRD	100%	208.599.000	APBD Kab.Bandung	208.599.000
x	xx	01	11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya perbaikan peralatan kerja	100%	231.192.000	APBD Kab.Bandung	231.192.000
x	xx	01	12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	meningkatnya pelayanan administrasi setwan	100%	22.560.000	APBD Kab.Bandung	22.560.000
x	xx	01	13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	10 item barang	143.109.000	APBD Kab.Bandung	143.109.000
x	xx	01	14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	meningkatnya fungsi gedung kantor	12 item barang	15.499.000	APBD Kab.Bandung	15.499.000
x	xx	01	15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	meningkatnya kualitas pimpinan dan anggota dewan DPRD	12 surat kabar/majalah/bulan dan terbitan berkala WPU/bulanan	341.250.000	APBD Kab.Bandung	341.250.000
x	xx	01	16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan logistik kantor	meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 jenis	129.400.000	APBD Kab.Bandung	129.400.000
x	xx	01	17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	meningkatnya pelayanan	5 kegiatan	425.758.000	APBD Kab.Bandung	425.758.000
x	xx	01	18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	di pahamiya peraturan dan ketentuan yang di butuhkan	8 kali kegiatan	1.764.084.270	APBD Kab.Bandung	1.764.084.270
x	xx	01	19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan tenaga Pendukung administrasi teknis dan perkantoran	terlayannya kebutuhan tenaga/tugas-tugas administrasi sekretariat DPRD	1 org/13 bulan	13.000.000	APBD Kab.Bandung	13.000.000
x	xx	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
x	xx	02	05 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			-		-
x	xx	02	22 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terciptanya kondisi gedung kantor yang baik	1 unit gedung setwan, 1 unit gedung DPRD dan 1 mess DPRD	113.849.000	APBD Kab.Bandung	113.849.000
x	xx	02	23 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			-		-
x	xx	02	24 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tercapainya pemeliharaan mibil dinas/operasional	21 unit roda 4, 10 unit roda 2	835.295.000	APBD Kab.Bandung	835.295.000
x	xx	02	44 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	meningkatnya pelayanan/kinerja	9 unit kendaraan R4	56.227.000	APBD Kab.Bandung	56.227.000
x	xx	02	47 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan jasa / sewa Rumah Jabatan, Kendaraan dan Perlengkapan kantor	meningkatnya pelayanan	5 unit kendaraan R4	44.455.000	APBD Kab.Bandung	44.455.000
x	xx	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
x	xx	03	02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tercapainya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan	50 stel PSH 50 stel PDH, 50 stel PSR DPRD	193.567.000	APBD Kab.Bandung	193.567.000
x	xx	03	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian kerja lapangan	tercapainya pengadaan pakaian kerja lapangan	3 jenis	16.380.000	APBD Kab.Bandung	16.380.000
x	xx	03	05 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	meningkatnya kinerja/disiplin	2 jenis	40.477.000	APBD Kab.Bandung	40.477.000
x	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						

x	xx	05	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan dan konseling (peningkatan SDM)	tercapainya peningkatan kualitas SDM aparatur	83 orang	179.477.000	APBD Kab.Bandung		179.477.000
x	xx	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan jasa jaminan Asuransi Kesehatan Dewan	tercapainya peningkatan kualitas SDM	50 orang anggota DPRD, 1 orang suami/istri dan 2 orang anak	655.357.000	APBD Kab.Bandung		655.357.000
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
x	xx	06	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya dokument laporan kinerja dan ikhtisar setwan	10 jenis dokumen	96.207.000	APBD Kab.Bandung		96.207.000
x	xx	06	02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	terlaksananya pelaporan realisasi anggaran DPRD dan sekretariat DPRD per triwulan dan per semesteran	2 kali kegiatan	51.782.000	APBD Kab.Bandung		51.782.000
x	xx	06	03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	terpenuhinya laporan prognosis realisasi anggaran sekretariat DPRD	12 kali kegiatan	92.635.000	APBD Kab.Bandung		92.635.000
x	xx	06	04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun	1 kali kegiatan	41.226.200	APBD Kab.Bandung		41.226.200
						Jumlah 1		6.236.662.270			6.236.662.270
1	20	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					9		
1	20	15	01	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah	terbahasnya RAPERDA		3.258.890.819	APBD Kab.Bandung		3.631.762.643
1	20	15	02	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama						0
1	20	15	03	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	realisasi program kerja alat kelengkapan DPRD		4.177.736.181	APBD Kab.Bandung		4.694.358.357
1	20	15	04	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rapat-rapat paripurna	terwujudnya produk-produk DPRD		152.681.000	APBD Kab.Bandung		178.069.000
1	20	15	05	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Kegiatan Reses	terserapnya aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah		1.577.135.000	APBD Kab.Bandung		1.956.657.000
1	20	15	06	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	meningkatnya partisipasi msasyarakat dalam perumusan kebijakan daerah		308.649.000	APBD Kab.Bandung		360.096.000
1	20	15	07	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		2.155.544.000	APBD Kab.Bandung		2.806.466.000
1	20	15	08	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sosialisasi perturan perundang-undangan	draft Raperda prakarsa DPRD		19.364.000	APBD Kab.Bandung		22.591.000
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							
1	20	26	01	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	terselesaikannya permasalahan perundang-undangan		200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
1	20	26	06	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	draft Raperda prakarsa DPRD		150.000.000	APBD Kab.Bandung		150.000.000
						Jumlah 2		12.000.000.000			14.000.000.000
						Jumlah (1+2)		18.236.662.270			20.236.662.270

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN CILEUNYI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013			
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
x	xx	01	Pelayanan administrasi perkantoran		Cileunyi			14			
x	xx	01	02 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	3.000.000	APBD Kab.Bandung	Kecamatan Cileunyi	3.000.000
x	xx	01	08 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Cileunyi	Pelayanan Penunjang Kegiatan Pelayanan Publik	7.000.000	APBD Kab.Bandung	Pelayanan Penunjang Kegiatan Pelayanan Publik	7.000.000
x	xx	01	10 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Cileunyi	Pelayanan Penunjang Kegiatan Pelayanan Publik	7.000.000	APBD Kab.Bandung	Pelayanan Penunjang Kegiatan Pelayanan Publik	7.000.000
x	xx	01	11 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Cileunyi	Pelayanan Penunjang Kegiatan Pelayanan Publik	4.000.000	APBD Kab.Bandung	Pelayanan Penunjang Kegiatan Pelayanan Publik	4.000.000
x	xx	01	12 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Cileunyi	Penunjang Kegiatan Pelayanan Publik	3.000.000	APBD Kab.Bandung	Penunjang Kegiatan Pelayanan Publik	3.000.000
x	xx	01	13 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cileunyi	Pegawai Kecamatan Cileunyi	12.000.000	APBD Kab.Bandung	Pegawai Kecamatan Cileunyi	12.000.000
x	xx	01	17 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Cileunyi	Aparatur	88.000.000	APBD Kab.Bandung	Aparatur	88.000.000
x	xx	01	19 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis administrasi Perkantoran	Cileunyi	Pegawai Honorer	13.000.000	APBD Kab.Bandung	Pegawai Honorer	13.000.000
x	xx	01	20 Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Cileunyi	Pegawai Kecamatan	15.000.000	APBD Kab.Bandung	Pegawai Kecamatan	15.000.000
x	xx	02	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur			Cileunyi			APBD Kab.Bandung		
x	xx	02	03 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor		Cileunyi		250.000.000	APBD Kab.Bandung		250.000.000
x	xx	02	22 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Cileunyi			APBD Kab.Bandung		
x	xx	02	24 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Cileunyi		55.000.000	APBD Kab.Bandung		55.000.000
x	xx	03	Program Disiplin Aparatur			Cileunyi			APBD Kab.Bandung		
x	xx	03	02 Program Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Cileunyi		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cileunyi			APBD Kab.Bandung		
x	xx	06	03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Cileunyi		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x	xx	06	04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Cileunyi		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
					Jumlah 1			470.000.000			470.000.000
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Cileunyi					
1	20	20	03 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Cileunyi		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
					Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
					Jumlah (1+2)			600.000.000			608.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN CILENGKRANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Cilengkrang						
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Cilengkrang		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Cilengkrang		9.400.000	APBD Kab.Bandung		9.400.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Cilengkrang		9.540.000	APBD Kab.Bandung		9.540.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Cilengkrang		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Cilengkrang		5.784.000	APBD Kab.Bandung		5.784.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cilengkrang		22.020.000	APBD Kab.Bandung		22.020.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Cilengkrang		75.110.000	APBD Kab.Bandung		75.110.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sministrasi Perkantoran	Cilengkrang			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Cilengkrang		18.000.000	APBD Kab.Bandung		18.000.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Cilengkrang			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 03	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Perluasan Gedung Serba guna		Cilengkrang		250.000.000	APBD Kab.Bandung		250.000.000
x xx 02 04	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Cilengkrang			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 05	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Cilengkrang		45.702.000	APBD Kab.Bandung		45.702.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Cilengkrang			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Cilengkrang		7.790.000	APBD Kab.Bandung		7.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cilengkrang			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Cilengkrang		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Cilengkrang		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			460.000.000			460.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Cilengkrang					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Cilengkrang		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			590.000.000			598.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN CIMEUNYAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x	xx	01	Pelayanan administrasi perkantoran		Cimenyang				
x	xx	01	01 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Cimenyang		2.000.000	APBD Kab.Bandung	2.000.000
x	xx	01	02 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Cimenyang	5.000.000	APBD Kab.Bandung	5.000.000
x	xx	01	08 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Cimenyang	8.500.000	APBD Kab.Bandung	8.500.000
x	xx	01	09 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Cimenyang	7.000.000	APBD Kab.Bandung	7.000.000
x	xx	01	10 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Cimenyang	7.500.000	APBD Kab.Bandung	7.500.000
x	xx	01	11 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Cimenyang	82.000.000	APBD Kab.Bandung	82.000.000
x	xx	01	12 Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Cimenyang	17.000.000	APBD Kab.Bandung	17.000.000
x	xx	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :		Cimenyang			APBD Kab.Bandung	
x	xx	02	07 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Cimenyang	15.000.000	APBD Kab.Bandung	15.000.000
x	xx	02	10 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pengadaan Mebeulair		Cimenyang	9.000.000	APBD Kab.Bandung	9.000.000
x	xx	02	22 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Cimenyang	7.200.000	APBD Kab.Bandung	7.200.000
x	xx	02	24 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Cimenyang	45.000.000	APBD Kab.Bandung	45.000.000
x	xx	02	30 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stoom Walls		Cimenyang	2.500.000	APBD Kab.Bandung	2.500.000
x	xx	03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Cimenyang		APBD Kab.Bandung	
x	xx	03	02 PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga tertentu	Cimenyang	4.500.000	APBD Kab.Bandung	4.500.000
x	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cimenyang		APBD Kab.Bandung	
x	xx	06	03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Cimenyang	4.000.000	APBD Kab.Bandung	4.000.000
x	xx	06	04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Cimenyang	3.800.000	APBD Kab.Bandung	3.800.000
				Jumlah 1			220.000.000		220.000.000
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Cimenyang			
1	20	20	03 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Cimenyang	130.000.000	APBD Kab.Bandung	138.000.000
				Jumlah 2			130.000.000		138.000.000
				Jumlah (1+2)			350.000.000		358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN BOJONG SOANG

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2012		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013	
						target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Sumber Dana	Target capaian kinerja
x	xx	01	Pelayanan administrasi perkantoran		Bojongsoang					
x	xx	01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Bojongsoang	3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x	xx	01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Bojongsoang	9.509.000	APBD Kab.Bandung		9.509.000
x	xx	01 09	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bojongsoang	7.546.000	APBD Kab.Bandung		7.546.000
x	xx	01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan	Bojongsoang	4.254.000	APBD Kab.Bandung		4.254.000
x	xx	01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Bojongsoang	5.785.000	APBD Kab.Bandung		5.785.000
x	xx	01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bojongsoang	6.280.000	APBD Kab.Bandung		6.280.000
x	xx	01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Bojongsoang	78.113.000	APBD Kab.Bandung		78.113.000
x	xx	01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis Administrasi Perkantoran	Bojongsoang		APBD Kab.Bandung		
x	xx	01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bojongsoang	30.500.000	APBD Kab.Bandung		30.500.000
x	xx	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :		Bojongsoang			APBD Kab.Bandung		
x	xx	02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Bojongsoang		APBD Kab.Bandung		
x	xx	02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Bojongsoang	49.723.000	APBD Kab.Bandung		49.723.000
x	xx	03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :		Bojongsoang			APBD Kab.Bandung		
x	xx	03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Bojongsoang	5.790.000	APBD Kab.Bandung		5.790.000
x	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Bojongsoang			APBD Kab.Bandung		
x	xx	06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Bojongsoang	6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x	xx	06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Bojongsoang	3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
				Jumlah 1			210.000.000			210.000.000
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Bojongsoang					
1	20	20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Bojongsoang	130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
				Jumlah 1			130.000.000			138.000.000
				Jumlah (1+2)			340.000.000			348.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN MARGAHAYU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Margahayu						
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Margahayu		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Margahayu		17.500.000	APBD Kab.Bandung		17.500.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Margahayu		9.140.000	APBD Kab.Bandung		9.140.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Margahayu		4.100.000	APBD Kab.Bandung		4.100.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Margahayu		5.780.000	APBD Kab.Bandung		5.780.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Margahayu		10.050.000	APBD Kab.Bandung		10.050.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Margahayu		79.270.000	APBD Kab.Bandung		79.270.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis Administrasi Perkantoran	Margahayu			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Margahayu		20.150.000	APBD Kab.Bandung		20.150.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Margahayu			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Margahayu			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Margahayu		55.720.000	APBD Kab.Bandung		55.720.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Margahayu			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Margahayu		5.790.000	APBD Kab.Bandung		5.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Margahayu			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Margahayu		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Margahayu		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Margahayu					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Margahayu		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN MARGAASIH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Margaasih						
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Margaasih		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Margaasih		9.500.000	APBD Kab.Bandung		9.500.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Margaasih		9.550.000	APBD Kab.Bandung		9.550.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Margaasih		4.750.000	APBD Kab.Bandung		4.750.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Margaasih		5.765.000	APBD Kab.Bandung		5.765.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Margaasih		21.000.000	APBD Kab.Bandung		21.000.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Margaasih		67.113.000	APBD Kab.Bandung		67.113.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Margaasih			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Margaasih		26.300.000	APBD Kab.Bandung		26.300.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Margaasih			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 07	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Margaasih		200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Margaasih			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Margaasih		55.722.000	APBD Kab.Bandung		55.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Margaasih			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Margaasih		7.800.000	APBD Kab.Bandung		7.800.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Margaasih			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Margaasih		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Margaasih		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			420.000.000			420.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Margaasih					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Margaasih		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			550.000.000			558.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN DAYEUH KOLOT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Dayeuh Kolot						
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dayeuh Kolot	Tersedianya air		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dayeuh Kolot	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Dayeuh Kolot	Tersedianya Alat Tulis Kantor		7.000.000	APBD Kab.Bandung		7.000.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dayeuh Kolot	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan		4.000.000	APBD Kab.Bandung		4.000.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dayeuh Kolot	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dayeuh Kolot	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Dayeuh Kolot	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan		88.000.000	APBD Kab.Bandung		88.000.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Dayeuh Kolot	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dayeuh Kolot	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :		Dayeuh Kolot				APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dayeuh Kolot	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dayeuh Kolot	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas		65.000.000	APBD Kab.Bandung		65.000.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :		Dayeuh Kolot				APBD Kab.Bandung		
x xx 03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dayeuh Kolot	Tersedianya Pakaian Olah Raga		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Dayeuh Kolot				APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dayeuh Kolot	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan		4.000.000	APBD Kab.Bandung		4.000.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dayeuh Kolot			3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
				Jumlah 1		210.000.000			210.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Dayeuh Kolot						
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Dayeuh Kolot			130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
				Jumlah 1		130.000.000			138.000.000
				Jumlah (1+2)		340.000.000			348.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN KATAPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Katapang						
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Katapang		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Katapang		11.500.000	APBD Kab.Bandung		11.500.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Katapang		9.000.000	APBD Kab.Bandung		9.000.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Katapang		4.150.000	APBD Kab.Bandung		4.150.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Katapang		5.115.000	APBD Kab.Bandung		5.115.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Katapang		22.400.000	APBD Kab.Bandung		22.400.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Katapang		88.115.000	APBD Kab.Bandung		88.115.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Katapang			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Katapang		10.500.000	APBD Kab.Bandung		10.500.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Katapang			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Katapang		7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Katapang		45.720.000	APBD Kab.Bandung		45.720.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Katapang			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Katapang		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Katapang			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Katapang		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Katapang		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Katapang					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Katapang		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Pameungpeuk					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Pameungpeuk		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Pameungpeuk		8.500.000	APBD Kab.Bandung		8.500.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pameungpeuk		7.546.000	APBD Kab.Bandung		7.546.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Pameungpeuk		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Pameungpeuk		5.785.000	APBD Kab.Bandung		5.785.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pameungpeuk		10.250.000	APBD Kab.Bandung		10.250.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Pameungpeuk		88.113.000	APBD Kab.Bandung		88.113.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdmministrasi Perkantoran	Pameungpeuk		13.000.000	APBD Kab.Bandung		13.000.000
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pameungpeuk		10.040.000	APBD Kab.Bandung		10.040.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Pameungpeuk			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 41	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		Pameungpeuk		300.000.000	APBD Kab.Bandung		300.000.000
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Pameungpeuk			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Pameungpeuk		35.722.000	APBD Kab.Bandung		35.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Pameungpeuk			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Pameungpeuk		5.790.000	APBD Kab.Bandung		5.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Pameungpeuk			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Pameungpeuk		5.100.000	APBD Kab.Bandung		5.100.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Pameungpeuk		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			500.000.000			500.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Pameungpeuk					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Pameungpeuk		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			630.000.000			638.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN ARJASARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Arjasari						
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Arjasari		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Arjasari		19.500.000	APBD Kab.Bandung		19.500.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Arjasari		9.546.000	APBD Kab.Bandung		9.546.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Arjasari		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Arjasari		5.105.000	APBD Kab.Bandung		5.105.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Arjasari		22.050.000	APBD Kab.Bandung		22.050.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Arjasari		65.113.000	APBD Kab.Bandung		65.113.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdmministrasi Perkantoran	Arjasari			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Arjasari		28.520.000	APBD Kab.Bandung		28.520.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Arjasari			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 42	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Arjasari		300.000.000	APBD Kab.Bandung		300.000.000
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Arjasari			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Arjasari		45.722.000	APBD Kab.Bandung		45.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Arjasari			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Arjasari		7.790.000	APBD Kab.Bandung		7.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Arjasari			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Arjasari		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Arjasari		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			520.000.000			520.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Arjasari					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Arjasari		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			650.000.000			658.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN PANGALENGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Pangalengan					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Pangalengan		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Pangalengan		19.500.000	APBD Kab.Bandung		19.500.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pangalengan		8.436.000	APBD Kab.Bandung		8.436.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Pangalengan		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Pangalengan		5.785.000	APBD Kab.Bandung		5.785.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangalengan		12.000.000	APBD Kab.Bandung		12.000.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Pangalengan		88.113.000	APBD Kab.Bandung		88.113.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sministrasi Perkantoran	Pangalengan			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pangalengan		20.500.000	APBD Kab.Bandung		20.500.000
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Pangalengan		7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Pangalengan		35.722.000	APBD Kab.Bandung		35.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Pangalengan			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Pangalengan		5.790.000	APBD Kab.Bandung		5.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Pangalengan			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Pangalengan		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Pangalengan		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Pangalengan					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Pangalengan		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN CIMAUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran								
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Cimaung		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Cimaung		9.400.000	APBD Kab.Bandung		9.400.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Cimaung		9.336.000	APBD Kab.Bandung		9.336.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Cimaung		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Cimaung		5.785.000	APBD Kab.Bandung		5.785.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimaung		15.050.000	APBD Kab.Bandung		15.050.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Cimaung		68.113.000	APBD Kab.Bandung		68.113.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sministrasi Perkantoran	Cimaung		13.650.000	APBD Kab.Bandung		13.650.000
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Cimaung		20.500.000	APBD Kab.Bandung		20.500.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Cimaung		750.000.000	APBD Kab.Bandung		750.000.000
x xx 02 03	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pembangunan gedung kantor		Cimaung			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Cimaung			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Cimaung		45.722.000	APBD Kab.Bandung		45.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Cimaung			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Cimaung		5.790.000	APBD Kab.Bandung		5.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cimaung			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Cimaung		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Cimaung		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			960.000.000			960.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Cimaung					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Cimaung		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			1.090.000.000			1.098.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN BANJARAN

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2012		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013	
						target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Sumber Dana	Target capaian kinerja
x	xx	01	Pelayanan administrasi perkantoran		Banjaran					
x	xx	01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjaran	Tersedianya air	3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x	xx	01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Banjaran	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	19.500.000	APBD Kab.Bandung		19.500.000
x	xx	01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Banjaran	Tersedianya Alat Tulis Kantor	9.546.000	APBD Kab.Bandung		9.546.000
x	xx	01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banjaran	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x	xx	01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Banjaran	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	5.785.000	APBD Kab.Bandung		5.785.000
x	xx	01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banjaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.043.000	APBD Kab.Bandung		14.043.000
x	xx	01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Banjaran	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	80.100.000	APBD Kab.Bandung		80.100.000
x	xx	01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Banjaran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sministrasi Perkantoran		APBD Kab.Bandung		
x	xx	01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Banjaran	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	18.360.000	APBD Kab.Bandung		18.360.000
x	xx	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :		Banjaran			APBD Kab.Bandung		
x	xx	02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banjaran	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000
x	xx	02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banjaran	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	40.722.000	APBD Kab.Bandung		40.722.000
x	xx	03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :		Banjaran			APBD Kab.Bandung		
x	xx	03 02	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Banjaran	Tersedianya Pakaian Olah Raga tertentu	7.790.000	APBD Kab.Bandung		7.790.000
x	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Banjaran			APBD Kab.Bandung		
x	xx	06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Banjaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x	xx	06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Banjaran		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
				Jumlah 1			220.000.000			220.000.000
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Banjaran					
1	20	20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Banjaran		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
				Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
				Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN CICALENGKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Cicalengka					
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		13.390.000	APBD Kab.Bandung		13.390.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		10.740.000	APBD Kab.Bandung		10.740.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		5.909.000	APBD Kab.Bandung		5.909.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		2.952.000	APBD Kab.Bandung		2.952.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		20.745.000	APBD Kab.Bandung		20.745.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		89.000.000	APBD Kab.Bandung		89.000.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		22.500.000	APBD Kab.Bandung		22.500.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Cicalengka			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		9.534.000	APBD Kab.Bandung		9.534.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		34.760.000	APBD Kab.Bandung		34.760.000
x xx 02 07	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		7.450.000	APBD Kab.Bandung		7.450.000
x xx 02 08	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		3.020.000	APBD Kab.Bandung		3.020.000
x xx 02 42	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka		215.820.000	APBD Kab.Bandung		215.820.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Cicalengka					
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya pelayanan publik	Cicalengka					
			Jumlah 1			435.820.000			435.820.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Cicalengka					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Cicalengka		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			565.820.000			573.820.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN RANCAEKEK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Rancaekek					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Rancaekek		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Rancaekek		16.100.000	APBD Kab.Bandung		16.100.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rancaekek		9.346.000	APBD Kab.Bandung		9.346.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Rancaekek		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Rancaekek		5.185.000	APBD Kab.Bandung		5.185.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rancaekek		20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Rancaekek		67.113.000	APBD Kab.Bandung		67.113.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Rancaekek			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rancaekek		20.590.000	APBD Kab.Bandung		20.590.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Rancaekek			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 41	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehab Rumah Dinas		Rancaekek		200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Rancaekek		4.500.000	APBD Kab.Bandung		4.500.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Rancaekek		55.722.000	APBD Kab.Bandung		55.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Rancaekek			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Rancaekek		6.790.000	APBD Kab.Bandung		6.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Rancaekek			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Rancaekek		4.500.000	APBD Kab.Bandung		4.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Rancaekek		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			420.000.000			420.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Rancaekek					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Rancaekek		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			550.000.000			558.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN CIKANCUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Cikancung					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Cikancung		4.000.000	APBD Kab.Bandung		4.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Cikancung		15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Cikancung		7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Cikancung		3.500.000	APBD Kab.Bandung		3.500.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Cikancung		2.900.000	APBD Kab.Bandung		2.900.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cikancung		18.000.000	APBD Kab.Bandung		18.000.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Cikancung		75.560.000	APBD Kab.Bandung		75.560.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Cikancung			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Cikancung		38.000.000	APBD Kab.Bandung		38.000.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Cikancung			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Cikancung		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Cikancung		36.040.000	APBD Kab.Bandung		36.040.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Cikancung			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Cikancung		7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cikancung			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Cikancung		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
			Jumlah 1			220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Cikancung					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Cikancung		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN NAGREG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Nagreg					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Nagreg					
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Nagreg		10.879.000	APBD Kab.Bandung		10.879.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Nagreg		14.696.000	APBD Kab.Bandung		14.696.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Nagreg		8.640.000	APBD Kab.Bandung		8.640.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Nagreg		6.122.000	APBD Kab.Bandung		6.122.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nagreg		18.213.000	APBD Kab.Bandung		18.213.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Nagreg		73.250.000	APBD Kab.Bandung		73.250.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Nagreg			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Nagreg		17.900.000	APBD Kab.Bandung		17.900.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Nagreg			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Nagreg		12.800.000	APBD Kab.Bandung		12.800.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Nagreg		44.000.000	APBD Kab.Bandung		44.000.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Nagreg			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Nagreg		7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Nagreg			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Nagreg		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
			Jumlah 1	Nagreg		220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Nagreg					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Nagreg		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN BALEENDAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Beleendah						
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Beleendah		5.214.000	APBD Kab.Bandung		5.214.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Beleendah		1.172.000	APBD Kab.Bandung		1.172.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Beleendah		8.260.000	APBD Kab.Bandung		8.260.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Beleendah		4.411.000	APBD Kab.Bandung		4.411.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Beleendah		3.734.000	APBD Kab.Bandung		3.734.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Beleendah		2.200.000	APBD Kab.Bandung		2.200.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Beleendah		84.460.000	APBD Kab.Bandung		84.460.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sministrasi Perkantoran	Beleendah		39.000.000	APBD Kab.Bandung		39.000.000
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Beleendah		10.285.000	APBD Kab.Bandung		10.285.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Beleendah			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Beleendah		4.116.000	APBD Kab.Bandung		4.116.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Beleendah		32.120.000	APBD Kab.Bandung		32.120.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Beleendah			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Beleendah		11.550.000	APBD Kab.Bandung		11.550.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Beleendah			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Beleendah		13.478.000	APBD Kab.Bandung		13.478.000
			Jumlah 1	Beleendah		220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Beleendah					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Beleendah		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN PACET

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Pacet						
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Pacet		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Pacet		9.700.000	APBD Kab.Bandung		9.700.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pacet		9.461.000	APBD Kab.Bandung		9.461.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Pacet		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Pacet		5.025.000	APBD Kab.Bandung		5.025.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pacet		11.035.000	APBD Kab.Bandung		11.035.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Pacet		69.113.000	APBD Kab.Bandung		69.113.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Pacet			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tewujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pacet		30.500.000	APBD Kab.Bandung		30.500.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Pacet			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Pacet		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Pacet		55.722.000	APBD Kab.Bandung		55.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Pacet			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Pacet		7.790.000	APBD Kab.Bandung		7.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Pacet			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Pacet		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Pacet		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Pacet					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Pacet		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN KERTASARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Kertasari					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Kertasari		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Kertasari		12.500.000	APBD Kab.Bandung		12.500.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kertasari		7.546.000	APBD Kab.Bandung		7.546.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Kertasari		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kertasari		5.285.000	APBD Kab.Bandung		5.285.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kertasari		38.200.000	APBD Kab.Bandung		38.200.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Kertasari		62.103.000	APBD Kab.Bandung		62.103.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Kertasari			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kertasari		30.500.000	APBD Kab.Bandung		30.500.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Kertasari			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 42	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Kertasari		200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Kertasari			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Kertasari		40.722.000	APBD Kab.Bandung		40.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Kertasari			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Kertasari		5.490.000	APBD Kab.Bandung		5.490.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Kertasari			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Kertasari		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Kertasari		4.000.000	APBD Kab.Bandung		4.000.000
			Jumlah 1			420.000.000			420.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Kertasari					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Kertasari		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			550.000.000			558.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN CIPARAY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Ciparay						
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Ciparay		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Ciparay		18.500.000	APBD Kab.Bandung		18.500.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Ciparay		9.000.000	APBD Kab.Bandung		9.000.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Ciparay		4.000.000	APBD Kab.Bandung		4.000.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Ciparay		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ciparay		20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Ciparay		78.000.000	APBD Kab.Bandung		78.000.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sministrasi Perkantoran	Ciparay		13.000.000	APBD Kab.Bandung		13.000.000
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ciparay		20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Ciparay		200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
x xx 02 42	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Ciparay			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Ciparay			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Ciparay		35.000.000	APBD Kab.Bandung		35.000.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Ciparay			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Ciparay		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Ciparay			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Ciparay		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Ciparay		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			420.000.000			420.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Ciparay					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Ciparay		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			550.000.000			558.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN MAJALAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Majalaya					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Majalaya		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Majalaya		15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Majalaya		10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Majalaya		4.400.000	APBD Kab.Bandung		4.400.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Majalaya		3.100.000	APBD Kab.Bandung		3.100.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Majalaya		2.000.000	APBD Kab.Bandung		2.000.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Majalaya		95.000.000	APBD Kab.Bandung		95.000.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Majalaya		13.000.000	APBD Kab.Bandung		13.000.000
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Majalaya		20.000.000	APBD Kab.Bandung		20.000.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Majalaya			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Majalaya			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Majalaya		34.500.000	APBD Kab.Bandung		34.500.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Majalaya			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Majalaya		12.000.000	APBD Kab.Bandung		12.000.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Majalaya			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Majalaya		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
			Jumlah 1			220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Majalaya					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Majalaya		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN IBUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Ibun					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Ibun		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Ibun		15.752.000	APBD Kab.Bandung		15.752.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Ibun		10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Ibun		4.711.000	APBD Kab.Bandung		4.711.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Ibun		3.264.000	APBD Kab.Bandung		3.264.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ibun		12.280.000	APBD Kab.Bandung		12.280.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Ibun		74.550.000	APBD Kab.Bandung		74.550.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Ibun		0	APBD Kab.Bandung		0
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ibun		36.000.000	APBD Kab.Bandung		36.000.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Ibun			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Ibun			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Ibun		37.443.000	APBD Kab.Bandung		37.443.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Ibun			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Ibun		14.000.000	APBD Kab.Bandung		14.000.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Ibun			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Ibun		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
			Jumlah 1	Ibun		220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Ibun					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Ibun		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN PASEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Paseh					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Paseh		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Paseh		19.000.000	APBD Kab.Bandung		19.000.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Paseh		9.000.000	APBD Kab.Bandung		9.000.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Paseh		4.000.000	APBD Kab.Bandung		4.000.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Paseh		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paseh		17.000.000	APBD Kab.Bandung		17.000.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Paseh		74.000.000	APBD Kab.Bandung		74.000.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis administrasi Perkantoran	Paseh		0	APBD Kab.Bandung		0
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Paseh		36.000.000	APBD Kab.Bandung		36.000.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Paseh			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Paseh			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Paseh		37.000.000	APBD Kab.Bandung		37.000.000
x xx 02 42	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehab Sedang Gedung Kantor	Terbangunnya sarana perkantoran	Paseh		200.000.000	APBD Kab.Bandung		200.000.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Paseh			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Paseh		9.000.000	APBD Kab.Bandung		9.000.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Paseh			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Paseh		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
			Jumlah 1			420.000.000			420.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Paseh					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Paseh		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			550.000.000			558.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN SOLOKANJERUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Solokanjeruk					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Solokanjeruk		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Solokanjeruk		14.000.000	APBD Kab.Bandung		14.000.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Solokanjeruk		13.000.000	APBD Kab.Bandung		13.000.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Solokanjeruk		5.000.000	APBD Kab.Bandung		5.000.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Solokanjeruk		4.000.000	APBD Kab.Bandung		4.000.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Solokanjeruk		9.000.000	APBD Kab.Bandung		9.000.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Solokanjeruk		62.000.000	APBD Kab.Bandung		62.000.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sministrasi Perkantoran	Solokanjeruk		0	APBD Kab.Bandung		0
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Solokanjeruk		46.000.000	APBD Kab.Bandung		46.000.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Solokanjeruk			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Solokanjeruk			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Solokanjeruk		32.000.000	APBD Kab.Bandung		32.000.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Solokanjeruk			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Solokanjeruk		16.000.000	APBD Kab.Bandung		16.000.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Solokanjeruk			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Solokanjeruk		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
			Jumlah 1			210.000.000			210.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Solokanjeruk					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Solokanjeruk		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			340.000.000			348.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN PASIR JAMBU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Pasirjambu					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Pasirjambu		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Pasirjambu		9.000.000	APBD Kab.Bandung		9.000.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pasirjambu		16.500.000	APBD Kab.Bandung		16.500.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Pasirjambu		9.500.000	APBD Kab.Bandung		9.500.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Pasirjambu		3.480.000	APBD Kab.Bandung		3.480.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasirjambu		3.220.000	APBD Kab.Bandung		3.220.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Pasirjambu		70.000.000	APBD Kab.Bandung		70.000.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sministrasi Perkantoran	Pasirjambu		13.000.000	APBD Kab.Bandung		13.000.000
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pasirjambu		28.000.000	APBD Kab.Bandung		28.000.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Pasirjambu			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Pasirjambu		9.300.000	APBD Kab.Bandung		9.300.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Pasirjambu		26.000.000	APBD Kab.Bandung		26.000.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Pasirjambu			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Pasirjambu		10.000.000	APBD Kab.Bandung		10.000.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Pasirjambu			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Pasirjambu		6.000.000	APBD Kab.Bandung		6.000.000
			Jumlah 1			210.000.000			210.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Pasirjambu					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Pasirjambu		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			340.000.000			348.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN CIWIDEY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Ciwidey					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Ciwidey		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Ciwidey		16.540.000	APBD Kab.Bandung		16.540.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Ciwidey		9.546.000	APBD Kab.Bandung		9.546.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Ciwidey		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Ciwidey		5.770.000	APBD Kab.Bandung		5.770.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ciwidey		13.650.000	APBD Kab.Bandung		13.650.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Ciwidey		70.050.000	APBD Kab.Bandung		70.050.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis administrasi Perkantoran	Ciwidey			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ciwidey		20.500.000	APBD Kab.Bandung		20.500.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Ciwidey			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Ciwidey		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Ciwidey		53.000.000	APBD Kab.Bandung		53.000.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Ciwidey			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Ciwidey		7.790.000	APBD Kab.Bandung		7.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Ciwidey			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Ciwidey		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Ciwidey		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Ciwidey					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Ciwidey		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN RAN CABALI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Rancabali						
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Rancabali		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Rancabali		19.200.000	APBD Kab.Bandung		19.200.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rancabali		9.546.000	APBD Kab.Bandung		9.546.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Rancabali		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Rancabali		5.785.000	APBD Kab.Bandung		5.785.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rancabali		21.650.000	APBD Kab.Bandung		21.650.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Rancabali		55.153.000	APBD Kab.Bandung		55.153.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Rancabali			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rancabali		20.500.000	APBD Kab.Bandung		20.500.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Rancabali			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Rancabali		7.000.000	APBD Kab.Bandung		7.000.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Rancabali		45.722.000	APBD Kab.Bandung		45.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Rancabali			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Rancabali		7.790.000	APBD Kab.Bandung		7.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Rancabali			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Rancabali		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Rancabali		4.000.000	APBD Kab.Bandung		4.000.000
			Jumlah 1			210.000.000			210.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Rancabali					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Rancabali		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			340.000.000			348.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN SOREANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Soreang					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Soreang		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Soreang		10.100.000	APBD Kab.Bandung		10.100.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Soreang		9.531.000	APBD Kab.Bandung		9.531.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Soreang		4.154.000	APBD Kab.Bandung		4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Soreang		5.540.000	APBD Kab.Bandung		5.540.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Soreang		10.053.000	APBD Kab.Bandung		10.053.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Soreang		85.110.000	APBD Kab.Bandung		85.110.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis administrasi Perkantoran	Soreang		13.000.000	APBD Kab.Bandung		13.000.000
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Soreang		15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Soreang			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Soreang		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Soreang		40.722.000	APBD Kab.Bandung		40.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Soreang			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Soreang		7.790.000	APBD Kab.Bandung		7.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Soreang			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Soreang		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Soreang		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			220.000.000			220.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Soreang					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Soreang		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			350.000.000			358.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN CANGKUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran			Cangkuang					
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air	Cangkuang		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Cangkuang		13.120.000	APBD Kab.Bandung		13.120.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Cangkuang		9.546.000	APBD Kab.Bandung		9.546.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Cangkuang		4.156.000	APBD Kab.Bandung		4.156.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Cangkuang		5.155.000	APBD Kab.Bandung		5.155.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cangkuang		12.000.000	APBD Kab.Bandung		12.000.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan	Cangkuang		72.113.000	APBD Kab.Bandung		72.113.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran	Cangkuang			APBD Kab.Bandung		
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Cangkuang		20.500.000	APBD Kab.Bandung		20.500.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Cangkuang			APBD Kab.Bandung		
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor	Cangkuang		7.500.000	APBD Kab.Bandung		7.500.000
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas	Cangkuang		35.620.000	APBD Kab.Bandung		35.620.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :			Cangkuang			APBD Kab.Bandung		
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Cangkuang		7.790.000	APBD Kab.Bandung		7.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cangkuang			APBD Kab.Bandung		
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan	Cangkuang		6.500.000	APBD Kab.Bandung		6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Cangkuang		3.000.000	APBD Kab.Bandung		3.000.000
			Jumlah 1			200.000.000			200.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Cangkuang					
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Cangkuang		130.000.000	APBD Kab.Bandung		138.000.000
			Jumlah 2			130.000.000			138.000.000
			Jumlah (1+2)			330.000.000			338.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KECAMATAN KUTAWARINGIN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran				Kutawaringin				
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air		Kutawaringin		3.000.000	APBD Kab.Bandung	3.000.000
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor		Kutawaringin		15.180.000	APBD Kab.Bandung	15.180.000
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Kutawaringin		9.124.000	APBD Kab.Bandung	9.124.000
x xx 01 11	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan		Kutawaringin		4.154.000	APBD Kab.Bandung	4.154.000
x xx 01 12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		Kutawaringin		5.780.000	APBD Kab.Bandung	5.780.000
x xx 01 13	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kutawaringin		10.050.000	APBD Kab.Bandung	10.050.000
x xx 01 17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan		Kutawaringin		70.110.000	APBD Kab.Bandung	70.110.000
x xx 01 19	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdmministrasi Perkantoran		Kutawaringin			APBD Kab.Bandung	
x xx 01 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kutawaringin		18.590.000	APBD Kab.Bandung	18.590.000
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :				Kutawaringin		250.000.000	APBD Kab.Bandung	250.000.000
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kutawaringin			APBD Kab.Bandung	
x xx 02 22	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor		Kutawaringin			APBD Kab.Bandung	
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas		Kutawaringin		46.722.000	APBD Kab.Bandung	46.722.000
x xx 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :				Kutawaringin			APBD Kab.Bandung	
x xx 03 05	PROGRAM DISIPLIN APARATUR :	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga		Kutawaringin		7.790.000	APBD Kab.Bandung	7.790.000
x xx 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Kutawaringin			APBD Kab.Bandung	
x xx 06 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan		Kutawaringin		6.500.000	APBD Kab.Bandung	6.500.000
x xx 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Kutawaringin		3.000.000	APBD Kab.Bandung	3.000.000
			jumlah 1				450.000.000		450.000.000
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				Kutawaringin				
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			Kutawaringin		130.000.000	APBD Kab.Bandung	138.000.000
			Jumlah 2				130.000.000		138.000.000
			Jumlah (1+2)				580.000.000		588.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KELURAHAN PASAWAHAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013	
					Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x	xx	01		Pelayanan administrasi perkantoran		Pasawahan	Pegawai Kelurahan Pasawahan						
x	xx	01	08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya Kebersihan Kantor	Pasawahan	Pegawai Kelurahan Pasawahan	14.100.000	APBD Kab.Bandung			14.100.000
x	xx	01	10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Pasawahan	Pegawai Kelurahan Pasawahan	14.500.000	APBD Kab.Bandung			14.500.000
x	xx	01	12	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Pasawahan	Pegawai Kelurahan Pasawahan	12.500.000	APBD Kab.Bandung			12.500.000
x	xx	01	17	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan untuk biaya Makan dan Minum Kantor	Pasawahan	Pegawai Kelurahan Pasawahan	30.000.000	APBD Kab.Bandung			30.000.000
x	xx	02		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Pasawahan			APBD Kab.Bandung			
x	xx	02	05	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Pasawahan		18.900.000	APBD Kab.Bandung			18.900.000
						Jumlah 1			90.000.000				90.000.000
1	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH									
1	20	20	03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Pasawahan		317.231.000	APBD Kab.Bandung			339.437.170
						Jumlah 2			317.231.000				339.437.170
						Jumlah (1+2)			407.231.000				429.437.170

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KELURAHAN PADASUKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013		
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x	xx	01	Pelayanan administrasi perkantoran		Padasuka					
x	xx	01	08 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya Kebersihan Kantor	Padasuka	Pegawai Kelurahan Padasuka	8.000.000	APBD Kab.Bandung	8.000.000
x	xx	01	10 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Padasuka	Pegawai Kelurahan Padasuka	14.000.000	APBD Kab.Bandung	14.000.000
x	xx	01	02 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Padasuka	Pegawai Kelurahan Padasuka	14.000.000	APBD Kab.Bandung	14.000.000
x	xx	01	03 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan untuk biaya Makan dan Minum Kantor	Padasuka	Pegawai Kelurahan Padasuka	36.000.000	APBD Kab.Bandung	36.000.000
x	xx	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Padasuka		APBD Kab.Bandung		
x	xx	02	24 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Padasuka	Pegawai Kelurahan Padasuka	18.000.000	APBD Kab.Bandung	18.000.000
x	xx	02	42 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Padasuka	Pegawai Kelurahan Padasuka	200.000.000	APBD Kab.Bandung	200.000.000
					Jumlah 1			290.000.000		290.000.000
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
1	20	20	03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Padasuka		323.526.000	APBD Kab.Bandung	346.172.820
								323.526.000		346.172.820
					Jumlah 2			613.526.000		636.172.820
					Jumlah (1+2)					636.172.820

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KELURAHAN ANDIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013		
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x	xx	01	Pelayanan administrasi perkantoran		Andir					
x	xx	01	08 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya Kebersihan Kantor	Andir	Pegawai Kelurahan Andir	10.000.000	APBD Kab.Bandung	10.000.000
x	xx	01	10 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Andir	Pegawai Kelurahan Andir	20.000.000	APBD Kab.Bandung	20.000.000
x	xx	01	02 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Andir	Pegawai Kelurahan Andir	22.000.000	APBD Kab.Bandung	22.000.000
x	xx	01	03 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan untuk biaya Makan dan Minum Kantor	Andir	Pegawai Kelurahan Andir	45.000.000	APBD Kab.Bandung	45.000.000
x	xx	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Andir			APBD Kab.Bandung	
x	xx	02	24 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Andir	Pegawai Kelurahan Andir	18.000.000	APBD Kab.Bandung	18.000.000
x	xx	02	42 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Andir	Pegawai Kelurahan Andir	75.000.000	APBD Kab.Bandung	75.000.000
					Jumlah 1			190.000.000		190.000.000
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
1	20	20	03 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Andir		414.096.000	APBD Kab.Bandung	443.082.702
					Jumlah 2			414.096.000		443.082.702
					Jumlah (1+2)			604.096.000		633.082.702

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KELURAHAN BALEENDAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013		
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x	xx	01	Pelayanan administrasi perkantoran		Baleendah	Pegawai Kelurahan Baleendah				
x	xx	01	08 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya Kebersihan Kantor	Baleendah	Pegawai Kelurahan Baleendah	8.000.000	APBD Kab.Bandung	8.000.000
x	xx	01	10 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Baleendah	Pegawai Kelurahan Baleendah	15.000.000	APBD Kab.Bandung	15.000.000
x	xx	01	02 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Baleendah	Pegawai Kelurahan Baleendah	13.000.000	APBD Kab.Bandung	13.000.000
x	xx	01	03 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan untuk biaya Makan dan Minum Kantor	Baleendah	Pegawai Kelurahan Baleendah	36.000.000	APBD Kab.Bandung	36.000.000
x	xx	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Baleendah			APBD Kab.Bandung	
x	xx	02	24 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Baleendah	Pegawai Kelurahan Baleendah	18.000.000	APBD Kab.Bandung	18.000.000
x	xx	02	42 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Baleendah	Pegawai Kelurahan Baleendah	120.000.000	APBD Kab.Bandung	120.000.000
					Jumlah 1			210.000.000		210.000.000
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
1	20	20	03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Baleendah		584.000.000	APBD Kab.Bandung	624.880.000
								584.000.000		624.880.000
					Jumlah 2			794.000.000		834.880.000
					Jumlah (1+2)					834.880.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KELURAHAN MANGGAHANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013		
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x	xx	01	Pelayanan administrasi perkantoran		Manggahang					
x	xx	01	08 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya Kebersihan Kantor	Manggahang	Pegawai Kelurahan Manggahang	9.000.000	APBD Kab.Bandung	9.000.000
x	xx	01	10 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Manggahang	Pegawai Kelurahan Manggahang	15.000.000	APBD Kab.Bandung	15.000.000
x	xx	01	02 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Manggahang	Pegawai Kelurahan Manggahang	14.000.000	APBD Kab.Bandung	14.000.000
x	xx	01	03 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan untuk biaya Makan dan Minum Kantor	Manggahang	Pegawai Kelurahan Manggahang	34.000.000	APBD Kab.Bandung	34.000.000
x	xx	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Manggahang			APBD Kab.Bandung	
x	xx	02	24 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Manggahang	Pegawai Kelurahan Manggahang	18.000.000	APBD Kab.Bandung	18.000.000
x	xx	02	42 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Manggahang	Pegawai Kelurahan Manggahang	250.000.000	APBD Kab.Bandung	250.000.000
					Jumlah 1			340.000.000		340.000.000
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
1	20	20	03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Manggahang		314.020.000	APBD Kab.Bandung	336.001.400
								314.020.000		336.001.400
					Jumlah 2			654.020.000		676.001.400
					Jumlah (1+2)					676.001.400

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KELURAHAN CIBEUNYING

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2012				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Cibeunying	Pegawai Kelurahan Cibeunying	7.000.000	APBD Kab.Bandung		7.000.000	
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cibeunying	Pegawai Kelurahan Cibeunying	8.000.000	APBD Kab.Bandung		8.000.000	
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Cibeunying	Pegawai Kelurahan Cibeunying	14.000.000	APBD Kab.Bandung		14.000.000	
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cibeunying	Pegawai Kelurahan Cibeunying	13.000.000	APBD Kab.Bandung		13.000.000	
x xx 01 03	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Cibeunying	Pegawai Kelurahan Cibeunying	30.000.000	APBD Kab.Bandung		30.000.000	
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :		Cibeunying			APBD Kab.Bandung			
x xx 02 24	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cibeunying	Pegawai Kelurahan Cibeunying	18.000.000	APBD Kab.Bandung		18.000.000	
		Jumlah 1			90.000.000			90.000.000	
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Cibeunying		481.507.000	APBD Kab.Bandung		515.212.490	
		Jumlah 2			481.507.000			515.212.490	
		Jumlah (1+2)			571.507.000			605.212.490	

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KELURAHAN JELEKONG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2012				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01	Pelayanan administrasi perkantoran		Jelegong	Pegawai Kelurahan Jelegong					
x xx 01 08	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jelegong	Pegawai Kelurahan Jelegong	9.000.000	APBD Kab.Bandung		9.000.000	
x xx 01 10	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Jelegong	Pegawai Kelurahan Jelegong	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000	
x xx 01 02	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jelegong	Pegawai Kelurahan Jelegong	15.000.000	APBD Kab.Bandung		15.000.000	
x xx 01 03	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Jelegong	Pegawai Kelurahan Jelegong	33.000.000	APBD Kab.Bandung		33.000.000	
x xx 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :		Jelegong			APBD Kab.Bandung			
x xx 02 45	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Rehab Gedung Olah Raga	Jelegong	Pegawai Kelurahan Jelegong	100.000.000	APBD Kab.Bandung		100.000.000	
x xx 02 1	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jelegong	Pegawai Kelurahan Jelegong	18.000.000	APBD Kab.Bandung		18.000.000	
		Jumlah 1			190.000.000			190.000.000	
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
1 20 20 03	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jelegong		485.500.000	APBD Kab.Bandung		519.485.000	
		Jumlah 2			485.500.000			519.485.000	
		Jumlah (1+2)			675.500.000			709.485.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KELURAHAN WARGA MERKAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013		
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x	xx	01	Pelayanan administrasi perkantoran		Wargamekar	Pegawai Kelurahan Wargamekar				
x	xx	01	08 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya Kebersihan Kantor	Wargamekar	Pegawai Kelurahan Wargamekar	8.000.000	APBD Kab.Bandung	8.000.000
x	xx	01	10 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Wargamekar	Pegawai Kelurahan Wargamekar	14.947.000	APBD Kab.Bandung	14.947.000
x	xx	01	02 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Wargamekar	Pegawai Kelurahan Wargamekar	13.000.000	APBD Kab.Bandung	13.000.000
x	xx	01	03 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan untuk biaya Makan dan Minum Kantor	Wargamekar	Pegawai Kelurahan Wargamekar	27.000.000	APBD Kab.Bandung	27.000.000
x	xx	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Wargamekar	Pegawai Kelurahan Wargamekar		APBD Kab.Bandung	
x	xx	02	24 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Wargamekar	Pegawai Kelurahan Wargamekar	18.000.000	APBD Kab.Bandung	18.000.000
					Jumlah 1			80.947.000		80.947.000
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
1	20	20	03 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Wargamekar		284.458.385	APBD Kab.Bandung	304.370.472
					Jumlah 2			284.458.385		304.370.472
					Jumlah (1+2)			365.405.385		385.317.472

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012**

NAMA SKPD : KELURAHAN SULAIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2012			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013		
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
x	xx	01	Pelayanan administrasi perkantoran		Sulaiman	Pegawai Kelurahan Sulaeman				
x	xx	01	08 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya Kebersihan Kantor	Sulaiman	Pegawai Kelurahan Sulaeman	9.000.000	APBD Kab.Bandung	9.000.000
x	xx	01	10 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Sulaiman	Pegawai Kelurahan Sulaeman	12.000.000	APBD Kab.Bandung	12.000.000
x	xx	01	12 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Sulaiman	Pegawai Kelurahan Sulaeman	11.000.000	APBD Kab.Bandung	11.000.000
x	xx	01	17 Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan untuk biaya Makan dan Minum Kantor	Sulaiman	Pegawai Kelurahan Sulaeman	30.000.000	APBD Kab.Bandung	30.000.000
x	xx	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :			Sulaiman		APBD Kab.Bandung		
x	xx	02	05 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Operasional Rutin	Sulaiman	Pegawai Kelurahan Sulaeman	18.000.000	APBD Kab.Bandung	18.000.000
				Jumlah 1				80.000.000		80.000.000
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
1	20	20	03 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Sulaiman		241.687.000	APBD Kab.Bandung	258.605.108
								241.687.000		258.605.108
								321.687.000		338.605.108
								579.484.422.442		624.367.971.464

BUPATI BANDUNG

H. DADANG M. NASER, SH., S.Ip.

579.484.422.442

0

1.748.178.973.674

480.374.571.982

1.267.804.401.693

624.367.971.464

(0)

1.878.030.657.891

SKPD	
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD

BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD
BPMP	SKPD

SKPD	
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD

Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	

Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD
Diskoperindag	SKPD

Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	Wilayah
Diskoperindag	
Diskoperindag	

Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD

Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	SKPD
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah

Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah

Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	wilayah
Disnakan	
Disnakan	
Disnakan	
Disnakan	
Disnakan	

Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	SKPD
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut

Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut
Distanbunhut	Distanbunhut

BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD

BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD

BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	SKPD
BKP3	
BKP3	

Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD

Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD

Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD

Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	SKPD
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH

Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	WILAYAH

Dispertasih	WILAYAH
Dispertasih	
Dispertasih	

SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD

SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD

SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	SKPD
SDAPE	
SDAPE	

BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD

BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	SKPD
BPBD	
BPBD	

	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD

DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	SKPD
DISHUB	
DISHUB	

BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD
BPLH	SKPD

Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD

Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD
Bina Marga	SKPD

RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	SKPD
RSUD Majalaya	
RSUD Majalaya	

DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD

DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD

DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD
DINSOSDUKASIP	SKPD

Disnaker	SKPD
Disnaker	SKPD
Disnaker	SKPD
Disnaker	
Disnaker	

Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD

Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	SKPD
Kesbanglinmas	
Kesbanglinmas	

BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD

BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD

BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD
BKBPP	SKPD

BKBPP	SKPD
BKBPP	
BKBPP	

Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD

Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	SKPD
Inspektorat	
Inspektorat	

DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD

DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD
DPPK	SKPD

BAPPAPSI	SKPD
BAPPAPSI	SKPD
BAPPAPSI	SKPD
BAPPAPSI	SKPD
BAPPAPSI	SKPD
BAPPAPSI	SKPD
BAPPAPSI	SKPD
BAPPAPSI	SKPD
BAPPAPSI	SKPD
BAPPAPSI	SKPD
BAPPAPSI	SKPD

BAPPAPSI SKPD

BAPPAPSI SKPD

BAPPAPSI SKPD

BAPPAPSI SKPD

BAPPAPSI SKPD

BAPPAPSI SKPD

BAPPAPSI SKPD

BAPPAPSI	SKPD
----------	------

BAPPAPSI	
BAPPAPSI	

BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD

BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD

BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	SKPD
BKPP	
BKPP	

RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD
RSUD Soreang	SKPD

Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD

Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD

Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD

Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD
Setda	SKPD

Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD

Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD
Dispopar	SKPD

Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD

Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD

Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD

Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	SKPD
Dinkes	WILAYAH
Dinkes	
Dinkes	

Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD

Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD
Bappeda	SKPD

RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD

RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD
RSUD Cicalengka	SKPD

Satpol PP	SKPD
Satpol PP	SKPD
Satpol PP	SKPD
Satpol PP	SKPD
Satpol PP	SKPD
Satpol PP	
Satpol PP	

BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD

BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	SKPD
BPMPD	
BPMPD	

Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD

Dikbud	SKPD
Dikbud	SKPD
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH

DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH

DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH

DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH

DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH

DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH

DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH

DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
DIKBUD	WILAYAH
Dikbud	
Dikbud	

####

Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD

Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD
Setwan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	
Kecamatan	
Kecamatan	
Kecamatan	

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

--

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	
Kecamatan	

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	
Kecamatan	

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD
Kecamatan	SKPD

Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	

Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	

Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	

Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	

Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	

Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	

Kelurahan	SKPD																		
Kelurahan	SKPD																		
Kelurahan	SKPD																		
Kelurahan	SKPD																		
Kelurahan	SKPD																		
Kelurahan	SKPD																		
Kelurahan	SKPD																		
Kelurahan																			
Kelurahan	SKPD																		
Kelurahan																			
Kelurahan																			

Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	SKPD
Kelurahan	
Kelurahan	

4.403.750.000
1.743.775.223.674
99.109.850.460
1.649.069.123.214

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Tingkat Kabupaten (Musrenbangkab), dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Pemerintah Kabupaten Bandung bersama dengan DPRD seyogianya memperhatikan konsistensi antara RKPD Tahun 2012 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2012.

Semua Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten Bandung agar melakukan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2012 dan dana lainnya untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan.

Berkaitan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh Kabupaten Bandung karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar Kabupaten/Kota, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program-program RKPD Tahun 2012 yang didanai oleh APBD. Untuk itu Dinas/Badan/Lembaga berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap triwulan sekali kepada Bupati U.p. Bapeda Kabupaten Bandung. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.